



## **GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

**NOMOR 19 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN  
KEPEMUDAAN TAHUN 2023-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);  
5. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2023-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
2. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi dini, dan cita-cita Pemuda.
3. Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2026 berisi program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.
4. Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan adalah koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan yang dilaksanakan oleh lembaga sesuai dengan kewenangannya.
5. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
8. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten /Kota Se-Sulawesi Tengah.
9. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga.

Pasal 2

- (1) RAD Pelayanan Kepemudaan merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya pencapaian target pelayanan Kepemudaan Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan.

- (2) RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

#### Pasal 3

- (1) Dokumen RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I           PENDAHULUAN;
  - b. BAB II        LANDASAN HUKUM BIDANG PELAYANAN KEPEMUDAAN;
  - c. BAB III       ISU STRATEGIS KEPEMUDAAN;
  - d. BAB IV       STRATEGI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS;
  - e. BAB V        PENGORGANISASIAN RENCANA AKSI;
  - f. BAB VI       Matriks Rencana Koordinasi Kegiatan Lintas Organisasi Perangkat Daerah untuk Pelayanan Kepemudaan; dan
  - g. BAB VII      PENUTUP.
- (2) Dokumen RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 4

RAD Pelayanan Kepemudaan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya pencapaian target pelayanan Kepemudaan.

#### Pasal 5

Dalam penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan mengacu pada Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan serta melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan :
  - a. Pemerintah Daerah lain;
  - b. pihak ketiga; dan/atau
  - c. Lembaga atau Pemerintah Daerah di luar Negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat.

Pasal 9

- Pembiayaan penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 20 Juli 2023  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA


Diundangkan di Palu  
pada tanggal 20 Juli 2023  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 883

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ADIMAN, SH., M.SI  
Pembina Tingkat I, IV/b  
Nip. 19740610 200003 1 007

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
NOMOR           TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA       AKSI       DAERAH       TUJUAN  
PELAYANAN  
KEPEMUDAAN TAHUN 2023-2026

**DOKUMEN RAD PELAYANAN KEPEMUDAAN**

BAB 1  
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

“Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia”.

Begitu jargon presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno pada sambutan peringatan Hari Proklamasi tahun 1956 di Jakarta. Dalam pidato yang berjudul “Berilah Isi kepada Hidupmu” itu, dia menyebutkan bahwa revolusi belum selesai. Kaum muda harus melangkah mewujudkan Indonesia Jaya. Menuju seratus tahun kemerdekaan, bangsa ini bertekad mencapai Visi Indonesia Maju 2045. Strategi utamanya adalah dengan merealisasikan bonus demografi. Tentu pemuda juga lah yang menjadi tumpuan harapan untuk mewujudkan visi ini. Mereka diharapkan menjadi pendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sehingga Indonesia dapat lolos dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap). Untuk mewujudkan hal itu, ekonomi kita harus tumbuh 6-7 persen. Tentu saja, pandemi COVID-19 mengoreksi realisasi bonus demografi tersebut. Wabah ini menimbulkan krisis multidimensi yang mengancam berbagai capaian, terutama target-target pembangunan manusia dan kepemudaan. Menjelang tahun ketiga berlangsungnya pandemi, kami menyusun laporan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 2021. Selain memonitor pembangunan kepemudaan, laporan ini juga menganalisis besaran disrupsi yang diakibatkan COVID-19 terhadap berbagai dimensi pembangunan kepemudaan, terutama aspek-aspek yang tertuang dalam IPP. Secara ringkas, inti sari laporan ini adalah sebagai berikut :

Secara umum, IPP Indonesia dalam kurun 2015 sampai 2020 meningkat meski tidak signifikan, bahkan bisa dikatakan relatif konstan. Memang pada periode 2015-2019, angkanya naik dari 48,67 (2015) menjadi 52,67 (2019), atau melaju rata-rata 1 persen per tahun. Akan tetapi pada 2020, indeks ini turun menjadi 51,00 atau kembali ke tingkat tahun 2017-2018. Konsekuensinya upaya mencapai target IPP 57,67 pada 2024 menjadi lebih berat.

Untuk tahun 2020, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Aceh, Maluku Utara, dan Kepulauan Riau secara berurutan menjadi provinsi-provinsi peraih indeks tertinggi. Di sisi lain, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung adalah sejumlah provinsi dengan IPP terendah. Meninjau capaian satu tahun sebelumnya (2019), DIY, Bali, Aceh, dan Kepulauan Riau relatif konsisten sebagai peraih IPP tertinggi. Sedangkan Bangka Belitung relatif konsisten dengan IPP-nya yang rendah. Pada 2020, disparitas IPP antarprovinsi masih cukup tinggi. Akan tetapi, kesenjangan ini mengecil dibanding tahun sebelumnya karena COVID-19 ternyata berdampak lebih buruk pada sejumlah provinsi yang selama ini IPP-nya lebih tinggi.

Hal ini terjadi karena daerah dengan IPP tinggi pada umumnya adalah provinsi-provinsi yang relatif maju dengan tingkat urbanisasi tinggi. Terlepas dari dampak multidimensinya yang buruk, ada hikmah dari pandemi COVID-19, yaitu meningkatnya konvergensi IPP antarprovinsi. Kendati secara nasional IPP turun, ada 17 provinsi yang mengalami kenaikan pada 2020. Perbaikan angka di setengah jumlah provinsi ini berperan menurunkan kesenjangan IPP antarprovinsi. Sulawesi Utara perlu mendapat perhatian khusus karena satu-satunya provinsi yang mengalami anjloknya IPP tiga tahun berturut-turut dan pada tahun 2020 mengalami stagnasi. Pemerintah juga perlu memantau lima provinsi yang hanya mengalami dua kali kenaikan selama periode 2015-2020, yaitu Kepulauan Riau, Papua Barat, Riau, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat.

Dari lima domain pembentuk IPP (pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi), domain pendidikan paling berkontribusi terhadap capaian IPP dengan nilai indeks tertinggi (70,00). Di sisi lain, lapangan dan kesempatan kerja adalah domain IPP terlemah (40,00) dan relatif fluktuatif selama enam tahun terakhir. Domain lapangan dan kesempatan kerja ini juga mengalami penurunan terbesar pada 2020 akibat pandemi COVID-19. Domain partisipasi dan kepemimpinan dan domain gender dan diskriminasi juga perlu mendapat catatan khusus. Selama enam tahun terakhir, keduanya tidak mengalami kemajuan, domain partisipasi dan kepemimpinan sejak tahun 2015-2020 stagnan sebesar 46,67, sedangkan untuk domain gender dan diskriminasi stagnan selama periode 2016-2019 dan menurun pada tahun 2020 dan kembali ke tingkat tahun 2015 (43,33).

Oleh karena itu, pendidikan dan kepemudaan (being young and educated) merupakan kombinasi baik untuk membentengi diri dari dampak pandemi. Dengan demikian perlu direkomendasikan untuk mengintegrasikan pembangunan kepemudaan dengan pendidikan untuk meningkatkan kualitas human capital sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial alamiah terhadap guncangan atau krisis ekonomi. Maka jargon Soekarno yang menginginkan sepuluh pemuda untuk mengguncang dunia tampaknya tidak cukup. Sekarang, jargon yang lebih tepat adalah siapkan 10 pemuda berkualitas, sehat, sejahtera dan berpendidikan tinggi, maka Indonesia akan menjadi negara berpenghasilan tinggi pada saat merayakan 100 tahun kemerdekaan, pada 2045 nanti.

Kiprah pemuda memiliki sejarah panjang sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Budi Utomo terbentuk pada 1908 sebagai organisasi pemuda modern pertama, bertujuan meningkatkan taraf hidup rakyat melalui peningkatan kecerdasan rakyat. Hal ini sebagai respons atas timpangnya pendidikan dan kesejahteraan antara priayi dan pribumi. Budi Utomo telah menjadi tonggak perjuangan pemuda dan mengilhami lahirnya berbagai organisasi pemuda di tingkat nasional maupun di daerah, yang kemudian mencetuskan Sumpah Pemuda 1928. Peristiwa besar ini berkontribusi luar biasa dalam melahirkan paradigma persatuan perjuangan melalui kekuatan fisik dan non-fisik. Di masa penjajahan Jepang, Pembela Tanah Air (PETA) merupakan kekuatan militer berbasis pemuda yang semula dibentuk Jepang untuk memerangi bangsa Barat, namun kemudian dimanfaatkan para pemuda Indonesia sebagai persiapan kekuatan jika Indonesia merdeka. Sesaat menjelang kemerdekaan, kelompok pemuda mengambil langkah cepat dengan mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun perjuangan pemuda tidak terhenti sampai tercapainya kemerdekaan. Pemuda memperjuangkan aset bangsa yang masih berada di tangan penjajah, seperti halnya Djawatan Kereta Api pada September 1945 yang diambil alih dari Jepang. Perjuangan tersebut menginspirasi dilanjutkannya pengambilalihan perusahaan lain, yaitu Perusahaan Listrik dan Gas, Perusahaan Tram Kota, Djawatan Radio dan lain-lain tumbuh dan berkembang optimal. Pemuda sebagai aktor perubahan akan menjadi pusat kemajuan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa separuh dari potensi sumber daya pembangunan untuk menyiapkan masa depan bangsa ada pada penduduk usia produktif, dalam hal ini, anak, perempuan, dan

pemuda harus memiliki kualitas hidup yang baik, berdaya, dan berkarakter. Peran pemuda sangat penting dalam setiap tahapan pembangunan, di antaranya sebagai 1) Target Group (bekerja sama dengan Pemuda sebagai penerima manfaat) sebagai sasaran dan penerima manfaat pembangunan; 2) sebagai Collaborators (Pemuda sebagai mitra) berpartisipasi dalam setiap tahapan pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, dan money); 3) sebagai Initiators (Pemuda sebagai pemimpin) menjadi pemimpin dan agen perubahan dalam pencapaian target pembangunan. Oleh karena itu, pengembangan SDM yang berdaya saing dan investasi nyata berkelanjutan di bidang kepemudaan perlu menjadi fokus utama pemerintah, serta dapat direncanakan melalui pengembangan pendidikan, advokasi maupun pelatihan yang mudah diimplementasikan dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Selain itu, menyiapkan sekitar 64,5 juta pemuda, atau setara 23,86 persen<sup>3</sup> dari total penduduk nasional sebagai investasi masa depan memerlukan perencanaan jangka panjang. Selaras dengan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030, di mana seluruh aktor termasuk di dalamnya pemuda diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian target-targetnya, diperlukan upaya meningkatkan pembangunan pemuda serta mempertajam kebijakan di berbagai aspek. Optimalisasi pembangunan kepemudaan dapat dilakukan pada dasarnya dengan memastikan data dan informasi yang riil dan mencerminkan dinamika kinerja pembangunan pemuda tersedia. Untuk mempermudah pemahaman setiap pemangku kepentingan pembangunan dalam memantau kemajuan kinerja pembangunan pemuda, maka ukuran kinerja pembangunan pemuda harus merupakan angka yang sederhana namun dapat merepresentasikan banyak dimensi, atau berupa suatu indeks komposit yang bisa memberikan gambaran capaian kinerja pembangunan pemuda. Laporan ini menguraikan mengenai hasil perhitungan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang diharapkan dapat menjadi informasi berharga bagi seluruh pemangku kepentingan.

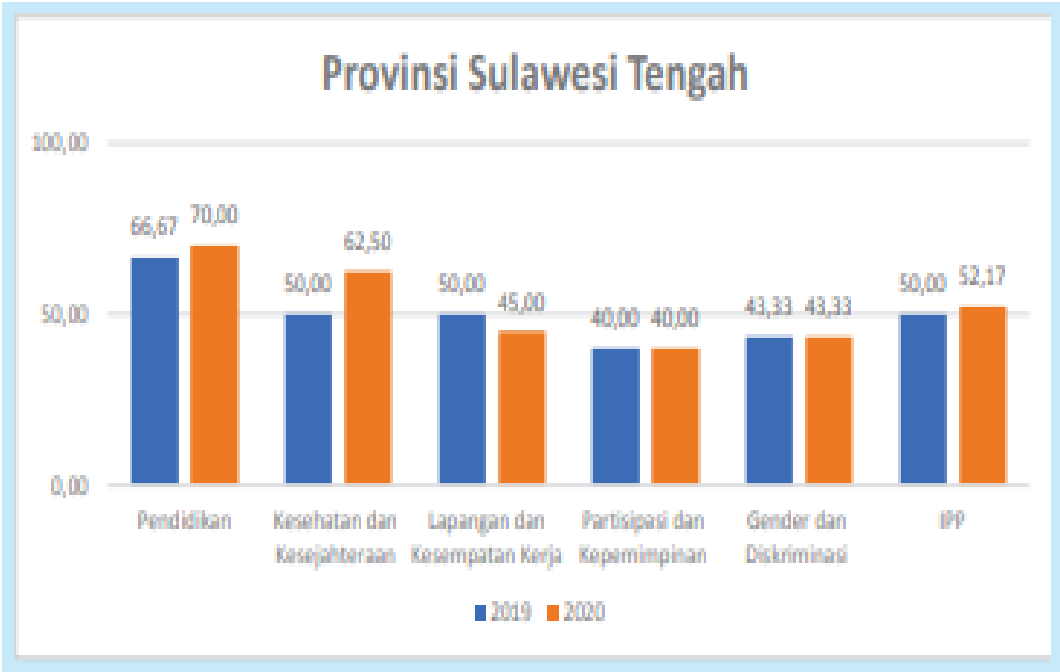
Perubahan Nilai Indeks	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	Jumlah Provinsi	Nama Provinsi	Persentase Provinsi (%)
Selalu Naik	Naik	Naik	Naik	Naik	Naik	0	-	0
Empat kali naik	Naik	Naik	Naik	Naik	Turun	1	Jawa Tengah	2,94%
	Naik	Naik	Naik	Turun	Naik	4	Aceh, Jambi, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur	11,76%
	Naik	Turun	Naik	Naik	Naik	2	Sulawesi Tengah, Gorontalo	5,88%
Tiga kali naik	Naik	Naik	Naik	Turun	Turun	2	DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat	5,88%
	Naik	Naik	Turun	Naik	Turun	3	Banten, Bali, Sulawesi Tenggara	8,82%
	Naik	Naik	Stag-nan	Naik	Turun	1	DIY	2,94%
	Naik	Turun	Naik	Naik	Turun	5	Kalimantan Timur, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Sumatra Selatan, Jawa Barat	14,71%
	Naik	Turun	Turun	Naik	Naik	2	Maluku Utara, Papua	5,88%
	Naik	Turun	Naik	Turun	Naik	6	Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatra Barat, Maluku, Lampung, Kalimantan Selatan	17,65%
	Turun	Naik	Naik	Turun	Naik	2	Sumatra Utara, Kalimantan Tengah	5,88%
Dua kali naik	Naik	Naik	Turun	Stag-nan	Turun	1	Kalimantan Barat	2,94%
	Naik	Turun	Naik	Stag-nan	Turun	1	Sulawesi Barat	2,94%
	Naik	Turun	Turun	Naik	Turun	1	Riau	2,94%
	Naik	Turun	Turun	Turun	Naik	1	Papua Barat	2,94%
	Turun	Naik	Turun	Naik	Turun	1	Kepulauan Riau	2,94%
Satu kali naik	Naik	Turun	Turun	Turun	Stag-nan	1	Sulawesi Utara	2,94%
Selalu Turun	Turun	Turun	Turun	Turun	Turun	0	-	0

Dinamika Perubahan Nilai IPP Se- Indonesia 2015-2020

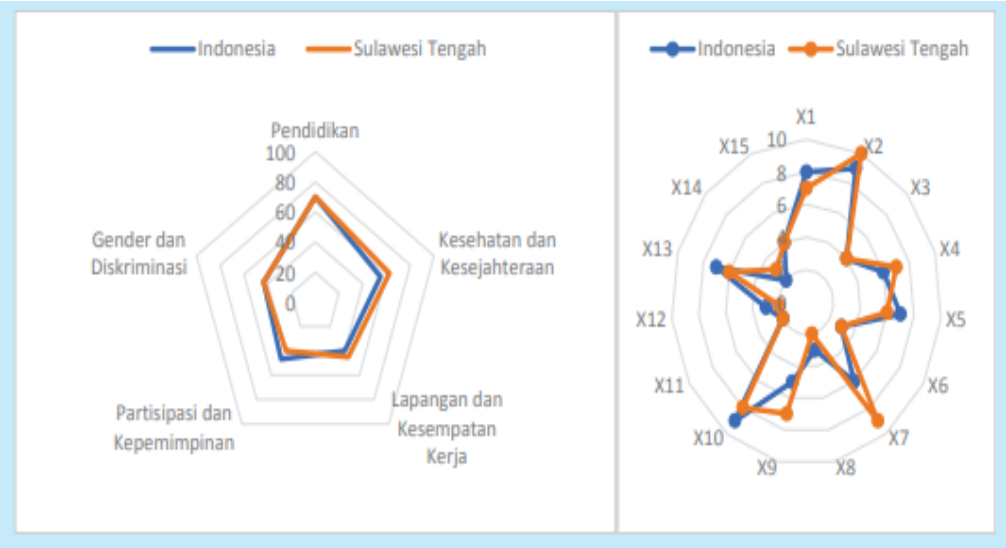
Di sisi lain, terdapat 17 provinsi yang terlepas dari potensi dampak COVID-19 masih mencatatkan pertumbuhan indeks yang lebih baik dari nilai ekspektasinya. Hal ini mengindikasikan pembangunan pemuda di provinsi-provinsi tersebut lebih optimal dan lebih bertahan terhadap guncangan eksternal seperti pandemi COVID-19. Provinsi-provinsi tersebut Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat. Pada 2020 IPP Provinsi Sumatra Barat mengalami persentase pertumbuhan terbesar (9,40 persen), jauh dari ekspektasi pertumbuhannya sebesar 0,54 persen.

Pada tahun 2020 jumlah pemuda di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 759 ribu pemuda (Statistik Pemuda, 2020). Di tahun ini, ketika nilai IPP nasional turun dari 52,67 ke 51, IPP Sulawesi Tengah naik dari 50,00 ke 52,17 (Gambar 3.26, panel a). Kenaikan ini didorong oleh peningkatan pada domain pendidikan serta domain kesehatan dan kesejahteraan, yang masing-masing naik sebesar 3,33 dan 12,5 poin. Namun demikian, terdapat dua domain yang tidak mengalami perubahan yaitu domain partisipasi

dan kepemimpinan, serta domain gender dan diskriminasi. Sedangkan domain lapangan dan kesempatan kerja, turun sebesar 5 poin. Bila dibandingkan dengan nilai indeks di tingkat nasional, hanya domain partisipasi dan kepemimpinan yang masih berada di bawah rata-rata nasional (Gambar 3.26, panel b). Dua domain berada di atas nilai nasional, yaitu domain kesehatan dan kesejahteraan (selisih 7,5 poin) serta domain lapangan dan kesempatan kerja (selisih 5 poin). Sedangkan, nilai indeks domain pendidikan serta domain gender dan diskriminasi setara dengan angka nasional. Perbandingan dengan nilai indikator tingkat nasional (Gambar 3.26, panel c), Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 6 indikator yang capaiannya relatif tertinggal dan hanya memiliki 5 indikator yang lebih baik dari nilai nasional. Kelima indikator tersebut adalah APK sekolah menengah, angka kesakitan pemuda, persentase remaja hamil, TPT pemuda, dan persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas. Perlu dicatat bahwa persentase remaja hamil di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami perbaikan yang signifikan dari 17,59 persen ke 6,58 persen. Ini berbalikan dengan persentase nasional yang justru naik dari 17,92 persen ke 18,22 persen. Perbaikan indikator ini memberi sumbangan pada kenaikan indeks domain kesehatan dan kesejahteraan. Tantangan Provinsi Sulawesi Tengah utamanya terdapat pada domain partisipasi dan kepemimpinan yang capaiannya masih sangat rendah (40,00) dan berada di bawah rata-rata nasional (46,67). Hal ini disebabkan oleh capaian ketiga indikator pembentuk domain tersebut yang masih di bawah rata-rata nasional. Selanjutnya, Provinsi ini juga menghadapi tantangan pada indikator rata-rata lama sekolah yang baru mencapai 10,37 tahun atau 0,41 tahun lebih rendah dari capaian nasional. Hal ini juga terkait dengan tingginya angka perkawinan usia anak (14,89 persen), persentase pemuda korban kejahatan (1,24 persen), serta persentase pemuda merokok (26,82 persen). Selain itu, Provinsi Sulawesi Tengah juga menghadapi tantangan untuk meningkatkan persentase pemuda wirausaha kerah putih (0,21 persen), dan persentase pemuda yang bekerja di sektor formal (18,77 persen).



Perbandingan IPP dan Nilai Indeksi Domain Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020



Perbandingan antara nilai indeks domain prov. Sulteng dan nasional tahun 2020

Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

**2. Tujuan**



Secara umum, RAD Pelayanan Kepemudaan tahun 2023-2026 Provinsi Sulawesi Tengah ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman teknis bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan pelaksanaan koordinasi dan komitmen bersama lintas pemangku kepentingan dalam bidang pembangunan kepemudaan;
2. Sebagai referensi dalam penyusunan rencana aksi tahunan, harmonisasi antara kebijakan nasional dan daerah dalam pelayanan kepemudaan.
3. Meningkatkan pemahaman terhadap kondisi masalah dan potensi kepemudaan yang berguna untuk mendukung pembangunan daerah;
4. Meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah dan lintas sector agar dapat bersinergi dalam mewujudkan pemuda yang Tangguh dan berdaya saing;
5. Menyediakan perangkat pemantauan dan penilaian untuk berbagai kegiatan kepemudaan di daerah.

### **3. Sistematika Penulisan**

Bab I	: Pendahuluan.
Bab II	: Kebijakan dan Program Kepemudaan.
Bab III	: Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan.
Bab IV	: Sistematika RAD Pelayanan Kepemudaan
Bab V	: Penutup

#### **Acuan Outline RAD Pelayanan Kepemudaan**

##### **BAB 1. Pendahuluan**

1.1	Latar Belakang .....
1.2	Tujuan .....
1.3	Ruang Lingkup .....
1.4	Metodologi .....
1.5	Sasaran Pengguna .....
1.6	Sistematika Penulisan .....

##### **BAB 2. Landasan Hukum Bidang Pelayanan Kepemudaan**

2.1.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.....
2.2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .....
2.3.	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektoral Bidang Pelayanan Kepemudaan .....
2.4.	Peraturan Daerah tentang RPJMD .....
2.5.	Peraturan Daerah tentang Kepemudaan (jika ada) .....
2.6.	Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Provinsi .....
2.7.	Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Koordinasi Kabupaten/Kota .....

### **BAB 3. Isu Strategis Kepemudaan**

- 3.1. Domain Pendidikan .....
- 3.2. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan.....
- 3.3. Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja .....
- 3.4. Domain Partisipasi dan Kepemimpinan .....
- 3.5. Domain Gender dan Diskriminasi .....

### **BAB 4. Strategi Kebijakan dan Program Prioritas**

- 4.1. Strategi Kebijakan .....
- 4.1.1. Penyadaran Pemuda .....
- 4.1.2. Pemberdayaan Pemuda .....
- 4.1.3. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda .....
- 4.1.4. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda .....
- 4.1.5. Pengembangan Kepeloporan Pemuda .....
- 4.1.6. Penelitian dan Kajian Kepemudaan .....
- 4.1.7. Penanggulangan Perilaku Negatif Pemuda .....
- 4.2. Program Prioritas Pembangunan Kepemudaan (setiap OPD)
  - 4.2.1. Dinas Pemuda dan Olahraga .....
  - 4.2.2. Dinas Pendidikan .....
  - 4.2.3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata .....
  - 4.2.4. *Dinas lainnya yang disebut dalam Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota* .....

### **BAB 5. Pengorganisasian Rencana Aksi**

- 5.1. Struktur Pelaksana .....
- 5.2. Tahapan Kegiatan .....
- 5.4. Rapat Koordinasi .....
- 5.5. Indikator Keberhasilan .....
- 5.6. Pemantauan dan Evaluasi .....
- 5.6.1. Pengukuran Kinerja OPD.....
- 5.6.2. Pengukuran Apresiasi Pemuda.....

### **BAB 6. Matriks Rencana Koordinasi Kegiatan Lintas Organisasi Perangkat Daerah untuk Pelayanan Kepemudaan .....**

### **BAB 7. Penutup .....**

## **4. Ruang Lingkup**

### **4.1 Kondisi Umum**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 bahwa luas wilayah daratan dengan luas wilayah daratan mencapai 65.526,72 Km<sup>2</sup> atau 6.552.672 Ha. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel

Pola Ruang Provinsi Sulawesi Tengah

NO	FUNGSI KAWASAN	LUAS		KETERANGAN
		(Ha)	%	
I	Kawasan Lindung	2.329.745	35,55	
	Kawasan Konservasi Suaka Alam dan Pelestarian Alam	656.270*	10,00	* Termasuk DPCLS seluas 5.510Ha. Dalam Proses Persetujuan DPRRI
	Kawasan Konservasi Suaka Alam dan Pelestarian Alam Air	340.120	5,19	
	Hutan Lindung	1.333.355*	21,00	*Termasuk DPCLS seluas 9.802Ha. Dalam Proses Persetujuan DPR RI
II	Kawasan Budi daya Hutan	2.078.858	31,73	
	Hutan Produksi Tetap(HPT)	1.442.649	22,02	
	Hutan Produksi (HP)	412.746	6,30	
	Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)	223.463	3,41	
III.	Areal Penggunaan Lain(APL)	2.083.765	32,00	
	APL	2.083.765	32,00	
IV.	Perairan (Danau dan Sungai)	60.304	0,92	
	Jumlah III& IV	2.144.069	32,72	
	Luas Wilayah Provinsi	6.552.672	100,00	

NO	FUNGSI KAWASAN	LUAS		KETERANGAN
		(Ha)	%	
	Sulawesi Tengah (I+II+III+IV)			

Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2013-2033

Sementara menurut sumber data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah (2021), luas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yakni 61.841,29 Km2, secara rinci diperlihatkan Tabel 2.2.

**Tabel 2.2**

**Luas Wilayah dan Persentase Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten**

No.	Kabupaten	Ibukota	Ketinggian Tempat (mpdl)	Luas Wilayah (Km2)	Persentase terhadap Luas Provinsi (%)
1.	Banggai Kepulauan	Salakan	104	2.488,79	4,02
2.	Banggai	Luwuk	125	9.672,70	15,64
3.	Morowali	Bungku	3	3.037,04	4,91
4.	Poso	Poso Kota	18	7.112,25	11,50
5.	Donggala	Banawa	35	4.275,08	6,91
6.	Tolitoli	Baolan	8	4.079,77	6,60
7.	Buol	Biau	63	4.043,57	6,54
8.	Parigi Moutong	Parigi	29	5.089,91	8,23
9.	Tojo Una-Una	Ampana	117	5.721,15	9,25
10.	Sigi	Bora	183	5.196,02	8,40
11.	Banggai Laut	Banggai	24	725,67	1,17
12.	Morowali Utara	Kolonodale	50	10.004,28	16,18

13.	Palu	Palu	64	395,06	0,64
Jumlah				61.841,29	100,00

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2021.

Selanjutnya pola ruang Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.1. di bawah ini.

Gambar 2.1 Peta Pola Ruang Provinsi Sulawesi Tengah



Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2013-2033

Luas perairan laut Sulawesi Tengah mencapai 193.923,75 Km<sup>2</sup> dengan jumlah pulau sebanyak 1.140 pulau dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Provinsi Sulawesi Barat.

Secara administrasi, hingga saat ini Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki 12 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Banggai, Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Banggai Laut dan Kota Palu, yang terdiri dari 176 Kecamatan, dan 2.020 Desa/Kelurahan.

Tabel 2.3

**Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan**  
**Di Provinsi Sulawesi Tengah Menurut kabupaten/Kota**  
**Tahun 2021**

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH	
		KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
1	2	3	4
1.	PALU	8	46
2.	SIGI	16	177
3.	DONGGALA	16	167
4.	PARIGI MOUTONG	23	283
5.	POSO	19	170
6.	TOJO UNA-UNA	12	146
7.	BANGGAI	23	337
8.	BANGGAI KEPULAUAN	12	144
9.	BANGGAI LAUT	7	66
10.	MOROWALI	9	133
11.	MOROWALI UTARA	10	126
12.	BUOL	11	115
13.	TOLITOLI	10	110
JUMLAH SULTENG		176	2.020

Sumber: BPS, Sulteng Dalam Angka Tahun 2022.

**4.2 Letak dan Kondisi Geografis**

Posisi astronomi Sulawesi Tengah terletak antara 2<sup>0</sup>22’ Lintang Utara dan 3<sup>0</sup>48’ Lintang Selatan serta 119<sup>0</sup>22’ dan 124<sup>0</sup>22’ Bujur Timur. Posisi geostrategis Sulawesi Tengah berada di tengah Wilayah Nusantara dan di tengah Pulau Sulawesi, berada di lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan ALKI III.

**4.3 Topografi**

Berdasarkan Kemiringan lahan, dataran Sulawesi Tengah dirinci sebagai berikut:

- Kemiringan 0 - 3 derajat sekitar 11,8 persen;
- Kemiringan 3 - 15 derajat sekitar 8,9 persen;
- Kemiringan 15 - 40 derajat sekitar 19,9 persen;
- Kemiringan di atas 40 derajat sekitar 59,9 persen.

Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran wilayah Sulawesi Tengah terbagi atas:

- Ketinggian 0 m – 100 m = 20,2 persen;
- Ketinggian 101 m – 500 m = 27,2 persen;
- Ketinggian 501 m – 1.000 m = 26,7 persen; dan

- Ketinggian 1.001 m ke atas = 25,9 persen.

4.4 Geologi

Struktur dan karakteristik geologi wilayah Sulawesi Tengah didominasi oleh bentangan pegunungan dan dataran tinggi, yakni mulai dari wilayah Kabupaten Buol dan Tolitoli, terdapat deretan pegunungan yang berangkai ke jajaran pegunungan di Provinsi Sulawesi Utara. Di tengah wilayah Sulawesi Tengah yaitu Kabupaten Donggala dan Parigi Moutong terdapat tanah genting yang diapit oleh Selat Makassar dan Teluk Tomini, selain itu sebagian besar merupakan daerah pegunungan dan perbukitan. Di selatan dan timur yang mencakup wilayah Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai, berjejer deretan pegunungan yang sangat rapat seperti Pegunungan Tokolekayu, Verbeek, Tineba, Pampangeo, Fennema, Balingara, dan Batui. Sebagian besar dari daerah pegunungan itu mempunyai lereng yang terjal dengan kemiringan di atas 45 derajat.

4.5 Hidrologi

Di sepanjang wilayah Sulawesi Tengah terdapat beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengalir di sejumlah wilayah kabupaten/kota (Tabel 2.5). Selain daerah aliran sungai juga terdapat beberapa danau yang hampir seluruhnya berada di kawasan lindung. Danau dan sumber daya sungai tersebut dimanfaatkan untuk pertanian, energi listrik dan kebutuhan rumah tangga. Luas kecamatan dan rencana pengembangan sistem jaringan pengolahan sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi di Sulawesi Tengah disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4

Luas Kecamatan pada dalam Wilayah Sungai (WS) Lintas  
Provinsi di Sulawesi Tengah

No	Provinsi / Kabupaten	Kecamatan	Luas Kecamatan dalam WS (Km2)	Persentase Kecamatan dalam WS (%)
A.	Provinsi Sulawesi Tengah			

No	Provinsi / Kabupaten	Kecamatan	Luas Kecamatan dalam WS (Km2)	Persentase Kecamatan dalam WS (%)
1	Kabupaten Donggala	Balaesang	169,18	1,16
		Balaesang Tanjung	189,49	1,3
		Banawa	100,32	0,69
		Banawa Selatan	313,93	2,15
		Banawa Tengah	79,95	0,55
		Labuan	169,18	1,16
		Pinembani	447,77	3,07
		Rio Pakawa	881,47	6,05
		Sindue	138,67	0,95
		Sindue Tobata	260,59	1,79
		Sirenja	183,2	1,26
		Tanantovea	245,02	1,68
		Sindue Tombusabora	201,97	1,39
		<b>Total Luas</b>	<b>3.380,73</b>	<b>23,21</b>
2	Kota Palu	Mantikulore	201,43	1,38
		Palu Barat	22,99	0,16
		Palu Utara	37,01	0,25
		Tawaeli	53,02	0,36
		Ulujadi	53,22	0,37
		Palu Selatan	29,06	0,2
		Palu Timur	10,76	0,07
		Tatanga	14,18	0,1
		<b>Total Luas</b>	<b>421,68</b>	<b>2,89</b>
3	Kabupaten Sigi	Dolo	40,84	0,28
		Dolo Barat	128,29	0,88
		Dolo Selatan	397,31	2,73
		Kinovaro	34,19	0,23
		Kulawi	1.139,97	7,82
		Kulawi Selatan	406,9	2,79



No	Provinsi / Kabupaten	Kecamatan	Luas Kecamatan dalam WS (Km2)	Persentase Kecamatan dalam WS (%)
		Lindu	576,9	3,96
		Marawola	40,9	0,28
		Marawola Barat	157,31	1,08
		Nokilalaki	80,37	0,55
		Palolo	592,18	4,06
		Pipikoro	991,72	6,81
		Sigi Biromaru	324,29	2,23
		Sumbasa	162,43	1,11
		Tanam Bulava	57,73	0,4
		<b>Total Luas</b>	<b>5.131,34</b>	<b>35,22</b>
4	Kabupaten Poso	Lore Barat	322,08	2,21
		Lore Peore	577,26	3,96
		Lore Selatan	483,08	3,32
		Lore Tengah	696,04	4,78
		Lore Timur	149,75	1,03
		Lore Utara	333,3	2,29
		<b>Total Luas</b>	<b>2.561,50</b>	<b>17,58</b>

Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2013-2033.

Secara rinci pembagian DAS di WS Palu Lariang tersaji pada tabel 2.5.

**Tabel 2.5**  
**Pembagian DAS di WS Palu Lariang**

Kode DAS	Nama DAS	Luas (Km2)	Persentase DAS Dalam WS (%)	Kode DAS	Nama DAS	Luas (Km2)	Persentase DAS Dalam WS (%)
1	Lariang	7.264,97	49,87	27	Watutela	30,18	0,21
2	Minti	326,28	2,24	28	Watutailo	15,28	0,1
3	Sulung	970,3	6,66	29	Biuluniongga	30,05	0,21
4	Pangian	140,39	0,96	30	Taipa	88,29	0,61
5	Sawi	52,97	0,36	31	Tabeo	16,07	0,11
6	Randomaya ng	94,52	0,65	32	Taweli	104,27	0,72
7	Kasuloang	138,76	0,95	33	Lambagu	92,54	0,64
8	Bambaira	6,49	0,04	34	Labuan	158,67	1,09
9	Tampaore	16,45	0,11	35	Toaya	77,41	0,53
10	Kumboki	26,6	0,18	36	Masaengi	93,66	0,64
11	Surumana	304,08	2,09	37	Tibo	143,97	0,99
12	Bambalalombi	35,39	0,24	38	Batusuya	93,49	0,64
13	Mamara	119,86	0,82	39	Aliandu	110,49	0,76
14	Tolongano	12,86	0,09	40	Loro	29,48	0,2
15	Kangando	17,68	0,12	41	Sinapa	4,79	0,03
16	Towale	37,93	0,26	42	Sikara	6,23	0,04
17	Tomaku	10,74	0,07	43	Omba	20,77	0,14
18	Donggala	56,3	0,39	44	Tondo	26,18	0,18
19	Uwemole	6,03	0,04	45	Lente	105,83	0,73
20	Lottu	3,8	0,03	46	Tompo	95,86	0,66
21	Nggoji	19,19	0,13	47	Lende	30,01	0,21
22	Watusampu	20,64	0,124	48	Airmakuni	96,52	0,66
23	Buluri	37,17	0,26	49	Kusu	46,96	0,32
24	Owenumpu	22,86	0,16	50	Kamonji	46,32	0,32
25	Palu	3.063,96	21,03	51	Tompe	50,08	0,34
26	Lepata	77,5	0,53	52	Maruri	71,65	0,49

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 4/PRT/M/2015

Tabel 2.5 menunjukkan bahwa DAS Palu Lariang memiliki sejumlah beberapa sub DAS yang cukup besar dan memiliki potensi besar dalam pemanfaatan sumber daya untuk kegiatan pertanian, industri dan rumah tangga. Jika ditinjau dari wilayah sungai strategis nasional yang terdapat di Sulawesi Tengah, terdapat beberapa wilayah sungai strategis sebagaimana terlihat pada tabel 2.6.

**Tabel 2.6**  
**Wilayah Sungai Strategis Nasional Di Provinsi Sulawesi**  
**Tengah (WS Parigi – Poso)**

No	Provinsi / Kabupaten	Kecamatan	Luas Total Kecamatan (Km2)	Luas Kecamatan dalam WS (Km2)	Persentase Kecamatan dalam WS (%)
A.	Provinsi Sulawesi Tengah				
1.	Kabupaten Morowali Utara	Mori Atas	768,89	13,02	1,7
		Mori Utara	699,82	140,94	20,1
		Soyo Jaya	1.221,09	39,51	3,2
Sub Total Kabupaten Morowali Utara				193,47	2,25
2.	Kabupaten Parigi Moutong	Ampibabo	279,61	279,61	100
		Balinggi	119,64	119,64	100
		Kasimbar	271,56	194,76	71,7
		Parigi	104,65	104,65	100
		Parigi Barat	78,72	78,72	100
		Parigi Selatan	439,97	356,92	81,1
		Parigi Tengah	64,41	64,41	100
		Parigi Utara	29,65	29,65	100
		Sausu	291,61	291,61	100
		Sinju	111,94	111,94	100
		Toribulu	97,57	97,51	99,9
		Torue	575,29	399,35	69,4
Sub Total Kabupaten Parigi Moutong				2.128,77	24,72
		Danau Poso	366,95	366,95	100
		Lage	411,13	411,13	100
		Lore Piore	506,89	42,7	8,4

No	Provinsi / Kabupaten	Kecamatan	Luas Total Kecamatan (Km2)	Luas Kecamatan dalam WS (Km2)	Persentase Kecamatan dalam WS (%)
		Lore Selatan	510,77	80,8	15,8
		Lore Tengah	594,25	29,26	4,9
		Lore Utara	484,69	31,96	6,6
		Pamona Barat	227,55	227,55	100
		Pamona Pusalemba	486,81	486,81	100
		Pamona Selatan	381,89	312,06	81,7
		Pamona Tenggara	312,08	184,64	59,2
		Pamona Timur	713,97	166,78	23,4
		Pamona Utara	685,47	598,76	87,3
3.	Kabupaten Poso	Poso Kota	35,95	35,95	100
		Poso Kota Selatan	41,42	41,42	100
		Poso Kota Utara	37,68	37,68	100
		Poso Pesisir	334,64	252,97	75,6
		Poso Pesisir Selatan	430,92	418	97
		Poso Pesisir Utara	555,24	470,02	84,7
Sub Total Kabupaten Poso				4.195,44	48,72
4.	Kabupaten Tojo Una-Una	Tojo	422,81	422,81	100
		Tojo Timur	1.318,41	1.255,53	95,2
		Ulu Bongka	1.538,42	17,82	1,2
Sub Total Kabupaten Tojo Una-Una				1.696,16	19,7
Total Luas WS Parigi Poso				8.610,57	

Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033.

Secara rinci pembagian DAS di WS Parigi Poso disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.7**

**Pembagian DAS di WS Parigi Poso**

No.	Nama DAS	Luas DAS (Km <sup>2</sup> )	Persentase DAS Dalam WS (%)	No.	Nama DAS	Luas DAS (Km <sup>2</sup> )	Persentase DAS Dalam WS (%)
1	Tompis	118,04	1,37	26	Tiwa'a	31,13	0,36
2	Kasimbar	104,87	1,22	27	Masani	38,61	0,45
3	Toribulu	154,46	1,79	28	Lape	26,95	0,31
4	Tapoya	223,74	2,60	29	Puna	778,30	9,04
5	Silangga	68,40	0,79	30	Mapane	59,42	0,69
6	Marantale	41,50	0,48	31	Poso	2.674,85	31,07
7	Salumbia	31,80	0,37	32	Tongko	297,21	3,45
8	Toboli	29,55	0,34	33	Malei	203,31	2,36
9	Pelawa	50,43	0,59	34	Bambalo	45,24	0,53
10	Baliara	87,93	1,02	35	Toliba	200,26	2,33
11	Olaya	53,09	0,62	36	Tambiano	51,86	0,60
12	Korontua	35,32	0,41	37	Mawomba	64,66	0,75
13	Dolago	175,11	2,03	38	Kabalo	134,46	1,56
14	Tindaki	146,50	1,70	39	Tayawa	81,62	0,95
15	Sampalo	60,05	0,70	40	Ue Kuli	44,66	0,52
16	Torue	62,60	0,73	41	Betaue	218,53	2,54
17	Tolai	61,26	0,71	42	Ue Dele	17,02	0,20
18	Topeau	54,00	0,63	43	Sandada	43,20	0,50
19	Suli	150,82	1,75	44	Tojo	216,48	2,51
20	Sausu	568,64	6,60	45	Masalongi	245,65	2,85
21	Tambara	246,52	2,86	46	Pancuma	80,71	0,94
22	Kalora	8,47	0,10	47	Tongku	122,17	1,42
23	Samalera	17,65	0,20	48	Ue Podi	142,77	1,66
24	Kilo	129,64	1,51	49	Padapu	27,83	0,32
25	Kameasi	45,48	0,53	50	Kayunyol	37,76	0,44

No.	Nama DAS	Luas DAS (Km <sup>2</sup> )	Persenta se DAS Dalam WS (%)	No.	Nama DAS	Luas DAS (Km <sup>2</sup> )	Persenta se DAS Dalam WS (%)
					e		

Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033.

Selanjutnya Wilayah Danau Kawasan Lindung di Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.8**  
**Wilayah Danau Kawasan Lindung Di Provinsi Sulawesi Tengah**

No .	Nama Danau	Kabupaten/Kota	Luas (Km <sup>2</sup> )
1	Tatawu	Donggala	0,625
2	Padang	Donggala	0,02875
3	Kalimpaa	Donggala	0,055
4	Wanga	Poso	0,245
5	Dampelas	Donggala	4,9375
6	Rano	Donggala	2,50
7	Lindu	Sigi	33,925
8	Bolano Toga	Parigi Moutong	0,2575
9	Batu Dako	Parigi Moutong	0,1775
10	Bolanosau	Parigi Moutong	0,9375
11	Dedei	Parigi Moutong	0,2125
12	Laut Kecil	Parigi Moutong	2,4375

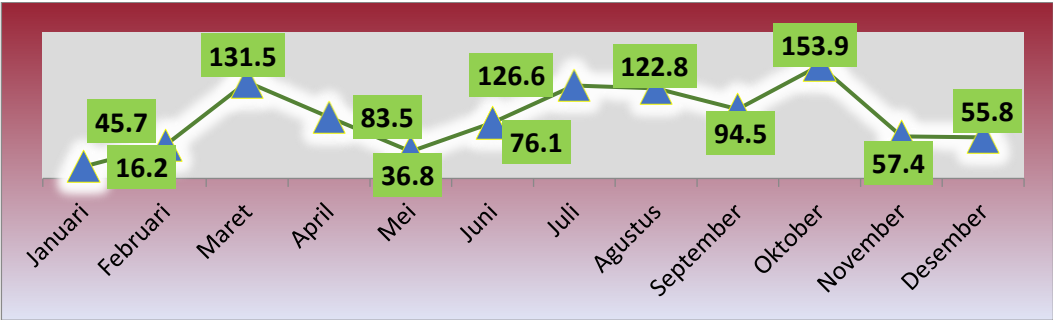
No .	Nama Danau	Kabupaten/Kota	Luas (Km <sup>2</sup> )
13	Bolano Molosifat	Parigi Moutong	0,1250
14	Poso	Poso	369,385
15	Tanah Morambo	Poso	0,0625
16	Limbo Kasimpo	Poso	0,825
17	Telaga Toju	Poso	0,295
18	Tiu	Morowali	1,3125
19	Bae	Morowali	4,125
20	Kodi	Morowali	2,5625
21	Laindungan	Banggai	0,14
22	Petinding	Banggai	0,0325
23	Bakalan	Banggai	0,0625
24	Kobit	Banggai	0,03
25	Lamotong	Banggai	0,02
26	Tendetung	Banggai	1,4375
27	Alan	Banggai	0,09
28	Makapa B	Banggai	0,23

Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2013-2033.

4.6 Klimatologi

Kota Palu memiliki dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Berbeda dengan tahun sebelumnya. Sepanjang Tahun 2021 terjadi musim hujan di Kota Palu, curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Oktober yaitu 153,9 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada Bulan Januari yaitu 16,2 mm.

Gambar 2.2  
Kondisi Curah Hujan di Kota Palu Menurut Bulan Tahun 2021

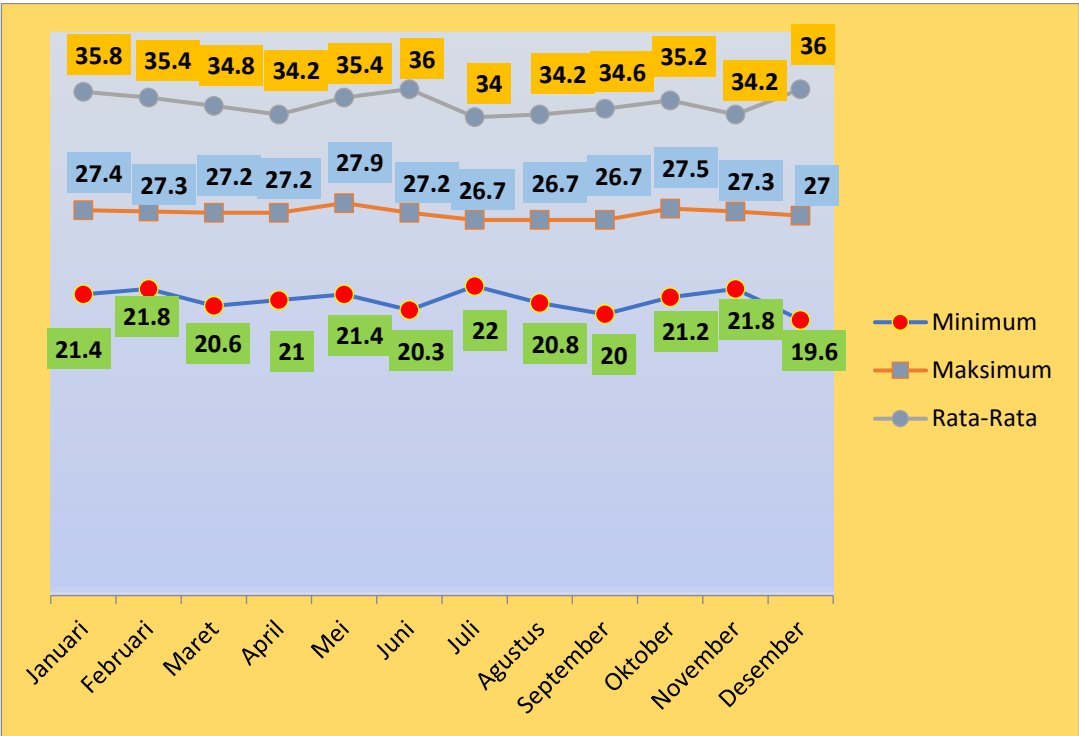


Sumber: BPS, 2022.

Pada Tahun 2021, suhu udara rata-rata terendah terjadi di Bulan Juli yaitu 340C, dan tertinggi yaitu 35,80C terjadi pada Bulan Januari, sedangkan suhu udara maksimum tertinggi terjadi pada Bulan Mei

yaitu 27,90C, dan yang terendah pada Bulan Juli, Agustus dan bulan September yaitu 26,70C. Sementara suhu udara minimum yang tertinggi terjadi pada bulan Februari dan November yaitu 21,80C, dan yang terendah pada bulan Desember yaitu 19,60C.

**Gambar 2.3**  
**Suhu Udara Minimum, Maksimum dan Rata-Rata Kota Palu**  
**Menurut Bulan Tahun 2021**

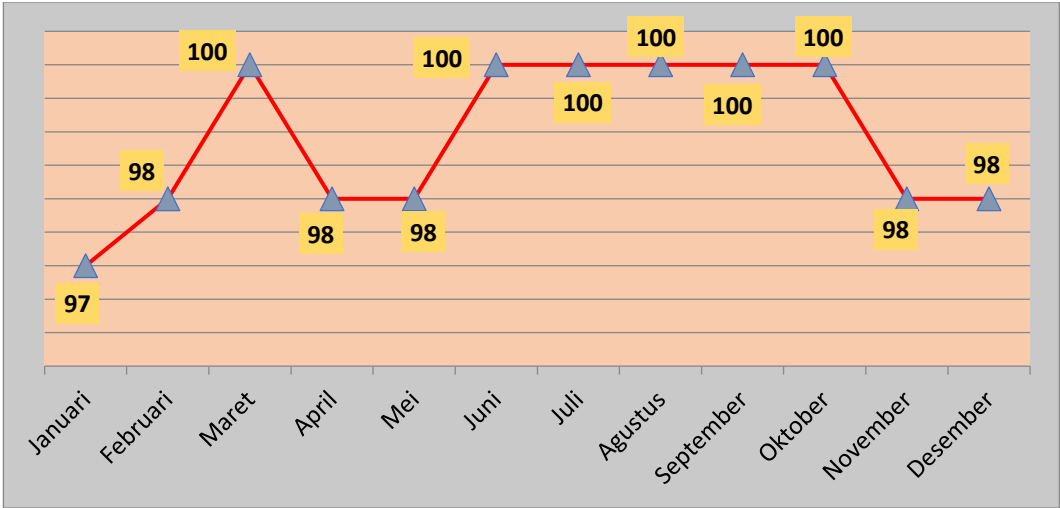


Sumber: BPS, 2022.

Kelembaban udara rata-rata di Kota Palu selama Tahun 2021 terjadi pada Bulan Maret, Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober dengan kelembaban udara tertinggi yaitu 100 persen dan terendah terjadi pada Bulan Januari yaitu 97,00 persen.

**Gambar 2.4**  
**Kelembaban Udara Kota Palu Menurut Bulan Tahun 2021 (%)**



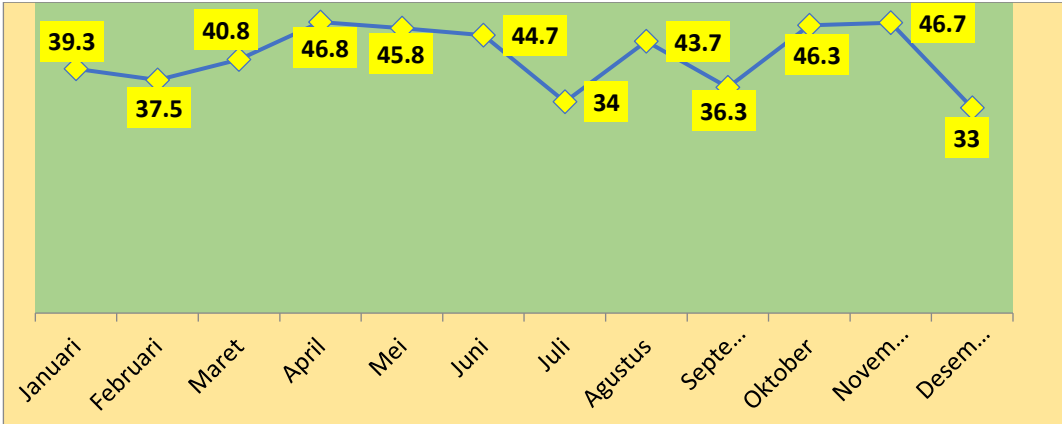


Sumber: BPS, 2022.

Intensitas sinar matahari pada Tahun 2021. Rata-rata penyinaran tertinggi terjadi pada Bulan April yaitu mencapai 46,8 persen, sedangkan terendah terjadi pada Bulan Desember yaitu 33 persen.

Gambar 2.5

Rata-Rata Intensitas Sinar Matahari di Kota Palu Tahun 2021



Sumber: BPS, 2022.

4.7 Penggunaan Lahan

Hutan mempunyai peran penting dalam menunjang kelangsungan hidup dan kehidupan makhluk hidup, khususnya umat manusia. Hutan tidak hanya memberikan manfaat langsung (tangible use) sebagai sumber penghasil hasil hutan berupa kayu dan non kayu, tetapi hutan juga memberikan manfaat tidak langsung (intangibile use) sebagai pengatur tata air, kesuburan tanah, iklim mikro, pencegah erosi dan longsor, sehingga eksistensinya harus tetap dipertahankan melalui pengaturan fungsi hutan.

Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi yang dikaruniai potensi sumberdaya hutan yang melimpah, baik ditinjau dari gatra luas kawasan hutan maupun gatra keanekaan hayati.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033, Luas Kawasan Lindung yaitu 2.329.745 Ha, Kawasan Budidaya Hutan seluas 2.078.858 Ha, Areal Pengguna Lain (APL) seluas 2.083.765 Ha, dapat terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.9**  
**Pola Ruang Provinsi Sulawesi Tengah**

No.	Fungsi Kawasan	Luas		Keterangan
		(Ha)	%	
I.	Kawasan Lindung	2.329.745	35,55	
	Kawasan Konservasi Suaka Alamdan Pelestarian Alam	656.270*	10	* Termasuk DPCLS seluas 5.510 Ha. Dalam Proses Persetujuan DPR RI
	Kawasan Konservasi Suaka Alamdan Pelestarian Alam Air	340.120	5,19	
	Hutan Lindung	1.333.355*	21	*Termasuk DPCLS seluas 9.802Ha. DalamProses Persetujuan DPR RI
II.	Kawasan Budidaya Hutan	2.078.858	31,73	
	Hutan Produksi Tetap(HPT)	1.442.649	22,02	
	Hutan Produksi (HP)	412.746	6,3	

No.	Fungsi Kawasan	Luas		Keterangan
		(Ha)	%	
	Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)	223.463	3,41	
<b>III</b>	<b>Areal Penggunaan Lain (APL)</b>	<b>2.083.765</b>	<b>32</b>	
	APL	2.083.765	32	
<b>IV.</b>	<b>Perairan(Danau dan Sungai)</b>	<b>60.304</b>	<b>0,92</b>	
	<b>Jumlah III&amp; IV</b>	<b>2.144.069</b>	<b>32,72</b>	
	<b>Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (I+II+III+IV)</b>	<b>6.552.672</b>	<b>100</b>	

Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2013-2033.

**5. Potensi Pengembangan Wilayah**

**5.1 Pertanian**

Berdasarkan data RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 luas potensi lahan Pertanian seluas 672.795 Ha, lahan ini masih dapat diperluas dengan memanfaatkan kawasan hutan konversi seluas 297.859,78 Ha, sehingga potensi keseluruhan pertanian adalah 942.206 Ha. Pengembangan Potensi Pertanian dibagi atas dua bagian, yaitu: (1) Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah (TPLB); (2) Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK).

Untuk lahan basah; pengembangan kawasan pertanian diarahkan pada kawasan yang sesuai untuk penanaman tanaman pangan. Lahan basah yang mempunyai sistem atau potensi pengembangan prasarana pengairan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti; ketinggian kawasan di bawah 1000 m, kelerengan kawasan di bawah 40% dan kedalaman efektif lapisan tanah di atas 30 cm.

Untuk Lahan Kering; lebih diarahkan pada areal yang tidak mempunyai sistem dan atau potensi pengembangan pengairan/irigasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor; ketinggian kawasan di bawah 1000 m, kelerengan kawasan di bawah 40% dan kedalaman efektif lapisan tanah di atas 30 cm. Saat ini Provinsi Sulawesi Tengah telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dengan rincian sebagai berikut:

- Untuk Lahan Sawah Irigasi dan Tadah Hujan seluas 168.250 Ha yang pengelolaannya lebih diarahkan pada pola tanam satu kali seluas 12.630 Ha, tanam dua kali seluas 124.713 Ha, tanam tiga kali seluas 6.132 Ha, tidak tanam padi seluas 3.689 Ha, tidak diusahakan atau bero seluas 21.086 Ha.
- Untuk lahan kering yang terdiri dari tegalan atau kebun seluas 577.490 Ha dan ladang atau huma seluas 241.220 Ha. Selanjutnya total luas lahan pertanian di Provinsi Sulawesi Tengah yang diarahkan untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 266.552 Ha yang terdiri masing-masing Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 119.702 Ha dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) seluas 146.850 Ha. Ketersediaan lahan ini diharapkan dapat mempertahankan ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Tengah melalui Program Sawah Lestari.

a. Tanaman Pangan

Jenis pertanian tanaman pangan di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 memiliki luas panen 185 626,64 ha, meningkat dibandingkan pada tahun 2020 dengan luas panen 180.509,55 Ha, sedangkan jumlah produktivitas pada tahun 2020 seluas 44,88 ku/ha, tahun 2021 meningkat menjadi 46,69 ku/ha, sementara pada tahun 2020 produksi padi 810.108,26 ku, meningkat dibandingkan pada tahun 2021 produksi padi sebesar 866 668,66 ku, ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.10

Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut  
Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2020 dan 2021

Kabupaten/Kota	Luas Panen (Ha)		Produktivitas (ku/ha)		Produksi (ku)	
	2020	2021 <sub>x</sub>	2020	2021 <sub>x</sub>	2020	2021 <sub>x</sub>
1	2	3	4	5	6	7
Banggai Kepulauan	665,64	509,6	45,23	42,17	3 010,66	2 149,16
Banggai	35 825,73	37 558,08	42,12	43,57	150 885,18	163 626,66
Morowali	9 224,84	8 889,56	45,6	51,11	42 068,22	45 434,34
Poso	25 284,09	24 952,20	39,3	43	99 359,51	107 306,23
Donggala	13 720,97	13 376,32	48,29	43,45	66 260,44	58 122,33
Tolitoli	14 910,76	13 588,55	56,04	44,66	83 556,72	60 684,03
Buol	5 019,45	6 354,19	41,57	39,6	20 866,59	25 164,20
Parigi Moutong	47 991,21	54 387,78	45,81	51,92	219 829,78	282 407,04
Tojo Una-Una	1 506,68	1 260,76	44,2	41,78	6 660,20	5 267,84
Sigi	18 556,55	17 568,29	44,81	48,51	83 143,90	85 229,76
Banggai Laut	–	–	–	–	–	–
Morowali Utara	7 727,65	7 017,09	44,17	43,43	34 133,56	30 472,58
Kota Palu	75,98	164,22	43,89	48,99	333,5	804,49
Sulawesi Tengah	180 509,55	185 626,64	44,88	46,69	810 108,26	866 668,66

Sumber : BPS, 2022

Selanjutnya pada tahun 2021 produksi beras mengalami peningkatan yaitu 508 940,91 ton, jika dibandingkan dengan produksi beras pada tahun 2020 yaitu 475.726,51 ton, dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.11**  
**Produksi Beras Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2020 dan 2021**

Kabupaten/Kota	Produksi Beras (ton)	
	2020	2021 <sup>x</sup>
1	2	3
Banggai Kepulauan	1 767,97	1 262,07
Banggai	88 605,55	96 087,81
Morowali	24 704,05	26 680,79
Poso	58 347,70	63 014,31
Donggala	38 910,66	34 131,65
Tolitoli	49 067,70	35 635,98
Buol	12 253,67	14 777,37
Parigi Moutong	129 092,44	165 840,18
Tojo Una-Una	3 911,12	3 093,49
Sigi	48 825,27	50 050,17
Banggai Laut	—	—
Morowali Utara	20 044,53	17 894,66
Kota Palu	195,85	472,43
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>475 726,51</b>	<b>508 940,91</b>

Sumber : BPS, 2022

Pada tabel tersebut, bahwa produksi beras yang tertinggi terdapat pada Kabupaten Parigi Moutong, pada tahun 2020 sebesar 129.092,44,- ton, atau 27,14 persen, dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 165.840,18,- atau 22,16 persen.

Sementara itu daerah irigasi, luas areal sawah potensial 47.640 Ha, sedangkan fungsional sangat menentukan keberhasilan produksi beras.

Pada tahun 2021 di Provinsi Sulawesi Tengah jumlah daerah irigasi sebanyak 30 luas areal sawah fungsional 34.504 Ha, seperti pada tabel berikut :

**Tabel 2.12**

**Daerah Irigasi, Luas Areal Sawah Potensial dan Fungsional Menurut Kabupaten/Kota Kewenangan dan tanggungjawab Provinsi Sulawesi Tengah (Ha) Tahun 2021**

Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Irigasi	Luas Potensial (ha)	Luas Fungsional (ha)
1	2	3	4
Banggai Kepulauan	-	-	-
Banggai	8	13 316	8 890,51
Morowali	2	3 893	4 484,00
Poso	4	5 628	3 817,00
Donggala	1	1 625	923,22
Tolitoli	3	4 348	2 947,50
Buol	1	1 028	534,15
Parigi Moutong	8	14 923	11 664,53
Tojo Una-Una	-	-	-
Sigi	2	1 669	492,9
Banggai Laut	-	-	-
Morowali Utara	1	1 210	750
Kota Palu	-	-	-
Sulawesi Tengah	30	47 640	34 504

Sumber : BPS, 2022

Kabupaten Parigi Moutong merupakan daerah yang memiliki irigasi yang terbanyak yaitu dengan jumlah 8 irigasi, dan memiliki areal persawahan potensial sebanyak 14.923 Ha, sedangkan areal persawahan fungsional sebanyak 11.664,53 Ha.

Sedangkan jumlah daerah irigasi, luas areal sawah potensial yang menjadi keweangan Pusat 30.564,88 Ha, sedangkan fungsional sangat menentukan keberhasilan produksi beras. Pada tahun 2021 di

Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi keweangan Pusat jumlah daerah irigasi sebanyak 6 luas areal sawah fungsional 20.260,15 Ha, seperti pada tabel berikut :

**Tabel 2.13**  
**Daerah Irigasi, Luas Areal Sawah Potensial dan Fungsional Menurut Kabupaten/Kota Kewenangan dan tanggungjawab Pusat (Ha) Tahun 2021**

Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Irigasi	Luas Potensial (ha)	Luas Fungsional (ha)
1	2	3	4
Banggai Kepulauan	—	—	—
Banggai	3	9 550,47	7 164,99
Morowali	—	—	—
Poso	—	—	—
Donggala	—	—	—
Tolitoli	—	—	—
Buol	—	—	—
Parigi Moutong	2	12 833,76	7 820,16
Tojo Una-Una	—	—	—
Sigi	1	8 180,65	5 275
Banggai Laut	—	—	—
Morowali Utara	—	—	—
Kota Palu	—	—	—
Sulawesi Tengah	6	30.564,88	20.260,15

Sumber : BPS, 2022

b. Hortikultura

Pencapaian produksi pertanian hortikultura bagi penduduk Sulawesi Tengah utamanya bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabe rawit, Kentang, Kubis, Kangkung, Petsai dan tomat masih dipenuhi dari produksi sendiri, dan hanya beberapa



komoditi dari daerah lain sebagai tambahan, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.14**

**Luas Panen Tanaman Sayuran dan Jenis Tanaman Provinsi Sulawesi Tengah (Ha) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021**

Kabupaten/Kota	Bawang Merah	Cabai Besar	Cabe Rawit	Kentang	Kubis	Tomat	Bawang Putih	Kangkung	Petsai/Sawi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Banggai Kepulauan	19	57	127	-	-	61	-	58	8
Banggai	112	155	707	-	13	237	-	116	58
Morowali	55	82	287	-	-	73	-	94	98
Poso	178	203	351	39	1 670	309	47	183	872
Donggala	84	211	278	7	95	143	-	85	21
Tolitoli	9	71	67	-	-	20	-	44	11
Buol	6	32	433	-	-	32	-	9	5
Parigi Moutong	210	163	785	-	-	247	15	98	40
Tojo Una-Una	27	30	466	-	-	62	-	20	6
Sigi	49	8	152	2	3	105	5	12	49
Banggai Laut	-	1	18	-	-	13	-	21	6
Morowali Utara	1	18	138	-	-	25	-	52	18
Palu	62	19	64	-	-	79	-	46	37
Sulawesi Tengah	810	1 049	3 874	48	1 780	1 405	67	838	1 227

Sumber : BPS, 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa areal yang tersedia untuk penanaman kesembilan jenis komoditi tersebut Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 memiliki areal seluas 11.098 Ha, dan yang terluas yaitu 3.874 Ha, untuk areal penanaman cabe rawit, sedangkan areal yang jenis komoditi paling sedikit adalah Kentang yaitu seluas 48 Ha.

**5.2 Perkebunan**

Kawasan Perkebunan Tanaman Tahunan/Perkebunan diarahkan pada areal tanaman tahunan/perkebunan dengan karakteristik/ lingkungan dengan ketinggian di bawah 2000 m, kelerengan kawasan di bawah 40 persen dan kedalaman efektif lapisan tanah di atas 30 cm. Potensi perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah seluas 289.805 Ha, dengan potensi komoditi kelapa seluas 61.999 Ha, kakao 120.085 Ha,

cengkeh 33.361 Ha, karet 6.250 Ha, jambu mente 9.815 Ha, pala 11.434 Ha dan sawit rakyat 23.115 Ha.

### **5.3 Peternakan**

Pengembangan kawasan peternakan umumnya berada pada kondisi lingkungan dengan ketinggian di bawah 1.000 meter, kelerengan di bawah 1.000 meter dan jenis tanah dan iklim yang sesuai untuk padang rumput alamiah. Pemanfaatan kawasan secara optimal seluas 130.955,5 Ha, sedangkan potensi areal peternakan yang sudah dimanfaatkan seluas 120.955,5 Ha.

Adapun jenis ternak yang diusahakan diklasifikasikan sebagai berikut: (a) Ternak Besar meliputi: sapi, kerbau dan kuda; (b) Ternak kecil meliputi: kambing, domba dan babi; (c) Ternak unggas meliputi: ayam ras, ayam kampung dan itik.

### **5.4 Perikanan**

Potensi perairan laut Sulawesi Tengah seluas 193.923,75 km<sup>2</sup> yang banyak mengandung berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya, terbagi dalam 3 (tiga) zona yaitu (1) Selat Makasar dan Laut Sulawesi (sebesar 929.700 ton), (2) Teluk Tomini (sebesar 595.620 ton), (3) Teluk Tolo (sebesar 68.456 ton). Potensi sumberdaya ikan di perairan tersebut kurang lebih sebanyak 330.000 ton per tahun. Sedangkan ikan yang bisa dikelola secara lestari sekitar 214.000 ton per tahun. Di Teluk Tolo terdapat 68.000 ton per tahun, Teluk Tomini 78.000 ton per tahun, Selat Makasar dan Laut Sulawesi 68.000 ton per tahun. Dari potensi ikan lestari tersebut jumlah ikan yang dapat ditangkap sebesar 217.280 ton per tahun.

### **5.5 Industri**

Pengembangan kawasan industri mempunyai persyaratan lokasi industri sesuai dengan hasil studi kelayakan. Rencana pemanfaatan kawasan industri diarahkan pada lokasi yang teridentifikasi memiliki potensi sumber daya alam. Pengembangan kawasan diarahkan pula pada lokasi yang mempunyai daya dukung sarana dan prasarana.

Untuk pengembangan industri Provinsi Sulawesi Tengah ke depan diarahkan pada pengolahan barang manufaktur dan agroindustri yang mengandalkan kegiatan produksi yang dilakukan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Palu dan industri pengolahan tambang pada Kawasan Industri Morowali (KI-Morowali) serta Industri Gas Bumi di Kabupaten Banggai.

### **5.6 Pariwisata**

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi wisata yang cukup untuk dikembangkan menjadi obyek dan atraksi wisata bahari, wisata

alam dan wisata budaya. Potensi pariwisata dapat dikembangkan atas dasar nilai budaya yang sudah ada dalam masyarakat, nilai adat istiadat dan agama yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat.

Adapun Potensi dan obyek pariwisata yang dapat dikembangkan di Sulawesi Tengah adalah:

- a. **Kabupaten Banggai Kepulauan** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Pulau Makaliu (pulau Tikus), Pulau Lambangan Pouno, Pulau Tolobundu, Pulau Bandang Besar dan Kecil, Pulau Lesampuang, Pulau Delopo, Pantai Pasir Putih, Pulau Kembongan, dan Pulau Kokungan;
- b. **Kabupaten Buol** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Taman Wisata Alam Kumaligon, Goa Kolera, Pantai Kamaligon, Air Terjun Talokan, Sumber Air Panas, Air Terjun Pinamula, Rumah Adat Buol, Pantai Pelepas Rindu Hulubalang, Pantai Batu Susun, Pemandian Alam Tirtaria, Rumah Raja Buol, Pulau Ringgit/Pulau Lamari, Pulau Lesman, Pulau Boki, Pulau Busak, Pulau Raja, Gunung Pogogul, Pulau Panjang;
- c. **Kabupaten Donggala** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Pantai Batusuya, Taman Rekreasi Umum Loly Indah, Teluk Telenggano, Pusentasi, Pantai Boneoge, Toravega Cottage, Pantai Enu, Tanjung Karang, Harmony Cottage, Golden park Cottage, Lokasi Berkemah/Camping Ground, Pulau Pasoso.
- d. **Kabupaten Morowali – Morowali Utara** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Cagar Alam Morowali, Pemancingan Putri Malu, Air Terjun Mempueno, Sumber Air Panas One Pute, Teluk Tomori, Pulau Rumbia, Batu Payung, Tebing Toppohulu, Batu Putih, Pulau Ulu, Pengia, Taman Laut Kaleroang, Menui Kepulauan, Benteng Fafontofure, Mesjid Tua Bungku, Budaya Masyarakat Wana, Istana Bungku, Rumah Controleur/Pengawas, Kubur Raja Marunduh, Situs Istana Raja Mori, dan Bangunan Bersejarah;
- e. **Kabupaten Parigi Moutong** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Pulau Kelelawar, Tanjung Makakata, Situs Rumah Raja Moutong, Rumah Klerek, Air terjun dan Tebing Likunggavali, Pantai Bambalemo, Pantai Indah Bomba Kaili, Habitat Burung Maleo, Perkebunan Ebony, Pantai Junayasa, Pantai Prajurit Posona, Benda Cagar Budaya, Situs Tanalanto, Makam Raja Torikota, Makam Raja Maruf(Magau Janggo), Makam Magau Langi Maili, Makam Magau Nguni Pasolemba, Makam Magau Tagunu, Pantai Tumpapa;

- f. **Kabupaten Poso** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Pantai Seribu Bintang, Pantai wisata Tamongajo, Lembah Napu, Besoa dan Bada, Situs Rumah Adat Tambi, Megalith, Situs Suso, Situs Sepe, Situs Tadulako, Situs Megalit Pokekea, Situs Lempe, Deas Wuasa, Situs Padang Padali, Situs Megalith Tamadue, Situs Watulumu, Situs Watutau, Situs Megalith Betue, Situs Mungku Padampaa, Situs Watunongko, Danau Poso, Watubaula, Goa Tangkaboba, Pantai Tandolala, Siuri Cottage, Taman Anggrek Bancea, Padamariri, Goa Pamona;
- g. **Kabupaten Tolitoli** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Gua Pompaile, Air Terjun Kolasi, Air Panas Tanigi, Bendungan Kolondom, Tanjung Matop, Air Terjun Sigelang, Pulau Lutungan, Pantai Tende Sabang, Tanjung Simuntu, Pantai Lalos, Pantai Bajugan, Rumah Adat Etnis Tolitoli.
- h. **Kabupaten Tojo Una-una** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Kepulauan Togean, Air Terjun Tolibaz, Pantai Tipae, Pantai Pasir Putih Matakko, Pemandian Malatong, Air Panas Marowo, Pulau Pangempa, Tanjung Api, Sungai Bongka, Pantai Capatana, Pulau Kabalutan, Pulau Malenge, Jembatan Bakau, Pulau Bolilanga, Pulau Taipi, Pulau Unauna, Tanjung Keramat, Pulau Kadidiri;
- i. **Kabupaten Banggai** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu: Air Panas Uwedaka, Permandian Salodik, Danau Makapa, Air Terjun Hanga-Hanga, Permandian Sandakan, Permandian Dondo, Air Terjun Nambo, Permandian Ampata, Gua Wira, Permandian Kilo Lima, Teluk Lalong, Pantai Pandaan Wangi, Pulau Dua, Pulau Poat, Boli Cotage Cafe, Gereja Tua Simpangan, Situs Totonga Bola Matindok;
- j. **Kota Palu** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu: Niki Beach, Museum Negeri Sulawesi Tengah, Souraja atau Banua Oge, Kolam Renang Milenium, Lokasi MTQ Jabal Nur, Taman Ria, Dayo mpoluku, Teluk Palu, Makam Dato Karama, Kerajinan Tangan dan Makanan Khas Daerah, Makam Pue Njidi, Kolam Renang Graha Tirta, Pantai Taipa, Jazz Hotel dan Recreation Zone, Pantai Talise, Bumi Roviga, dan Cagar Alam Poboya.
- k. **Kabupaten Sigi** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Situs Bangga, Camping Ground Paneki, Matantimali, Pemandiaian Uwelera Porame, Porame Paradise, Mantikole, Taman Wisata Kapopo, Air Terjun Wera, Desa Dombu, Desa Toro, Lobo, Air Terjun Pawelua, Air Panas Bora, Gampiri, Kulit Kayu, Habitat Burung

Maleo, Desa Pakuli, Danau Lindu, Sungai Lariang, Lembah Pipikoro, Air TerjunTamunggu Indah.

5.7 Pertambangan

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah, antara lain terdapat potensi bahan galian dan mineral, serta potensi gas dan minyak bumi. Potensi minyak bumi yang terdapat di Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali terdapat di lapangan Minyak Tiaka Blok Trili yang terletak 17 mil dari garis pantai. Cadangan minyak di lapangan Tiaka sebesar 106,56 Million Barrel Oil/juta Barrel minyak (MMBO). Sedangkan potensi minyak bumi yang terdapat di Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai memiliki kapasitas 16,5-23 juta barrel per tahun dengan total kapasitas produksi 6.500 Barrel (BOPD) yang diperoleh dari enam sumur, dan produksi rata-rata setiap sumur yaitu 1.100 BOPD. Disamping itu, Kabupaten Banggai juga memiliki potensi gas alam cair yang terdapat di Donggi-Senoro dengan perkiraan cadangan sebesar 20-28 trilyun kaki kubik (tcf), jumlah kandungan gas di ladang-ladang Donggi-Senoro besarnya dua kali lipat dibandingkan sisa kandungan yang terdapat di ladang gas alam Arun di Aceh yang jumlahnya mencapai 14 tcf.

Selain potensi minyak bumi dan gas alam tersebut, Sulawesi Tengah juga memiliki potensi pertambangan. Potensi emas di Sulawesi Tengah terdapat di Kota Palu (Kecamatan Mantikulore dan Palu Utara), dengan luas wilayah tambang 561.050 Ha, Kabupaten Parigi Moutong (Kecamatan Parigi dan Moutong) dengan luas wilayah tambang 46.400 Ha, Kabupaten Buol (Kecamatan Paleleh, Bunobogu, Dondo) dengan luas wilayah tambang 746.400 Ha, Kabupaten Poso (Kecamatan Lore Utara) dengan luas wilayah tambang 19.180 Ha, dan Kabupaten Sigi (Kecamatan Sigi Biromaru) dengan luas wilayah tambang 228.700 Ha.

Secara umum potensi pertambangan yang terdapat di Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15

Potensi dan Sebaran Pertambangan di Sulawesi Tengah

.No.	Bahan Galian	Ciri Khas - Lokasi	Keterangan
I.	Batuan Ornamen/poles		

.No.	Bahan Galian	Ciri Khas - Lokasi	Keterangan
1.	Granit, Granodiorit, Gabro, Basal, Dasit dan Andesit	Granit warna Merah Daging terdapat di Kab. Banggai Kepulauan Granit Warna abu-abu, Abu-abu gelap terdapat di Kab. Donggala, Parigi Moutong dan Tolitoli	Gabro di Kab. Donggala pernah ditambang yang dipasar disebut Granit HI TAM
2	Marmer/pualam dan Sarpentin	Marmer Hijau terdapat di Kab. Tojo Una una, Parigi Moutong dan Poso Marmer Coklat, Putih, Krem dan Abu-abu terdapat di Kab. Morowali dan Kab. Banggai	Marmer Hijau-Muda pernah dieksploitasi di Poso dan Morowali.
		Marmer Coklat Kemerahan terdapat di Kab. Parigi Moutong Marmer Coklat terdapat di kab. Morowali	
II.	Batuan Bahan Konstruksi		
3	Sirtukil	Terdapat Kota Palu dan disemuaKabupaten se Sulawesi Tengah.	Material berasal dari rombakanbatuan yang terdiri daribatuanGranit, Granodiorit, Basal, Gabro,Andesit, Dasit, Serpentin, Dunit,juga dari Breksi dan KonglomeratDi Kab. Donggala dan Kota Paludiantar-pulauan keKalimantan Timur.
III.	Mineral Non Logam lainnya		

.No.	Bahan Galian	Ciri Khas - Lokasi	Keterangan
4	Batugamping	Kab. Donggala, Buol, Poso, BanggaiKepulauan dan Morowali	Kab. Donggala, BanggaiKepulauan mempunyai potensiBahan Baku Semen yang sudahmelalui studi Kelayakan danAMDAL.
5	Lempung	Disemua Kabupaten se Sulawesi Tengah	Sebagian baru dimanfaatkan dalam pembuatan batu bata,Genteng dan batako.
6.	Pasir Kwarsa	Kab. Donggala, Parigi Moutong, Tolitoli dan Banggai Kepulauan	Umumnya mempunyai kadar SiO3 kurang dari 75 %
7.	Gypsum	Kab. Banggai Kepulauan dan Kota Palu	Dipersiapkan untuk Pabrik Semendi Banggai Kepulauan
8.	Talk	Kab. Banggai, dan Tojo Unauna	Berupa Sisipan pada batuan batuan UltrabasaPertanian (Kaptan), Kadar Mg 03
9.	Dolomit	Kab. Banggai	Sebagai bahan baku Kapur(Magnesium ) sampai 35 %

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sulteng.

Selain hal tersebut di atas, Sulawesi Tengah juga memiliki potensi sumberdaya energi yang terbarukan dan tidak terbarukan, yaitu antara lain:

Gas Bumi : 9,6 triliun kaki kubik

- Panas Bumi : 378 mWe
- Sumber Energi Terbarukan:

❑ Air : 1.001,980 MW

❑ Matahari : 5.512 kWh/m<sup>2</sup>

☐ *Angin* : 2 – 5 m/s

☐ *Biogas* : 19.026 kW

- Luas Lahan Kritis Untuk Budi Daya Tanaman Jarak Pagar (Biofuel) : 260.070 ha.

Potensi energi air di Sulawesi Tengah cukup banyak baik skala besar (PLTA), menengah (PLTM) maupun skala kecil (PLTMH). Salah satu potensi tenaga air skala besar yang ada di Sulawesi Tengah adalah potensi tenaga air sungai Sulewana yang memiliki 3 titik potensi yaitu PLTA Poso-1, PLTA Poso-2 dan PLTA Poso-3. PLTA Poso 2 telah beroperasi sejak Tahun 2012 dengan Kapasitas 3x65 MW, sementara PLTA Poso-1 dengan kapasitas 4x30 MW dan PLTA Poso-3 dengan kapasitas 4x50 MW. Ketiga pembangkit tersebut direncanakan sebagai pembangkit Peaker dengan total kapasitas 515 MW.

Potensi energi air skala besar yang sedang dalam proses perizinan adalah PLTA Gumbasa dengan kapasitas 45 MW yang akan dikerjakan oleh PT. Gumbasa Energy. Potensi tenaga air skala (mini) yang sedang dibangun adalah PLTM Tomini - 2 dengan kapasitas 2 x1 MW oleh Pikitring Sulmapa dengan kemajuan pembangunan sudah mencapai 78,48 %. Potensi tenaga air di Provinsi Sulawesi Tengah masih banyak yang belum dimanfaatkan terutama potensi skala menengah (PLTM) dan kecil (PLTMH).

Sementara untuk potensi Panas Bumi terdapat di beberapa titik yang tersebar di Kabupaten Poso dan Donggala dengan potensi berkisar antara 20-40 Mwe. Sulawesi Tengah mempunyai intensitas sinar matahari cukup tinggi karena dilalui garis khatulistiwa. Penyinaran sinar matahari rata-rata 64 – 78 %, yang dapat dikembangkan sebagai sumber energi alternative dengan memanfaatkan Solar Home System (SHS) khususnya di daerah pedesaan dan pulau-pulau kecil yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik PLN.

Secara geografis kedudukan Sulawesi Tengah mempunyai garis pantai yang panjang kurang lebih 4.013 km, hal ini merupakan potensi energi yang dapat dimanfaatkan baik untuk pembangkit listrik maupun untuk tenaga penggerak bagi mesin-mesin tertentu. Kecepatan rata-rata angin di Sulawesi Tengah setiap bulannya berkisar antara 2–5 m/s.

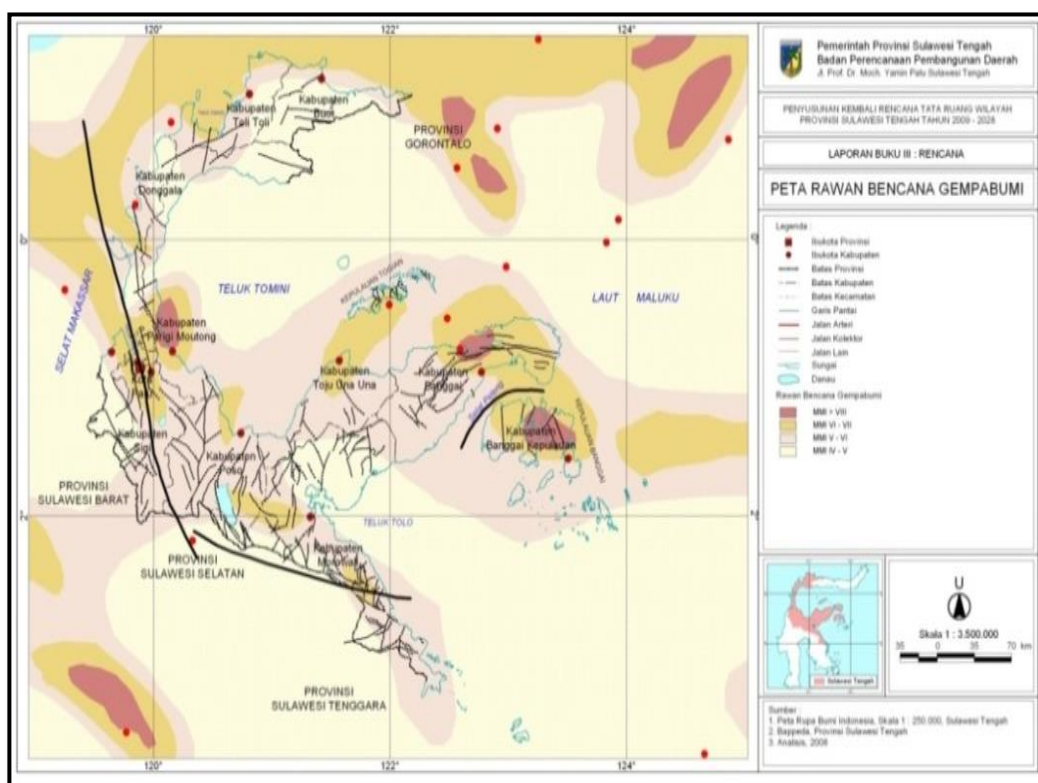
## **6. Wilayah Rawan Bencana**



Sebagian besar wilayah Provinsi Sulawesi Tengah termasuk kategori Kawasan/Zona Rawan Bencana, antara lain kawasan rawan letusan gunung berapi yaitu Gunung Colo yang terletak di Pulau Una-una Kabupaten Tojo Unauna, kawasan rawan gempa yang berskala tinggi di Kota Palu, Kabupaten Banggai, Bangkep, Parigi Moutong, berskala menengah di Kabupaten Sigi, Tolitoli, Morowali, Poso, sementara berskala rendah di Kabupaten Buol dan Morowali.

### Gambar 2.6

## Peta Rawan Bencana Gempa Bumi Provinsi Sulawesi Tengah



Sumber: Badan Informasi Geospasial (BIG) RI

## 6.1 Tataan Tektonik dan Sejarah Kegempaan Palu Sulawesi Tengah

Menurut Daryono (2011) Daerah Palu merupakan salah satu kawasan seismik aktif di Indonesia. Tingginya tingkat aktivitas kegempaan di kawasan ini tidak lepas dari lokasinya yang berada pada zona benturan tiga lempeng tektonik utama dunia, yaitu Indo-

Australia, Eurasia dan Pasifik. Pertemuan ketiga lempeng ini bersifat konvergen dan ketiganya bertumbukan secara relatif mengakibatkan Daerah Sulawesi Tengah dan sekitarnya menjadi salah satu daerah yang memiliki tingkat kegempaan yang cukup tinggi di Indonesia berkaitan dengan aktivitas sesar aktif. Menurut Hamilton (1979), ada beberapa segmentasi sesar yang sangat berpotensi membangkitkan gempa bumi kuat di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Sesar-sesar tersebut adalah: (a) Sesar Palu-Koro yang memanjang dari Palu ke arah Selatan dan Tenggara melalui Sulawesi Selatan bagian Utara menuju ke selatan Bone sampai di laut Banda, dengan panjang patahan sekitar 500 Kilometer (b) Sesar Saddang yang memanjang dari pesisir Pantai Mamuju memotong diagonal melintasi daerah Sulawesi Selatan bagian tengah, Sulawesi Selatan bagian selatan, Bulukumba menuju ke Pulau Selayar bagian Timur, dan (c) Sesar Parit-Parit di Laut Makassar Selatan dan Laut Bone, dan beberapa anak patahan baik yang berada di darat maupun di laut.

Untuk mengetahui tingkat aktivitas kegempaan di Palu, perlu dilakukan kajian sejarah gempabumi dan seismisitas. Berdasarkan distribusi seismisitas, tampak klaster aktivitas gempabumi yang cukup tinggi di sepanjang sesar aktif Palu-Koro hingga memotong Kota Palu. Ditinjau dari kedalaman gempabuminya, aktivitas gempabumi di zona ini tampak didominasi oleh gempabumi kedalaman dangkal antara 0 hingga 60 kilometer, yang merupakan cerminan pelepasan tegangan kerak bumi yang dipicu oleh aktivitas sesar aktif.

Klaster seismisitas gempabumi dangkal ini terkonsentrasi hampir merata baik di lepas pantai maupun di daratan. Klaster seismisitas ini merupakan gambaran dari sangat aktifnya kondisi tektonik di kawasan ini. Kondisi seismisitas ini menunjukkan bahwa daerah Palu dan sekitarnya merupakan daerah yang rawan terhadap gempabumi dan tsunami. Apalagi kondisi seismisitas dan tektonik yang ada mendukung untuk terjadinya gempabumi kuat dengan kedalaman dangkal yang dapat membangkitkan tsunami.

Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah misalnya, tercatat sebagai daerah rawan gempa karena salah satu wilayah yang memiliki aktivitas tektonik tertinggi di Indonesia. Penyebab utamanya tidak lain adalah karena di kota Palu terdapat patahan kerak bumi (sesar) berdimensi cukup besar, dikenal dengan sesar Palu-Koro. Sesar itu memanjang mulai dari Selat Makassar sampai pantai utara Teluk Bone dengan panjang patahan sekitar 500 km. Di Kota Palu, patahan itu melintas dari Teluk Palu masuk ke wilayah daratan, memotong

jantung kota, terus sampai ke Sungai Lariang di Lembah Pipikoro, Donggala (arah selatan Palu). Sesar yang merupakan pertemuan lempeng-lempeng tektonik di bawah perut bumi itu jenis sesar aktif. Sesar itu terus bergerak satu sama lain dan memiliki sifat pergeseran sinistral (pergeseran ke arah kanan) dengan kecepatan geser sekitar 14-17 mm/tahun. Pergeseran pada lempeng-lempeng tektonik yang cukup aktif di sesar Palu Koro membuat tingkat kegempaan di wilayah ini juga dikategorikan cukup tinggi. Catatan seismograf pada Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Palu menyebutkan, hampir setiap menit Palu dan Donggala diguncang gempa.

Hanya saja getarannya kecil-kecil, dan hanya bisa dicatat seismograf. Mengutip ungkapan Kepala BMKG Palu, Mudjianto, dalam sebuah situs internet sekitar September 2010, bahwa kota Palu diguncang gempa 600 kali dalam sebulan dengan kekuatan 3 sampai 6 SR memperlihatkan betapa tingginya aktifitas tektonik di kawasan ini.

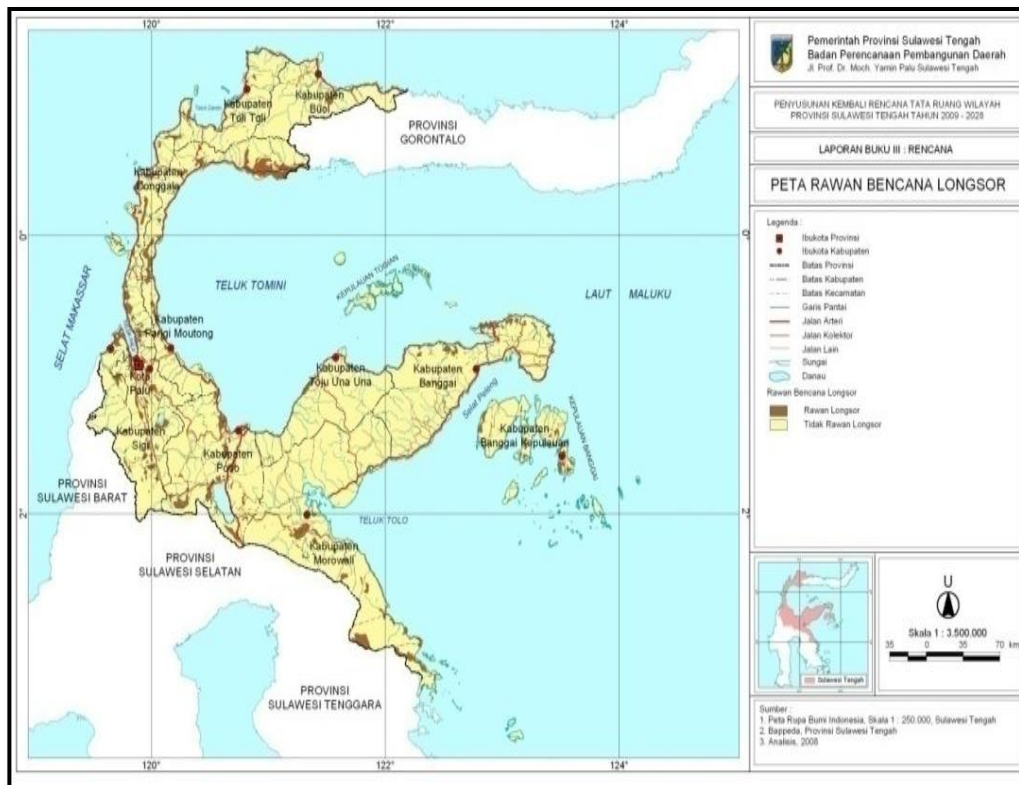
Potensi gempa juga bertambah dengan fakta bahwa pulau Sulawesi dilewati oleh apa yang dikenal dengan formasi Pasific ring of fire yang membentang dari Jepang, Filipina, Maluku dan Sulawesi. Formasi ini berupa sederetan gunung api yang menjadi tempat kurang lebih 450 gunung api aktif maupun tidak aktif atau sekitar 75% dari jumlah gunung api di seluruh dunia. Sekitar 90% gempa dan 80% gempa terbesar terjadi di sepanjang formasi ini.

## **6.2 Kawasan Tanah Longsor dan Likufaksi**

Kawasan tanah longsor berpotensi terjadi di Kabupaten Parigi Moutong, Sigi, Donggala, Poso dan Morowali, sedangkan kawasan rawan banjir di Kabupaten Sigi, Morowali, Banggai dan Kota Palu.

### **Gambar 2.7**

#### **Peta Rawan Bencana Longsor Provinsi Sulawesi Tengah**



Sumber: Badan Informasi Geospasial (BIG) RI.

## 7. Demografi

Penduduk merupakan faktor penting dalam proses pembangunan karena bukan hanya berperan sebagai pelaksana pembangunan, namun juga menjadi sasaran pembangunan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk, pembangunan harus diarahkan pada pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas, serta pengerahan mobilitas sehingga mempunyai ciri dan karakteristik yang bersinergi dengan tujuan pembangunan.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah sejak periode 2010-2021 cenderung meningkat, yakni dari 2.635,01 jiwa pada Tahun 2010 menjadi 3.021.879 jiwa pada Tahun 2021. Sementara tingkat laju pertumbuhan penduduk pada Tahun 2021 sebesar 1,62 persen dengan tingkat kepadatan penduduk pada Tahun 2021 sebesar 48 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Tabel 2.16**

**Perkembangan Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk  
dan Tingkat Kepadatan Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah  
Tahun 2021**

NO.	INDIKATOR	2021
1.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	3.021.879
	- Laki-Laki	1.551.317
	- Perempuan	1.470.562
2.	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,62
3.	Tingkat Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	48

Sumber: BPS, 2022.

Dilihat dari struktur kelompok umur, penduduk Sulawesi Tengah di dominasi oleh kelompok usia produktif. Selanjutnya, perkembangan jumlah penduduk menurut kelompok umur di Provinsi Sulawesi Tengah secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.17**  
**Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4
0 – 4	141.298	135.438	276.736
5 – 9	137.682	132.669	270.351
10 – 14	136.067	127.936	264.003
15 – 19	134.325	125.247	259.572
20 – 24	136.550	127.526	264.076
25 – 29	133.353	124.784	258.137
30 – 34	125.667	118.982	244.649
35 – 39	117.086	111.085	228.171
40 – 44	109.394	104.211	213.605
45 – 49	97.827	93.124	190.951
50 – 54	83.252	78.883	162.135
55 – 59	68.195	64.496	132.691
60 – 64	51.512	48.633	100.145

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
65 – 69	36.813	34.986	71.799
70 – 74	22.417	21.978	44.395
75 +	19.879	20.584	40.463
Tidak Tahu/ <i>Unknow</i>			
Jumlah	1.551.317	1.470.562	3.021.879

Sumber: BPS, 2022.

**2.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

**2.1.1.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

**2.1.1.1.1 Pertumbuhan PDRB**

Tujuan pembangunan ekonomi secara substansi adalah untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang ada dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat memerlukan terciptanya kondisi dasar, yakni: (1) Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (2) Penciptaan sektor ekonomi yang kokoh; serta (3) Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

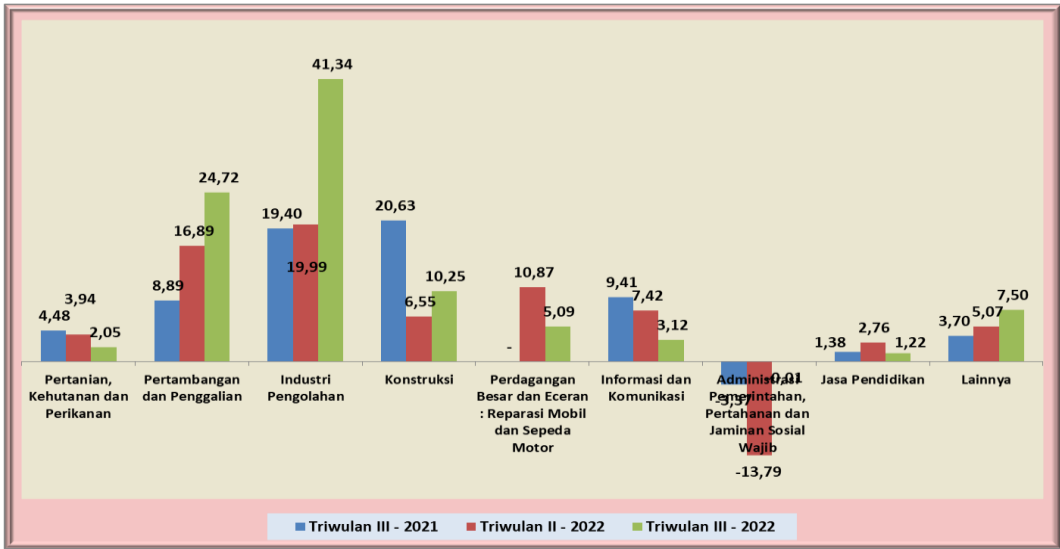
Ekonomi Sulawesi Tengah kumulatif triwulan III tahun 2022 terhadap kumulatif triwulan III tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 13,83 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 33,06 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi yang mendorong ekonomi terjadi pada komponen Ekspor sebesar 30,56 persen.

**1) PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Lapangan Usaha**  
**a. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah Triwulan III-2022 Terhadap Triwulan III-2021 (y-on-y)**

Ekonomi Sulawesi Tengah triwulan III-2022 dibanding triwulan II-2021 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 19,13 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha kecuali Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial yang berkontraksi sebesar 0,01 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 37,23 persen. Sementara itu, Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; serta Pertambangan dan Penggalian yang memiliki peran dominan juga mengalami pertumbuhan masing-

masing sebesar 41,34 persen, 2,05 persen dan 24,72 persen. Struktur PDRB Sulawesi Tengah menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan II I2022 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sulawesi Tengah masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 41,56 persen; diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 15,45 persen; dan Pertambangan dan Penggalian sebesar 15,41 persen. Peranan ketiga lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sulawesi Tengah mencapai 72,42 persen, seperti pada gambar berikut :

**Gambar 2.8**  
**Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (persen).**



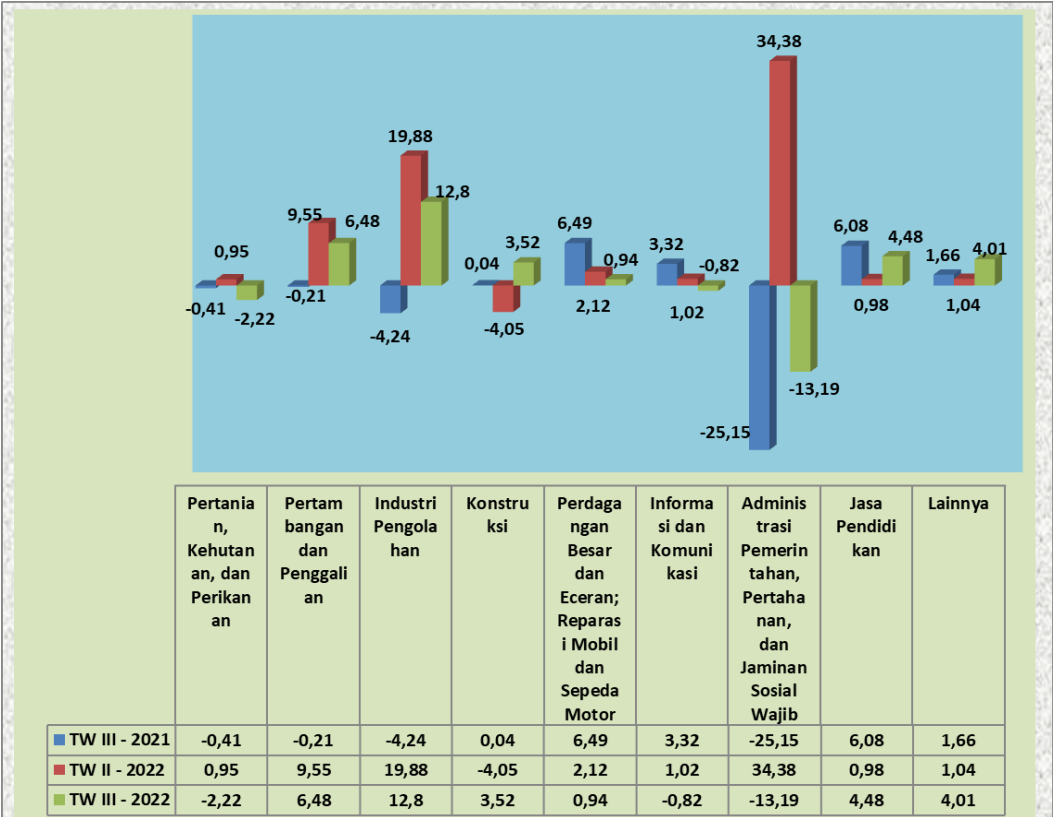
Sumber Data : BRS Prov. Sulteng 2022 (diolah)

**b. *Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah Triwulan III-2022 Terhadap Triwulan II-2022 (q-to-q)***

Ekonomi Sulawesi Tengah triwulan III-2021 dibanding triwulan III-2022 (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 4,94 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha, kecuali Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Informasi dan Komunikasi; serta Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

yang berkontraksi masing-masing sebesar 2,22 persen; 0,82 persen; dan 13,19 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Industri Pengolahan sebesar 12,80 persen. Sementara itu, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang juga memiliki peran dominan mengalami pertumbuhan sebesar 6,48 persen.

**Gambar 2.9**  
**Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) (persen).**



Sumber Data : BRS Prov. Sulteng 2022 (diolah)

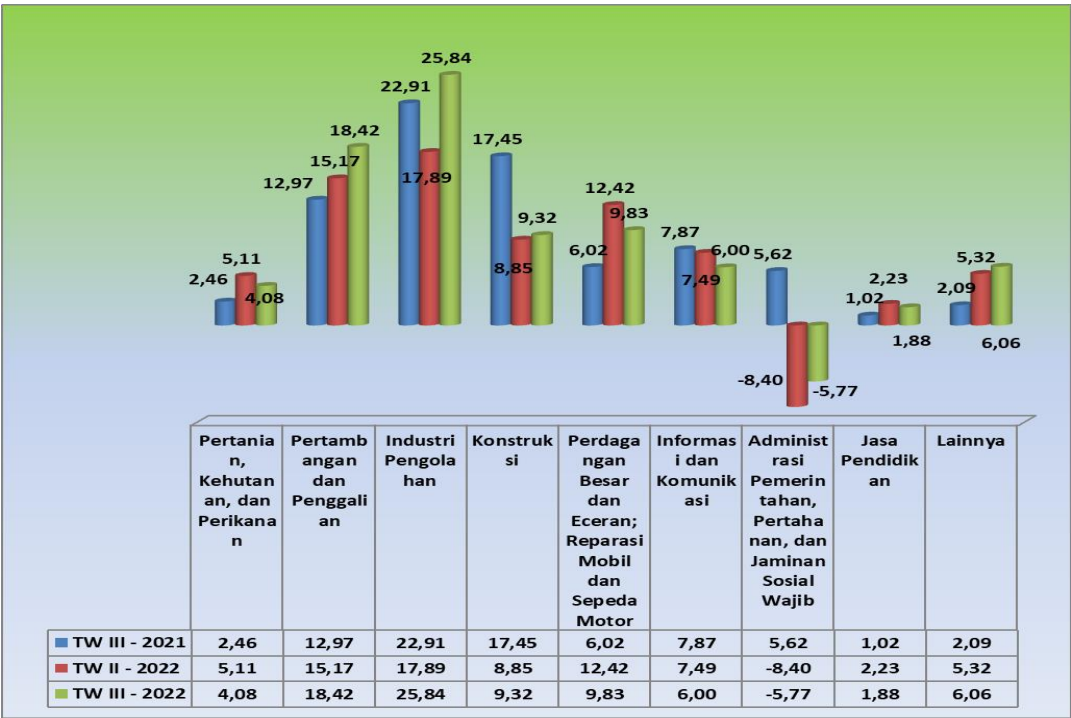
**c. *Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah Kumulatif Triwulan III-2022 Terhadap Kumulatif Triwulan III-2021 (c-to-c)***

Ekonomi Sulawesi Tengah kumulatif triwulan III-2022 dibanding kumulatif triwulan III-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 13,83



persen (c-to-c). Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang terkontraksi sebesar 5,77 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 33,06 persen, diikuti Industri Pengolahan sebesar 25,84 persen; dan Pertambangan dan Penggalian sebesar 18,42 persen.

**Gambar 2.10**  
**Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (c-to-c) (persen)**



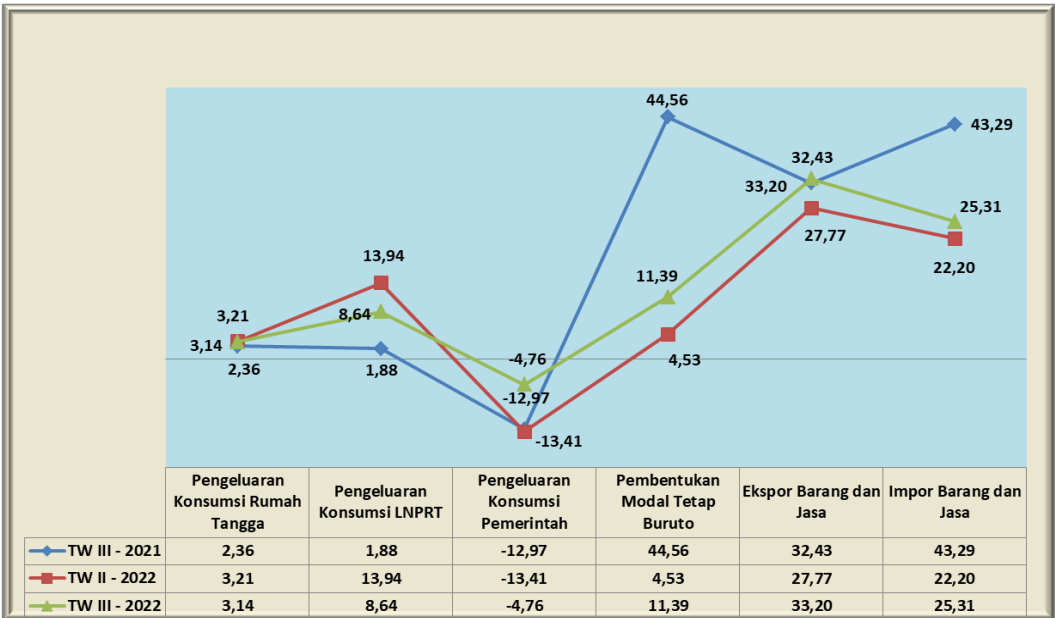
Sumber Data : BRS Prov. Sulteng 2022 (diolah)

**2. PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Pengeluaran**  
**a. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III-2022 Terhadap Triwulan III-2021 (y-on-y)**

Dari sisi pengeluaran, ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah pada triwulan III-2022 dibanding triwulan III-2021 tumbuh sebesar 19,13 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 33,20 persen. Pada periode ini, komponen

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) mengalami kontraksi sebesar 4,76 persen. Struktur PDRB Sulawesi Tengah menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan III tahun 2022 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Sulawesi Tengah masih didominasi oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa yang mencakup lebih dari PDRB Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebesar 109,35 persen. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut-turut adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 47,69 persen dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 27,09 persen. Apabila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah triwulan III tahun 2022, komponen yang memiliki sumbangsih paling besar adalah komponen Ekspor Barang dan Jasa dengan kontribusi sebesar 42,69 persen, diikuti oleh PMTB sebesar 5,26 persen. Sedangkan Impor Barang dan Jasa sebagai komponen pengurang dalam PDRB juga memiliki andil besar yaitu 29,88 persen.

**Gambar 2.11**  
**Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (y-on-y)**  
**(persen)**



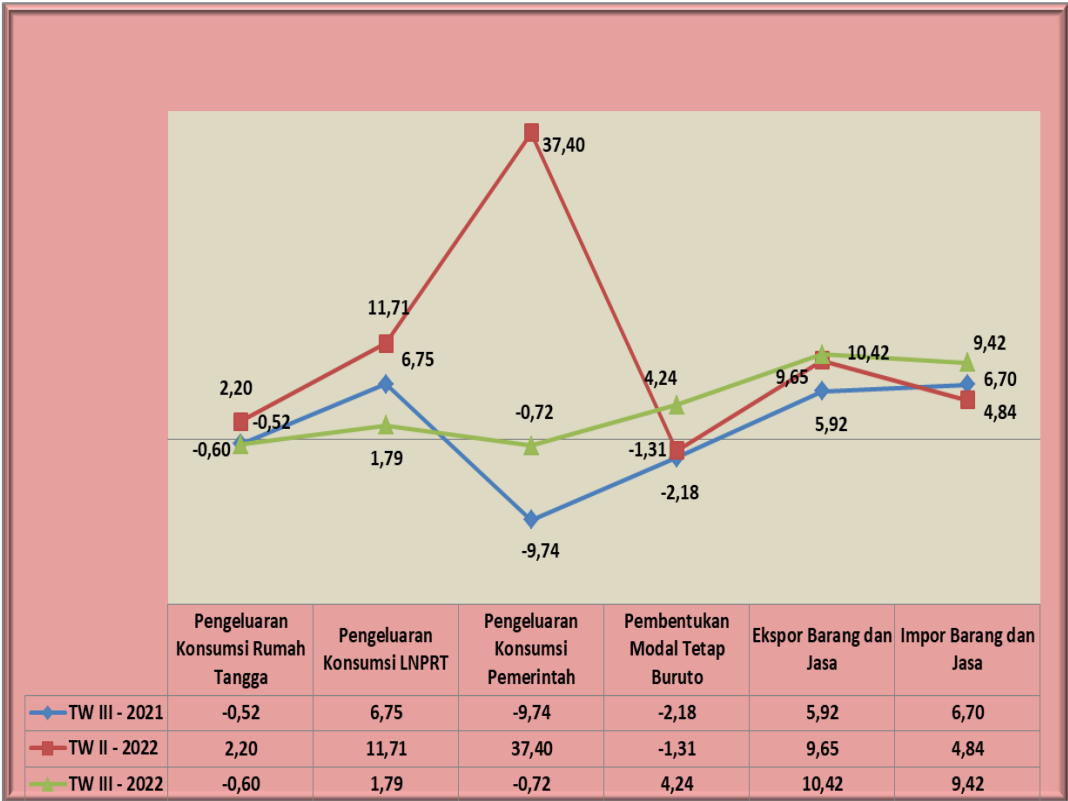
Sumber Data : BRS Prov. Sulteng 2022 (diolah)

**b. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III - 2022 Terhadap Triwulan II-2022 (q-to-q)**

Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah triwulan III-2022 dibanding triwulan II-2022 (q-to-q) tumbuh sebesar 4,94 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan yang terjadi pada semua komponen kecuali Pengeluaran Konsumsi Rumah

Tangga (PK-RT) yang mengalami kontraksi sebesar 0,6 persen dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang mengalami kontraksi sebesar 0,72 persen. Pertumbuhan paling tinggi terjadi pada komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 10,42 persen. Sementara itu pertumbuhan komponen impor barang dan jasa tumbuh sebesar 9,42 persen.

**Gambar 2.12**  
**Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (q-to-q)**  
**(persen)**



Sumber Data : BRS Prov. Sulteng 2022 (diolah)

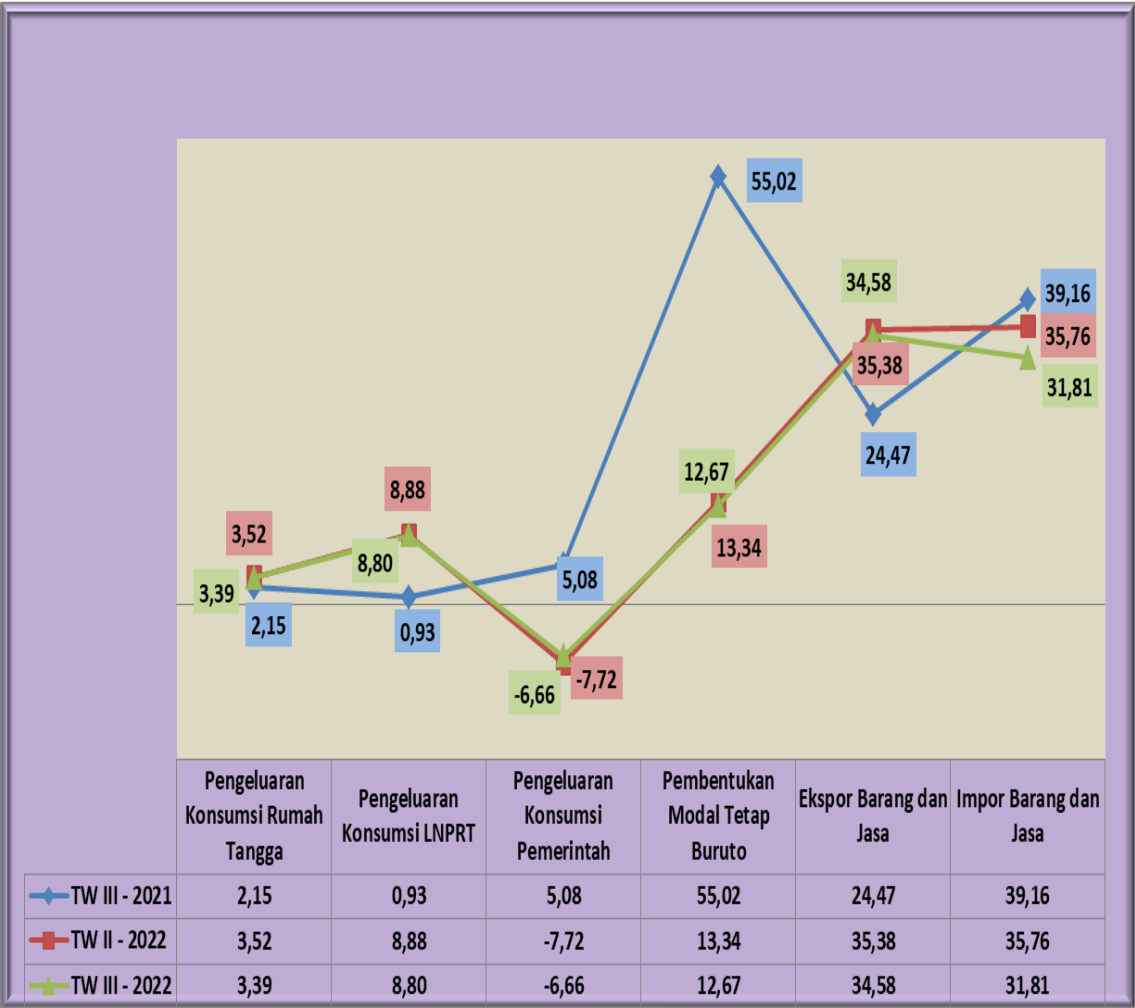
**c. Pertumbuhan Ekonomi Kumulatif Triwulan III-2022 Terhadap Kumulatif Triwulan III -2021 (c-to-c)**

Ekonomi Sulawesi Tengah kumulatif triwulan III-2022 dibanding kumulatif triwulan III -2021 mengalami pertumbuhan sebesar 13,83 persen (c-to-c). Pertumbuhan terjadi pada semua komponen kecuali Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang mengalami kontraksi sebesar 6,66 persen. Komponen pengeluaran yang mengalami pertumbuhan terbesar yaitu Ekspor barang dan jasa sebesar 34,58 persen, kemudian diikuti komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto

sebesar 12,67 persen. Sedangkan untuk komponen Pengeluaran Rumah Tangga dan Lembaga Non Profit mengalami pertumbuhan di bawah 10 persen yaitu 3,39 persen dan 8,80 persen.

Gambar 2.13

Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (c-to-c)  
(persen)



Sumber Data : BRS Prov. Sulteng 2022 (diolah)

d. ***PDRB Sulawesi Tengah Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)***

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Tengah menurut harga berlaku pada triwulan III Tahun 2022 meningkat jika dibandingkan dengan triwulan III tahun 2021 (y-on-y) sebesar 4,76 persen atau dari 63.348,84 miliar rupiah pada triwulan III tahun 2021 menjadi 81.692,22 miliar rupiah, sedangkan Nilai Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) triwulan III Tahun 2022 jika dibandingkan dengan triwulan II tahun 2022 ((q-to-q) menurun dari 82.899,92 miliar rupiah pada triwulan II menjadi 81.692,22 miliar rupiah, atau 1,46 persen.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Tengah menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Lapangan Usaha Industri Pengolahan memberikan kontribusi yang besar, pada PDRB menurut Harga Berlaku triwulan III tahun 2022 sebesar 41,56 persen, sedangkan menurut Harga Konstan tahun 2010 triwulan III 2022 sebesar 35, 12 persen, dan yang paling rendah terdapat pada Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas hanya sebesar 15,78 miliar rupiah.

Sedangkan Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Tengah menurut Harga Konstan pada triwulan III Tahun 2022 meningkat jika dibandingkan dengan triwulan III tahun 2021 (y-on-y) sebesar 16,06 persen atau dari 37.375,49 miliar rupiah pada triwulan III tahun 2021 menjadi 44.526,75 miliar rupiah, sedangkan Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) triwulan III Tahun 2022 jika dibandingkan dengan triwulan II tahun 2022 ((q-to-q) menurut Harga Konstan meningkat dari 42.429,11 miliar rupiah pada triwulan II menjadi 44.526,75 miliar rupiah, atau 4,71 persen, dan yang paling rendah terdapat pada Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas hanya sebesar 15,14 miliar rupiah, namun berdasarkan Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) triwulan III Tahun 2022 jika dibandingkan dengan triwulan II tahun 2022 ((q-to-q) menurut Harga Berlaku menurun dari 82.899,92 miliar rupiah pada triwulan II menjadi 81.692,22 miliar rupiah, seperti pada tabel berikut:

**Tabel 2.18**  
**Nilai PDRB Sulawesi Tengah Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga**  
**Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)**

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	Triw III-2021	Triw II-2022	Triw III-2022	Triw III-2021	Triw II-2022	Triw III-2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b> Pertanian Kehutan- an dan Perikanan	11 438,92	12 842,75	12 617,88	7 671,83	8 007,08	7 829,12
<b>B</b> Pertambangan dan Penggalian	9 133,10	12 698,86	12 592,08	6 232,27	7 300,00	7 772,88
<b>C</b> Industri Pengolahan	22 656,40	35 101,54	33 949,91	11 062,37	13 862,03	15 636,03
<b>D</b> Pengadaan Listrik dan Gas	14,11	15,26	15,78	13,76	14,75	15,14
<b>E</b> Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	53,81	55,27	58,1	35,37	35,63	37,43
<b>F</b> Konstruksi	5 695,17	6 294,90	6 588,00	3 312,11	3 527,51	3 651,53
<b>G</b> Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4 033,07	4 351,77	4 443,67	2 455,43	2 556,44	2 580,39
<b>H</b> Transportasi dan Pergudangan	1 110,19	1 635,26	1 703,96	678,42	913,64	931
<b>I</b> Penyediaan Ako- modasi dan Makan Minum	212,15	242,19	246,16	128,69	144,81	146,52
<b>J</b> Informasi dan Komunikasi	1 688,81	1 751,77	1 741,12	1 331,03	1 383,83	1 372,54
<b>K</b> Jasa Keuangan dan Asuransi	1 082,19	1 133,41	1 211,01	682,26	657,29	694,27
<b>L</b> Real Estat	729,25	805,9	825,48	481,91	519,93	527,53
<b>M N</b> Jasa Perusahaan	99,89	110,98	111,53	64,39	68,93	69,23
<b>O</b> Administrasi Pemerintahan Pertah- anan dan Jaminan Sosial Wajib	2 705,40	3 163,09	2 757,49	1 581,26	1 821,25	1 581,07
<b>P</b> Jasa Pendidikan	1 602,19	1 579,16	1 657,67	993,96	962,86	1 006,04
<b>Q</b> Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	740,01	747,64	784,05	436,74	432,25	446,29
<b>R S T U</b> Jasa Lainnya	354,17	370,19	388,33	213,72	220,89	229,75
<b>PDRB</b>	<b>63 348,84</b>	<b>82 899,92</b>	<b>81 692,22</b>	<b>37 375,49</b>	<b>42 429,11</b>	<b>44 526,75</b>

Sumber Data : BRS Prov. Sulteng 2022 (diolah)

**Tabel 2.19**  
**Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Sulawesi Tengah Menurut lapangan Usaha (persen)**

Lapangan Usaha	Laju pertumbuhan (persen)			Sumber pertumbuhan (persen)		
	Triw III-2022 Terhadap Triw II-2022	Triw III- 2022 Terhadap Triw III- 2021	Kum Triw III- 2022 Terhadap Kum Triw III- 2021	Triw III- 2022 Terhadap Triw II- 2022	Triw III- 2022 Terhadap Triw III- 2021	Kum Triw III- 2022 Terhadap Kum Triw III- 2021
	(q-to-q)	(y-on-y)	(c-to-c)	(q-to-q)	(y-on-y)	(c-to-c)
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b> Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-2,22	2,05	4,08	-0,42	0,42	0,84
<b>B</b> Pertambangan dan Penggalian	6,48	24,72	18,42	1,12	4,12	3,06
<b>C</b> Industri Pengolahan	12,8	41,34	25,84	4,18	12,24	7,62
<b>D</b> Pengadaan Listrik dan Gas	2,63	10,07	9,27	-	-	-
<b>E</b> Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,03	5,81	2,52	-	0,01	-
<b>F</b> Konstruksi	3,52	10,25	9,32	0,3	0,91	0,84
<b>G</b> Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,94	5,09	9,83	0,06	0,33	0,62
<b>H</b> Transportasi dan Pergudangan	1,9	37,23	33,06	0,04	0,68	0,62
<b>I</b> Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,18	13,85	10,43	-	0,05	0,04
<b>J</b> Informasi dan Komunikasi	-0,82	3,12	6	-0,03	0,11	0,21
<b>K</b> Jasa Keuangan dan Asuransi	5,63	1,76	0,73	0,09	0,03	0,01
<b>L</b> Real Estat	1,46	9,47	9,35	0,02	0,12	0,12
<b>M N</b> Jasa Perusahaan	0,43	7,51	7,36	0	0,01	0,01
<b>O</b> Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-13,19	-0,01	-5,77	-0,57	-	-0,26
<b>P</b> Jasa Pendidikan	4,48	1,22	1,88	0,1	0,03	0,05
<b>Q,</b> Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,25	2,19	1,84	0,03	0,03	0,02
<b>R S T U</b> Jasa Lainnya	4,01	7,5	6,06	0,02	0,04	0,03
<b>PDRB</b>	<b>4,94</b>	<b>19,13</b>	<b>13,83</b>	<b>4,94</b>	<b>19,13</b>	<b>13,83</b>

Sumber Data : BRS Prov. Sulteng 2022 (diolah)

Berdsarakan tabel diatas Laju Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah Komulatif triwulan III tahun 2022 terhadap triwulan III tahun 2021 (c-to-c) yang tertinggi sebesar 33,06 persen terdapat pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan, sementara untuk triwulan III tahun 2022 terhadap triwulan III Tahun 2021 (y-on-y) Pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 41,34 persen, sedangkan pada triwulan III tahun 2022 terhadap triwulan II tahun 2022 (q-to-q), Pertumbuhan tertinggi juga terjadi pada lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 12,80 persen.

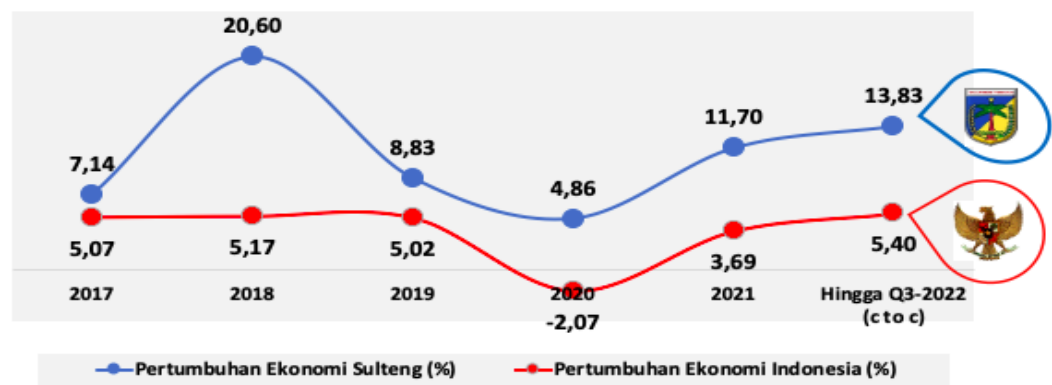
Sementara itu, sumber pertumbuhan PDRB yang tertinggi didominasi oleh lapangan usaha Industri Pengolahan yaitu komulatif Triwulan III tahun 2022 terhadap Triwulan III tahun 2021 (c-to-c)

menyumbang 7,62 persen, dan triwulan III tahun 2022 terhadap triwulan III tahun 2021 (y-on-y), serta triwulan III Tahun 2022 terhadap triwulan II Tahun 2022 (c-to-c) masing-masing 12,24 persen dan 4,18 persen.

Selain itu secara spasial, capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah secara komulatif sampai pada triwulan III tahun 2022 sebesar 13,83 persen, meningkat 3,04 persen jika dibandingkan dengan triwulan I sampai dengan triwulan III tahun 2021 (c-to-c) sebesar 10,79 persen, dalam perspektif nasional pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah diatas pertumbuhan nasional yaitu sebesar 5,40 persen.

Pada wilayah Sulawesi, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah menempati urutan tertinggi dari 5 Provinsi yaitu secara berurut Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo, seperti pada tabel berikut :

**Gambar 2.14**  
**Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah dan Nasional Triwulan III Tahun 2021 dan Triwulan III Tahun 2022**



Sumber Data : BRS Prov. Sulteng 2022 (diolah)

**Tabel 2.20**



Pertumbuhan Ekonomi Provinsi se Sulawesi Triwulan III Tahun

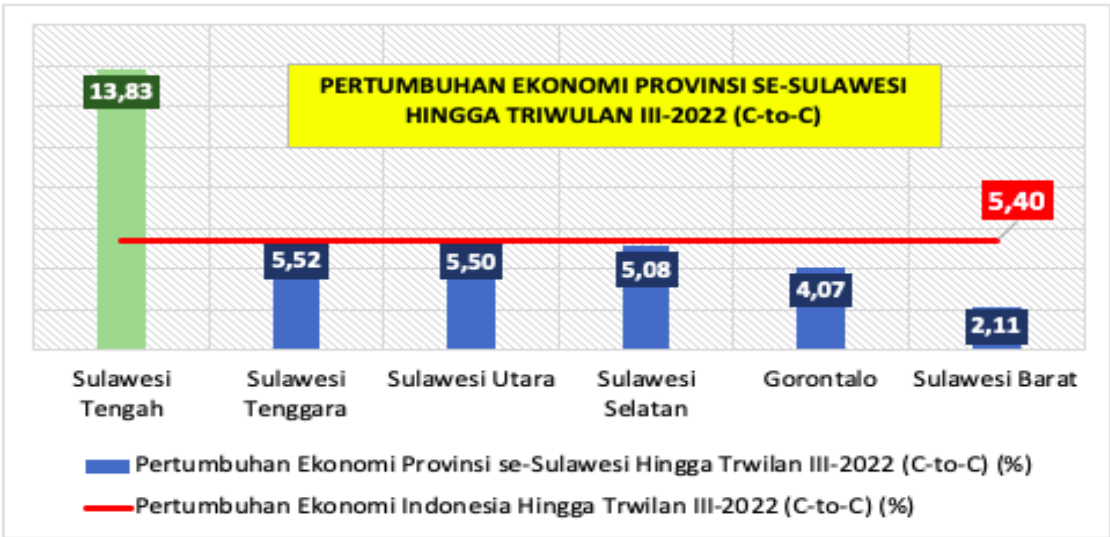
PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI SE-SULAWESI (%)				
PROVINSI SE-SULAWESI	HINGGA TRWULAN III-2021 (C-to-C)	HINGGA TRWULAN III-2022 (C-to-C)	NAIK/ TURUN	KET
Sulawesi Utara	4,45	5,50	1,05	↑
Sulawesi Tengah	10,79	13,83	3,04	↑
Sulawesi Selatan	3,56	5,08	1,52	↑
Sulawesi Tenggara	2,78	5,52	2,74	↑
Gorontalo	1,49	4,07	2,58	↑
Sulawesi Barat	2,10	2,11	0,01	↑

2021 dan Triwulan III Tahun 2022

Sumber Data : BRS Prov. Sulteng 2022 (diolah)

Provinsi Sulawesi Tengah dengan pertumbuhan ekonomi sampai dengan triwulan III tahun 2022 (c-to-c) sebesar 13,83 persen, sehingga dalam perspektif nasional, masih diatas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,40 persen (c-to-c), dan yang paling rendah adalah Provinsi Sulawesi Barat, seperti pada gambar berikut:

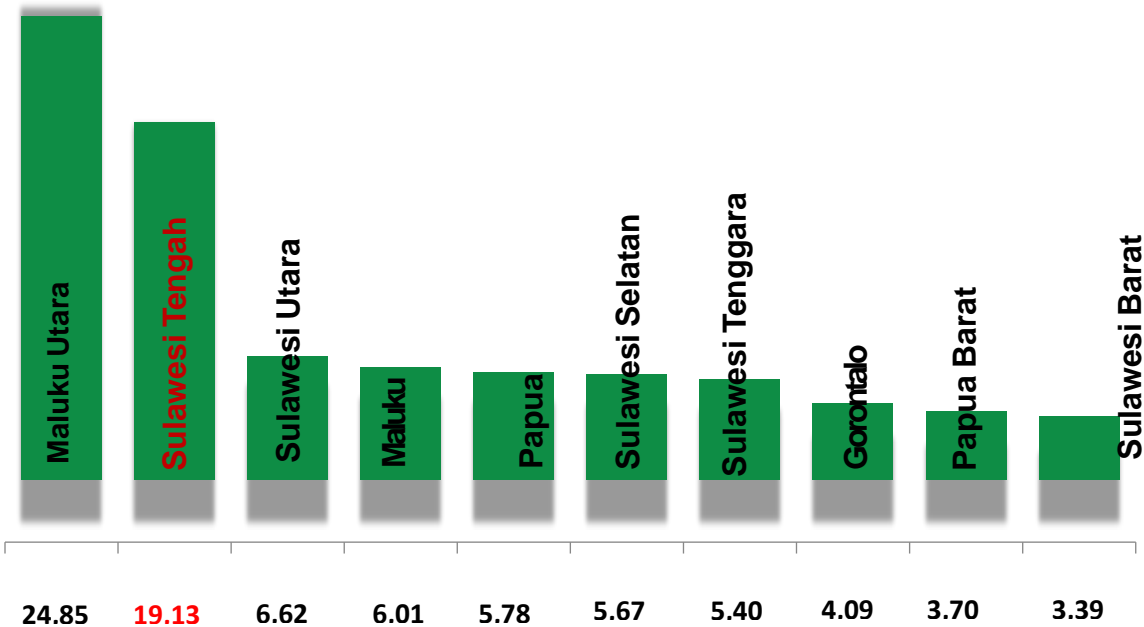
Gambar 2.15  
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi se Sulawesi Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022



Sumber Data : BRS Prov. Sulteng 2022 (diolah)

Sementara pada perspektif kawasan Sulampua pertumbuhan ekonomi sampai dengan triwulan III tahun 2022 (y-on-y), Sulawesi Tengah menempati urutan kedua setelah Provinsi Maluku Utara yaitu sebesar 19,13 persen, dan yang paling rendah adalah Provinsi Sulawesi Barat yaitu sebesar 3,39 persen, seperti pada gambar berikut:

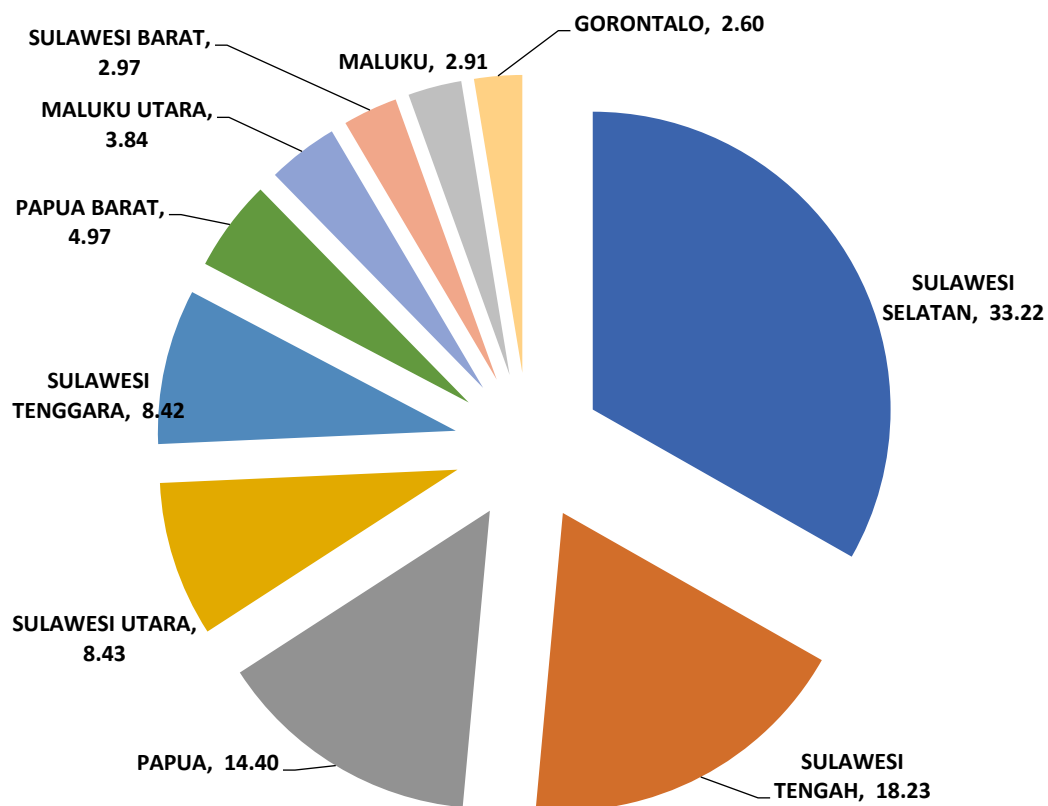
**Gambar 2.16**  
**Pertumbuhan Ekonomi Provinsi se Sulampua Sampai dengan**  
**Triwulan III**  
**(y-on-y) Tahun 2022**



Sumber Data : BRS Prov. Sulteng 2022 (diolah)

Sedangkan distribusi pertumbuhan ekonomi kawasan Sulampua sampai dengan triwulan III tahun 2022, Sulawesi Tengah menempati urutan kedua setelah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 17,56 persen, namun menurun jika dibandingkan dengan triwulan II tahun 2022, yaitu sebesar 18,23 persen, seperti pada gambar berikut:

**Gambar 2.17**  
**Distribusi pertumbuhan Ekonomi kawasan Sulampua Sampai**  
**dengan Triwulan II Tahun 2022**



Sumber Data : BRS Prov. Sulteng 2022 (diolah)

**2.1.1.1.2 PDRB Perkapita**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita memberikan gambaran nilai tambah atas keseluruhan aktivitas ekonomi yang dihasilkan oleh penduduk dalam suatu periode tertentu, atau dengan perkataan lain PDRB perkapita adalah nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Semakin tinggi nilai PDRB perkapita suatu daerah, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. PDRB perkapita merupakan salah satu indikator untuk mengetahui sejauhmana tingkat pembangunan ekonomi suatu daerah dalam lingkup makro, selain itu juga dijadikan sebagai acuan untuk memantau kemampuan daerah dalam menghasilkan produk domestik barang dan jasa.

Salah satu indikator ekonomi untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah biasa menggunakan pengeluaran per kapita, tetapi bisa juga menggunakan pendekatan PDRB per kapita. PDRB per kapita dihitung dengan membagi nilai PDRB suatu wilayah dengan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Pada tahun 2021, PDRB per kapita kabupaten/kota di Sulawesi Tengah cukup beragam. Kabupaten dengan PDRB per kapita

ADHB yang tertinggi adalah Kabupaten Morowali yaitu sebesar 375.097 ribu rupiah per tahun, kemudian diikuti Kabupaten Morowali Utara sebesar 86.716 ribu rupiah per tahun, dan Kota Palu sebesar 64.232 ribu rupiah per tahun.

PDRB Perkapita Provinsi Sulawesi Tengah selama periode tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 menunjukkan trend peningkatan yakni dari Rp66.306,27 ribu pada Tahun 2020 menjadi Rp81.733,04 ribu pada Tahun 2021, Capaian PDRB perkapita tersebut masih rendah dibandingkan dengan PDB perkapita nasional.

Sementara PDRB perkapita berdasarkan harga konstan 2010 pada tahun 2021 Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 49.588,29 ribu rupiah, meningkat jika dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 45.052,32 ribu rupiah, dan PDRB perkapita yang tertinggi di Kabupaten Morowali sebesar 327.058 ribu rupiah, dan yang paling rendah terdapat di Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 22.478 ribu rupiah, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.21**

**PDRB per Kapita ADHB dan ADHK Menurut Kabupaten/Kota  
di Provinsi Sulawesi Tengah (ribu rupiah), 2020–2021**

Kabupaten/Kota	ADHB		ADHK	
	2020 x	2021 x x	2020 x	2021 x x
1	2	3	4	5
Banggai Kepulauan	32.002,00	32.782,00	21.732,00	22.478,00
Banggai	75.697,00	78.581,00	51.235,00	51.510,00
Morowali	388.051,00	375.097,00	274.166,00	327.058,00
Poso	37.757,00	37.109,00	25.491,00	26.269,00
Donggala	39.124,00	39.761,00	27.217,00	28.203,00
Tolitoli	36.995,00	35.999,00	24.608,00	25.469,00
Buol	38.881,00	35.400,00	26.499,00	27.483,00
Parigi Moutong	39.124,00	36.480,00	25.249,00	26.224,00
Tojo Una-Una	34.229,00	37.089,00	22.796,00	23.317,00
Sigi	35.196,00	37.707,00	23.845,00	24.560,00
Banggai Laut	33.707,00	31.966,00	22.843,00	23.677,00
Morowali Utara	92.644,00	86.716,00	67.002,00	72.944,00
Palu	60.892,00	64.232,00	41.516,00	43.460,00
Jumlah Kabupaten/Kota	66.362,02	81.795,34	45.266,17	49.736,41

Sulawesi Tengah	66.306,27	81.733,04	45.052,32	49.588,29
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Sumber: BPS, 2022 (Diolah)

2.1.1.1.3      **Potensi Daerah**

2.1.1.1.3.1 **Pertanian**

Kebijakan pembangunan bidang ekonomi nasional diarahkan pada peningkatan sektor industri dengan didukung oleh sektor pertanian yang tangguh. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kebijakan pembangunan daerah di Sektor Pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis. Pembangunan di sektor pertanian menjadi lebih penting disebabkan sebagian besar wilayah Sulawesi Tengah merupakan daerah pertanian dan mata pencaharian penduduknya adalah bercocok tanam/berkebun dan nelayan, dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.22**

**Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Sub  
Sektor Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 –  
2020**

NO	KOMODITAS	2016	2017	2018	2019	2020
1	Padi (Sawah+Ladang)					
	- Luas Panen (Ha)	228.571	243.070	204.158	186.100,4 4	180.51 0
	- Produksi (Ton)	1.103.16 9	1.144.39 8	954.794	844.904,3 0	810.10 8
	- Produktivitas (Kw/Ha)	48,26	47,08	46,77	45,40	44,88
2	Jagung					
	- Luas Panen (Ha)	62.165,4	78.993,3	93.551,8 0	129.765	130.01 2
	- Produksi (Ton)	317.669	374.322	386.606	564.404	568.47 3
	- Produktivitas (Kw/Ha)	51,10	47,39	41,33	43,49	43,72
3	Kedelai					
	- Luas Panen (Ha)	8.867,8	3.450,8	21.107,2 0	5.594	2.835
	- Produksi (Ton)	15.358	4.962	26.573	5.336	3.654
	- Produktivitas (Kw/Ha)	17,32	14,38	12,59	9,54	12,89

NO	KOMODITAS	2016	2017	2018	2019	2020
4	Kacang Tanah					
	- Luas Panen (Ha)	3.246,8	2.549,9	2.803,40	2.085	1.960
	- Produksi (Ton)	4.410	2.766	3.432	2.196	2.099
	- Produktivitas (Kw/Ha)	13,58	10,85	12,24	10,53	10,71
5	Kacang Hijau					
	- Luas Panen (Ha)	944,7	586,2	698,30	469	460
	- Produksi (Ton)	780	780	573	68	373
	- Produktivitas (Kw/Ha)	8,25	8,25	8,20	1,46	8,11
6	Ubi Kayu					
	- Luas Panen (Ha)	1.808,5	1.991,5	1.993,10	1.687	1.626
	- Produksi (Ton)	34.970	54.225	58.426	46.667	40.046
	- Produktivitas (Kw/Ha)	193,37	272,28	293,13	276,69	246,29
7	Ubi Jalar					
	- Luas Panen (Ha)	1.102,7	1.215,2	1.314,50	1.087	1.311
	- Produksi (Ton)	15.684	15.464	19.791	19.072	14.857
	- Produktivitas (Kw/Ha)	142,23	127,25	150,60	175,47	113,33

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2021.

Perkembangan produksi tanaman padi di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2016-2018 cenderung meningkat, sedangkan pada Tahun 2019-2020 produksinya mengalami penurunan yaitu Pada Tahun 2019 sebesar 844.904 ton, sedangkan pada tahun 2020 hanya mencapai 810.108 ton pada tahun 2020 produksi tertinggi yaitu komoditi padi dengan produksi mencapai 810.108 ton dan luas panen 180.510 ha dengan tingkat produktivitas sebesar 44,88 kw/ha, menyusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah komoditi jagung dengan produksi mencapai 568.473 ton dan luas panen 130.012 ha dengan tingkat produktivitas sebesar 43,72 kw/ha, dan komoditi ubi kayu dengan produksi mencapai 40.046 ton dan luas panen 1.626 ha dengan tingkat produktivitas sebesar 246,29 kw/ha. Sedangkan produksi terendah yakni komoditi kacang hijau dengan produksi hanya 373 ton dan luas panen 460 ha dengan tingkat produktivitas sebesar 8,11 kw/ha, sehingga kontribusi sub sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB tahun 2020 mencapai 4,05 persen, kalau dibandingkan periode 2018-2019 cenderung meningkat, namun jika dibandingkan pada tauhn 2016-2017 kontribusinya menurun.

Pada Sub Sektor Tanaman Hortikultura kontribusinya terhadap PDRB pada tahun 2020 mencapai 2,64 persen cenderung meningkat dibandingkan pada periode 2018-2019, namun jika dibandingkan

periode tahun 2016-2017 cenderung menurun, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.23**  
**Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Sub**  
**Sektor**

Tanaman Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020

NO.	KOMODITAS	2016	2017	2018	2019	2020
1	Bawang Merah					
	- Produktivitas (Ku/ha)	46,46	49,89	57,49	47,82	54,30
	- Luas Panen (Ha)	1,506	1,718	1,333	1,361	1,055
	- Produksi (Ton)	6.997	8.572	7.663	6.508	5.725
2	Cabai Besar					
	- Produktivitas (Ku/ha)	54,54	54,31	67,93	62,55	74,34
	- Luas Panen (Ha)	872	1.230	1.105	854	974
	- Produksi (Ton)	4.756	6.680	7.507	5.342	7.238
3	Cabai Rawit					
	- Produktivitas (Ku/ha)	57,77	72,32	68,34	61,77	60,88
	- Luas Panen (Ha)	2.014	2.935	3.809	3.664	4.113
	- Produksi (Ton)	11.635	21.226	26.032	22.632	25.042
4	Kentang					
	- Produktivitas (Ku/ha)	86,02	179,88	129,43	122,03	119,66
	- Luas Panen (Ha)	66	108	112	106	67
	- Produksi (Ton)	568	1.943	1.450	1.294	802
5	Jahe					
	- Produktivitas (Kg/M <sup>2</sup> )	2,72	3,89	3,85	2,66	3,39
	- Luas Panen (M <sup>2</sup> )	179.202	209.861	212.027	112.399	100.563
	- Produksi (Kg)	486.666	817.221	815.911	299.388	340.830
6	Jeruk					
	- Produktivitas (Ku/Phn)	0,97	1,23	1,32	1,17	0,44
	- Tanaman Menghasilkan (Phn)	22.808	10.779	29.369	33.589	115.160
	- Produksi (Ku)	22.047	13.284	38.910	39.242	50.328
7	Pisang					
	- Produktivitas (Ku/Rumpung)	0,98	0,57	0,48	0,54	0,78
	- Tanaman Menghasilkan (Rumpung)	310.656	252.539	235.576	456.614	313.596
	- Produksi (Ku)	305.946	144.792	111.919	244.881	244.221
8	Durian					
	- Produktivitas (Ku/Phn)	1,92	1,72	1,29	1,01	1,01
	- Tanaman Menghasilkan (Phn)	91.791	78.420	102.423	249.441	191.876
	- Produksi (Ku)	176.662	134.933	131.879	252.881	193.819
9	Krisan					
	- Produktivitas (Tangkai/M <sup>2</sup> )	29,10	2,87	2,90	3,94	2,76
	- Luas Panen (M <sup>2</sup> )	3.618	17.004	11.299	2.655	1.527
	- Produksi (Tangkai)	105.296	48.841	32.789	10.469	4.219
10	Anggrek					
	- Produktivitas (Tangkai/M <sup>2</sup> )	55,61	8,01	4,29	8,05	3,59
	- Luas Panen (M <sup>2</sup> )	1.338	7.471	6.311	6.988	6.699
	- Produksi (Tangkai)	74.400	59.813	27.077	56.237	24.064

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2021.

Dilihat pada tabel diatas bahwa Cabai Rawit merupakan produksi komoditi di Provinsi Sulawesi Tengah yang tertinggi, pada periode 2019-2020 cenderung meningkat, namun jika dibandingkan pada Tahun 2018 produksinya mengalami penurunan yaitu dengan jumlah sebesar 26.032 ton, sedangkan pada tahun 2020 hanya mencapai 25.042 ton, sedangkan luas panen pada tahun 2020 seluas 4.113 ha, sementara tingkat produktivitas mencapai 60,88 Ku/Ha.

2.1.1.1.3.2 Perkebunan

Perkembangan usaha perkebunan di Sulawesi Tengah menunjukkan peningkatan yang cukup nyata dengan beberapa komoditas andalan seperti : kakao, cengkeh, dan kelapa. Disamping



itu terdapat juga beberapa komoditi potensi lainnya seperti: kemiri, pala dan Vanili.

Komoditi tanaman perkebunan yang merupakan komoditi perdagangan mempunyai peranan strategis, karena disamping merupakan sumber penghasilan devisa negara, juga mencakup rangkaian kegiatan produksinya termasuk peluang terbukanya lapangan kerja yang cukup menyerap banyak tenaga kerja.

Sub Sektor Perkebunan telah memberikan andil yang cukup baik dalam perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah. Pada Tahun 2021 Sub Sektor Perkebunan berkontribusi sebesar 11 persen terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah, ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel 2.24**

**Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan  
Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2020 – 2021**

NO	KOMODITI	2020	2021
1	2	3	4
1.	<b>Kakao</b>		
	- Luas Panen (Ha)	279.217	272.325,6
	- Produksi (Ton)	127.206,86	127.206,86
2.	<b>Kelapa</b>		
	- Luas Panen (Ha)	214.591	143.135,17
	- Produksi (Ton)	191.541,91	195.160,06
3.	<b>Kopi</b>		
	- Luas Panen (Ha)	9.951	10.339,50
	- Produksi (Ton)	2.593,57	3.548,64
4.	<b>Cengkeh</b>		
	- Luas Panen (Ha)	76.347	77.039,9
	- Produksi (Ton)	19.430,90	23.308,5
5.	<b>Lada</b>		
	- Luas Panen (Ha)	3.098	3.098
	- Produksi (Ton)	257,40	363,5
6.	<b>Pala</b>		
	- Luas Panen (Ha)	21.752	21.689,9
	- Produksi (Ton)	602,60	991,2
7.	<b>Jambu Mete</b>		
	- Luas Panen (Ha)	13.709	13.483,5
	- Produksi (Ton)	2.213,20	2.591,8
8.	<b>Karet</b>		
	- Luas Panen (Ha)	7.763	7.828
	- Produksi (Ton)	4.306,33	4.747,30
9.	<b>Vanili</b>		
	- Luas Panen (Ha)	654	773,7
	- Produksi (Ton)	22,00	41,00

NO	KOMODITI	2020	2021
1	2	3	4
10.	<b>Kelapa Sawit</b>		
	- Luas Panen (Ha)	144.793	214.143,41
	- Produksi (Ton)	272.275,15	310.435,97
11.	<b>Sagu</b>		
	- Luas Panen (Ha)	3.245	3.253,6
	- Produksi (Ton)	940,8	903
12.	<b>Kemiri</b>		
	- Luas Panen (Ha)	5.456	5.622,5
	- Produksi (Ton)	1.211,0	1.205,6

Sumber: BPS 2022.

Selama periode Tahun 2020-2021 perkembangan produksi komoditi tanaman perkebunan di Sulawesi Tengah rata-rata mengalami peningkatan. Komoditi perkebunan yang memiliki produksi terbesar pada Tahun 2021 yaitu kelapa, kelapa sawit, kakao, dan cengkeh.

Pada tahun 2021 Produksi tanaman kelapa sawit mencapai 310.435,97 ton dengan luas panen 214.143,41 ha, sementara produksi Kelapa pada Tahun 2021 mencapai 195.160,06 ton dengan luas panen 143.135,17 ha, , produksi kakao sebanyak 127.206,86 ton dengan luas panen 272.325,6 ha, dan produksi cengkeh sebesar 23.308,5 ton dengan luas panen 77.039,9 ha.

**2.1.1.1.3.3 Peternakan**

Jenis ternak yang diusahakan di Sulawesi Tengah terdiri dari: (a) Ternak Besar meliputi: sapi, kerbau dan kuda; (b) Ternak kecil meliputi: kambing, domba dan babi; (c) Ternak unggas meliputi: ayam ras, ayam kampung dan itik.

**Tabel 2.25**

**Populasi Ternak Menurut Jenisnya di Provinsi Sulawesi Tengah,  
Tahun 2017-2021**

NO.	KOMODITI	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Ternak Besar</b>					
	- Kerbau	3.884	3.409	2.421	2.876	3.086
	- Sapi	353.486	267.483	358.496	402.191	434.070
	- Kuda	1.661	1.410	1.340	1.094	1.099
2.	<b>Ternak Kecil</b>					
	- Kambing	445.337	433.335	531.533	555.399	588.009
	- Domba	7.351	7.429	7.922	10.942	12.538
	- Babi	230.356	261.820	265.719	229.154	222.268
3.	<b>Ternak Unggas</b>					
	a. Ayam Ras	13.852.266	11.798.788	12.959.955	8.562.221	9.246.048
	- Petelur	2.081.518	557.159	645.025	1.299.790	1.263.744
	- Pedaging	11.770.748	11.241.629	12.314.930	7.262.431	7.982.304
	b. Ayam Kampung	4.477.451	4.400.735	5.250.361	4.711.438	5.118.732
	c. Itik	792.469	873.446	912.818	1.230.712	1.244.398

Sumber: BPS, 2022.

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa, selama periode tahun 2017-2021, jenis ternak besar mengalami peningkatan populasi walaupun pada jenis sub ternak kuda yang cenderung menurun, namun pada jenis ternak kecil dan ternak unggas pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding pada tahun 2021.

Pada Tahun 2021, populasi terbanyak untuk kategori jenis ternak besar yaitu sapi dengan jumlah populasi sebanyak 434.070 ekor, mengalami peningkatan dibanding pada tahun 2020 berjumlah 402.191 ekor, Sementara untuk kategori jenis ternak kecil populasi terbanyak yaitu kambing dengan jumlah 588.009 ekor, mengalami peningkatan dari tahun 2020 berjumlah 555.399 ekor. Untuk kateori jenis ternak unggas populasi terbanyak yaitu ayam ras pedaging dengan jumlah populasi mencapai 7.982.304 ekor, namun jika dibandingkan dengan populasi pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan jumlah 7.262.431 ekor.

**2.1.1.1.3.4 Kelautan dan Perikanan**

Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu sektor unggulan dari 5 sektor unggulan Provinsi Sulawesi Tengah. Pada Tahun 2020 Sektor Perikanan memberi konstribusi sebesar 6 persen terhadap perekonomian Sulawesi Tengah.

Pada Tahun 2020 jumlah produksi perikanan budidaya sesuai data sementara mencapai 960.460,28 ton, menurun dibanding Tahun 2019 yang produksinya hanya sebesar 964.509,04 ton. Sementara produksi Perikanan Tangkap pada Tahun 2020 mencapai 201.101,80 ton meningkat dari Tahun 2019 yang sebesar 196.519,30 ton.

Perkembangan produksi perikanan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.26**

**Perkembangan Produksi Perikanan Menurut Jenis Usaha  
Di Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016 – 2020\* (Ton)**

NO.	JENIS USAHA PERIKANAN	2016	2017	2018	2019	2020*
1.	<b>Perikanan Budidaya</b>	<b>1.339.013,78</b>	<b>1.059.008,70</b>	<b>918.186,40</b>	<b>964.509,04</b>	<b>960.460,28</b>
	a. Jaring Apung Laut	61,62	736,90	1.885,82	728,47	727,17
	b. Jaring Apung Tawar		63,00	63,58	61,02	61,43
	c. Jaring Tancap Tawar	475,70	482,80	480,53	473,42	475,83
	d. Karamba	26,29	27,00	24,71	25,09	25,50
	e. Kolam	7.727,94	4.542,64	18.014,59	2.976,29	3.490,26
	f. Laut Lainnya		1,90	5.519,02	22,95	-
	g. Minapadi Sawah	26,69	51,00	12,00	25,00	86,45
	h. Rumput Laut	1.208.044,74	948.163,60	763.704,45	922.897,05	918.788,40
	i. Tambak	122.650,80	104.939,86	128.481,71	37.299,76	36.805,24
2.	<b>Perikanan Tangkap</b>	<b>212.330,60</b>	<b>174.964,00</b>	<b>171.115,00</b>	<b>196.519,30</b>	<b>201.101,80</b>
	a. Laut	210.140,20	174.049,30	168.550,50	193.605,20	198.240,60
	b. Perairan Umum	2.190,40	914,70	2.564,50	2.914,10	2.861,20

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulteng, 2021.

Kekayaan keanekaragaman hayati (biodiversity) yang cukup besar juga dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Tengah, karena adanya ekosistem pesisir dan pulau kecil seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, yang sangat luas dan beragam. Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sulawesi Tengah cukup beragam seperti ekosistem terumbu karang seluas 186.766,71 Ha, padang lamun seluas 27.406,48 Ha dan mangrove seluas 33.876,29 Ha yang merupakan sumberdaya hayati potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, wilayah perairan Sulawesi Tengah memiliki letak strategis yang berada di garis khatulistiwa dengan posisi di tengah Pulau Sulawesi.

Aspek keaneragaman sumberdaya hayati, kawasan perairan sangat subur dengan keberadaan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang cukup lengkap, dimana kawasan Sulawesi Tengah letaknya di sekitar Khatulistiwa dan merupakan jantung dari segitiga karang dunia (World Coral Triangle) yang merupakan pusat keberadaan sumberdaya terumbu karang dunia. Posisi yang dianggap sangat menguntungkan, karena memberikan nilai tambah untuk pengembangan sosial ekonomi wilayah ke depan.

**2.1.1.1.3.5 Kehutanan**

Perkembangan produksi hasil hutan di Sulawesi Tengah selama periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuatif.

Jenis hasil hutan Kayu Bulat pada Tahun 2021 mencapai 84.441,35\* m3 meningkat di banding Tahun 2020 yang produksinya sebanyak 65.019,12 m3. Sementara produksi Kayu Gergajian pada Tahun 2021 mencapai 28.771,89\* m3 meningkat dibanding Tahun 2020 sebesar 24.465,17 m3. Namun Hasil jenis hutan lainnya yaitu rotan dengan jumlah produksi pada Tahun 2020 mencapai 1.864,20 ton meningkat dibanding Tahun 2019 yang produksinya mencapai 1.040,00 ton. Untuk jenis hasil hutan Damar produksinya pada Tahun 2020 sebanyak 335,0 ton menurun dibanding Tahun 2019 yang produksinya mencapai 440,0 ton, sementara pada tahun 2021 masih nol, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.27**  
**Perkembangan Produksi Hasil Hutan Menurut Jenisnya**  
**Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2017-2021**

No .	Jenis Hasil Hutan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kayu Bulat (m <sup>3</sup> )	46.681,61	76.255,49	111.091,49	65.019,12	84.441,35*
2.	Kayu Gergajian (m <sup>3</sup> )	17.434,06	37.658,75	25.728,64	24.465,17	28.771,89*
3.	Rotan (ton)	4.620,00	1.380,00	1.040,00	1.864,20	-
4.	Damar (ton)	440	600	440	335	-

Sumber : BPS, 2021 dan Data Statistik Dinas Kehutanan 2022

**2.1.1.1.4 Laju Inflasi**

Inflasi yang diukur berdasarkan perubahan indeks harga di tingkat konsumen (IHK) yaitu indeks yang mengukur rata-rata perubahan harga antar waktu dari satu paket jenis barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat yang tinggal di perkotaan, sebagai proksi pengeluaran dalam suatu periode tertentu.

**A. Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi Gabungan Dua Kota di Provinsi Sulawesi Tengah**

Pada bulan Desember 2022 inflasi gabungan dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0,80 persen, sedangkan inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun dari Desember 2021 hingga Desember 2022 sebesar 5,96 persen.

Dari dua kota IHK di Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu tercatat mengalami inflasi sebesar 0,80 persen dengan inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun sebesar 5,81 persen. Sementara Kota Luwuk pada bulan Desember mengalami inflasi sebesar 0,82 persen dengan inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun sebesar 6,62 persen.

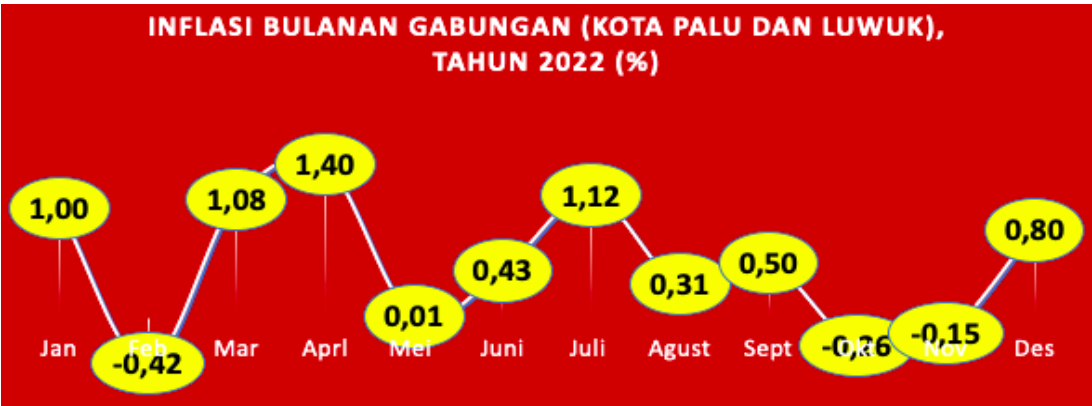
Pada bulan Desember 2022 inflasi dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0,80 persen, Dari dua kota IHK di Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu tercatat mengalami Inflasi sebesar 0,80 persen sementara Kota Luwuk mengalami Inflasi sebesar 0,82 persen.

Inflasi pada bulan Desember 2022 dipengaruhi oleh naiknya indeks harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,95 persen, diikuti oleh kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya (1,00 persen), kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,38 persen), kelompok transportasi (0,20 persen), kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,08 persen), kelompok pendidikan (0,03 persen), serta kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,03 persen).

Sedangkan penurunan indeks harga terjadi pada kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,58 persen, diikuti oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,06 persen), kelompok kesehatan (0,05 persen), serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (0,05 persen).

Gambar 2.18

Laju Inflasi Bulanan Gabungan 2 Kota Tahun 2022



Sumber Data : BRS Prov. Sulteng 2022 (diolah)

Tabel 2.28

Laju Inflasi Bulanan Gabungan 2 Kota Tahun 2022

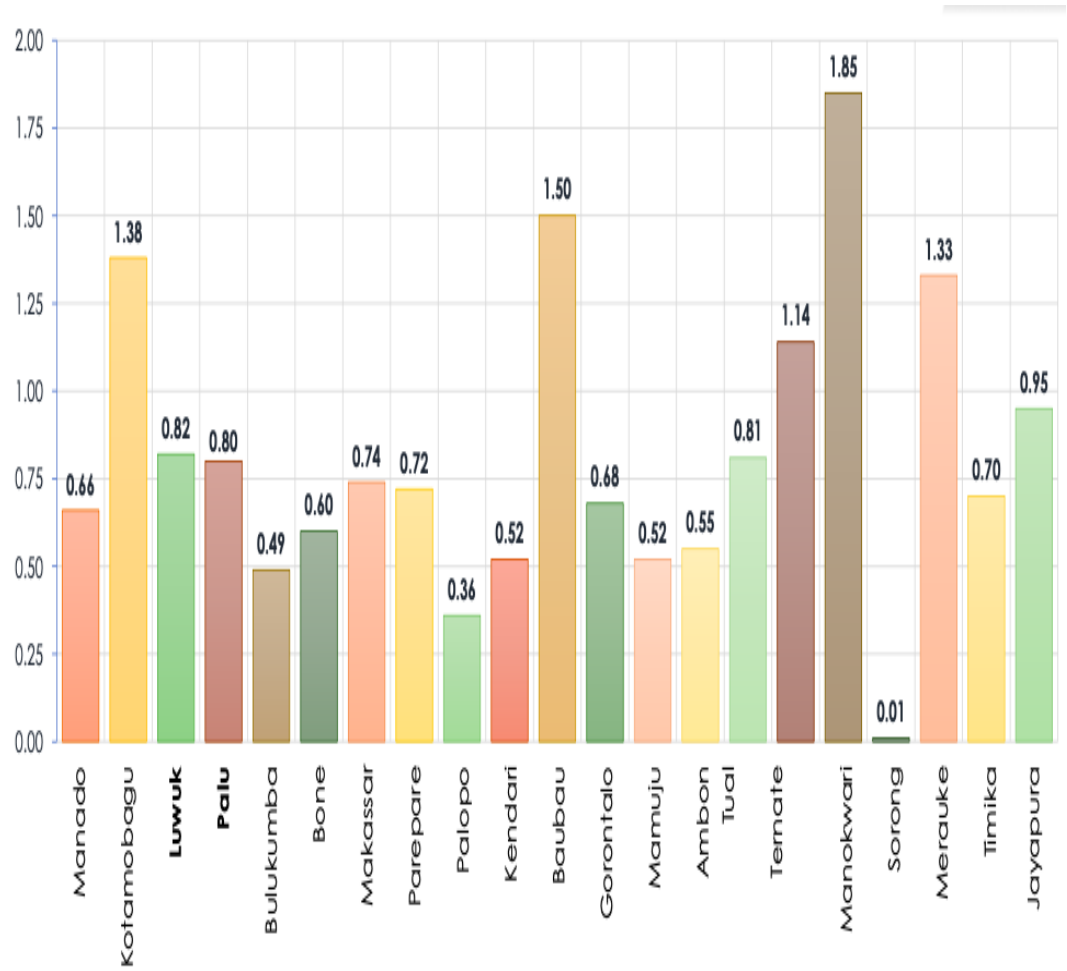
NO.	URAIAN	WILAYAH		
-----	--------	---------	--	--

		KOTA PALU	KOTA LUWUK	GABUNGAN 2 KOTA	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Inflasi Tahun Kalender	5,81	6,62	5,96	
2.	Inflasi Tahun ke Tahun	5,81	6,62	5,96	

Sumber Data : BRS Prov. Sulteng 2022 (diolah)

Dari 90 kota pantauan IHK nasional, tercatat seluruhnya mengalami inflasi. Kota Palu menempati urutan ke-27 inflasi di tingkat nasional dan urutan ke-9 di kawasan Sulampua, sementara Kota Luwuk menempati urutan ke-25 inflasi di tingkat nasional dan urutan ke-7 di kawasan Sulampua.

**Gambar 2. 19**  
**Perbandingan Inflasi di Kawasan Sulawesi dan Sulampua**  
**Desembar Tahun 2022**



Sumber Data : BRS Prov. Sulteng 2022 (diolah)

Tabel 2.29



**Inflasi Bulanan dan Komoditas Penyumbang Inflasi Gabungan  
Bulan Desember 2022 (2018=100)**

Rincian		Inflasi M o M (%)	Inflasi Y o Y (%)
	<b>Inflasi Umum</b>	<b>0,80</b>	<b>5,96</b>
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	2,95	4,14
2	Pakaian dan Alas Kaki	-0,58	1,54
3	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	-0,06	8,96
4	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,08	4,92
5	Kesehatan	-0,05	0,14
6	Transportasi	0,20	14,64
7	Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0,05	0,03
8	Rekreasi, Olahraga dan Budaya	1,00	4,43
9	Pendidikan	0,03	0,91
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,03	3,82
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,38	6,52

Sumber Data : BRS Prov. Sulteng 2022 (diolah)

Pada bulan Desember 2022, indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah, inflasi bulanan gabungan dan komoditas penyumbang inflasi (y-on-y) yang tertinggi pada kelompok transportasi dengan nilai indeks sebesar 14,64 persen, dan yang paling rendah dengan nilai indeks sebesar 0,03 persen terdapat pada kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan.

Beberapa komoditas yang memiliki andil terhadap inflasi antara lain ikan selar (0,20 persen), beras (0,11 persen), bawang merah (0,07 persen), ikan cakalang (0,05 persen), kangkung (0,03 persen), ikan malalugis (0,03 persen), angkutan udara (0,02 persen), daging ayam ras (0,02 persen), rokok putih (0,02 persen), dan jagung manis (0,02 persen).

Sedangkan beberapa komoditas yang memiliki andil negatif terhadap inflasi antara lain blus wanita (0,01 persen), kerudung/jilbab (0,01 persen), semen (0,01 persen), cabai merah (0,01 persen), sawi hijau (0,01 persen), bahan bakar rumah tangga (0,01 persen), sandal kulit wanita (0,005 persen), daging sapi (0,004 persen), rok luar (0,004 persen), dan terong (0,004 persen).

**Tabel 2.30**  
**Andil Inflasi Komoditas Gabungan 2 Kota Desember 2022**

No.	Komoditas	Andil (%)	No.	Komoditas	Andil (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ikan Selar	0,20	1	Blus Wanita	-0,01
2	Beras	0,11	2	Kerudung/Jilbab	-0,01
3	Bawang Merah	0,07	3	Semen	-0,01
4	Ikan Cakalang	0,05	4	Cabai Merah	-0,01
5	Kangkung	0,03	5	Sawi Hijau	-0,01
6	Ikan Malalugis	0,03	6	Bahan Bakar Rumah Tangga	-0,01
7	Angkutan Udara	0,02	7	Sandal Kulit Wanita	-0,005
8	Daging Ayam Ras	0,02	8	Daging Sapi	-0,004
9	Rokok Putih	0,02	9	Rok Luar Model Biasa	-0,004
10	Jagung Manis	0,02	10	Terong	-0,004

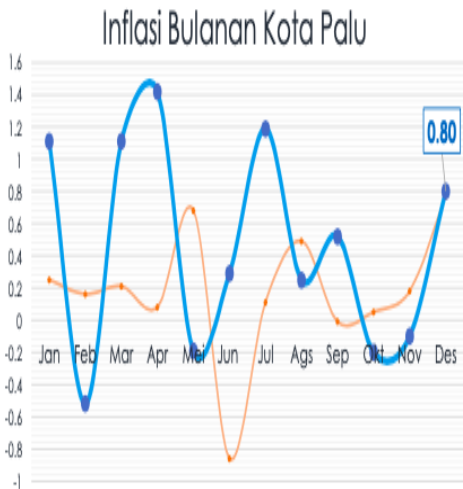
Sumber Data : BRS Prov. Sulteng 2022 (diolah)

Pergerakan Inflasi Kota Palu pada bulan desember tahun 2022 dengan nilai indeks yang tertinggi adalah pada kelompok transportasi sebesar 12,75 persen (y-on-y), sementara inflasi bulanan dari kelompok Komoditas sebesar 0,80 persen, terdiri dari Ikan Selar andil inflasi sebesar 0,24 persen, Beras 0,14 persen, Bawang Merah 0,07 persen, Ikan Cakalang 0,03 persen dan kangkung sebesar 0,03 persen.

**Tabel 2.31**

**Inflasi Bulanan dan Komoditas Penyumbang Inflasi di Kota Palu  
Desember 2022**

Rincian		Inflasi M o M (%)	Inflasi Y o Y (%)
	<b>Inflasi Umum</b>	<b>0,80</b>	<b>5,81</b>
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	3,25	3,41
2	Pakaian dan Alas Kaki	-0,28	2,71
3	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	-0,07	10,20
4	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,00	4,33
5	Kesehatan	0,14	0,26
6	Transportasi	0,04	12,75
7	Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,00	0,20
8	Rekreasi, Olahraga dan Budaya	0,52	3,81
9	Pendidikan	0,00	0,98
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,00	2,62
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,02	7,39

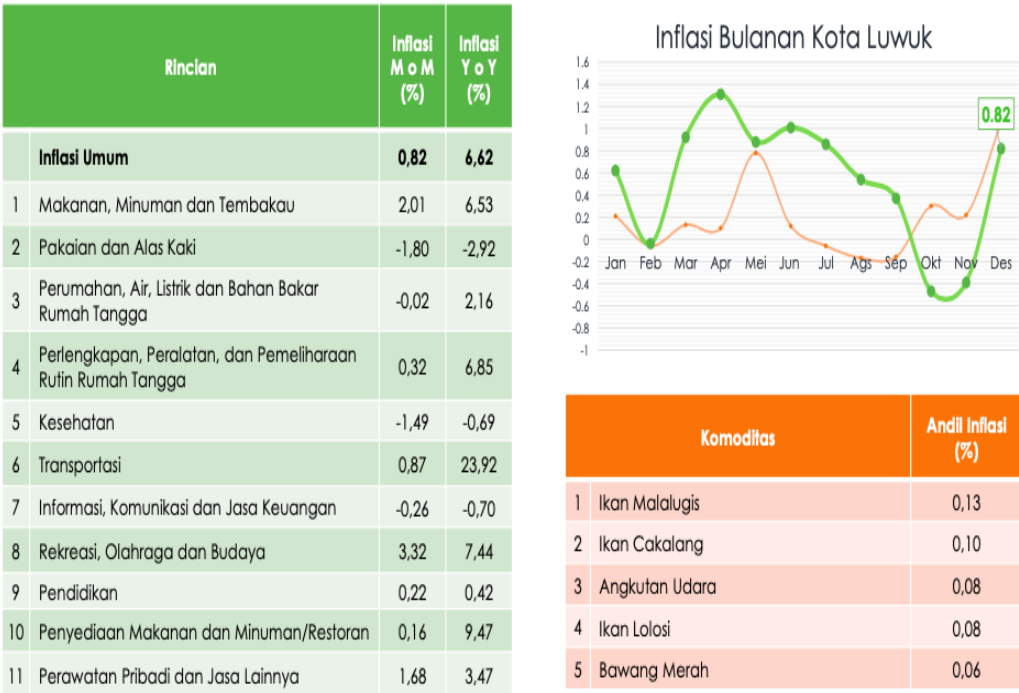


Komoditas	Andil Inflasi (%)
1 Ikan Selar	0,24
2 Beras	0,14
3 Bawang Merah	0,07
4 Ikan Cakalang	0,03
5 Kangkung	0,03

Sumber Data : BRS Prov. Sulteng 2022 (diolah)

Sementara Inflasi Kota Luwuk pada bulan desember tahun 2022 dengan nilai indeks yang tertinggi juga terdapat pada kelompok transportasi sebesar 23,92 persen (y-on-y), sementara inflasi bulanan dari kelompok Komoditas sebesar 0,82 persen, terdiri dari Ikan Malalugis andil inflasi sebesar 0,13 persen, Ikan Cakalang 0,10 persen, Angkutan Udara 0,08 persen, Ikan Lolosi 0,08 persen dan Bawang Merah sebesar 0,06 persen.

**Tabel 2.32**  
**Inflasi Bulanan dan Komoditas Penyumbang Inflasi di Kota  
Luwuk Desember 2022**



Sumber Data : BRS Prov. Sulteng 2022 (diolah)

2.1.1.1.5 Kesenjangan Distribusi Pendapatan

Indeks Gini Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh.

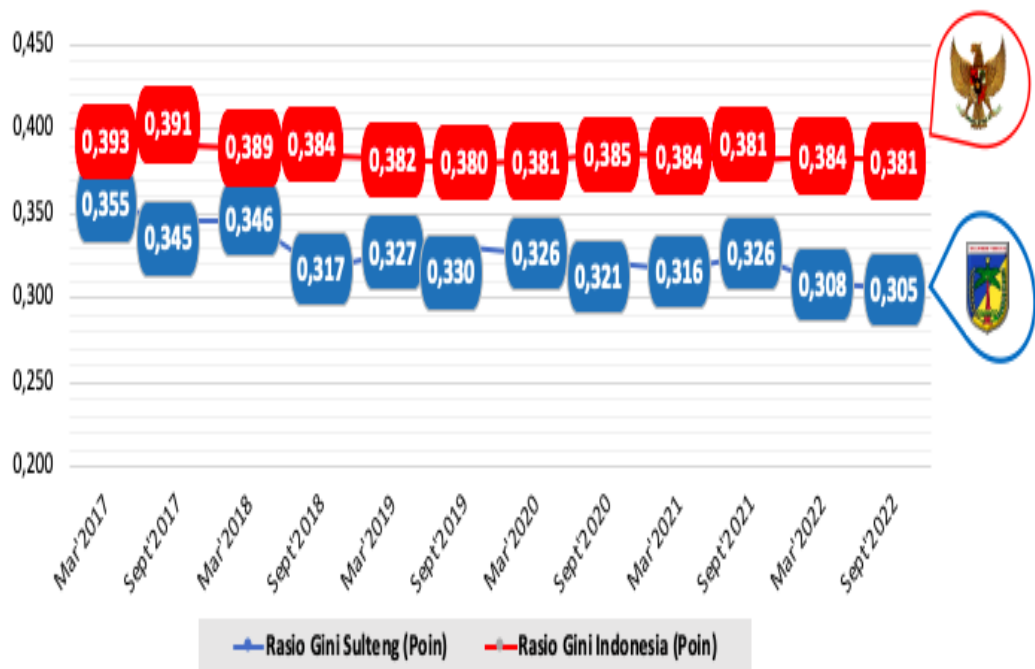
Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

a. Perkembangan Gini Ratio Maret 2017 - September 2022

Nilai Gini Ratio Sulawesi Tengah selama periode Maret 2017 - September 2022 terus mengalami fluktuasi. Pada Maret 2017 hingga September 2019 nilainya cenderung menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode Maret 2016 hingga September 2019 terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Sulawesi Tengah. Namun demikian pada periode September 2019 hingga September 2020 nilainya mengalami sedikit penurunan, pada September 2021 kembali nilainya menunjukkan sedikit peningkatan, dan selanjutnya kembali menunjukkan trend penurunan hingga September 2022.

Gambar 2.20

Capaian Indeks Gini Sulteng dan Nasional 2017 – 2022



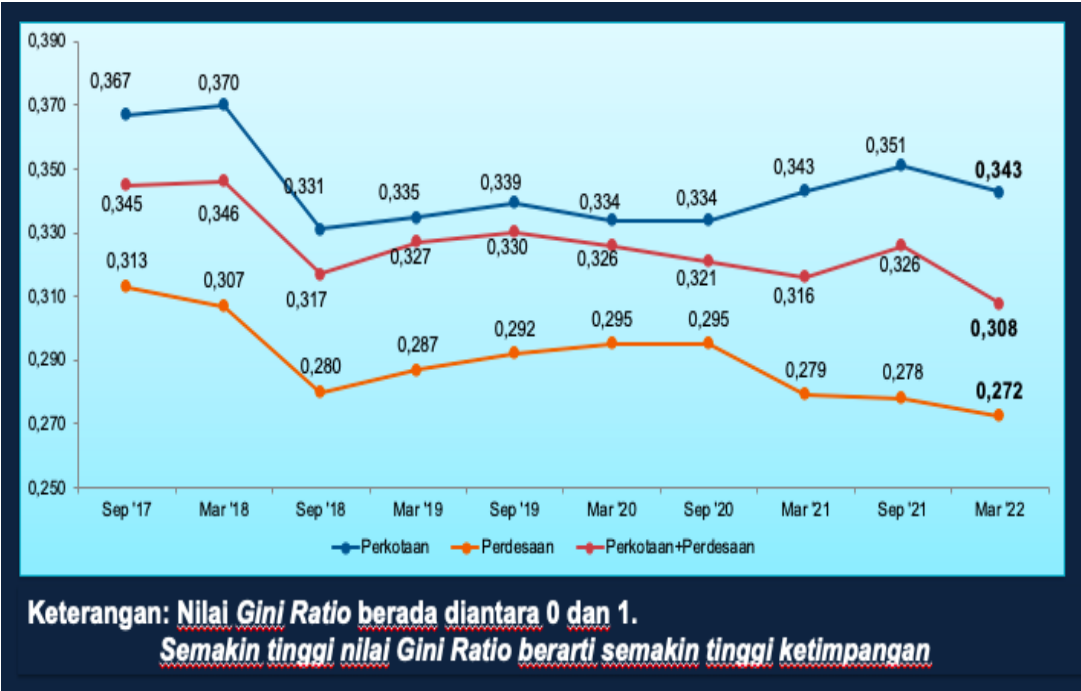
Sumber Data : BRS Prov. Sulteng 2022 (diolah)

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2020 adalah sebesar 0,334 mengalami penurunan sebesar 0,005 poin dibanding September 2019 yang sebesar 0,339, dan stagnan dibanding Maret 2020 yang juga sebesar 0,334. Pada September tahun 2021 Gini Ratio sebesar meningkat jika dibandingkan dengan September 2020 sebesar 0,17 poin, namun kembali menurun pada maret 2022 sebesar 0,008 poin.

Untuk daerah perdesaan, pada September 2020 Gini Ratio sebesar 0,295 naik 0,003 poin dibanding September 2019 yang sebesar 0,292 namun stagnan dibanding Maret 2020 di angka yang sama. Untuk September tahun 2021 Gini Ratio sebesar 0,278 menurun 0,017 poin dari tahun sebelumnya, dan maret 2022 sebesar 0,272 kembali menurun 0,006 poin, kalau dibandingkan dengan September tahun 2021.

Gambar 2.21

Perkembangan Indeks Gini Sulteng dan Indonesia 2017 – 2022



Sumber Data : BRS Prov. Sulteng 2022 (diolah)

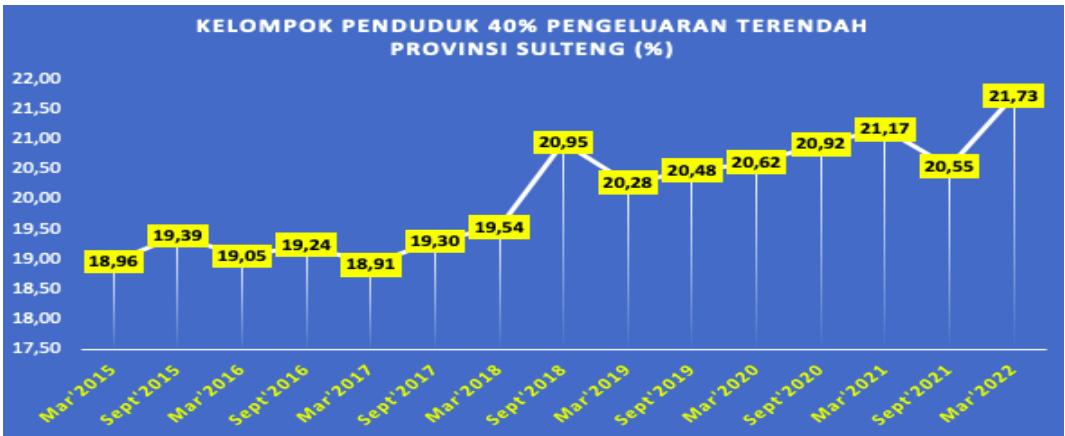
**b. Perkembangan Distribusi Pengeluaran Maret 2015 - Maret 2022**

Selain Gini Ratio ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya dibawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada diatas 17 persen.

Pada September 2020, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 20,92 persen yang berarti berada pada kategori ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada bulan September 2020 ini naik jika dibandingkan dengan kondisi September 2019 yang sebesar 20,48 persen, maupun dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 yang sebesar 20,62 persen.

Sementara September 2021 sebesar 20,55 persen, juga masih berada pada ketimpangan rendah, menurun jika dibandingkan dengan September 2020, namun pada maret 2022, naik 1,18 persen menjadi 21,73 persen, dan masih tergolong pada ketimpangan rendah, seperti pada gambar berikut :

**Gambar 2.22**  
**Kelompok Penduduk 40 peren Pengeluaran Terendah Provinsi Sulawesi Tengah Maret 2015 - Maret 2022**



Sumber Data : BRS Prov. Sulteng 2022 (diolah)

**c. Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan**

Faktor utama yang berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pengeluaran selama periode Maret-September 2020 adalah perubahan pengeluaran per kapita penduduk. Berdasarkan data Susenas, tercatat bahwa rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk kelompok 20 persen teratas mengalami penurunan yang lebih besar dibanding penduduk kelompok 40 persen terbawah. Pada kelompok penduduk 20 persen teratas penurunan tersebut mencapai 3,24 persen, sedangkan pada kelompok 40 persen terbawah hanya menurun sebesar 1,16 persen. Secara distribusi juga tercatat bahwa porsi pengeluaran penduduk kelompok 20 persen teratas secara total mengalami penurunan sebesar 0,22 persen, sedangkan pada kelompok 40 persen terbawah justru meningkat 0,30 persen.

**d. Gini Ratio Menurut Provinsi di Sulawesi pada September 2021 - September 2022**

Selama periode September 2019 - September 2020, nilai Gini Ratio Sulawesi Tengah merupakan yang terendah dibanding provinsi lain di Sulawesi, baik secara total maupun menurut kategori wilayah perkotaan dan perdesaan. Pada skala nasional, posisi nilai Gini Ratio Sulawesi Tengah dalam setahun terakhir relatif stagnan. Pada September 2019 nilai Gini Ratio Sulawesi Tengah berada pada urutan ke-11 terendah se-Indonesia, sedangkan pada Maret 2020 posisi tersebut hanya naik satu peringkat ke posisi 10, dan bertahan hingga September 2020.







Dibanding dengan Gini Ratio nasional pada September 2020 sebesar 0,385, hanya Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tenggara yang memiliki nilai Gini Ratio lebih tinggi. Kondisi ini sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan September 2019 maupun Maret 2020, dimana selain kedua provinsi tersebut, juga terdapat Provinsi Sulawesi Selatan.



Sedangkan pada September 2021 dan September 2022, Provinsi Sulawesi Tengah pada perspektif Pulau Sulawesi masih berada pada level paling rendah dari 5 Provinsi, dimana pada September 2021 Gini Ratio sebesar 0,326 poin, jika dibandingkan dengan September 2022 mengalami trend penurunan sebesar 0,021 poin, yaitu sebesar 0,305 poin, seperti pada tabel berikut:

**Tabel 2.33**

**Gini Ratio menurut Provinsi Se-Sulawesi September 2021-  
September 2022**

INDEKS GINI PROVINSI SE-SULAWESI (INDEKS)				
PROVINSI SE-SULAWESI	SEPTEMBER 2021	SEPTEMBER 2022	NAIK/ TURUN	KET
Sulawesi Utara	0,359	0,359	0,000	
Sulawesi Tengah	0,326	0,305	-0,021	
Sulawesi Selatan	0,377	0,365	-0,012	
Sulawesi Tenggara	0,394	0,366	-0,028	
Gorontalo	0,409	0,423	0,014	
Sulawesi Barat	0,366	0,371	0,005	

Sumber: BRS, Tahun Prov. Sulteng 2022, (diolah)

**2.1.1.1.6 Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah**

Adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi demografi dimasing-masing wilayah/daerah merupakan salah satu pemicu terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Namun demikian, adanya perbaikan perekonomian daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan strategi kebijakan pembangunan daerah yang diejawantahkan melalui program dan kegiatan di masing-masing wilayah kabupaten/kota diharapkan mampu meminimalisir adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut. Salah satu indikator makro yang lazim digunakan untuk melihat ketimpangan pembangunan antar wilayah dalam suatu kawasan adalah analisis Indeks Williamson (IW).

Disparitas pembangunan antar wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 cenderung meningkat yang direfleksikan dengan meningkatnya nilai Indeks Williamson, yakni dari 0,50 poin pada Tahun 2016 menjadi 0,84 poin pada Tahun 2020.



Untuk itu langkah yang penting ke depan dilakukan adalah manage pengeluaran fiscal dengan baik, menata dan mempertajam kembali program pembangunan kewilayahan, dengan demikian maka kesenjangan pembangunan antar-daerah dapat dipersempit.

**Gambar 2.23**  
**Perkembangan Nilai Indeks Williamson Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2016 – 2020**



Sumber: BPS 2022

#### **2.1.1.1.7 Perkembangan Penduduk Miskin**

Capaian pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tidak sepenuhnya dapat memperbaiki kehidupan masyarakat, mengingat masih terdapat sebagian penduduk yang hidup dalam himpitan kondisi kemiskinan. Untuk menangani kemiskinan, pemerintah bersama instansi terkait mengambil langkah yang strategis melalui berbagai intervensi baik melalui program multi sasaran maupun melalui operasi pasar dan pengendalian harga. Upaya tersebut terus dilakukan seperti Raskin, Jamkesmas, dan berbagai program sektoral. Diharapkan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka penurunan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan dengan baik yang pada akhirnya dapat menurunkan angka kemiskinan.

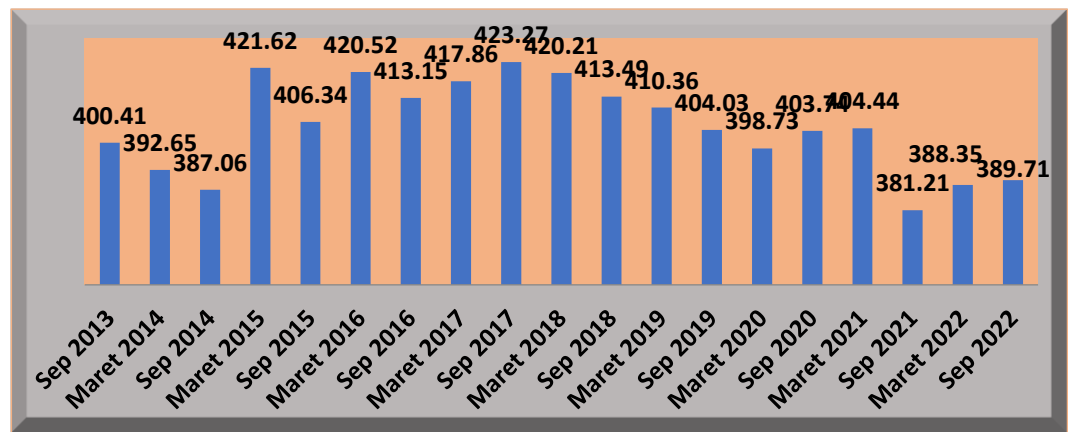
#### **1. Perkembangan atau Tingkat Kemiskinan, September 2013 - September 2022**

Secara umum, pada periode September 2013 - September 2022 jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tengah mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya, namun sejak 2015 tingkat kemiskinan tersebut menunjukkan fluktuasi yang cenderung meningkat hingga 2017 sebelum akhirnya kembali menunjukkan tren penurunan hingga 2019. Setelah adanya pandemi covid-19 pada tahun

2020, jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin kembali meningkat, dan pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar 12,18 persen, namun pada maret 2022 kembali meningkat menjadi 12,33 persen, atau sebesar 388,35 ribu orang, meningkat sebesar 7,14 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2021, dan menurun 16,09 ribu orang dibandingkan kondisi Maret 2021, dan 2,79 persen diatas nasional yaitu 9,54 persen.

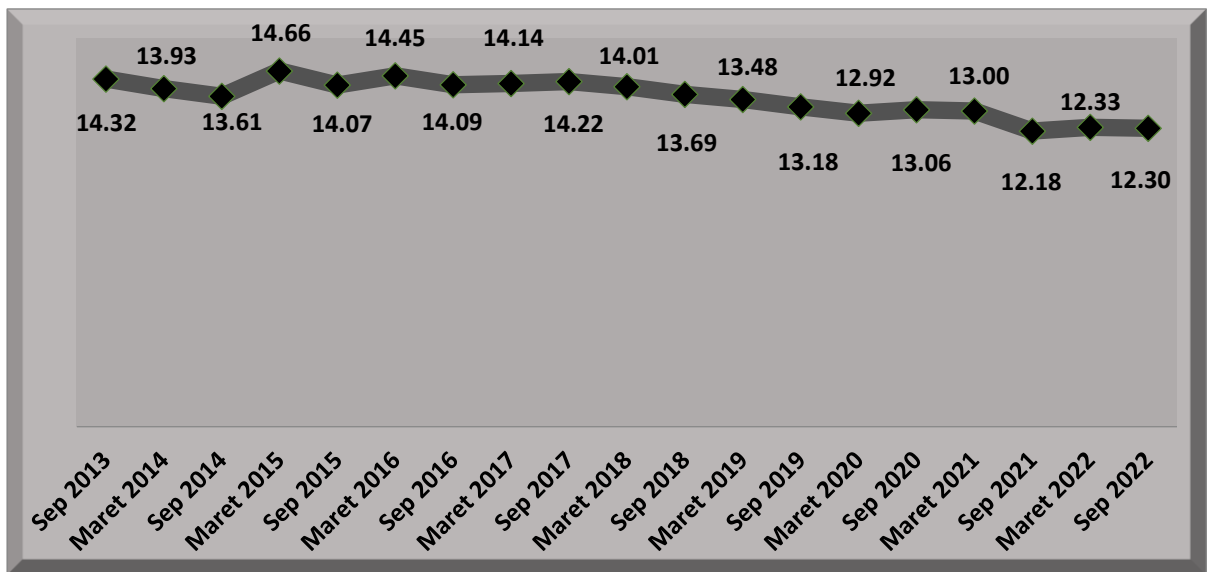
Namun pada September 2022 mengalami penurunan sebesar 0,03 persen yaitu sebesar 12,30 persen, dengan jumlah penduduk misikin sebesar 389,71 ribu, sedangkan dibandingkan dengan September 2021 meningkat sebesar 0,12 persen, seperti pada gambar berikut :

**Gambar 2.24**  
**Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Sulawesi Tengah**  
**September 2013 – September 2022**



Sumber: BRS Prov. Sulteng 2022, (diolah)

**Gambar 2.25**  
**Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Sulawesi Tengah**  
**September 2013 – September 2022**



Sumber: BRS Prov. Sulteng 2022, (diolah)

2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Maret 2021-Maret 2022

Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tengah pada September 2022 mencapai 389,71 ribu orang. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 1,36 ribu orang dibandingkan Maret 2022, sementara jika dibandingkan keadaan September 2021 jumlah penduduk miskin tersebut meningkat pula sebanyak 8,50 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2022 tercatat sebesar 12,30 persen, menurun sebesar 0,03 persen poin terhadap Maret 2022, dan meningkat sebesar 0,12 persen poin terhadap September 2021.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret-September 2022, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebesar 2,67 ribu orang, dan di daerah perdesaan turun sebesar 1,32 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 9,03 persen menjadi 9,13 persen, sedangkan di perdesaan turun dari 13,87 persen menjadi 13,79 persen.

Tabel 2.34  
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah,  
Maret 2021 – Maret 2022

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
1	2	3
<b>Perkotaan</b>		
Maret 2021	88,31	9,15
Sep 2021	86,67	8,82
Maret 2022	90,26	9,03
<b>Perdesaan</b>		
Maret 2021	316,14	14,73
Sep 2021	294,54	13,71
Maret 2022	298,09	13,87
<b>Total</b>		
Maret 2021	404,44	13
Sep 2021	381,21	12,18

Maret 2022	388,35	12,33
Sep 2022	389,71	12,30

Sumber: BRS Prov. Sulteng 2022, (diolah)

**3. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Kawasan Sulawesi pada Maret 2022**

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Sulawesi Tengah dibanding provinsi lain di Sulawesi merupakan yang tertinggi kedua. Secara absolut, jumlah penduduk miskin Sulawesi Tengah sebanyak 389,71 ribu orang adalah tertinggi kedua di bawah Sulawesi Selatan. Kondisi yang sama juga terlihat pada daerah perkotaan dan perdesaan. Secara persentase, angka kemiskinan Sulawesi Tengah sebesar 12,30 persen juga merupakan angka tertinggi kedua setelah Gorontalo.

Angka persentase ini jika dilihat berdasarkan daerah juga menunjukkan potret yang serupa, di mana untuk daerah perkotaan sebesar 9,13 persen merupakan tertinggi kedua setelah Sulawesi Barat, sedangkan untuk perdesaan sebesar 13,79 persen merupakan tertinggi dari semua Provinsi di Kawasan pulau Sulawesi, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.35**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Sulawesi September 2022**

Pulau	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
1	2	3	4	5	6	7
Sulawesi Utara	70,9	116,43	187,33	5,04	10,16	7,34
Sulawesi Tengah	92,93	296,77	389,71	9,13	13,79	12,30
Sulawesi Selatan	207,81	574,51	782,32	4,98	11,81	8,66
Sulawesi Tenggara	73,71	241,04	314,74	7,22	13,6	11,27
Gorontalo	24,4	162,95	187,35	4,49	24,52	15,51
Sulawesi Barat	26,9	142,36	169,26	9,33	12,58	11,92
Indonesia	11.980,32	14.382,95	26.363,27	7,53	12,36	9,57

Sumber: BRS Prov. Sulteng 2022, (diolah)

**4. Perkembangan Garis Kemiskinan, September 2021–September 2022**

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau

tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Tabel 3 menyajikan perkembangan garis kemiskinan pada September 2021 sampai dengan September 2022. Selama periode Maret-September 2022, Garis Kemiskinan naik sebesar 5,08 persen, yaitu dari Rp 530.251,- per kapita per bulan pada Maret 2022 menjadi Rp 557.183,- per kapita per bulan pada September 2022. Sementara pada periode September 2021– September 2022, Garis Kemiskinan naik sebesar 10,20 persen, yaitu dari Rp 505.608,- per kapita per bulan pada September 2021 menjadi Rp 557.183,- per kapita per bulan pada September 2022.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), dari sisi komoditas bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada September 2022 sebesar 75,99 persen.

**Tabel 2.36**  
**Garis Kemiskinan dan Perubahannya Menurut Wilayah**  
**Maret 2022-September 2022**

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
1	2	3	4
<b>Perkotaan</b>			
Sep-21	373.960	142.414	516.374
Maret 2022	388.768	149.250	538.018
Sep-22	412.305	153.690	565.994
Perubahan Sep'21–Sep'22 (%)	10,25	7,92	9,61
Perubahan Mar'22–Sep'22 (%)	6,05	2,97	5,20
<b>Perdesaan</b>			
Sep-21	391.001	109.351	500.351
Maret 2022	410.179	115.486	525.665
Sep-22	427.956	124.605	552.561
Perubahan Sep'21–Sep'22 (%)	9,45	13,95	5,04

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
1	2	3	4
Perubahan Mar'22—Sep'22 (%)	4,33	7,90	5,12
<b>Total</b>			
Sep-21	385.989	119.619	505.608
Maret 2022	404.034	126.217	530.251
Sep-22	423.390	133.793	557.183
Perubahan Sep'21—Sep'22 (%)	9,69	11,84	10,20
Perubahan Mar'22—Sep'22 (%)	4,79	6,00	5,08

Sumber: BRS Prov. Sulteng 2022, (diolah)

**Tabel 2.37**

**Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%) September 2022**

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Perdesaan
1	2	3	4
<b>Makanan:</b>	<b>72,85</b>	<b>Makanan:</b>	<b>77,45</b>
Beras	21,22	Beras	23,31
Rokok kretek filter	13,05	Rokok kretek filter	15,47
Tongkol/tuna/cakalang	4,2	Tongkol/tuna/cakalang	4,25
Cabe rawit	2,86	Kue basah	3,3
Telur ayam ras	2,73	Gula pasir	2,98
Kue basah	2,56	Cabe rawit	2,47
Mie instan	2,38	Telur ayam ras	2,33
Bawang merah	2,21	Mie instan	2,22
Gula pasir	2,01	Bawang merah	2,05
Kue kering/biskuit	1,6	Kembung	1,67

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Perdesaan
1	2	3	4
Kembung	1,36	Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	1,56
Tahu	1,24	Ketela pohon/singkong	1,14
lainnya	15,43	lainnya	14,72
<b>Bukan Makanan:</b>	<b>27,15</b>	<b>Bukan Makanan:</b>	<b>22,55</b>
Perumahan	9,94	Perumahan	9,49
Listrik	3,29	Bensin	2,7
Bensin	3,13	Perlengkapan mandi	1,27
Pendidikan	1,81	Listrik	1,26
Perlengkapan mandi	1,26	Pendidikan	1,24
Pakaian jadi perempuan dewasa	1,01	Sabun cuci	0,68
Kayu bakar	0,65	Pakaian jadi perempuan dewasa	0,62
Lainnya	6,07	Lainnya	5,29

Sumber: BRS Prov. Sulteng 2022, (diolah)

**5. Garis Kemiskinan per Rumah Tangga, September 2022**

Garis kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin.

Secara rata-rata garis kemiskinan per rumah tangga pada September 2022 adalah sebesar Rp. 2.847.205,-/bulan, turun sebesar 0,93 persen dibanding kondisi Maret 2022 yang sebesar Rp. 2.873.960,-/bulan.

**Tabel 2.38**

**Garis Kemiskinan per Rumah Tangga Miskin,**

**September 2021 - Maret 2022**

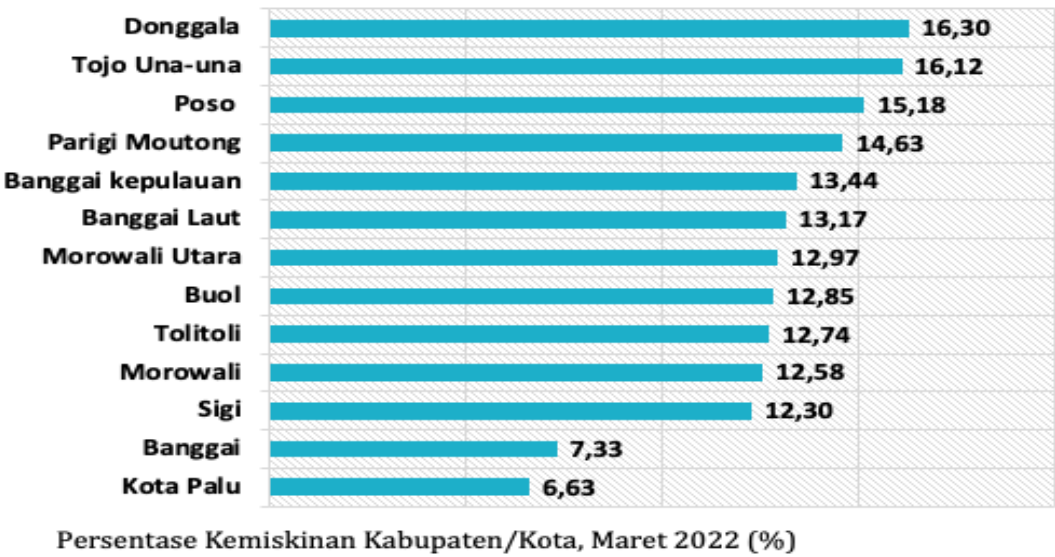
Tahun	Garis Kemiskinan per Kapita (Rp/kapita/bulan)	Rata-rata Anggota Rumah Tangga Miskin	Garis Kemiskinan Rumah Tangga Miskin (Rp/rumah tangga/bulan)
1	2	3	4

Maret 2022	530.251	5,42	2.873.960
September 2022	557.183	5,11	2.547.205
<b>Perubahan Maret 2022-September 2022 (%)</b>	<b>5,08</b>	<b>-5,72</b>	<b>-0,93</b>

Sumber: BRS Prov. Sulteng 2022, (diolah)

6. Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Maret 2022

Tingkat Kemiskinan pada Maret 2022, Persentase Kemiskinan tertinggi di Kabupaten Donggala sebesar 16,30 persen dan terendah di Kota Palu sebesar 6,63 persen, seperti pada gambar berikut :



Sumber: BRS Prov. Sulteng 2022, (diolah)











Gambar 2.26

Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota, Maret 2022

Dilihat dari perubahan Tingkat Kemiskinan Maret 2021-Maret 2022, seluruh kabupaten/kota mengalami penurunan tingkat kemiskinan. Kabupaten yang mengalami penurunan tertinggi yaitu Kabupaten Buol (-1,21 persen poin), disusul yang kedua dan ketiga masing-masing adalah Kabupaten Morowali (-1,17 persen poin), dan Kabupaten Banggai Laut (-1,00 persen poin), seperti pada tabel berikut :



**Tabel 2.39**  
**Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah**  
**Maret 2021-Maret 2022**

PERSENTASE KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA SE-SULTENG (%)					
NO	KABUPATEN/ KOTA	MARET 2021	MARET 2022	NAIK/ TURUN	KET
1	Banggai kepulauan	13,72	13,44	-0,28	
2	Banggai	7,83	7,33	-0,50	
3	Morowali	13,75	12,58	-1,17	
4	Poso	15,92	15,18	-0,74	
5	Donggala	16,73	16,30	-0,43	
6	Tolitoli	13,51	12,74	-0,77	
7	Buol	14,06	12,85	-1,21	
8	Parigi Moutong	15,28	14,63	-0,65	
9	Tojo Una-una	16,60	16,12	-0,48	
10	Sigi	13,05	12,30	-0,75	
11	Banggai Laut	14,17	13,17	-1,00	
12	Morowali Utara	13,90	12,97	-0,93	
13	Kota Palu	7,17	6,63	-0,54	

Sumber: BRS Prov. Sulteng 2022, (diolah)

Keberhasilan penurunan angka kemiskinan ini tidak lepas dari peran dan komitmen bersama pemerintah baik pusat maupun daerah serta para *stakeholder* dalam bingkai gotong royong pada upaya menurunkan kemiskinan khususnya di Sulawesi Tengah, karena sampai maret 2022 kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah masih diatas tingkat kemiskinan nasional sebesar 2,73 persen, yaitu 9,57 persen.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah

tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing- masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel 2.40**  
**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparah**  
**Kemiskinan (P2) di Sulawesi Tengah Menurut Daerah,**  
**September 2021 – September 2022**

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Total
1	2	3	4
<b>Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)</b>			
Sep-21	1,48	2,59	2,24
Maret 2022	1,49	2,84	2,41
Sep-22	1,83	2,29	2,15
<b>Indeks Keparah</b> <b>Kemiskinan (P2)</b>			
Sep-21	0,43	0,7	0,62
Maret 2022	0,41	0,81	0,68
Sep-22	0,52	0,56	0,54

Sumber: BRS Prov. Sulteng 2022, (diolah)

Pada periode September 2021-Maret 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan IndeksKeparah

Kemiskinan (P2) mengalami peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2021 adalah 2,24 naik menjadi 2,41 pada Maret 2022, sedangkan Indeks Keparah

Kemiskinan mengalami peningkatan dari 0,62 menjadi 0,68 pada periode yang sama.

Sementara pada periode Maret 2022 – September 2022 Kedalaman kemiskinan menurun 0,26 persen menjadi 2,15 persen, sedangkan jika dibandingkan dengan September 2021 juga mengalami penurunan sebesar 0,09 atau 2,24 persen.

Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparah

Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada Maret 2022, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untukdaerah perkotaan sebesar 1,49 dan di daerah perdesaan mencapai

2,84. Sementara itu nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan adalah 0,41, sedangkan di daerahperdesaan mencapai 0,81, sedangkan pada September 2022 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untukdaerah perkotaan sebesar 1,83 sedangkan di daerah perdesaan mencapai 2,29. Sementara itu nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan adalah 0,52, dan untuk daerah perdesaan 0,56 poin.

Dengan demikian, maka diperlukan sebuah strategi dalam penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan yang melibatkan semua pihak baik, pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat setempat, maupun masyarakat miskin sendiri. Tiga pilar penanggulangan kemiskinan yang harus dibangun terus menerus kedepan di Sulawesi Tengah yaitu:

- 1) Memperluas kesempatan kerja (*Promoting Opportunities for the Poor*).
- 2) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat (*Facilitating Empowerment*).
- 3) Memperkuat ketahanan sosial (*Enhancing Social Security*).

#### **2.1.1.2 Fokus Kesejahteraan Sosial**

##### **2.1.1.2.1 Pendidikan**

###### **2.1.1.2.1.1 Sarana dan Prasarana Pendidikan**

Pembangunan di sektor pendidikan, diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan dengan memanfaatkan secara optimal fasilitas pendidikan yang ada. Salah satu sasaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mencapai misinya untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing yaitu meningkatkan akses dan mutu pendidikan untuk menuntaskan pendidikan dasar dan pengembangan pendidikan menengah. Adapun beberapa arah kebijakan di antaranya yaitu penyediaan sarana dan prasarana sekolah/ruang kelas yang semakin baik, penyediaan guru berdasarkan bidang ilmu sesuai kebutuhan, dan peningkatan kapasitas dan kualitas perpustakaan sekolah. Perbaikan kualitas pendidikan melalui penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana, serta akses pendidikan yang dapat dijangkau oleh masyarakat merupakan salah satu poin penting dalam pembangunan pendidikan. Masalah yang masih terjadi saat ini yaitu tidak meratanya fasilitas-fasilitas tersebut sehingga tidak semua kalangan masyarakat dapat menikmati fasilitas pendidikan yang layak. Oleh karena itu, akses pendidikan berkualitas yang merata menjadi prioritas utama dalam pengembangan pendidikan, dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel 2.41**

**Jumlah Fasilitas Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021**

<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>SD</b>		<b>SMP</b>		<b>SMA/SMK</b>		<b>PERGURUAN TINGGI</b>	
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
Banggai Kepulauan	137	136	65	64	38	39	1	2
Banggai Morowali	297	296	131	126	77	77	2	3
Poso	127	124	48	45	27	23	2	2
Donggala	168	167	78	80	34	34	5	6
Tolitoli	167	164	108	103	48	45	–	–
Buol	110	110	72	72	38	38	5	5
Parigi Moutong	113	108	67	65	24	23	2	2
Tojo Una-Una	268	268	127	127	70	71	3	3
Sigi	141	140	59	61	28	29	–	1
Banggai Laut	174	172	83	82	42	38	4	4
Morowali Utara	65	65	39	39	21	20	–	–
Palu	121	121	49	47	19	20	–	–
	46	46	35	34	38	37	13	13
<b>SULTENG</b>	<b>1.934</b>	<b>1.917</b>	<b>961</b>	<b>945</b>	<b>504</b>	<b>494</b>	<b>37</b>	<b>41</b>

Sumber: BPS, Tahun 2021

Sampai dengan Tahun 2021 fasilitas pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi sudah hampir merata disemua Kabupaten/Kota, walaupun masih terdapat beberapa Kabupaten yang belum memiliki Perguruan Tinggi yaitu Kabupaten Donggala, Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara, dan Perguruan Tinggi yang terbanyak selain Kota Palu yang memang merupakan Ibu Kota Provinsi yaitu Kabupaten Poso dan Kabupaten Tolitoli masing – masing memiliki 5 Perguruan Tinggi.

**2.1.1.2.1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)**

Salah satu indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan, yakni melalui Angka Partisipasi Kasar (APK).

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkatpendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK ini menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan.

Capaian APK SD di Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 sebesar 103,55 persen, sementara capaian APK SMP sebesar 92,86 persen dan capaian APK SMA sebesar 87,99 persen, dapat ditunjukkan pada gambar berikut : Sumber: BPS-RI

**Tabel 2.42**

**Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2022**

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5
SD/MI/Sederajat	93.33	93.25	103.68	103.55
SMP/MTs/ Sederajat	74.99	75.63	93.17	92.86
SMA/SMK/MA/Sederajat	65.44	65.72	88.06	87.99

Sumber: Sumber: BPS-RI

Perspektif kabupaten/kota, pada Tahun 2021 capaian APK SD tertinggi terdapat di Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 106,89 persen dan terendah terdapat di Kabupaten Tolitoli sebesar 95,54 persen, namun terdapat 2 (dua) Kabupaten yang datanya tidak terupdate yaitu Kabupaten Banggai dan Kota Palu, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.43

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan serta Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

NO.	KABUPATEN/KOTA	Angka Partisipasi Kasar (APK)		
		SD/MI/Se derajat	SMP/MTs/ Sederajat	SMA/SMK/MA/ Sederajat
1	2	6	7	8
1.	PALU	-	-	-
2.	SIGI	103,37	92,39	82,92
3.	DONGGALA	107,78	92,46	76,89
4.	PARIGI MOUTONG	100,56	89,94	87,43
5.	POSO	103,58	97,58	91,87
6.	TOJO UNA-UNA	106,89	79,26	87,93
7.	BANGGAI	-	-	-
8.	BANGGAI KEPULAUAN	110,21	79,77	78,56
9.	BANGGAI LAUT	97,97	107,64	80,97
10.	MOROWALI	109,42	102,31	83,39
11.	MOROWALI UTARA	98,3	101,7	87,43
12.	BUOL	110,00	89,08	78,79
13.	TOLITOLI	95.54	91.91	83.67

Sumber: BPS dan Dikjar Provinsi Sulteng 2021

Capaian APK SMP pada Tahun 2021 tertinggi terdapat di Kabupaten Banggai Laut sebesar 107,64 persen dan terendah di Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 79,26 persen, namun terdapat 2 (dua) Kabupaten yang datanya tidak terupdate yaitu Kabupaten Banggai dan Kota Palu.

Pada jenjang SMA Tahun 2021, capaian APK tertinggi terdapat di Kabupaten Poso sebesar 91,87 persen dan terendah di Kabupaten Donggala sebesar 76,89 persen, namun terdapat 2 (dua) Kabupaten yang datanya tidak terupdate yaitu Kabupaten Kabupaten Banggai dan Kota Palu.

2.1.1.2.1.3 Angka Partisipasi Murni (APM)

Sama halnya APK, Angka Partisipasi Murni (APM) juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM ini melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut, atau dengan perkataan lain APM adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase

siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.

Capaian APM pada seluruh jenjang pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 sesuai jenjang pendidikan yaitu APM SD/MI yang tertinggi sebesar 93,25 persen.

Sementara menurut Kabupaten/Kota tahun 2022 terdapat di Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 98,86 persen sedangkan yang terendah terdapat pada Kabupaten Parigi Moutong sebesar 90,83 persen, sementara capaian APM SMP/MTs pada yang tertinggi terdapat di Kabupaten Morowali Utara sebesar 84,73 persen sedangkan yang terendah terdapat pada Kabupaten Tolitoli sebesar 64,24 persen, sedangkan capaian APM SMA/MA/SMK yang tertinggi terdapat di Kabupaten Morowali Utara sebesar 71,16 persen sedangkan yang terendah terdapat pada Kabupaten Tolitoli sebesar 56,29 persen, dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.44**

**Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)**

**Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021**

NO.	KABUPATEN/KOTA	Angka Partisipasi Murni (APM)		
		SD/MI/Sederajat	SMP/MTs/Sederajat	SMA/SMK/MA/Sederajat
1	2	3	4	5
1.	PALU	-	-	-
2.	SIGI	93,5	75,84	58,82
3.	DONGGALA	94,08	78,44	61,17
4.	PARIGI MOUTONG	90,83	73,43	66,69
5.	POSO	93,92	78,7	69,49
6.	TOJO UNA-UNA	98,86	71,00	63,31
7.	BANGGAI	-	-	-
8.	BANGGAI KEPULAUAN	97,96	68,86	61,3
9.	BANGGAI LAUT	86,18	71,48	61,98
10.	MOROWALI	95,07	73,23	69,71
11.	MOROWALI UTARA	90,77	84,73	71,16
12.	BUOL	97,55	76,00	62,52
13.	TOLITOLI	91.53	64.24	56.29

Sumber: BPS, 2022.

**2.1.1.2.2 Kesehatan**

Pembangunan di bidang kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional Indonesia yang diatur di dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Dijelaskan bahwa tujuan pembangunan

kesehatan adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional.

Secara substansi, pemerintah maupun pemerintah daerah telah berupaya secara optimal dalam membangun derajat kesehatan masyarakat melalui sinergitas kebijakan pembangunan kesehatan yang diejawantahkan dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan.

Capaian kinerja pembangunan kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat dari beberapa perkembangan indikator kesehatan, antara lain: Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, dan Persentase Balita Gizi Buruk.

Selama periode Tahun 2016-2020, perkembangan Angka Harapan Hidup di Provinsi Sulawesi Tengah cenderung meningkat yakni dari 67,31 tahun pada Tahun 2016 menjadi 68,75 tahun pada Tahun 2020. Sementara perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan pada periode 2016-2017 cenderung menurun, yakni dari 83,59 per 100.000 Kelahiran Hidup pada Tahun 2016 meningkat menjadi 213,44 per 100.000 Kelahiran Hidup pada Tahun 2017, dan pada Tahun 2018 menurun menjadi 153,88 Per 100.000 Kelahiran Hidup, pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 213,41 Per 100.000 Kelahiran Hidup, dan kembali menurun pada tahun 2020 menjadi 131,24 Per 100.000 Kelahiran Hidup.

Angka Kematian Bayi (AKB) selama periode Tahun 2016-2020 berfluktuasi yakni dari 12,79 per 1000 kelahiran hidup pada Tahun 2016 menurun menjadi 11,85 per 100.000 Kelahiran Hidup pada Tahun 2017, pada tahun 2018 menurun menjadi 8,77 per 100.000 Kelahiran Hidup, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 9,94 per 100.000 Kelahiran Hidup, sedangkan pada tahun 2020 kembali menurun menjadi 8,21 per 100.000 Kelahiran Hidup.

Sementara Angka Kematian Balita (AKABA) pada periode yang sama pergerakannya berfluktuasi yakni pada Tahun 2016 sebesar 13,52 per 1000 Kelahiran Hidup, Tahun 2017 sebesar 0,49 per 1000 Kelahiran Hidup, Tahun 2018 sebesar 0,63 per 1000 Kelahiran Hidup, pada tahun 2019 menjadi 1,10 per 1000 Kelahiran Hidup, sedangkan pada tahun 2020 menjadi 0,62 per 1000 Kelahiran Hidup.



Perkembangan persentase balita gizi buruk selama periode 2016-2020, menunjukkan *trend* yang membaik, yakni dari 0,16 persen pada Tahun 2016 berkurang sedikit menjadi 0,15 persen pada Tahun 2017, dan pada Tahun 2018 meningkat signifikan menjadi 14,16 persen, namun pada tahun 2019 menurun menjadi 10,83 persen, namun pada tahun 2020 kembali sedikit meningkat menjadi 11,54 persen, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.45**  
**Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Kesehatan**  
**di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 – 2019**

No.	Indikator Kesehatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	67,31	67,32	67,78	68,23	68,75
2	Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	83,59	213,44	153,88	213,41	131,24
3	Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)	12,79	11,85	8,77	9,94	8,21
4	Angka Kematian Balita (per 1000 KH)	13,52	0,49	0,63	1,10	0,62
5	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	0,16	0,15	14,16	10,83	11,54

Sumber: BPS dan Dinkes Provinsi Sulteng, 2021.

**2.1.1.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga**

Kekayaan seni dan kebudayaan Sulawesi Tengah yang tersebar di wilayah Kabupaten/Kota merupakan asset yang sangat penting nilainya bagi pengembangan dan pembangunan di Sektor Pariwisata. Seni dan budaya ini antara lain berupa tarian tradisional, berbagai macam seni rupa dan seni musik tradisional.

Perkembangan jumlah grup kesenian di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2015-2018 mengalami peningkatan yakni dari 259 sanggar seni pada Tahun 2015 menjadi 265 sanggar seni pada Tahun 2018, sementara jumlah gedung kesenian dari 4 unit pada Tahun 2015 meningkat menjadi 5 unit pada Tahun 2018.

Di bidang pemuda dan olah raga, jumlah gedung olahraga yang terdapat di Sulawesi Tengah sepanjang periode 2015-2018 tidak mengalami perubahan yakni sebesar 0,06 per 10.000 penduduk.

**Tabel 2.46**

**Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Bidang Seni Budaya,  
Pemuda dan Olahraga di Provinsi Sulawesi Tengah  
Tahun 2014 - 2018**

NO.	INDIKATOR KINERJA SENI BUDAYA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	201 5	201 6	201 7	201 8
1	Kebudayaan				
	- Jumlah grup kesenian (sanggar)	259	261	265	265
	- Jumlah gedung	4	5	5	5
2	Pemuda dan Olahraga				
	Jumlah gedung olahraga (per 10.000 penduduk)	0,06	0,06	0,06	0,06

Sumber: Dikbud, Dispar dan Dispora Provinsi Sulteng, 2019.

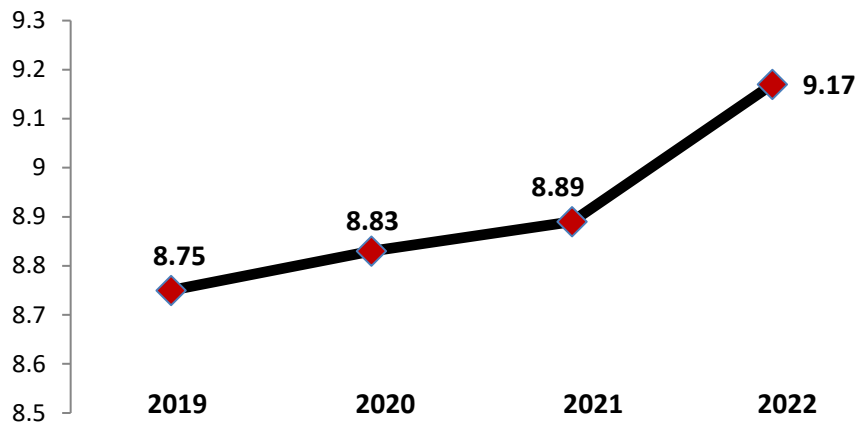
**2.1.2 Aspek Pelayanan Umum**  
**2.1.2.1 Fokus Layanan Urusan Wajib**

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah tersedianya Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu pembangunan atau investasi dibidang pendidikan dan kesehatan menempati posisi urgen dalam skala prioritas pembangunan daerah harus terus ditingkatkan.

Di bidang pendidikan, peningkatan sumber daya manusia lebih diutamakan dengan memberi kesempatan kepada penduduk usia sekolah, dimana luasnya wilayah yang harus dijangkau merupakan faktor yang cukup berpengaruh disamping faktor-faktor lainnya dalam menjalankan program-program pendidikan yang berimplikasi terciptanya SDM yang handal dan siap bersaing di era globalisasi.

**2.1.2.1.1 Pendidikan**

Kinerja pembangunan dalam bidang pendidikan secara kontinyu mengalami perbaikan yang cukup nyata, hal ini terlihat dari capaian indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan manusia, pada tahun 2021 sebesar 8,89 Tahun, pada tahun 2022 angka Rata-Rata Lama Sekolah Sulawesi Tengah Penduduk Umur  $\geq 15$  Tahun sebesar 9,17 naik sebesar 0,28 point, jika dibandingkan tahun 2021, sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini:



Sumber : BRS Prov. Sulteng 2022

**Gambar 2.27**

### **Angka Rata-Rata Lama Sekolah**

#### **Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2022**

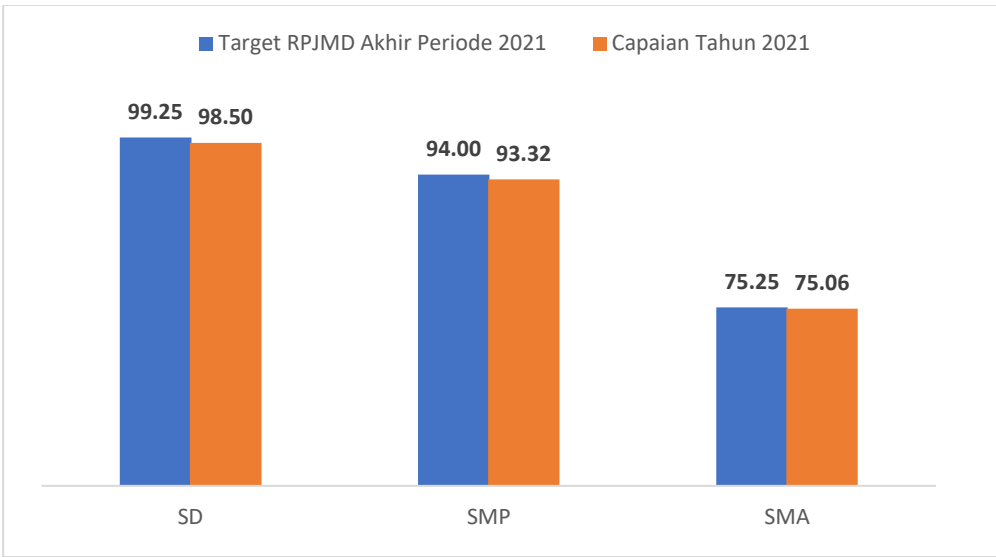
Indikator selanjutnya yaitu Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15 Tahun keatas, hingga akhir Tahun 2021 telah mencapai 98,11 persen atau melampaui target RPJMD pada akhir periode Tahun 2021 yaitu sebesar 96,50 persen, hal ini menggambarkan bahwa semakin tingginya minat dan perhatian masyarakat dalam pendidikan formal maupun informal.

Indikator penting lainnya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang menunjukkan pencapaian masih di bawah target RPJMD Akhir RPJMD Tahun 2021, dimana untuk target Angka Partisipasi Sekolah SD/MI Tahun 2021 yaitu sebesar 99,25 persen dengan capaian sebesar 98,50 persen, APS SMP/MTs dari target 94,00 persen realisasi mencapai sebesar 93,32 persen dan untuk APS SMA/MA/SMK capaian sebesar 75,06 persen dari target RPJMD sebesar 75,25 persen seperti terlihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.28**

### **Capaian Indikator Angka Partisipasi Sekolah**

#### **(APS) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021**



Sumber : Bappeda Sulteng (data diolah kembali), 2022

Berdasarkan hasil evaluasi untuk Capaian Indikator kinerja Program (Outcomes) urusan Pendidikan antara lain dapat dilihat pada 6 (enam) capaian indikator yaitu; 1) indikator meningkatnya persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah dari target 100,00 persen terealisasi sebesar 100,00 persen, 2) indikator Meningkatnya Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah (SMA, SMK) dan Jenjang Pendidikan Khusus dari target 100,00 persen realisasi sebesar 45,00 persen, 3) indikator meningkatnya persentase terlaksananya pemenuhan pengembangan kurikulum muatan lokal pada jenjang pendidikan menengah (SMA, SMK) dan jenjang pendidikan khusus dari target 100,00 persen realisasi sebesar 45,00 persen, 4) indikator meningkatnya persentase pemerataan dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan satuan Pendidikan menengah dan pendidikan khusus dari target 100,00 persen realisasi hingga semester I tahun 2021 sebesar 35,00 persen, 5) indikator meningkatnya persentase terlaksananya pengendalian perizinan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang dilaksanakan oleh masyarakat dari target 100,00 persen realisasi hingga semester I tahun 2021 sebesar 45,00 persen, dan 6) indikator meningkatnya persentase terlaksananya pengembangan bahasa dan sastra daerah dari target 100,00 persen realisasi hingga semester I tahun 2021 sebesar 40,00 persen, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.47**

**Capaian Indikator Kinerja Program (Outcomes)**

**Urusan Pendidikan Tahun 2021**

Program	Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Target RKPD 2021	Capaian 2021	Tingkat Capaian (%)
1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada DISDIKBUD	100	100	100
2.Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah (SMA, SMK) dan Jenjang Pendidikan Khusus	100	75	75
3.Program Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya Persentase Terlaksananya Pemenuhan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pada Jenjang Pendidikan Menengah (SMA, SMK) dan Jenjang Pendidikan Khusus	100	95	95
4.Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Persentase Pemerataan dan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	100	95	95
5.Program Pengendalian	Meningkatnya Persentase Terlaksananya Pengendalian Perizinan	100	100	100

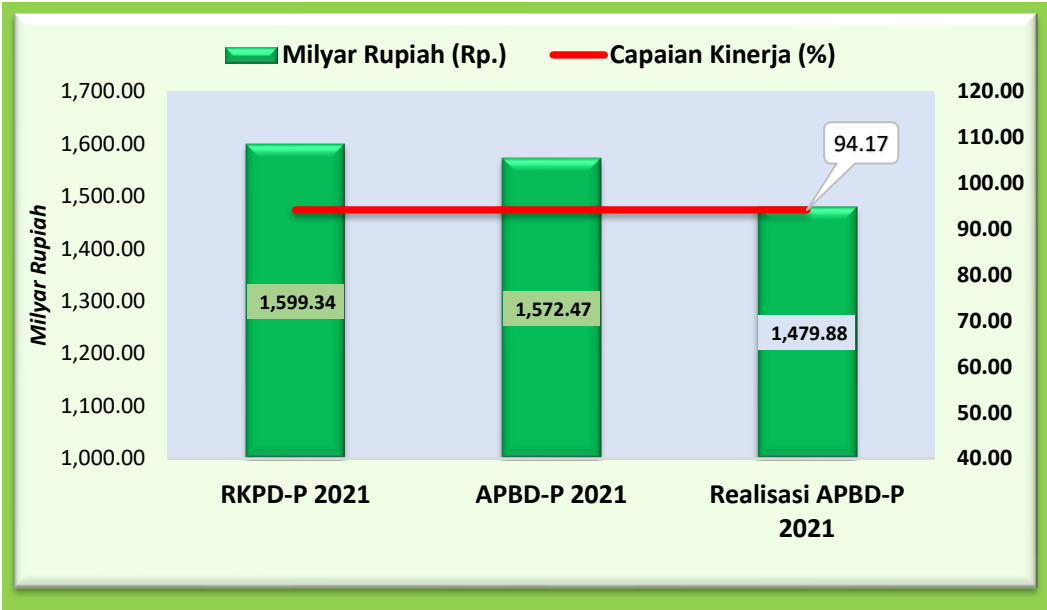
Program	Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Target RKPD 2021	Capaian 2021	Tingkat Capaian (%)
Perizinan Pendidikan	Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Yang Dilaksanakan Oleh Masyarakat			
6. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Meningkatnya Persentase Terlaksananya Pengembangan Bahasa Dan Sastra Daerah	100	100	100

Sumber Bappeda Prov. Sulteng 2022 (data diolah Kembali)

Dari hasil persandingan/konsistensi perencanaan penganggaran pada Bidang Pendidikan Tahun 2022, dapat diketahui bahwa penetapan pagu anggaran pada RKPD-P Tahun 2021 adalah sebesar Rp.1.599.335.984.724, menjadi sebesar Rp. 1.572.466.624.680, pada Pagu Anggaran APBD-P Tahun 2021 dengan tingkat Capaian keuangan sebesar 98,32 persen, yang berarti terjadi deviasi sebesar 1,68 persen atau mengalami penurunan sebesar Rp. 26.869.360.044 terhadap target Pagu Anggaran RKPD-P Tahun 2021. Sedangkan untuk realisasi anggaran tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 1.479.882.458.127 atau mencapai sebesar 94,11 persen dengan nilai silpa sebesar Rp. 92.584.166.553.

Berdasarkan hasil Evaluasi Capaian Kinerja RKPD Bidang Pendidikan pada Tahun 2021 Secara umum rata-rata tingkat capaian kinerja program (outcomes) mencapai sebesar 94,17 persen dengan kriteria penilaian realisasi capaian kinerja masuk dalam kategori ‘Sangat Tinggi’.

**Gambar 2.29**  
**Target dan Alokasi Anggaran (Milyar Rp.)**  
**Serta Capaian Kinerja Bidang Pendidikan Tahun 2021**



Sumber : Bappeda Sulteng (data diolah kembali), 2022

2.1.3.1.2 Kesehatan

Capaian kinerja pembangunan bidang kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2016-2020 dapat dilihat dari perkembangan indikator kesehatan pada tabel berikut:

**Tabel 2.48**  
**Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Kesehatan**  
**Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016 – 2020**

NO .	INDIKATOR KINERJA BIDANG PENDIDIKAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio posyandu per satuan balita (per 1000)	13,8	14,00	11,22	14,2	14,2
2.	Rasio puskesmas per satuan penduduk (per 1000)	0,06	0,06	0,09	0,03	0,03
3.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 1000)	0,009 9	0,010 7	0,011 6	0,012 4	0,012 6
4.	Rasio Dokter per satuan penduduk (per 1000)	0,027	0,026	0,028	0,035	0,041
5.	Rasio tenaga medis (bidan/perawat) persatuan penduduk (per 1000)	3,27	3,85	4,21	3,62	3,61

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021 (Data diolah kembali).

Pada tabel diatas menunjukkan perkembangan indikator kinerja kesehatan di Sulawesi Tengah selama periode 2016-2020 sebagai berikut.

- Perkembangan rasio posyandu per satuan balita cenderung menurun, yakni dari 13,8 per 1000 balita pada Tahun 2016 menjadi 14,2 per 1000 balita pada Tahun 2020.
- Perkembangan rasio puskesmas per satuan penduduk mengalami penurunan yakni dari 0,06 per 1000 penduduk pada Tahun 2016 menjadi 0,03 per 1000 penduduk pada Tahun 2020.
- Perkembangan rasio rumah sakit per satuan penduduk cenderung meningkat, yakni dari 0,0099 per 1000 penduduk pada Tahun 2016 menjadi 0,0126 per 1000 penduduk pada Tahun 2020.
- Perkembangan rasio dokter per satuan penduduk cenderung meningkat yakni dari 0,027 per 1000 penduduk pada Tahun 2016 menjadi 0,041 per 1000 penduduk pada Tahun 2020.
- Perkembangan rasio tenaga medis (perawat/bidan) per satuan penduduk cenderung meningkat, yakni dari 3,27 per 1000 penduduk pada Tahun 2016 menjadi 3,61 per 1000 penduduk pada Tahun 2020.

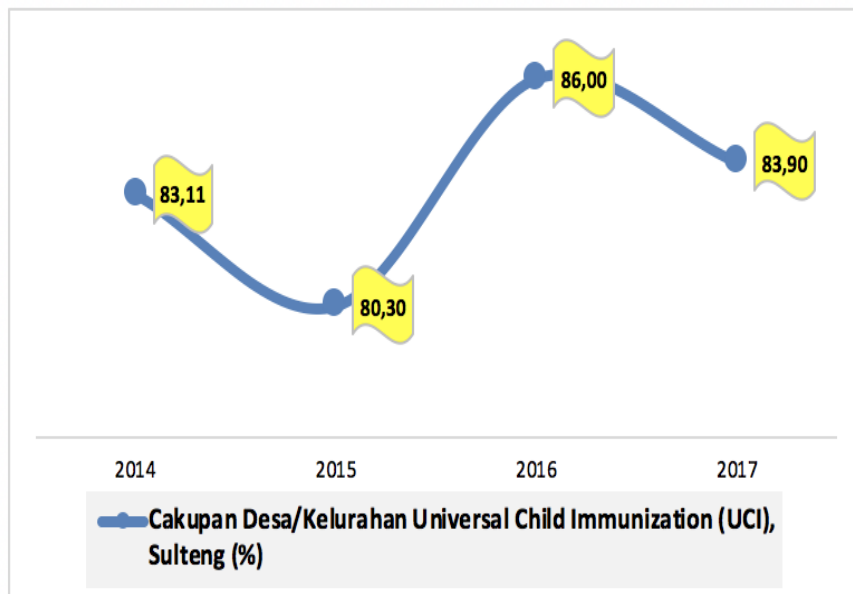
Selanjutnya, perkembangan cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Provinsi Sulawesi Tengah sejak periode 2014-2017 cenderung fluktuatif, yakni pada Tahun 2014 sebesar 83,11 persen menurun menjadi 80,30 persen pada Tahun 2015, pada Tahun 2016 cakupan desa/kelurahan UCI meningkat menjadi 86,0 persen, selanjutnya menurun menjadi 83,90 persen pada tahun 2017.

### **Gambar 2.30**

#### **Perkembangan Capaian Cakupan Desa/Kelurahan UCI**

#### **Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 - 2017**



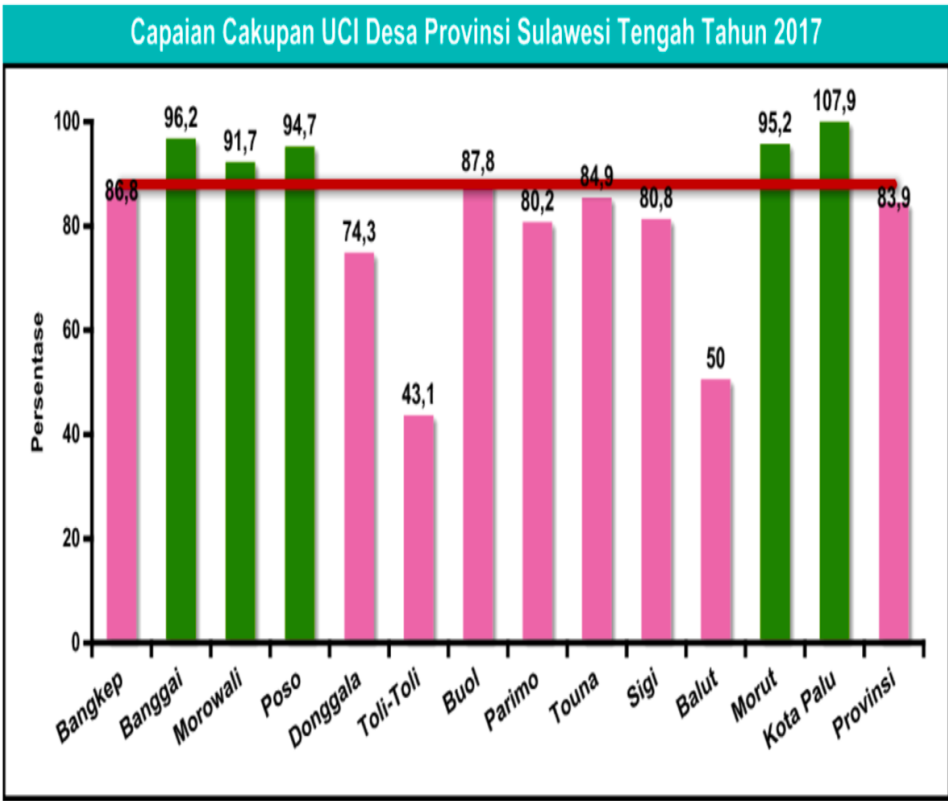


Sumber: Dinkesda Provinsi Sulteng, 2018.

Perspektif kabupaten/kota, pada Tahun 2017 capaian cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) tertinggi terdapat di Kota Palu sebesar 107,9 persen, sedangkan terendah di Kabupaten Tolitoli sebesar 43,1 persen. Dari 13 Kabupaten/Kota, terdapat 5 kabupaten/Kota yang mencapai target yaitu Kabupaten Banggai (96,2%), Kabupaten Morowali (91,7%), Kabupaten Poso (94,7%), Kabupaten Morowali Utara (95,2%) dan Kota Palu (107,9%).

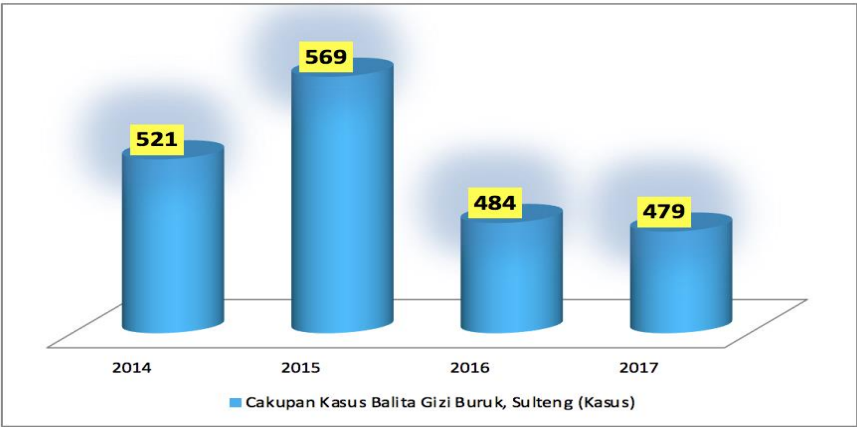
**Gambar 2.31**

**Capaian Cakupan Desa/Kelurahan UCI Kabupaten/Kota Tahun 2017**



Sumber: Dinkesda Provinsi Sulteng, 2018.

Sedangkan jumlah kasus balita gizi buruk di Sulawesi Tengah pada Tahun 2017 sebanyak 479 kasus, menurun dibanding dengan Tahun 2016 yang sebesar 484 kasus.



Sumber: Dinkesda Provinsi Sulteng, 2018.

Gambar 2.32

Perkembangan Jumlah Kasus Gizi Buruk Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014–2017

2.1.3.1.2.1 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu instrumen untuk mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui upaya memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin dan rentan serta daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan, meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga yang lebih baik, serta pendewasaan usia perkawinan melalui upaya peningkatan kesehatan reproduksi keluarga. Disamping itu melalui program KB juga diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak, peningkatan pendapatan keluarga khususnya bagi keluarga (kelompok masyarakat miskin), peningkatan kualitas lingkungan keluarga dan masyarakat.

Perkembangan pelaksanaan program KB di Sulawesi Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator pada tabel dan gambar berikut.

**Tabel 2.49**

**Perkembangan Jumlah Anak per Keluarga, Rasio Akseptor KB dan Cakupan Peserta KB Aktif di Provinsi Sulawesi Tengah**

**Tahun 2017 – 2021**

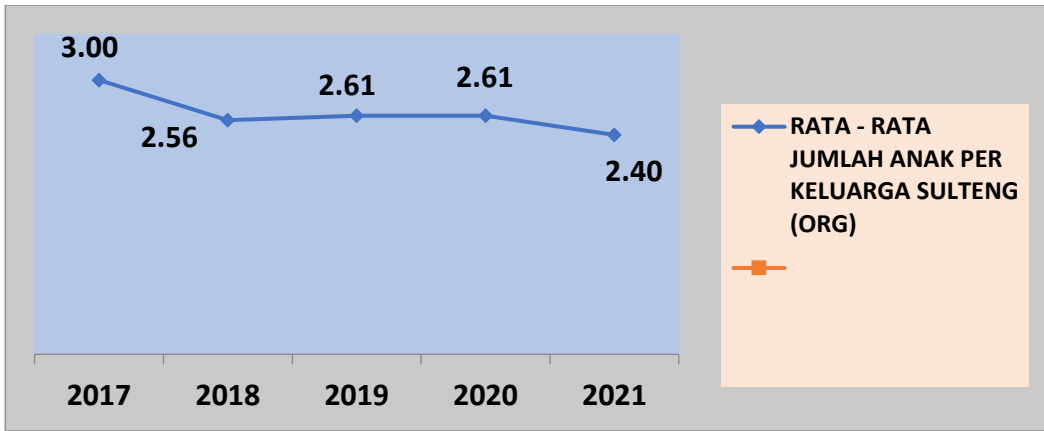
NO.	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1.	RASIO AKSEPTOR KB SULTENG (%)	26,79	9,99	11,23	12,22	14,66
2	CAPAIAN PESERTA KB AKTIF SULTENG (%)	73,00	76,99	78,53	76,45	13,00
3	RATA - RATA JUMLAH ANAK PER KELUARGA SULTENG (ORG)	3	2,56	2,61	2,61	2,4

Sumber: BKKBN Provinsi Sulteng dan BPS, 2022.

**Gambar 2.33**

**Perkembangan Jumlah Anak per Keluarga, Rasio Akseptor KB dan Cakupan Peserta KB Aktif di Provinsi Sulawesi Tengah**

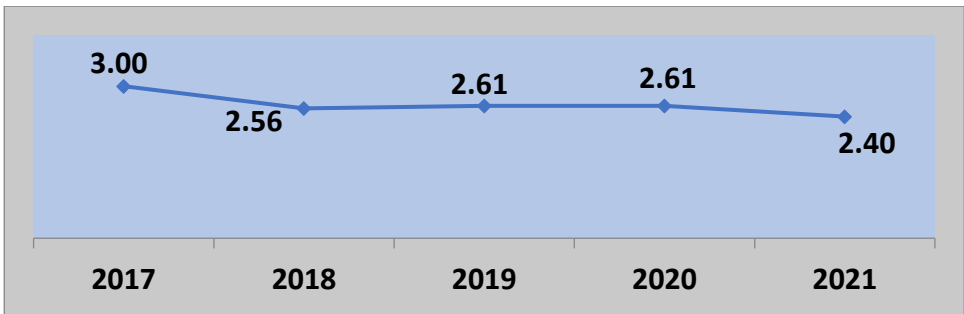
**Tahun 2017 – 2021**



Sumber: BKKBN Provinsi Sulteng dan BPS, 2022.

Gambar 2.34

**Perkembangan Rata-Rata Jumlah Anak Perkeluarga di Provinsi Sulawesi Tengah (Orang) Tahun 2017 – 2021**



Sumber: BKKBN Provinsi Sulteng dan BPS, 2021.

Terlihat bahwa perkembangan rata-rata jumlah anak per keluarga sepanjang periode Tahun 2017-2021, sebanyak 3 anak per keluarga. Sementara rasio akseptor KB diantara pasangan usia subur pada Tahun 2017 sebesar 26,79 persen, angka ini lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2018 hanya sebesar 9,99 persen, pada tahun 2019 kembali naik sebesar 11,23 persen, angka ini lebih rendah dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 12,22 persen, dan pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 14,66 persen, Sedangkan pada cakupan peserta KB aktif pada Tahun periode tahun 2017-2019 mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun pada tahun 2020 dan tahun 2021 kembali menurun dari 76,45 manjadi 13,00 persen.

**2.1.3.1.3 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**

Perkembangan dan pertumbuhan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Sulawesi Tengah dari tahun ke tahun menunjukan peningkatan yang sangat berarti. Bahkan saat ini UKM menjadi ujung tombak stabilisator dan penopang pertumbuhan perekonomian baik nasional maupun daerah. Perkembangan koperasi yang aktif, Usaha

Mikro Kecil dan Jumlah UKM non BPR/LKM UKM di Suawesi Tengah dapat dilihat pada gambar berikut.

**Tabel 2.50**  
**Banyaknya Koperasi menurut Status Keaktifan Koperasi**  
**dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, 2021**

Kabupaten/Kota	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	2	3	4
Lingkup Provinsi	56	35	91
Kabupaten Banggai Kepulauan	76	21	97
Kabupaten Banggai	139	40	179
Kabupaten Morowali	55	95	150
Kabupaten Poso	234	125	359
Kabupaten Donggala	61	75	136
Kabupaten Tolitoli	79	100	179
Kabupaten Buol	35	191	226
Kabupaten Parigi Moutong	222	9	231
Kabupaten Tojo Una-Una	41	27	68
Kabupaten Sigi	66	14	80
Kabupaten Banggai Laut	24	33	57
Kabupaten Morowali Utara	39	82	121
Kota Palu	89	130	219
Jumlah	1.216	977	2.193

Sumber: BPS 2022

Jumlah koperasi menurut status keaktifan di Sulawesi Tengah pada tahun 2021 sebanyak 2.193, yang aktif sebanyak 1.216 dan yang tidak aktif sebanyak 977, melihat data tersebut bahwa secara persentase pada tahun 2021 sebanyak 44,55 persen koperasi di Sulawesi Tengah berstatus tidak aktif.

Selanjutnya terlihat bahwa jumlah persentase koperasi yang aktif di Sulawesi Tengah pada tahun 2021 sebesar 55,45 persen. Sementara perkembangan usaha mikro kecil dan kecil pada Tahun 2021 sebesar 97,50 persen menurun sedikit jika dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 99,42 persen, sedangkan jumlah Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (Unit) mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 725.143 unit usaha jika dibandingkan pada tahun 2020 sebanyak 721.643 unit, sementara Jumlah BPR/LKM dari tahun 2021

sebanyak 72 unit, hanya mengalami kenaikan 1 unit jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 71 unit, seperti pada tabel berikut :

**Tabel 2.51**  
**Perkembangan Jumlah Koperasi UKM non BPR/LKM UKM (Unit)**  
**dan BPR/LKM (Unit) di Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2020-2021**

NO.	URAIAN	Target Indikator Kinerja Daerah		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian Pada Tahun ke-	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Koperasi aktif	65,72	65,78	55,45	55,20	84,38	83,92
2.	Jumlah UKM non BPR/LKM aktif	721.643	725.143	343.244	343.286	47,56	47,34
3.	Jumlah UKM BPR/LKM aktif	71	72	71	72	100,00	100,00
4.	Persentase Usaha Mikro dan kecil	97,07	97,10	99,42	97,50	102,42	100,41

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulteng Tahun 2022

Untuk melihat gambaran capaian kinerja Dinas Koperasi dan UMKM dapat dilihat antara lain pada rasio capaian tahun 2021 dimana rasio capaian dari jumlah UKM non BPR/LKM aktif sebanyak 47,34 persen, sedangkan jumlah UKM BPR/LKM aktif dengan rasio capaian sebanyak 100,00 persen dan Usaha Mikro dan Kecil melampaui dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 100,41 persen.

Sementara terkait dengan gambaran capaian kinerja utama (IKU) Bidang Koperasi, UKM Tahun 2021 dapat dilihat antara lain pada capaian indikator Jumlah Koperasi berkualitas dari target 10 persen dapat terealisasi sebesar 26 persen dengan tingkat capaian sebesar 260,00 persen, indikator Peningkatan Usaha Kecil yang naik kelas dari target 3 unit dapat terealisasi sebanyak 3 unit usaha dengan tingkat capaian sebesar 100,00 persen, indikator selanjutnya yaitu jumlah angkatan diklat perkoperasian dari target 13 angkatan dapat terealisasi sebanyak 17 angkatan atau melampaui target RKPD dengan persentase capaian sebesar 131 persen, dan jumlah angkatan diklat umkm dari target 17 angkatan hanya dapat terealisasi sebanyak 15 angkatan atau masih di bawah target RKPD dengan persentase capaian sebesar 88,24 persen. Gambaran capaian seluruh Indikator Kinerja Program (Outcomes) Urusan Koperasi dan UMKM pada Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.52**

**Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)**

**Bidang Koperasi, UKM Tahun 2021**

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja Program (Outcomes)</b>	<b>Target RKPD 2021</b>	<b>Realisasi RKPD 2021</b>	<b>Tingkat Capaian (%)</b>
1	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	BB	100,00
2	Jumlah Koperasi Berkualitas (%)	10	26	260,00
3	Jumlah Usaha Kecil yang Naik Kelas (unit)	3	3	100,00
4	Jumlah Diklat Perkoperasian (angkatan)	13	17	130,77
5	Jumlah Diklat UMKM (angkatan)	17	15	88,24

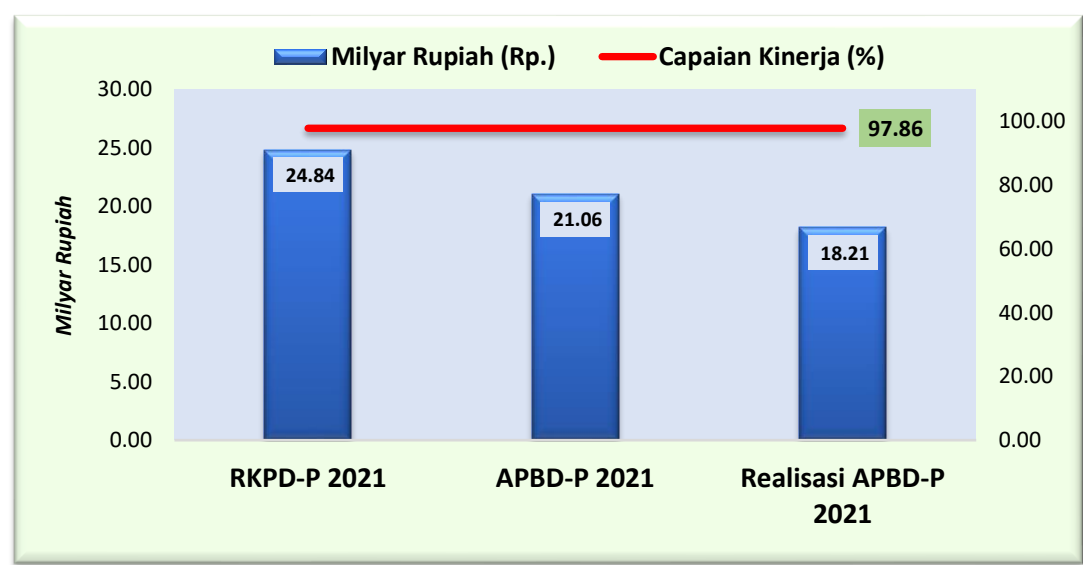
Sumber : Bappeda Sulteng (data diolah kembali), 2022

Dari hasil persandingan/konsistensi perencanaan penganggaran pada Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021, dapat diketahui bahwa penetapan pagu anggaran pada RKPD-P Tahun 2021 sebesar Rp. 24.841.848.676, menjadi Rp. 21.059.065.026 pada APBD-P Tahun 2021, yang berarti terjadi deviasi sebesar 15,23 persen atau mengalami penurunan sebesar Rp. 3.782.783.650 terhadap Target Pagu Anggaran RKPD-P Tahun 2021. Sedangkan untuk realisasi keuangan pada tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp. 18.214.693.905 atau mencapai sebesar 86,49 persen dengan nilai silpa sebesar Rp. 2.844.371.121.

Selanjutnya berdasarkan Matriks Evaluasi terhadap Hasil RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021, diketahui bahwa Tingkat Capaian Keuangan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah secara umum mencapai 84,77 persen dengan kriteria penilaian realisasi capaian keuangan berkategori 'Tinggi'. Sedangkan untuk tingkat capaian Kinerja RKPD Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun 2021 secara umum mencapai 110,63 persen

dengan kriteria penilaian realisasi capaian kinerja masuk dalam kategori ‘Sangat Tinggi’.

**Gambar. 2.35**  
**Target dan Alokasi Anggaran Serta Capaian Kinerja**  
**Koperasi dan UMKM Hidup Tahun 2021**



Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2022 (data diolah kembali)

**2.1.3.1.4 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Dalam rangka mensukseskan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat baik program nasional maupun program yang dibangun melalui pemerintah daerah sangat dibutuhkan kesiapan institusi/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di daerah.

Pada Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 jumlah kelompok binaan LPM di Sulawesi Tengah tidak mengalami perubahan sebanyak 1.842 lembaga. Dari jumlah binaan LPM tersebut, yang menjadi LPM berprestasi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 tidak mengalami perubahan sebanyak 12 LPM, namun jumlah LPM berprestasi tidak terdapat pada tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.53**  
**Perkembangan Kelompok Binaan LPM dan LPM Berprestasi**  
**di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020**



NO.	URAIAN	JUMLAH				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	KELOMPOK LPM	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842
2	LPM BERPRESTASI	12	12	12	12	0

Sumber: BPPMD Provinsi Sulteng, Tahun 2021.

#### 2.1.3.1.5 Kebudayaan

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan Sulawesi Tengah dan sekaligus sebagai pendorong perekonomian daerah. Untuk itu potensi pariwisata, seni dan budaya perlu terus untuk dikembangkan dan dipasarkan melalui kegiatan promosi, baik dalam negeri maupun manca negara.

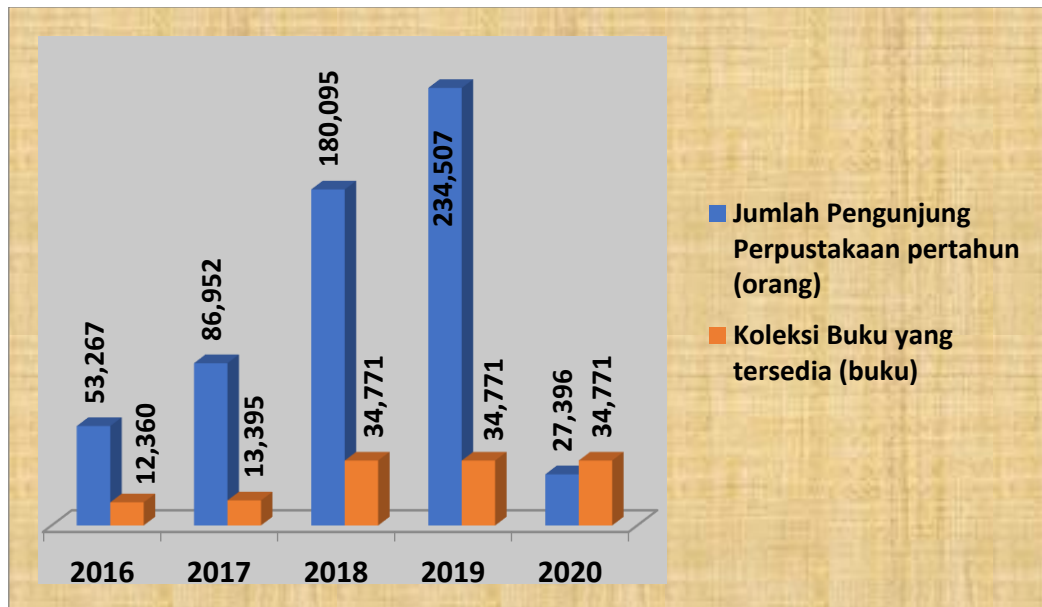
Penyelenggaraan festival seni dan budaya di Sulawesi Tengah pada Tahun 2017 sebanyak 17 kali, dengan jumlah sarana fasilitas penyelenggaraan seni dan budaya yaitu 20 buah. Selanjutnya jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Sulawesi Tengah sejak Tahun 2014-2017 mengalami peningkatan yakni dari 16 situs/BCB pada Tahun 2014 menjadi 18 situs/BCB pada Tahun 2017.

#### 2.1.3.1.6 Perpustakaan

Perpustakaan merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan kualitas sumberdaya manusia di Sulawesi Tengah. Sejak empat tahun terakhir, jumlah perpustakaan dan pengunjung perpustakaan semakin meningkat seiring meningkatnya jumlah koleksi buku yang tersedia.

**Gambar 2.36**

**Perkembangan Jumlah Perpustakaan, Pengunjung dan Koleksi Buku Perpustakaan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 – 2020**

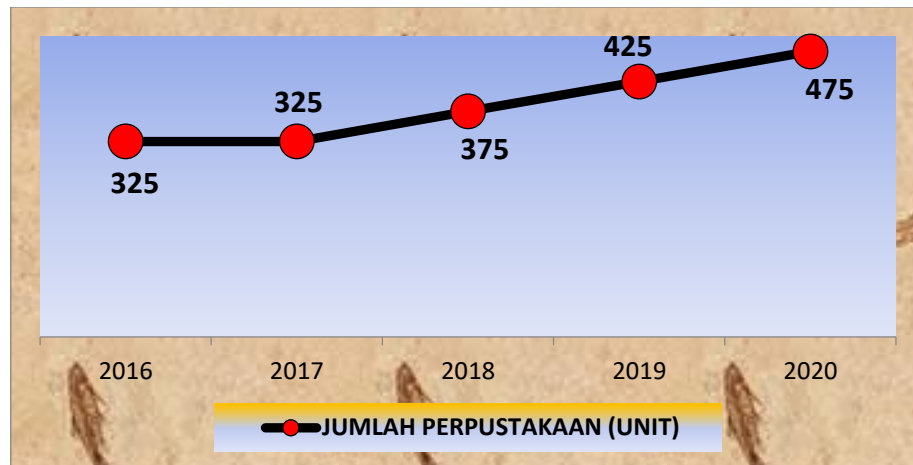


Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2021

Jumlah pengunjung perpustakaan di Sulawesi Tengah sejak periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 mengalami peningkatan, yaitu dari 53.267 orang pada Tahun 2016 menjadi 234.507 orang, namun pada Tahun 2020 menurun drastis dengan itu jumlah pengunjung perpustakaan hanya sebanyak 27.396 orang atau sekitar 11,68 persen, namun pada sisi lain jumlah perpustakaan dari tahun 2017 dengan jumlah 325 unit mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebanyak 475 unit, dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 2.37**

**Perkembangan Jumlah Perpustakaan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 – 2020**



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2021.

#### 2.1.3.1.7 Ketenagakerjaan

Penciptaan kesempatan kerja merupakan masalah yang amat mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pembangunan di bidang ekonomi harus diarahkan pada upaya penciptaan dan perluasan lapangan kerja.

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2022 sebanyak 2 336,62 ribu orang, naik 1,38 ribu orang dibanding Agustus 2021. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik sebesar 1,27 persen poin.

Penduduk yang bekerja sebanyak 1 586,32 ribu orang, meningkat sebanyak 61,59 ribu orang dari Agustus 2021. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (3,80 persen poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Konstruksi (1,18 persen poin).

Sebanyak 831,61 ribu orang (52,42 persen) bekerja pada kegiatan informal, turun 14,90 persen poin dibanding Agustus 2021.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sakernas 2022 sebesar 3,00 persen, turun 0,75 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021, Persentase setengah penganggur turun sebesar 2,77 persen poin, sementara persentase pekerja paruh waktu turun sebesar 4,87 persen poin dibandingkan Agustus 2021. „ Sedangkan tingkat Pengangguran Tertinggi sebesar 7,35 persen pada jenjang pendidikan Sekolah Menengan Kejuruan (SMK). „ Terdapat 24,77 ribu orang (1,06 persen penduduk usia kerja) yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (0,58 ribu orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (1,99 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (22,19 ribu orang).

##### 1) Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Sulawesi Tengah. Penduduk usia kerja pada Agustus 2022 sebanyak 2 336,62 ribu orang, naik sebanyak 35,77 ribu orang dibanding Agustus 2021 dan naik sebanyak 19,44 ribu orang jika dibanding Agustus 2021. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja.

## 2) Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Sulawesi Tengah. Penduduk usia kerja pada Agustus 2021 sebanyak 2 304,91 ribu orang, naik sebanyak 31,71 ribu orang dibanding Agustus 2021. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 1 635,47 ribu orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 701,15 ribu orang. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2022 terdiri dari 1 586,32 ribu orang penduduk yang bekerja dan 49,15 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2021, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 51,37 ribu orang. Penduduk bekerja mengalami kenaikan sebanyak 61,59 ribu orang dan pengangguran menurun sebanyak 10,23 ribu orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dibanding Agustus 2021. TPAK pada Agustus 2022 sebesar 69,99 persen naik 1,27 persen poin dibandingkan Agustus 2021. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2022, TPAK laki-laki sebesar 85,83 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 53,71 persen.

Dibandingkan Agustus 2021, TPAK laki-laki maupun perempuan mengalami kenaikan, masing-masing sebesar 1,05 persen poin dan 1,54 persen poin, ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel 2.54**

**Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja di Provinsi Sulawesi Tengah Agustus 2020 – Agustus 2022**

Status Keadaan Ketenagakerjaan		Agustus 2020 (ribu orang)	Agustus 2021 (ribu orang)	Agustus 2022 (ribu orang)	Perubahan Agustus 2020 - Agustus 2021		Perubahan Agustus 2021 - Agustus 2022	
					(ribu orang)	(%)	(ribu orang)	(%)
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Penduduk Usia Kerja</b>		2.269,14	2.304,91	2.336,62	35,77	1,58	31,71	1,38
<b>Angkatan Kerja</b>		1.575,73	1.584,10	1.635,47	8,37	0,53	51,37	3,24
-	Bekerja	1.516,35	1.524,73	1.586,32	8,38	0,55	61,59	4,04
-	Pengangguran	59,38	59,37	49,15	-0,01	0,02	10,23	-17,22
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>		693,41	720,81	701,81	27,40	3,95	19,66	-2,73
		(%)	(%)	(%)	(%) / Poin		(%) / Poin	
<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)</b>		69,44	68,73	69,99	-0,71		1,27	
-	Laki - Laki	85,82	84,78	85,83	-1,04		1,05	
-	Perempuan	52,50	52,17	53,71	-0,33		1,54	

Sumber : BRS 2022 (diolah)

3) Karakteristik Penduduk yang Bekerja

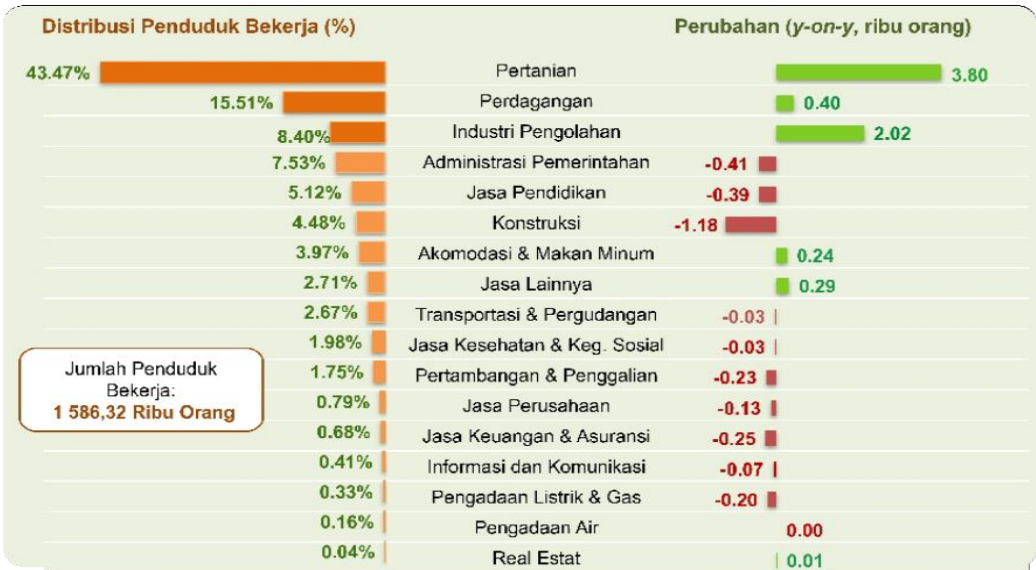
Bekerja adalah kegiatan seseorang untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan, keuntungan, maupun upah/gaji yang dilakukan paling sedikit satu jam dalam seminggu terakhir. Untuk melihat struktur penduduk bekerja maka perlu diperhatikan karakteristiknya. Karakteristik penduduk bekerja akan disajikan berdasarkan lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, jumlah jam kerja selama seminggu yang lalu.

a) Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2022, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 43,47 persen; Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 15,51 persen; dan Administrasi Pemerintahan sebesar 8,49 persen. Dominasi lapangan pekerjaan ini dalam menyerap tenaga kerja masih sama baik untuk Agustus 2021 maupun Agustus 2022. Apabila dibandingkan dengan Agustus 2021, tiga lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (3,80 persen poin); Industri Pengolahan (2,02 persen poin); dan Perdagangan (0,40 persen poin). Sementara tiga lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar adalah Konstruksi (1,18 persen poin); Administrasi Pemerintahan (0,41 persen poin); dan Jasa Pendidikan (0,39 persen poin).

**Gambar 2.38**

Persentase Penduduk Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan  
Utama, Agustus 2020 – Agustus 2021



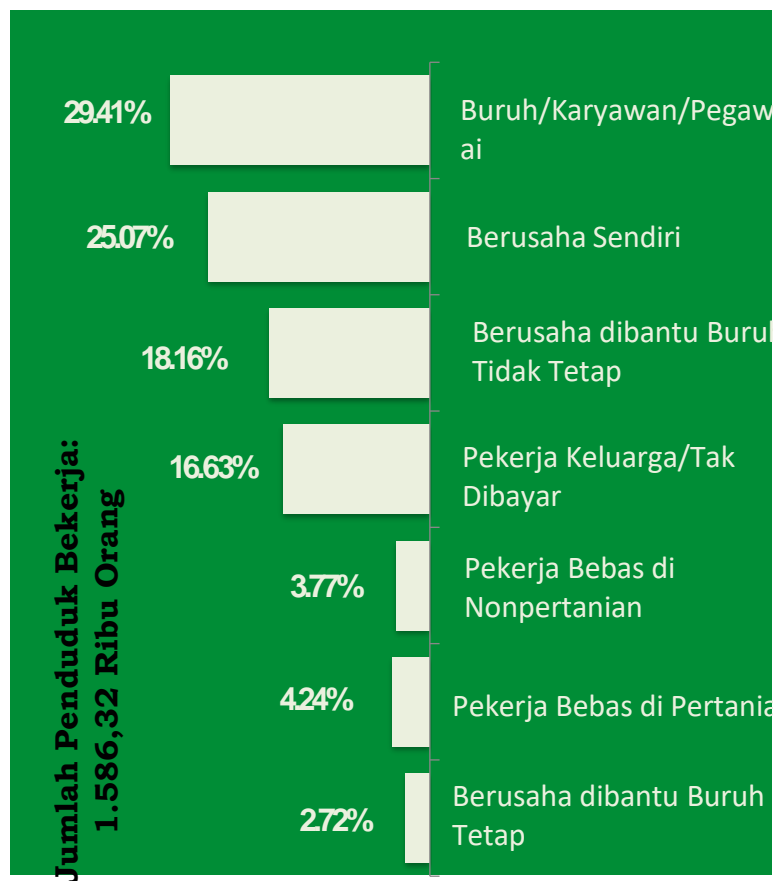
Sumber : BRS 2022 (diolah)

b) Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Pada Agustus 2022, penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 29,41 persen, sementara yang paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap/dibayar yaitu sebesar 2,72 persen. Dibandingkan Agustus 2021, status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/ tidak dibayar dan pekerja keluarga/ tidak dibayar mengalami kenaikan masing-masing sebesar 2,76 persen poin, 0,14 persen poin dan 0,28 persen poin. Status pekerjaan lain mengalami penurunan persentase. penurunan terbesar pada status buruh/ karyawan yaitu sebesar 0,84 persen poin (Lampiran 1) Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar). Pada Agustus 2022, penduduk yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 831,61 ribu orang (52,42 persen), sedangkan yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 754,71 ribu orang (47,58 persen). Penduduk bekerja di kegiatan informal pada Agustus 2021 turun sebesar 14,9 persen poin.

Gambar 2.39

Status Pekerjaan Utama Agustus 2022



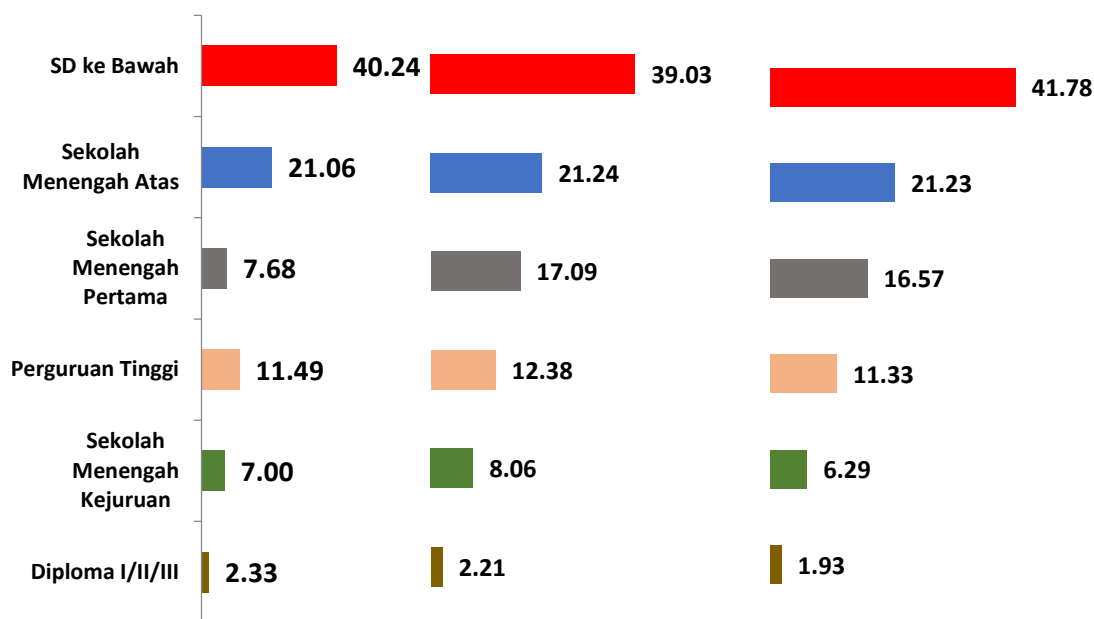
Sumber : BRS 2022 (diolah)

- c) Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
- Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2022, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD) yaitu sebanyak 41,78 persen. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma dan Universitas sebesar 13,26 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama baik pada Agustus 2021 maupun Agustus 2022.

Gambar 2.40

Persentase Penduduk Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan, Agustus 2020 – Agustus 2021

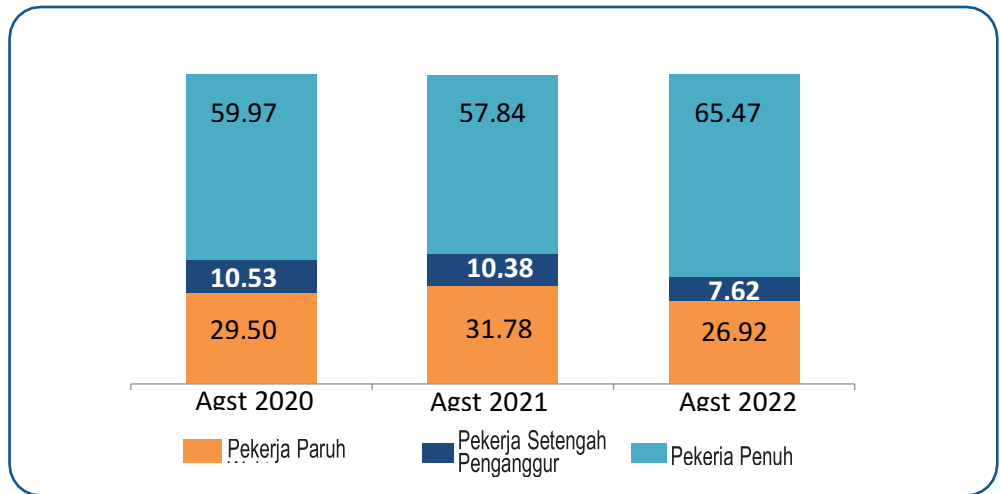




Sumber : BRS 2022 (diolah)

Dibandingkan dengan Agustus 2021, tenaga kerja dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama ke atas mengalami penurunan persentase. Sekolah Menengah Atas mengalami penurunan persentase terkecil yaitu 0,01 persen poin sedangkan Sekolah Menengah Kejuruan mengalami penurunan persentase terbesar yaitu 1,77 persen poin. Sementara penduduk bekerja dengan pendidikan SD ke bawah mengalami kenaikan sebesar 2,75 persen poin.

**Gambar 2.41**  
**Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja,**  
**Agustus 2020 – Agustus 2022**



Sumber : BRS 2022 (diolah)

d) Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja

Sebagian besar penduduk bekerja sebagai pekerja penuh (jam kerja minimal 35 jam per minggu) sebesar 65,47 persen pada Agustus 2022. Sementara 34,54 persen merupakan pekerja tidak penuh (jam kerja kurang dari 35 jam per minggu). Pekerja tidak penuh dikelompokkan dalam dua kategori yaitu setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu, masing-masing sebesar 7,62 persen dan 26,92 persen. Pekerja tidak penuh mengalami penurunan masing-masing sebesar 2,76 persen poin dan 4,86 persen poin jika dibandingkan Agustus 2021 (Lampiran 1).

- Setengah Pengangguran Menurut Jenis Kelamin

Setengah pengangguran adalah mereka yang jam kerjanya di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu), dan masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan lain. Tingkat setengah pengangguran pada Agustus 2022 adalah sebesar 7,62 persen. Hal ini berarti dari 100 penduduk bekerja terdapat sekitar delapan orang yang termasuk setengah penganggur. Dibandingkan Agustus 2021, tingkat setengah pengangguran mengalami penurunan sebesar 0,15 persen poin. Pada Agustus 2022, tingkat setengah pengangguran laki-laki sebesar 8,18 persen, sedangkan tingkat setengah pengangguran perempuan sebesar 6,68 persen. Dibandingkan Agustus 2021, tingkat setengah pengangguran baik laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan masing-masing 3,20 persen poin dan 2,03 persen poin.

- Pekerja Paruh Waktu Menurut Jenis Kelamin

Pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Tingkat pekerja paruh waktu

di Sulawesi Tengah pada Agustus 2022 sebesar 26,91 persen, yang berarti dari 100 orang penduduk bekerja terdapat sekitar 27 orang pekerja paruh waktu. Dibandingkan Agustus 2021, tingkat pekerja paruh waktu mengalami peningkatan masing-masing sebesar 2,29 persen poin dan 1,96 persen poin. Pada Agustus 2022, tingkat pekerja paruh waktu perempuan (38,14 persen) lebih tinggi dibanding pekerja paruh waktu laki-laki (20,12 persen). Dibandingkan Agustus 2021, tingkat pekerja paruh waktu laki-laki dan perempuan mengalami penurunan masing-masing sebesar sebesar 4,20 persen poin untuk laki-laki dan 6,15 persen poin untuk perempuan.

#### 4) Karakteristik Penganggur

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2022 sebesar 3,00 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar tiga orang penganggur. Pada Agustus 2022 TPT mengalami penurunan sebesar 0,75 persen poin dibandingkan Agustus 2021.

##### 1. TPT Menurut Jenis Kelamin

Pada Agustus 2022, TPT laki-laki sebesar 3,32 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 2,81 persen. Jika dibandingkan Agustus 2021, TPT laki-laki dan perempuan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,94 persen poin dan 0,42 persen poin.

Pada Agustus 2022, TPT perkotaan (4,34 persen) lebih tinggi dari TPT di daerah perdesaan (2,39 persen). TPT menurut daerah tempat tinggal memiliki pola yang sama dengan TPT provinsi. Dibandingkan Agustus 2021, TPT perkotaan turun sebesar 1,40 persen poin dan TPT perdesaan turun sebesar 0,47 persen poin.

##### 2. TPT Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pada Agustus 2022, TPT dari tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 7,35 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah yaitu sebesar 1,12 persen. Dibandingkan Agustus 2021, penurunan TPT terjadi pada semua kategori pendidikan kecuali jenjang pendidikan SMK dan Universitas. Penurunan TPT tertinggi pada kategori

pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar 1,55 persen poin. sedangkan kenaikan TPT tertinggi pada kategori pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yaitu sebesar 1,98 persen poin diikuti dengan kategori pendidikan universitas, naik sebesar 0,64 persen poin.

5) Pandemi COVID-19 dan Ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2022, penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu :

- a) Pengangguran Karena COVID-19;
- b) Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena COVID-19;
- c) Sementara Tidak Bekerja Karena COVID-19;
- d) Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena COVID-19.

Kondisi komponen pada pengangguran Kondisi COVID-19 dan Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 merupakan dampak pandemi COVID-19 pada mereka yang berhenti bekerja, sedangkan kondisi komponen Sementara Tidak Bekerja Karena COVID-19 dan Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena COVID-19 merupakan dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja, ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel 2.55**

**Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja,  
Agustus 2020– Agustus 2022**

No.	Komponen	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Perubahan			
					Ags 2020– Ags 2021		Ags 2021–Ags 2022	
		(ribu orang)			(ribu orang)	(%)	(ribu orang)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
a.	Pengangguran <sup>1</sup> Karena COVID-19	9,12	9,18	0,58	0,05	0.57	-8,59	- 93,64
b.	Bukan Angkatan Kerja (BAK) <sup>2</sup> Karena COVID-19	5,45	3,67	1,99	-1,78	- 32.58	-1,69	- 45,88
c.	Sementara Tidak Bekerja <sup>3</sup> Karena COVID-19	11,42	12,6	0	1,18	10.34	-12,6	-100
d.	Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengu- rangan Jam Kerja Karena COVID-19	202,92	192,17	22,19	-10,75	-5.30	- 169,98	- 88,45
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>228,91</b>	<b>217,62</b>	<b>24,77</b>	<b>- 11,29</b>	<b>-4.93</b>	<b>- 192,86</b>	<b>- 88,62</b>
-	Penduduk Usia Kerja (PUK)	2 269,14	2 304,91	2 336,62	35,77	1.58	31,71	1,38
		(persen poin)	(persen)	(persen)	(persen poin)		(persen poin)	

<b>Persentase terhadap PUK</b>	<b>10,09</b>	<b>9,44</b>	<b>1,06</b>	<b>-0,79</b>	<b>3,44</b>
--------------------------------	--------------	-------------	-------------	--------------	-------------

Sumber : BRS 2022 (diolah)

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 pada Agustus 2022 sebanyak 24,77 ribu orang, mengalami penurunan sebanyak 192,86 ribu orang atau sebesar 88,62 persen dibandingkan dengan Agustus 2021. Komposisi penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 terdiri dari 0,58 ribu orang pengangguran karena COVID-19; 1,99 ribu orang Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19; dan 22,19 ribu orang penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19. Sementara pada Agustus 2022, tidak terdapat orang sementara tidak bekerja karena COVID-19 di Sulawesi Tengah.

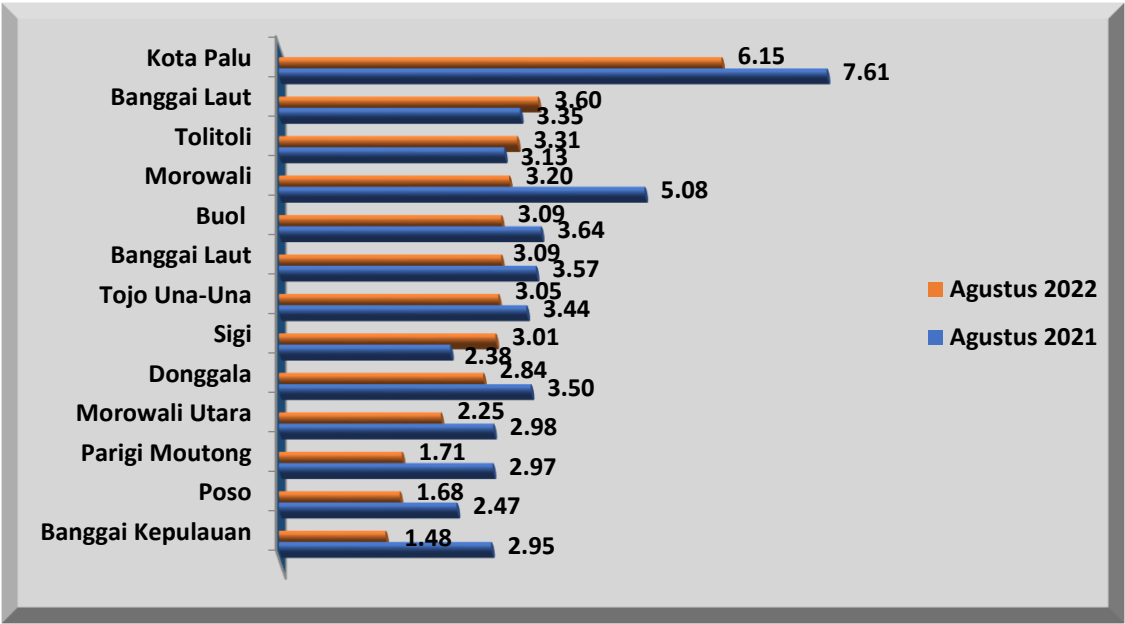
6) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Agustus 2022

Pada perspektif Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Kabupaten/Kota Agustus 2022, Kota Palu menempati urutan tertinggi yaitu sebesar 6,15 persen, menurun jika dibandingkan pada agustus 2021 sebesar 7,61 persen, dan yang paling rendah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan pada Agustus 2022 sebesar 1,48 persen, dan mengalami penurunan jika dibandingkan pada agustus 2021 sebesar 2,95 persen.

Secara umum Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Kabupaten/Kota mengalami penurunan, namun Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Sigi mengalami kenaikan, seperti pada gambar berikut :

**Gambar 2.42**

**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Agustus 2022**



Sumber : BRS 2022 (diolah)

**Tabel 2.56**  
**Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan**  
**Provinsi Sulawesi Tengah, Periode 2017-2021**

Indikator Ketenagakerjaan	2017	2018	2019	2020	2021
1	3	4	5	6	7
Angkatan Kerja (Orang)	1,428,583	1,502,972	1,486,561	1,575,730	2,304,910
Bekerja (Orang)	1,374,214	1,451,491	1,439,759	1,516,350	1,524,730
Pengangguran (Orang)	54,369	51,481	46,802	59,38	59,37
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	67.14	69.52	67.59	69.44	68.73
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)(%)	3.81	3.43	3.15	2.66	3.75

Sumber: BPS, 2022 dan Dinas Nakertrans Prov. Sulteng 2022

#### **2.1.3.1.8 Lingkungan Hidup**

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan lingkungan hidup dapat dilihat dari indikator antara lain; 1) Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi; serta 2) Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Provinsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. RPPLH disusun oleh pemerintah di tingkat nasional, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Provinsi Sulawesi Tengah pada 2019 dokumen RPPLH proses penyusunan, yang antara lain memuat daya dukung dan daya - 127 -amping lingkungan hidup.

##### **2) Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah**

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Provinsi Sulawesi Tengah telah menyelenggarakan KLHS untuk Kebijakan Rencana dan Program Daerah RPJMD.

#### **2.1.3.1.9 Urusan Pertanahan**

Urusan pertanahan dilaksanakan untuk meningkatkan penataan dan tercapainya perumusan kebijakan dalam urusan pertanahan. Wewenang pemerintah daerah dalam urusan pertanahan terbatas sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah pusat diantaranya pemberian izin lokasi. Izin lokasi diwajibkan bagi setiap perusahaan baik perorangan maupun badan hukum yang akan menanamkan modal dengan memanfaatkan lahan/tanah lintas daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi, penyelesaian sengketa tanah garapan lintas kabupaten/kota, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.

#### **2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan**



**2.1.3.2.1 Jumlah Investor dan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)**

Selain berperan sebagai penyedia sumber pembiayaan pembangunan daerah, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) juga berperan sebagai aktor/pelaku penting pembangunan daerah.

Perkembangan Nilai Investasi PMDN di Sulawesi Tengah sejak periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 mengalami perkembangan yang fuktuatif. Pada Tahun 2021 nilai PMDN sejumlah Rp3.012.341.100.000,- menurun dibanding realisasi Tahun 2020 sebesar Rp5.261.315.800.000,-. Sementara nilai investasi PMA di Sulawesi Tengah sepanjang periode 2017-2021 juga menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif. Pada Tahun 2020 Nilai PMA mencapai Rp39.684.282.680.000,- meningkat dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp25.617.411.568.119,-. keadaan realisasi Investasi PMA dan PMDN di Sulawesi Tengah secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.57**  
**Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN**  
**Di Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2017 – 2021**

Tahun	PMA		PMDN	
	Perusahaan	Nilai Investasi (Rp)	Perusahaan	Nilai Investasi (Rp)
2017	43	20.635.458.000.000	75	1.929.657.000.000
2018	23	9.010.437.440.000	103	12.689.562.560.000
2019	68	27.075.580.350.000	162	4.438.798.800.000
2020	68	25.617.411.568.119	162	5.261.315.800.000
2021	46	39.684.282.680.000	379	3.012.341.100.000

Sumber: BPM-P2TSPD Provinsi Sulteng, 2022.

2.1.3.2.2 Pariwisata

Perkembangan sektor pariwisata di Sulawesi Tengah turut memberi andil dalam proses pembangunan daerah. Sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi magnet bagi wisatawan asing/mancanegara untuk berkunjung di daerah Sulawesi Tengah.

Selama periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 jumlah kunjungan wisatawan dalam negeri di Sulawesi Tengah mengalami fluktuasi, yakni dari 3,050,126 orang Tahun 2017, Tahun 2018 meningkat menjadi 3,024,108 orang, pada Tahun 2019 kembali meningkat menjadi 3,322,845 orang, pada tahun 2020 dan tahun 2021 terjadi penurunan yang sangat signifikan yakni berjumlah 1,824,916 orang pada tahun 2020 dan 714,703 pada tahun 2021, dan Sementara jumlah kunjungan wisatawan asing tahun 2017 sampai dengan 2021 juga terjadi jumlah yang fluktuasi yaitu dari 24,7809 orang pada Tahun 2017 menurun menjadi 23,952 orang pada Tahun 2018, namun pada tahun 2019 kembali terjadi peningkatan menjadi 26,491 orang, namun pada tahun 2020 kembali menurun secara drastis menjadi 11,921 orang, selanjutnya pada Tahun 2021 terjadi penurunan yang signifikan menjadi 1,085 orang.

**Tabel 2.58**  
**Perkembangan Kunjungan Wisatawan Di Sulawesi Tengah,**  
**Tahun 2017 – 2021**

URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
Wisatawan Mancanegara	24,709	23,942	26,491	11,921	1,085
Wisatawan Nusantara (Domestik)	3,025,417	3,000,166	3,296,354	1,812,995	713,618
	3,050,126	3,024,108	3,322,845	1,824,916	714,703

Sumber: BPS dan Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulteng, 2022

**2.1.3.2.3 Kelautan dan Perikanan**

Produksi perikanan budidaya di Sulawesi Tengah pada Tahun 2020 mencapai 960.460.28 ton, meningkat dibandingkan dengan Tahun 2019 yang hanya mencapai 964.509,04 ton. Sementara produksi perikanan tangkap pada Tahun 2020 sebanyak 201.101,80 ton meningkat dibandingkan dengan Tahun 2019 yang hanya sebesar 196.519,30 ton. Perkembangan produksi perikanan di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2016-2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.59**  
**Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap**  
**Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 – 2020**

PRODUKSI PERIKANAN (TON)		
TAHUN	PERIKANAN BUDIDAYA	PERIKANAN TANGKAP
2016	1.339.013,78	212.330,60
2017	1.059.050,30	174.964,00
2018	918.186,40	171.115,00
2019	964.509,04	196.519,30
2020	960.460.28	201.101.80

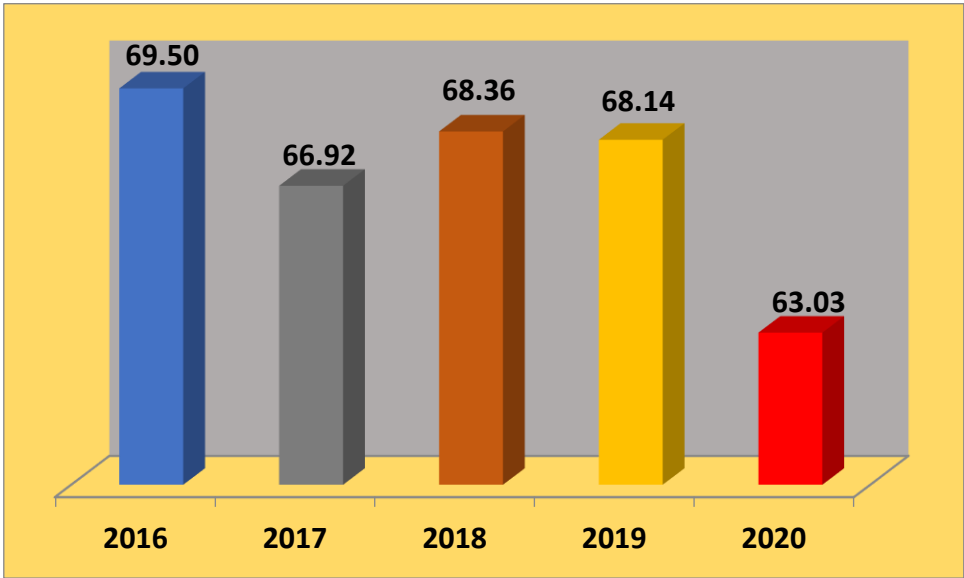
Sumber: BPS, 2020; dan Diskanlat Provinsi Sulteng, 2021.

Perkembangan konsumsi ikan di Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 cenderung fluktuatif, dimana pada Tahun 2016 rata-rata konsumsi ikan mencapai 69,50 kalori/kapita/hari menurun menjadi 66,92 kalori/kapita/hari pada Tahun 2017, selanjutnya pada Tahun 2018 konsumsi ikan meningkat menjadi 68,36 kalori/kapita/hari, dan pada Tahun 2019 konsumsi ikan sedikit menurun menjadi 68,14 kalori/kapita/hari, dan terjadi

penurunan drastis sebanyak 63.03 kalori/kapita/hari pada tahun 2020, dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 2.43**

**Perkembangan Rata-Rata Konsumsi Ikan di Sulawesi Tengah  
(Kalori/perkapita/tahun) Tahun 2016 – 2020**



Sumber: BPS, Tahun 2021.

Selanjutnya Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah mencadangkan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas 1.379.159,41 ha melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 523/635A/Dis.KANLUT-GST/2017. Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tengah tersebut terdiri atas:

1. Kawasan Konservasi Perairan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Doboto di Kabupaten Donggala, Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol (60.042,75 ha);
2. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Teluk Tomini di Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Tojo Una-Una (137.766,95 ha);
3. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Banggai Dalaka di Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut (869.059,94 ha); dan
4. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Morowali di Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Morowali (312.289,77 ha).

**2.1.2.3.4 Perindustrian dan Perdagangan**

Perkembangan sektor industri dan perdagangan di Sulawesi Tengah cenderung stagnan. Untuk sektor industri skala kecil dan menengah cukup berkembang tetapi untuk industri skala besar (industri manufaktur) tidak begitu berkembang. Industri skala kecil dan menengah yang dikembangkan oleh masyarakat dan swasta, seperti industri kerajinan tangan (rotan dan bambu), meubel, food (kuliner), dan penginapan (homestay). Adapun sektor perdagangan lebih bergerak pada perdagangan antar pulau dan antar provinsi untuk komoditas hasil-hasil pertanian, perkebunan dan perikanan laut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2038, Industri unggulan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas :

- a. Industri Pangan terdiri dari :
  - Industri pengolahan Berbahan Baku Hasil Pertanian dan Peternakan
  - Industri Pengolahan Minyak Nabati
  - Industri berbahan baku ikan dan hasil kelautan
  - Industri olahan coklat
  - Industri bawang
  - Industri olahan kopi
- b. Industri Hulu Agro
  - Industri pengolahan kelapa terpadu
  - Industri pengolahan minyak atsiri (cengkeh, pala dan nilam)
  - Industri pengolahan kelapa sawit
  - Industri karet
  - Industri Pakan
- c. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka (Kayu dan Rotan)
  - Industri Tekstil
  - Industri Furniture
  - Industri Pengolahan Kayu dan Rotan
  - Industri Kerajinan Kayu dan Anyaman Rotan
- d. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara
  - Industri Minyak dan Gas
- e. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam
  - Industri Besi
  - Industri Nikel
  - Industri Bahan Galian Bukan Logam

#### **2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah**

Dalam konteks otonomi daerah, peran pemerintah daerah lebih dituntut sebagai pemrakarsa dalam menciptakan dan meningkatkan kemandirian daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah.

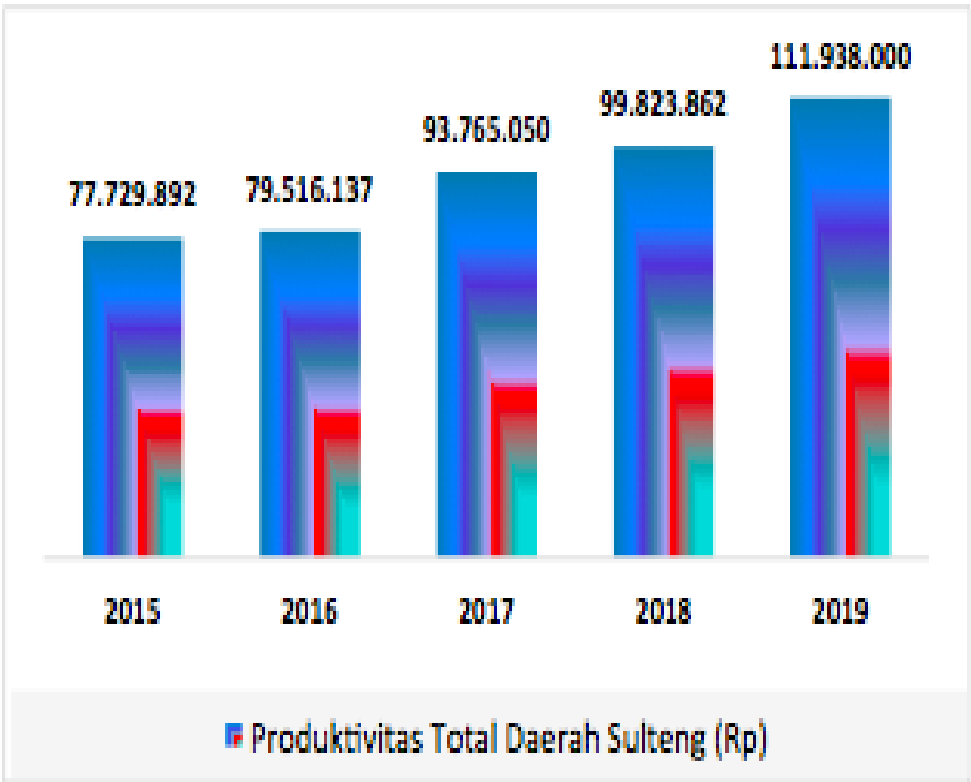
**2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

**2.1.4.1.1 Produktivitas Total Daerah**

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang telah dicapai tidak lepas dari peran semua sektor lapangan usaha. Produktivitas Total daerah menunjukkan seberapa besar bilah tambah bruto yang diciptakan oleh suatu daerah. Nilai produktivitas sektor ekonomi daerah yang tangguh diharapkan dapat mendukung daya saing daerah di era otonomi.

Produktivitas Total Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 menunjukkan *trend* yang meningkat, yakni dari Rp77.729.892,- pada Tahun 2015 menjadi Rp111.938.000,- pada Tahun 2019, dengan rata-rata peningkatan sebesar 9,70 persen pertahun.

**Gambar 2.44**  
**Perkembangan Produksi Total Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2015–2019**

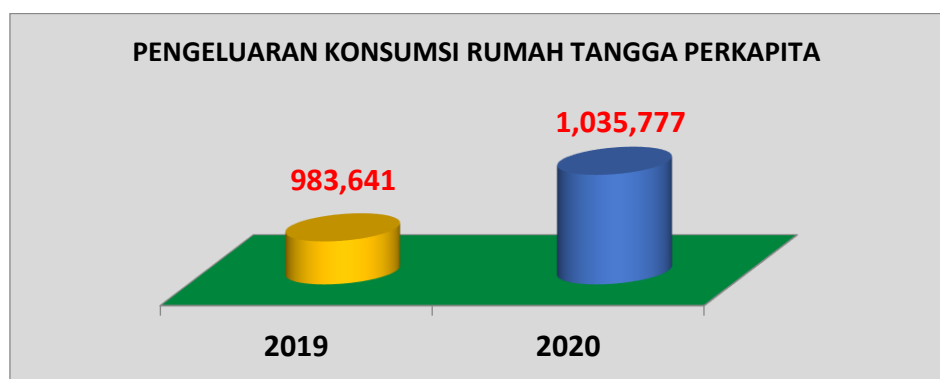


Sumber: BPS, Tahun 2020 (Data Diolah kembali).

#### 2.1.4.1.2 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita di Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 menunjukkan *trend* peningkatan, yakni dari Rp983.641,- perkapita perbulan pada Tahun 2019 mencapai Rp1.035.777,- perkapita perbulan pada Tahun 2020, ditunjukkan pada gambar berikut :

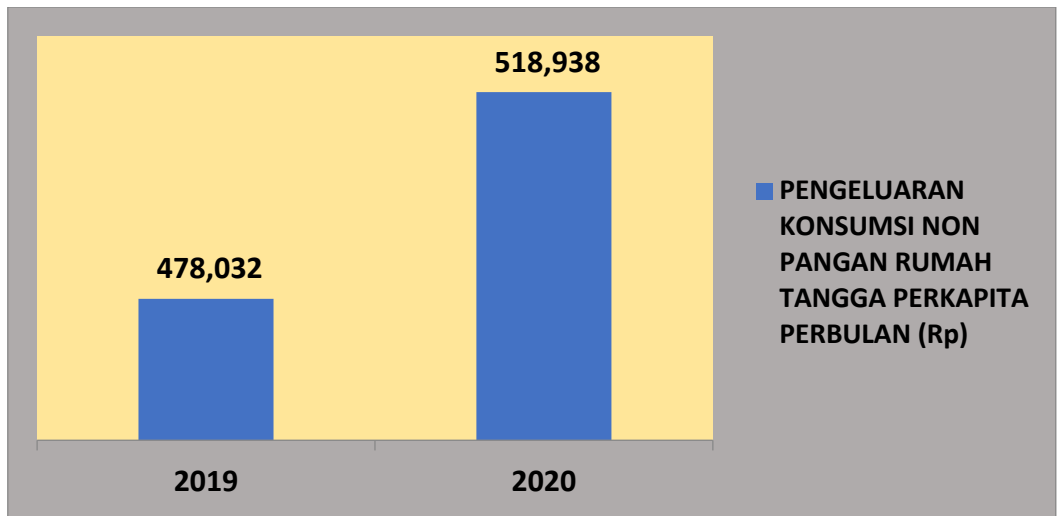
**Gambar 2.45**  
**Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019–2020**



Sumber: BPS, Tahun 2021.

Selanjutnya, Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga Perkapita di Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 juga menunjukkan *trend* peningkatan, yakni dari Rp478.032,- perkapita perbulan pada Tahun 2019 menjadi Rp518.938,- perkapita perbulan pada Tahun 2020.

**Gambar 2.46**  
**Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah**  
**Tangga Perkapita Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019–2020**



Sumber: BPS, Tahun 2021.

#### 2.1.4.1.3 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan petani dari waktu ke waktu, dan diharapkan bahwa petani mengalami surplus (pendapatan melebihi pengeluaran= $NTP > 100$ ). NTP diperoleh dari hasil perbandingan indeks harga yang diterima petani ( $I_t$ ) terhadap indeks harga yang dibayar petani ( $I_b$ ) dan nilai NTP dinyatakan dalam bentuk persentase.

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/dayabeli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produksi pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Sulawesi Tengah selama Desember 2022 sebesar 103,51 naik 0,52 persen dibandingkan NTP bulan sebelumnya, Indeks harga yang diterima ( $I_t$ ) mengalami peningkatan indeks sebesar 1,43 persen sedangkan indeks harga yang dibayar petani ( $I_b$ ) juga mengalami kenaikan indeks sebesar 0,81 persen, NTP tertinggi terjadi pada subsektor Hortikultura sebesar 117,05 sedangkan NTP terendah terjadi pada subsektor Tanaman Pangan sebesar 94,69 persen, Nilai Tukar Usaha Rumah tangga Pertanian (NTUP) sebesar 100,54 mengalami kenaikan sebesar 0,44 persen dibandingkan bulan November 2022.

Di tingkat nasional pada bulan Desember 2022, NTP mengalami kenaikan sebesar 1,11 persen bila dibandingkan dengan NTP bulan November, sedangkan untuk NTUP juga mengalami kenaikan sebesar 1,59 persen, Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Petani di tingkat nasional pada bulan Desember 2022 masing-masing sebesar 109,00 dan 108,96.

#### 1. Nilai Tukar Petani (NTP)



Nilai Tukar Petani (NTP) yang berperan sebagai indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan, merupakan persentase yang diperoleh dari perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian terhadap barang dan jasa baik yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian. Sehingga, semakin tinggi NTP secara relatif semakin kuat tingkat kemampuan atau daya beli petani.

Dari hasil pemantauan harga penjualan komoditas hasil pertanian di tingkat produsen, biaya produksi, dan konsumsi rumah tangga terhadap barang dan jasa di wilayah perdesaan selama Desember 2021 menunjukkan bahwa NTP Provinsi Sulawesi Tengah naik sebesar 0,61 persen, yakni dari 102,88 pada November 2021 menjadi 103,51 pada Desember 2021. Hal ini disebabkan perubahan indeks harga yang diterima petani (It) lebih besar dibandingkan dengan kenaikan perubahan indeks harga yang dibayar petani (Ib), yakni masing-masing sebesar 1,43 persen dan 0,81 persen.

**Tabel 2.60**  
**NTP Menurut Subsektor dan Perkembangannya,**  
**November – Desember 2021 (2018 = 100)**

SUB SEKTOR	NOVEMBER 2021	DESEMBER 2021	PERUBAHAN (%)
1	2	3	4
<b>1. Tanaman Pangan</b>			
a. Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP)	96,88	95,93	-0,97
b. Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It)	107,71	107,72	0,01
- Padi	105,11	104,81	-0,29
- Palawija	119,65	121,10	1,21
c. Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani (Ib)	111,19	112,29	0,99
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	111,99	113,35	1,21
- Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM)	109,11	109,55	0,40
<b>2. Hortikultura</b>			
a. Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH)	94,01	108,21	15,10
b. Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It)	103,19	119,57	15,87
- Sayur-sayuran	102,72	122,60	19,35
- Buah-buahan	105,86	105,79	-0,07
- Tanaman Obat	94,74	95,81	1,13
c. Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani (Ib)	109,76	110,50	0,67
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	110,37	111,23	0,77
- Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM)	106,67	106,84	0,16
<b>3. Tanaman Perkebunan Rakyat</b>			
a. Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR)	107,86	107,93	0,06
b. Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It)	118,71	119,68	0,82
- Tanaman Perkebunan Rakyat	118,71	119,68	0,82
c. Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani (Ib)	110,05	110,89	0,76
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	110,04	111,02	0,89
- Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM)	110,11	110,26	0,13

1	2	3	4
<b>4. Peternakan</b>			
a. Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)	99,11	97,98	-1,15
b. Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It)	109,00	108,47	-0,48
- Ternak Besar	106,36	105,55	-0,77
- Ternak Kecil	110,57	110,94	0,33
- Unggas	118,01	118,57	0,47
- Hasil Ternak	116,80	116,54	-0,22
c. Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani (Ib)	109,97	110,71	0,67
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	110,38	111,71	1,21
- Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM)	109,47	109,47	0,00
<b>5. Perikanan</b>			
a. Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)	102,76	104,28	1,47
b. Indeks Harga yang Diterima oleh Nelayan dan Pembudidaya Ikan (It)	112,17	114,70	2,25
- Tangkap	112,60	115,23	2,34
- Budidaya	107,23	108,59	1,27
c. Indeks Harga yang Dibayar oleh Nelayan dan Pembudidaya Ikan (Ib)	109,16	109,99	0,77
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	111,17	112,46	1,16
- Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM)	105,54	105,57	0,02
<b>5.1 Perikanan Tangkap</b>			
a. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	102,97	104,56	1,54
b. Indeks Harga yang Diterima oleh Nelayan (It)	112,60	115,23	2,34
- Penangkapan Perairan Umum	99,30	101,94	2,66
- Penangkapan Laut	112,71	115,34	2,33
c. Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (Ib)	109,35	110,20	0,78
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	111,19	112,50	1,18
- Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM)	105,95	105,97	0,02
<b>5.2 Perikanan Budidaya</b>			
a. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	100,25	100,94	0,69
b. Indeks Harga yang Diterima oleh Pembudidaya Ikan (It)	107,23	108,59	1,27
- Budidaya Air Tawar	115,95	117,36	1,22
- Budidaya Laut	103,81	104,70	0,86
- Budidaya Air Payau	115,89	118,65	2,39
c. Indeks Harga yang Dibayar oleh Pembudidaya Ikan (Ib)	106,96	107,58	0,58
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	110,99	111,94	0,86
- Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM)	100,86	100,98	0,12

1	2	3	4
<b>NTP Gabungan</b>			
a. Nilai Tukar Petani (NTP)	102,88	103,51	0,61
b. Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It)	113,45	115,08	1,43
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	110,28	111,17	0,81
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	110,70	111,83	1,02
- Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM)	109,26	109,47	0,19
<b>NTP Gabungan Tanpa Perikanan</b>			
a. Nilai Tukar Petani (NTP)	102,89	103,45	0,55
b. Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It)	113,54	115,10	1,37
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	110,36	111,26	0,82
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	110,67	111,78	1,01
- Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM)	109,53	109,75	0,20

Sumber Data : BPS 2022

## 2. Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It)

Selama Desember 2021, indeks harga yang diterima petani tercatat 115,08 atau naik sebesar 1,43 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 113,45. Peningkatan ini dipengaruhi oleh naiknya (It) sebagian besar subsektor yaitu tanaman pangan sebesar 0,01 persen, tanaman hortikultura sebesar 15,87 persen, tanaman perkebunan rakyat sebesar 0,82 persen, dan subsektor perikanan sebesar 2,25 persen.

## 3. Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani (Ib)

Indeks harga yang dibayar petani (Ib) dipengaruhi oleh komponen pengeluaran baik untuk konsumsi rumahtangga maupun fluktuasi harga barang dan jasa yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Indeks harga yang dibayar petani selama Desember 2021 seluruh subsektor mengalami kenaikan sebesar 0,81 persen dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya (Ib) seluruh subsektor.

## 4. NTP Menurut Subsektor

### 4.1 NTP Tanaman Pangan (NTPP)

NTP subsektor tanaman pangan selama bulan Desember 2021 mengalami penurunan indeks sebesar 0,97 persen yakni dari 96,88

pada November 2021 turun menjadi 95,93 pada Desember 2021. Penurunan NTPP disebabkan oleh perubahan indeks yang dibayar petani (Ib) lebih besar dari perubahan indeks yang diterima petani (It).

Perubahan indeks harga yang dibayarkan petani (Ib) pada subsektor tanaman pangan bulan Desember 2021 sebesar 0,99 persen dan perubahan indeks yang diterima petani (It) sebesar 0,01 persen.

#### **4.2 NTP Tanaman Hortikultura (NTPH)**

Selama bulan Desember 2021 subsektor Hortikultura mengalami kenaikan NTP sebesar 15,10 persen atau berubah dari 94,01 pada November 2021 menjadi 108,21 pada Desember 2021. Kenaikan NTPH disebabkan oleh naiknya perubahan (It) sangat signifikan sebesar 15,87 persen.

Indeks harga yang dibayar petani (ib) subsektor Hortikultura pada Desember 2021 sebesar 110,05. Kenaikan indeks harga yang dibayar petani dipengaruhi oleh naiknya indeks harga konsumsi rumah tangga dan indeks BPPBM masing-masing sebesar 0,77 persen dan 0,16 persen.

#### **4.3 NTP Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR)**

Nilai tukar subsektor tanaman perkebunan rakyat selama Desember 2021 mengalami kenaikan perubahan indeks sebesar 0,06 persen. Nilai NTPR yang sebelumnya sebesar 107,86 pada bulan November 2021 naik menjadi 107,93 pada Desember 2021. Kenaikan ini disebabkan oleh perubahan indeks harga yang diterima petani (It) sebesar 0,82 persen, adapun perubahan indeks harga yang dibayar petani (Ib) juga mengalami kenaikan sebesar 0,76 persen.

#### **4.4 NTP Peternakan (NTPT)**

Subsektor peternakan pada bulan Desember 2021 mengalami penurunan NTP sebesar 1,15 persen. Nilai NTPT yang semula 99,11 pada November 2021 turun menjadi 97,98 pada Desember 2021. Kondisi ini disebabkan oleh naiknya indeks harga yang dibayar petani (Ib) sebesar 0,67 persen, sedangkan indeks yang diterima petani (It) mengalami penurunan indeks sebesar 0,48 persen.

Indeks harga yang diterima (It) petani subsektor peternakan pada bulan Desember 2021 tercatat sebesar 108,47 sedangkan (Ib) tercatat sebesar 110,71. Kenaikan (Ib) dipengaruhi oleh naiknya perubahan indeks konsumsi rumah tangga sebesar 1,21 persen, sedangkan untuk indeks BPPBM tidak mengalami perubahan indeks. Perubahan indeks harga yang diterima petani (It) dipengaruhi oleh perubahan turunnya indeks ternak besar 0,77 persen dan hasil ternak/unggas sebesar 0,22 persen. Sedangkan untuk ternak kecil dan

unggas masing-masing naik sebesar 0,33 persen, 0,47 persen dan 0,76 persen.

#### **4.5 NTP Perikanan (NTNP)**

Selama bulan Desember 2021, subsektor perikanan mengalami kenaikan perubahan indeks nilai tukar sebesar 1,47 persen atau berubah dari 102,76 pada November 2021 naik menjadi 104,28 pada Desember 2021. Kondisi ini disebabkan oleh naiknya indeks harga yang diterima petani (It) sebesar 2,25 persen lebih besar dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani (Ib) sebesar 0,77 persen.

Pada kelompok perikanan tangkap (NTN), terjadi kenaikan nilai tukar nelayan sebesar 1,54 persen yakni dari 102,97 pada November 2021 naik menjadi 114,70 pada Desember 2021. Kenaikan nilai tukar pada subkelompok perikanan tangkap disebabkan oleh naiknya indeks harga yang diterima petani (It) pada kelompok penangkapan ikan di perairan umum dan di laut masing-masing sebesar 2,66 persen dan 2,33 persen.

Kelompok perikanan budidaya (NTPi) mengalami kenaikan indeks nilai tukar sebesar 0,69 persen yakni dari 100,25 pada November 2021 menjadi 100,94 pada Desember 2021. Hal ini disebabkan oleh naiknya (It) budidaya tawar sebesar 1,22 persen, budidaya air laut sebesar 0,86 dan budidaya air payau sebesar 2,39 persen. Indeks harga yang dibayar petani (Ib) juga mengalami kenaikan perubahan indeks sebesar 0,58 persen. Kenaikan (Ib) dipengaruhi oleh naiknya indeks konsumsi rumah tangga sebesar 0,86 persen dan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) sebesar 0,12 persen.

### **5. Indeks Harga Dibayar Petani Menurut Kelompok Pengeluaran**

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap pengeluaran petani selama Desember 2021 dapat dirinci menurut indeks harga yang dibayar petani baik untuk keperluan rumah tangga maupun keperluan proses produksi di sektor pertanian.

Berdasarkan 11 subkelompok konsumsi rumah tangga pada tahun dasar 2018, diketahui bahwa indeks harga yang dibayar petani (Ib) untuk konsumsi rumah tangga mengalami kenaikan indeks sebesar 1,02 persen, yakni dari 110,70 pada November 2021 naik menjadi 111,83 pada Desember 2021. Hal ini disebabkan naiknya seluruh indeks subkelompok, baik itu subkelompok makanan, minuman dan

tembakau sebesar 1,59 persen, subkelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,05 persen; subkelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar sebesar 0,31 persen; subkelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,33 persen; subkelompok Kesehatan sebesar 0,25 persen; subkelompok transportasi sebesar 0,17 persen; subkelompok penyediaan makanan dan minuman/retoran sebesar 0,09 serta subkelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya naik sebesar 0,14 persen.

Indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) mengalami kenaikan sebesar 0,19 persen. Hal ini disebabkan oleh kenaikan sebagian besar subkelompok yakni; subkelompok pengeluaran bibit naik sebesar 0,02 persen; pupuk, pestisida, obat dan pakan sebesar 0,58 persen; sewa dan pengeluaran lainnya sebesar 0,24 persen, subkelompok barang modal naik sebesar 0,09 persen dan subkelompok upah buruh naik sebesar 0,01 persen. Subkelompok transportasi dan komunikasi mengalami penurunan indeks sebesar 0,06 persen. Indeks yang dibayar petani (Ib) mengalami kenaikan perubahan indeks sebesar 0,81 persen, yakni dari 110,28 pada bulan November naik menjadi 111,17 pada bulan Desember 2021.

**Tabel 2.61**  
**Indeks Harga yang Dibayar Petani Menurut Kelompok**  
**Pengeluaran, November -Desember 2021**

NO.	SUBSEKTOR	NOVEMBER 2021	DESEMBER 2021	PERUBAHAN (%)
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Konsumsi Rumah Tangga</b>	<b>110,70</b>	<b>111,83</b>	<b>1,02</b>
	1. Makanan, Minuman dan Tembakau	112,33	114,12	1,59
	2. Pakaian dan Alas Kaki	107,46	107,52	0,05

NO.	SUBSEKTOR	NOVEMBER 2021	DESEMBER 2021	PERUBAHAN (%)
1	2	3	4	5
	3. Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Lainnya	107,23	107,56	0,31
	4. Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	110,91	111,27	0,33
	5. Kesehatan	110,70	110,97	0,25
	6. Transportasi	107,38	107,57	0,17
	7. Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	96,87	96,87	0,00
	8. Rekreasi, Olahraga dan Budaya	107,00	107,00	0,00
	9. Pendidikan	100,61	100,61	0,00
	10. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	115,14	115,24	0,09
	11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	112,54	112,70	0,14
<b>B.</b>	<b>Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM)</b>	<b>109,26</b>	<b>109,47</b>	<b>0,19</b>
	1. Bibit	105,03	105,04	0,02
	2. Pupuk, Pestisida, Obat dan Pakan	110,09	110,73	0,58
	3. Sewa dan Pengeluaran Lainnya	104,09	104,34	0,24
	4. Transportasi dan Komunikasi	107,69	107,62	-0,06
	5. Barang Modal	108,58	108,68	0,09
	6. Upah Buruh	110,20	110,20	0,01
<b>C.</b>	<b>Indeks yang Dibayar Petani (Ib)</b>	<b>110,28</b>	<b>111,17</b>	<b>0,81</b>

Sumber Data : BPS 2022

#### 6. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)

Nilai Tukar Usaha Rumahtangga Pertanian (NTUP) menunjukkan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib), tanpa memperhitungkan pengeluaran untuk konsumsi rumahtangga. NTUP

diharapkan lebih mencerminkan kemampuan daya tukar hasil produksi rumahtangga petani terhadap pengeluaran biaya selama proses produksi.

Nilai Tukar Usaha Rumahtangga Pertanian (NTUP) pada bulan Desember 2021 mengalami kenaikan indeks sebesar 1,24 persen yaitu dari 103,83 pada bulan November 2021 menjadi 105,12 pada bulan Desember 2021. Namun demikian, relatif lebih rendahnya indeks NTP yakni sebesar 103,51 dibandingkan indeks Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) yang sebesar 105,12 merefleksikan bahwa tingkat pengeluaran untuk biaya produksi dan penambahan barang modal, berperan cukup signifikan dalam menentukan besaran nilai tukar. Kenaikan NTUP dipengaruhi oleh naiknya NTUP subsektor Hortikultura yang sangat signifikan sebesar 15,69 persen; subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 0,69 persen dan subsektor perikanan sebesar 2,23 persen.

Pada bulan yang sama, NTUP tanpa perikanan sebesar 104,88 atau lebih rendah dari NTUP secara gabungan. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor perikanan tetap memiliki daya ungkit terhadap capaian nilai tukar usaha rumahtangga.

**Tabel 2.62**

**Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Menurut Subsektor dan Perkembangannya, November – Desember 2021**

NO	SUBSEKTOR	NOVEMBER 2021	DESEMBER 2021	PERUBAHAN (%)
1	2	3	4	5
1.	Tanaman Pangan	98,72	98,33	-0,43
2.	Hortikultura	96,74	111,91	15,69
3.	Tanaman Perkebunan Rakyat	107,80	108,55	0,69
4.	Peternakan	99,57	99,09	-0,48
5.	Perikanan	106,28	108,65	2,23
	a. Tangkap	106,28	108,74	2,32
	b. Budidaya	106,31	107,54	1,15
<b>NTUP</b>		<b>103,83</b>	<b>105,12</b>	<b>1,24</b>



NO	SUBSEKTOR	NOVEMBER 2021	DESEMBER 2021	PERUBAHAN (%)
1	2	3	4	5
NTUP Tanpa Perikanan		103,66	104,88	1,17

Sumber Data : BPS 2022

**7. Perbandingan Nilai Tukar Petani antar Provinsi se-Sulawesi**

Perbandingan NTP antar provinsi se-Sulawesi pada bulan Desember 2021 menunjukkan bahwa, untuk NTP subsektor tanaman pangan, indeks nilai tukar tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Utara yaitu sebesar 104,83. Pada subsektor hortikultura, Provinsi Sulawesi Utara memiliki indeks nilai tukar terendah yaitu sebesar 102,33. Pada subsektor tanaman perkebunan rakyat, terdapat 5 (lima) provinsi yang memiliki indeks di atas 100 yaitu Provinsi Sulawesi Utara sebesar 116,66, Provinsi Sulawesi Tengah 107,93, Provinsi Sulawesi Selatan 117,66, Provinsi Gorontalo 119,31, dan Provinsi Sulawesi Barat dengan nilai NTPR 156,23. Satu- satunya provinsi dengan indeks terendah terdapat di Provinsi Sulawesi Tenggara yakni hanya sebesar 99,19. Pada subsektor peternakan, nilai tukar tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu sebesar 105,17 dan yang terendah terdapat di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 96,17. Pada subsektor perikanan, nilai tukar tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 107,60.

Apabila diamati lebih jauh pada bulan Desember 2021, kondisi NTP Gabungan provinsi- provinsi di Pulau Sulawesi mengalami peningkatan indeks dengan kenaikan indeks masing-masing yaitu Provinsi Sulawesi Tengah naik sebesar 0,61 persen; Provinsi Sulawesi Selatan naik sebesar 0,50 persen, Provinsi Sulawesi Tenggara naik sebesar 0,26 persen dan Provinsi Gorontalo naik sebesar 1,16 persen. Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Barat mengalami penurunan indeks masing-masing sebesar 0,26 persen dan 0,52 persen.

**Tabel 2.63**

**Perbandingan NTP antar Provinsi Se-Pulau Sulawesi Menurut Subsektor dan Perkembangannya, November – Desember 2021**

Provinsi	Bulan	Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Perikanan	Gabungan
1	2	3	4	5	6	7	8
Sulawesi Utara	November 2021	105,89	96,99	118,22	102,95	105,45	110,80
	Desember 2021	104,83	102,33	116,66	103,28	107,04	110,51
	Perubahan (%)	-1,00	5,51	-1,32	0,31	1,51	-0,26
Sulawesi Tengah	November 2021	96,88	94,01	107,86	99,11	102,76	102,88
	Desember 2021	95,93	108,21	107,93	97,98	104,28	103,51
	Perubahan (%)	-0,97	15,10	0,06	-1,15	1,47	0,61
Sulawesi Selatan	November 2021	93,51	105,85	116,06	99,73	105,81	99,87
	Desember 2021	93,79	105,45	117,66	98,89	107,60	100,37
	Perubahan (%)	0,30	-0,37	1,37	-0,85	1,69	0,50
Sulawesi Tenggara	November 2021	97,46	112,21	99,34	104,72	104,45	100,82
	Desember 2021	98,03	113,50	99,19	105,17	104,93	101,08
	Perubahan (%)	0,59	1,15	-0,16	0,42	0,45	0,26
Gorontalo	November 2021	103,07	104,66	117,93	105,36	95,36	104,39
	Desember 2021	102,30	129,78	119,31	103,61	96,73	105,59
	Perubahan (%)	-0,74	24,00	1,18	-1,66	1,44	1,16
Sulawesi Barat	November 2021	103,45	107,13	157,33	97,42	106,17	130,33
	Desember 2021	102,78	112,13	156,23	96,17	107,36	129,66
	Perubahan (%)	-0,65	4,67	-0,70	-1,29	1,12	-0,52

Sumber Data : BPS 2022

**2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

Pada tahun 2017 Pemerintah provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Bina Marga dan penataan ruang telah melakukan peninjauan kembali terhadap RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, tahapannya salah satunya yaitu tahap Evaluasi yang dilakukan terhadap indikasi program dalam rencana tata ruang terhadap data pelaksanaan pemanfaatan ruang di lapangan dengan melihat kesesuaian antara pelaksanaan pemanfaatan ruang dengan target capaian dalam indikasi program. Evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Dalam pemanfaatan ruang, simpangan- simpangan dapat terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang atau program-program pembangunan yang dilakukan di lapangan dengan arahan dan muatan dalam RTRW Provinsi Sulawesi Tengah.

**Tabel. 2.64**

**Matriks Realisasi Program Lima Tahunan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Perwujudan Rencana Struktur Ruang)**

No.	Indikasi Program Lima Tahunan	Jenis dan Besaran						Dampak Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang (Tinggi/Rendah)
		Unit (Luas/ Panjang/ Jumlah/Volume/dll )	Realisasi Rencana		Kesesuaian Pemanfaatan Ruang		Besaran Pelaksanaaan Pemanfaatan (Tinggi/Rendah)	
			Realisasi	Realisasi	Sesuai	Tidak Sesuai		
			>50%	<50%				
PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG								
A	Percepatan Pengembangan Kota-Kota Utama Kawasan Perbatasan							
	Pengembangan/ Peningkatan fungsi	50%		√	√		Rendah	Tinggi
	Pengembangan baru	33%		√	√		Rendah	Tinggi
	Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi	0,5		√	√		Rendah	Tinggi
B	Mendorong Pengembangan Kota-Kota Sentra Produksi yang Berbasis Otonomi Daerah	0,33		√		√	Rendah	Tinggi
C	Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-Kota Pusat Pertumbuhan							
	Pengembangan/ Peningkatan fungsi	33%		√	√		Rendah	Tinggi
	Pengembangan baru	33%		√	√		Rendah	Tinggi
	Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi	33%		√	√		Rendah	Tinggi

No.	Indikasi Program Lima Tahunan	Jenis dan Besaran						Dampak Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang (Tinggi/Rendah)
		Unit (Luas/ Panjang/ Jumlah/Volume/dll )	Realisasi Rencana		Kesesuaian Pemanfaatan Ruang		Besaran Pelaksanaaan Pemanfaatan (Tinggi/Rendah)	
			Realisasi >50%	Realisasi <50%	Sesuai	Tidak Sesuai		
D	Pengendalian Kota-kota Berbasis Mitigasi Bencana							
	Rehabilitasi kota akibat bencana alam	0,5		√		√	Rendah	Tinggi
	Pengendalian perkembangan kota- kota berbasis Mitigasi Bencana	0,25	√		√		Tinggi	Tinggi
E	Perwujudan Sistem Transportasi							
	Pemantapan jaringan jalan Arteri Primer, Jaringan Lintas Trans Sulawesi Tengah, Jaringan lintas Barat	50%	√		√		Tinggi	Tinggi
	Pemantapan Pelabuhan Penyeberangan	50%	√		√		Tinggi	Tinggi
	Pembangunan Terusan Khatulistiwa	33%		√		√	Rendah	Rendah
	Pemantapan Pelabuhan Propinsi	100%	√		√		Tinggi	Tinggi
	Pemantapan Bandara Udara Pusat Penyebaran	100%	√		√		Tinggi	Tinggi

No.	Indikasi Program Lima Tahunan	Jenis dan Besaran						Dampak Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang (Tinggi/Rendah)
		Unit (Luas/ Panjang/ Jumlah/Volume/dll )	Realisasi Rencana		Kesesuaian Pemanfaatan Ruang		Besaran Pelaksanaaan Pemanfaatan (Tinggi/Rendah)	
			Realisasi >50%	Realisasi <50%	Sesuai	Tidak Sesuai		
	Skala Pelayanan Primer							
	Pemantapan Bandara Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Sekunder	100%	√		√		Tinggi	Tinggi
	Pemantapan Bandara Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Tersier	100%	√		√		Tinggi	Tinggi
F	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya							
	Konservasi SDA, Pendayagunaan SDA, dan PengendalianDaya Rusak Air (SDA)	33%	√		√		Tinggi	Rendah
	Perwujudan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Gas (Energi)Bumi	100%		√		√	Rendah	Tinggi
	Rehabilitasi Jaringan Terestrial (Komunikasi)	100%		√		√	Rendah	Rendah
	Pengembangan JaringanTerestrial (Komunikasi)	100%		√		√	Rendah	Rendah

Sumber : Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Prov. Sulteng 2019

**Tabel. 2.65**  
**Matriks Realisasi Program Lima Tahunan RTRW Provinsi**  
**Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Perwujudan Rencana Pola**  
**Ruang)**

No.	Indikasi Program Lima Tahunan	Unit (Luas/ Panjang/Jumlah/Volume/dll)	Jenis dan Besaran				Besaran Pelaksanaan (Tinggi / Rendah )	Dampak Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang (Tinggi / Rendah )
			Realisasi Rencana		Kesesuaian Pemanfaatan Ruang			
			Realisasi	Realisasi	Sesuai	Tidak		
			>50%	<50%		Sesuai		
PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG								
A	Percepatan Pengembangan Kota-Kota Utama Kawasan Perbatasan							
	Pengembangan/ Peningkatan fungsi	50%		√	√		Rendah	Tinggi
A	Perwujudan Kawasan Lindung							
	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Propinsi Suaka Alam Laut	33%		√		√	Rendah	Rendah
	Rehabilitasi dan Pemantapan	33%	√		√		Tinggi	Rendah

No.	Indikasi Program Lima Tahunan	Unit (Luas/ Panjang/Jumlah/Volume/dl)	Jenis dan Besaran				Besaran Pelaksanaan Pemanfaatan (Tinggi / Rendah)	Dampak Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang (Tinggi / Rendah)
			Realisasi Rencana		Kesesuaian Pemanfaatan Ruang			
			Realisasi  >50%	Realisasi  <50%	Sesuai	Tidak  Sesuai		
	Fungsi Kawasan Lindung Propinsi Suaka Margasatwa							
	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Propinsi Cagar Alam	33%	√		√		Tinggi	Rendah
	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Propinsi Taman Nasional	33%	√		√		Tinggi	Rendah
	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Propinsi Taman Hutan Raya	33%	√		√		Tinggi	Rendah
	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Propinsi Taman Wisata Alam	33%	√		√		Tinggi	Rendah
	Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Propinsi Suaka Alam Laut	33%	√		√		Tinggi	Rendah
	Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Propinsi Suaka Margasatwa	33%	√		√		Tinggi	Rendah

No.	Indikasi Program Lima Tahunan	Unit (Luas/ Panjang/Jumlah/Volume/dl)	Jenis dan Besaran				Besaran Pelaksanaan Pemanfaatan (Tinggi / Rendah)	Dampak Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang (Tinggi / Rendah)
			Realisasi Rencana		Kesesuaian Pemanfaatan Ruang			
			Realisasi  >50%	Realisasi  <50%	Sesuai	Tidak  Sesuai		
	Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Propinsi Cagar Alam	33%	√		√		Tinggi	Rendah
	Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Propinsi Taman Nasional	33%	√		√		Tinggi	Rendah
	Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Propinsi Taman Hutan Raya	33%	√		√		Tinggi	Rendah
	Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Propinsi Taman Wisata Alam	33%	√		√		Tinggi	Rendah
	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung (Kawasan Resapan Air)	50%	√		√		Tinggi	Rendah
	Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung	50%	√		√		Tinggi	Rendah
	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Taman Buru	50%	√		√		Tinggi	Rendah
	Pengembangan Pengelolaan Kawasan Taman Buru	50%	√		√		Tinggi	Rendah



No.	Indikasi Program Lima Tahunan	Unit (Luas/ Panjang/Jumlah/Volume/dl l)	Jenis dan Besaran				Besaran Pelaksanaan Pemanfaatan (Tinggi / Rendah )	Dampak Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang (Tinggi / Rendah )
			Realisasi Rencana		Kesesuaian Pemanfaatan Ruang			
			Realisasi  >50%	Realisasi  <50%	Sesuai	Tidak  Sesuai		
B	Perwujudan Pengembangan Kawasan Budi Daya							
	Pengendalian Kawasan Andalan untuk Pertanian Pangan Abadi	50%		√		√	Rendah	Rendah
	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertanian	25%	√		√		Tinggi	Rendah
	Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Perkebunan	50%	√		√		Tinggi	Rendah
	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perkebunan	25%	√		√		Tinggi	Rendah
	Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Pertambangan	50%		√		√	Rendah	Rendah
	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertambangan	25%	√		√		Tinggi	Rendah
	Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk industry pengolahan	50%		√		√	Rendah	Rendah
	Pengembangan Kawasan Andalan untuk industry pengolahan	25%		√		√	Rendah	Rendah

No.	Indikasi Program Lima Tahunan	Unit (Luas/ Panjang/Jumlah/Volume/dl)	Jenis dan Besaran				Besaran Pelaksanaan Pemanfaatan (Tinggi / Rendah)	Dampak Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang (Tinggi / Rendah)
			Realisasi Rencana		Kesesuaian Pemanfaatan Ruang			
			Realisasi	Realisasi	Sesuai	Tidak		
			>50%	<50%		Sesuai		
	Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Pariwisata	50%	√		√		Tinggi	Rendah
	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pariwisata	25%	√		√		Tinggi	Rendah
	Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Perikanan	50%	√		√		Tinggi	Rendah
	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perikanan	25%	√		√		Tinggi	Rendah
	Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Kelautan	50%	√		√		Tinggi	Rendah
	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Kelautan	25%	√		√		Tinggi	Rendah
	Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Kehutanan	50%	√		√		Tinggi	Rendah
	Pengembangan Kawasan Andalan Kehutanan	25%	√		√		Tinggi	Rendah

Sumber : Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Prov. Sulteng 2019.

Tabel. 2.66

Matriks Realisasi Program Lima Tahunan RTRW Provinsi Sulawesi  
Tengah Tahun 2013-2033 (Perwujudan Rencana Strategis)

No.	Indikasi Program Lima Tahunan	Unit (Luas/ Panjang/ Jumlah/Volume/dll)	Jenis dan Besaran				Besaran Pelaksanaan Pemanfaatan (Tinggi/ Rendah)	Dampak Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang (Tinggi/ Rendah)
			Realisasi Rencana		Kesesuaian Pemanfaatan Ruang			
			Realisasi >50%	Realisasi <50%	Sesuai	Tidak Sesuai		
PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG								
A	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	50%		√	√		Rendah	Tinggi
B	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	50%		√	√		Rendah	Tinggi
C	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya	50%		√	√		Rendah	Tinggi
D	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan	50%		√	√		Rendah	Tinggi

No.	Indikasi Program Lima Tahunan	Jenis dan Besaran						Dampak Pelaksanaaan Pemanfaatan Ruang (Tinggi/Rendah)
		Unit (Luas/ Panjang/ Jumlah/Volume/dll)	Realisasi Rencana		Kesesuaian Pemanfaatan Ruang		Besaran Pelaksanaaan Pemanfaatan (Tinggi/Rendah)	
			Realisasi >50%	Realisasi <50%	Sesuai	Tidak Sesuai		
	Pendayagunaan Sumberdaya alam dan Teknologi Tinggi							
E	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan	50%		√	√		Rendah	Tinggi
F	Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan	50%		√	√		Rendah	Tinggi
	1. Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi	33%	√	√			Tinggi	Tinggi
	2. Penawaran Wilayah Kerja Gas Metana Batubara	33%	√	√			Tinggi	Tinggi
	3. Pengembangan Kilang LNG	33%	√	√			Tinggi	Tinggi
G	Pengembangan Kawasan Andalan Bahan Bakar Nabati	33%		√		√	Rendah	Rendah

Sumber : Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Prov. Sulteng 2019

**2.1.4.2.1 Luas Wilayah Ekonomi Produktif**

Dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah Sulawesi Tengah, maka kawasan pertumbuhan ekonomi produktif terbagi atas lima Kawasan Strategis Nasional yang diakomodir dalam RTRWP Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 yakni: (1) Kawasan Strategis Ekonomi (KSE); (2) Kawasan Kota Terpadu Mandiri; (3) Kawasan Cepat Tumbuh; (4) Kawasan Agrotourism; dan (5) Kawasan Perbatasan.

**Tabel 2.67**  
**Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah**

No.	Nama KSN	Nama Kabupaten/Kota
1.	Kawasan Strategis Ekonomi (KSE) Palu Utara	Kota Palu
2.	Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Air Terang, KTM Bungku, KTM Padauloyo, KTM Bahari Bolano Lambunu dan KTM Talabosa	Buol, Morowali, Tojo Unauna, Parigi Moutong dan Poso
3.	Kawasan Cepat Tumbuh Kaw. Parigi – Ampibabo dsk., Kaw. Danau Poso dsk., Kaw. Ampana dsk., Kaw. Moutong – Tomini dsk., Kaw. Damsol – Damsel dsk., Kaw. Lalundu dsk.	Kab. Parigi Moutong Kab. Poso Kab. Tojo Una - Una Kab. Parigi MoutongKab. Donggala Kab. Donggala
4.	<b>Kawasan Agrotourism</b> Sausu – Manggalapi - Palolo dsk.	Kab. Parigi Moutong, Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi
5.	<b>Kawasan Perbatasan;</b>	
	Kawasan Tindantana	perbatasan kabupaten Poso dengan kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan;
	Kawasan Teluk Matarape	perbatasan kabupaten Morowali dengan Provinsi Sulawesi Tenggara;
	Kawasan Surumana	perbatasan kabupaten Donggala dengan Provinsi Sulawesi Barat;
	Kawasan Umu	perbatasan kabupaten Buol dengan Provinsi Gorontalo;

No.	Nama KSN	Nama Kabupaten/Kota
	Kawasan Kepulauan Togian	perbatasan kabupaten Tojo Unauna dengan Provinsi Gorontalo;
	Kawasan Molosipat	perbatasan kabupaten Parigi-Moutong dengan Provinsi Gorontalo;
	Kawasan Pulau Sonit	perbatasan kabupaten Banggai Kepulauan dengan Provinsi Maluku Utara.

Sumber: RTRWProvinsiSulawesi Tengah Tahun 2013-2033

2.1.4.2.2 Perkembangan Infrastruktur

2.1.4.2.2.1 Infrastruktur Jalan

Pembangunan dibidang infrastruktur jalan kewenangan Provinsi di Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 berdasarkan kondisi jalan mengalami peningkatan. Panjang jalan Provinsi mencapai 1.643,74 km, sedangkan Panjang jalan kewenangan pusat sepanjang 2.373,40 km, serta kewenangan Kabupaten dan Kota sepanjang 12.890,60 km.

**Tabel 2.68**  
**Panjang Jalan Menurut Pemerintah Kewenangan Mengelola dan Kondisi Jalan di Provinsi Sulawesi Tengah (km), 2020**

Status Jalan	Kondisi Jalan				
	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	Jumlah
1	2	3	4	5	6
Jalan Negara	1 024,90	1 289,80	44,20	14,50	2 373,40
Jalan Provinsi	547,73	467,70	181,61	446,70	1 643,74
Jalan Kabupaten/Kota	3 025,77	2 639,53	3 077,97	4 147,34	12 890,60
Jumlah	4 598,40	4 397,03	3 303,78	4 608,54	16 907,74

Selanjutnya, perkembangan kondisi jalan nasional (2.373,40 km) permukaan jalan aspal, sedangkan kewenangan Provinsi dengan Panjang jalan sepanjang 1.643,74 km, permukaan jalan diaspal sepanjang 1.192,44 km, Kerikil sepanjang 258,95 km, Tanah sepanjang 191,15 km dan beton sepanjang 1,20 km, sementara kewenangan Kabupaten/Kota permukaan jalan diaspal sepanjang 5.495,14 km, Kerikil sepanjang 4.073,69 km, Tanah sepanjang 2.926,52 km dan beton sepanjang 395,24 km.

**Tabel 2.69**  
**Perkembangan Kondisi Permukaan Jalan (km) di Sulawesi Tengah**  
**Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020**

Status Jalan	Jenis Permukaan Jalan				
	Aspal	Kerikil	Tanah	Beton	Jumlah
1	2	3	4	5	6
Jalan Negara	2 373,40	—	—	—	2 373,40
Jalan Provinsi	1 192,44	258,95	191,15	1,20	1 643,74
Jalan Kabupaten/Kota	5 495,14	4 073,69	2 926,52	395,24	12 890,60
Jumlah	9 060,98	4 332,64	3 117,67	396,44	16 907,74

Sumber: BPS, Tahun 2022.

**2.1.4.2.2.2 Infrastruktur Daerah Irigasi**

Kondisi dan perkembangan daerah irigasi di Provinsi Sulawesi Tengah antara lain adalah :

- 1) Daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sebanyak 6 (enam) daerah irigasi dengan luas potensial 30.564,88 Ha dan luas fungsional 20.260,15 Ha.
- 2) Daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi pada Tahun 2021 sebanyak 30 (tiga puluh) daerah irigasi dengan luas potensial 47.640 Ha dan luas fungsional 34.504 Ha.

**Tabel 2.70**  
**Daerah Irigasi, Luas Areal Sawah Potensial dan Fungsional yang**  
**Menjadi Kewenangan dan tanggung Jawab Pusat (ha), 2021**

Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Irigasi	Luas Potensial (ha)	Luas Fungsional (ha)
1	2	3	4
Banggai Kepulauan	—	—	—
Banggai	3	9 550,47	7 164,99
Morowali	—	—	—
Poso	—	—	—
Donggala	—	—	—
Tolitoli	—	—	—
Buol	—	—	—
Parigi Moutong	2	12 833,76	7 820,16
Tojo Una-Una	—	—	—
Sigi	1	8 180,65	5 275
Banggai Laut	—	—	—
Morowali Utara	—	—	—
Palu	—	—	—
Sulawesi Tengah	6	30 564,88	20 260,15

Sumber: BPS, 2022

**Tabel 2.71**  
**Daerah Irigasi, Luas Areal Sawah Potensial dan Fungsional yang Menjadi Kewenangan dan tanggung Jawab Provinsi (ha), Tahun 2021**

Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Irigasi	Luas Potensial (ha)	Luas Fungsional (ha)
1	2	3	4
Banggai Kepulauan	—	—	—
Banggai	8	13 316	8 890,51



Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Irigasi	Luas Potensial (ha)	Luas Fungsional (ha)
1	2	3	4
Morowali	2	3 893	4 484,00
Poso	4	5 628	3 817,00
Donggala	1	1 625	923,22
Tolitoli	3	4 348	2 947,50
Buol	1	1 028	534,15
Parigi Moutong	8	14 923	11 664,53
Tojo Una-Una	—	—	—
Sigi	2	1 669	492,90
Banggai Laut	—	—	—
Morowali Utara	1	1 210	750,00
Palu	—	—	—
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>30</b>	<b>47 640</b>	<b>34 504</b>

Sumber: BPS, 2022

**2.1.4.2.2.3. Infrastruktur Kelistrikan**

Kota Palu adalah titik simpul Pembangunan Sistim Kelistrikan Sulawesi dan merupakan Simpul Jaringan Kelistrikan dari Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat hingga Sulawesi Selatan.

Pada tahun 2021 Kondisi ketenagalistrikan Sulawesi Tengah saat ini dapat dilihat pada data berikut, dimana daya terpasang sebesar 860.174 MW, dengan jumlah produksi sebesar 1.441.205.087 MW, dan terjual sebesar 1.352.388 MW.

Sementara jumlah pelanggan listrik di Sulawesi Tengah pada tahun 2021 sebanyak 492.696 pelanggan, meningkat jika dibandingkan pada tahun 2020 dengan jumlah pelanggan sebanyak 352.307 pelanggan. Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga sebesar 70,73 persen dan Rasio Elektrifikasi desa sebesar 79,03 persen.

**2.1.4.2.2.4. Infrastruktur Perhubungan**

**a. Angkutan Darat**

Sebagai sarana jasa transportasi, kondisi ruas jalan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap tingkat kelancaran aktivitas perekonomian antarwilayah. Jumlah perusahaan jasa angkutan dan

armada memberikan gambaran umum pangsa pasar layanan jasa transportasi selama setahun terakhir.

Jumlah pelayanan angkutan darat yang beroperasi di Sulawesi Tengah pada Tahun 2021, dengan jumlah Perusahaan Angkutan Bus sebanyak 33 perusahaan, sedangkan Bus Umum sebanyak 210 unit dengan kapasitas penumpang sebanyak 5.012 penumpang terdiri dari armada Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) sebanyak 440 unit, Armada Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) sebanyak 110 unit, Armada Antar Jemput Dalam Provinsi sebanyak 82 Unit, Armada Antar Jemput Antar Provinsi sebanyak 8 unit, Angkutan Kota sebanyak 454 unit, dan taksi (argo meter) sebanyak 81 unit.

Berikut disajikan kondisi jaringan jalan strategis nasional di Provinsi Sulawesi Tengah:

**Tabel 2.72**  
**Jaringan Jalan Strategis Nasional Di Sulawesi Tengah**

NO	NOMOR RUAS	NAMA RUAS JALAN STRATEGIS NASIONAL (TERSAMBUNG)	PANJANG (KM)	KEPUTUSAN PENETAPAN
1.	018 19 K	Jl. Hasanuddin II (Palu)	0,850	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No.567/KPTS/M/2001, Tanggal 10 November 2010 Perihal Penetapan Ruas-Jalan Strategis Nasional.
2.	019 16 K	Jl. Malonda II (Buluri-Watusampu) Palu.	5,640	
3.	019 17 K	Jl. Sungai Gumbasa (Palu)	0,230	
4.	019 18 K	Jl. Danau Poso (Palu)	0,400	
5.	019 19 K	Jl. Sungai Dolago (Palu)	0,200	
6.	019 1A K	Jl. Sis Aljufri I (Palu)	0,350	
7.	019 14 K	Jl. Yos Sudarso (Poso)	0,650	
8.	043	Ruas Luwuk-Batui (Banggai)	42,114	
9.	043 11 K	Jl. Samratulangi (Luwuk/Banggai)	0,321	
10.	043 12 K	Jl. A. Yani (Luwuk/Banggai)	1,492	
11.	043 13 K	Jl. Urif Sumoharjo (Luwuk/Banggai)	0,886	
12.	043 14 K	Jl. Sidirman (Luwuk/Banggai)	0,976	
13.	043 15 K	Jl. M. Hatta (Luwuk/Banggai)	10,553	
14.	044	Ruas Batui-Toili (Banggai)	40,955	
15.	045	Ruas Toili-Rata (Banggai)	53,346	
16.	046	Ruas Rata-Baturube (Morowali)	57	
17.	063	Ruas Mepanga-Pasir Putih (Parigi Moutong)	23	
18.	064	Ruas Pasir Putih-Basi (Tolitoli)	32,50	

NO	NOMOR RUAS	NAMA RUAS JALAN STRATEGIS NASIONAL (TERSAMBUNG)	PANJANG (KM)	KEPUTUSAN PENETAPAN
19.	065	Ruas Tomata-Pape (Morwali)	64	
20.	066	Ruas Salakan-Sambiut (Banggai Kepulauan)	24	

Sumber : RTRWP Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033

Selanjutnya Jaringan Prasarana Transportasi (Terminal Penumpang) di Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.73**  
**Jaringan Prasarana Transportasi (Terminal Penumpang)**  
**di Provinsi Sulawesi Tengah**

No.	Nama Terminal Penumpang	Nama Kabupaten/Kota	Luas (m²)
	<b><u>Terminal Penumpang Tipe</u></b>		
1.		Palu	19.174
2.	Mamboro (Eksisting)	Poso	3.115
3.	Sintuwu (Eksisting)	Parigi Moutong	33.800
	Toboli (Eksisting)		
1.	<b><u>Terminal Penumpang Tipe</u></b>	Poso	
2.	Tentena (Eksisting)	Poso	
3.	Pasar Sentral (Eksisting)	Banggai	
4.	Biak (Eksisting)	Tolitoli	
5.	Lelean Nono (Baru)	Parigi Moutong	
	Mensung		

Sumber: Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya untuk Jaringan Prasarana Jembatan Timbang Di Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.74**

**Jaringan Prasarana Jembatan Timbang Di Sulawesi Tengah**

No.	Nama Jembatan Timbang	Nama Kabupaten/Kota	L u a s (m)
1.	Toboli	Parigi Moutong	60 m x 40 m
2.	Kayu Malue	Palu	64 m x 56 m
3.	Mayoa	Poso	60 m x 60 m
4.	Moutong	Parigi Moutong	60 m x 60 m

Sumber: Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya untuk Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Di Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.75**

**Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) di Sulawesi Tengah**

No.	Lokasi Pengujian	Nama Kabupaten/ Kota	Merk / Tahun Operasi	Kapasitas	Kondisi
1.	Lolu	Kota Palu	Kubota/1979	10 Ton	Rusak
2.	Poso	Poso	Kubota/2008	10 Ton	Baik

Sumber: Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk mengantisipasi pergerakan barang dan manusia dikembangkan jaringan moda transportasi angkutan penyeberangan melalui program angkutan sungai, danau, dan perairan (ASDP) seperti tabel berikut.

**Tabel 2.76**

**Jaringan Penyeberangan Lintas Provinsi Di Sulawesi Tengah**

No.	Nama Pelabuhan	Nama Kabupaten/ Kota	Nama Lintas Penyeberangan
1.	Pagimana	Banggai	Pagimana-Gorontalo (Prov. Sulteng- Gorontalo)
2.	Luwuk	Banggai	Luwuk-Salakan
3.	Taipa	Palu	Taipa-Balikpapan
4.	Ampana	Tojo Unauna	(Prov. Sulteng - Kaltim) Ampana-Wakai- Gorontalo
5.	Tolitoli	Tolitoli	(Prov. Sulteng- Gorontalo) Tolitoli-Tarakan (Prov. Sulteng - Kaltim)
6.	Banggai	Banggai Kepulauan	Banggai-Luwuk- Banggai-Boniton- Banggai-Bobong Dolong-Uwebone- Marissa- Parigi-Marissa-Dolong (Prov. Sulteng- Gorontalo)
7.	Toboli	Parigi Moutong	

Sumber: Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulteng

**b. Perkembangan Perhubungan Laut**

Bidang perhubungan laut, perkembangan pelayanan transportasi laut yang mencakup penyediaan fasilitas pelabuhan, keselamatan pelayaran dan pengembangan armada pelayaran nasional baik pelayaran nusantara, pelayaran rakyat, pelayaran perintis, pelayaran khusus dan pelayaran samudra, secara kontinu

ditingkatkan. Dalam rangka meningkatkan dan menunjang kelancaran pelayaran angkutan laut di Provinsi Sulawesi Tengah telah tersedia 1 (satu) pelabuhan utama (internasional) yakni Pelabuhan Pantoloan, 14 (empat belas) pelabuhan pengumpul (nasional), yakni Luwuk, Pagimana, Bunta, Tangkiang, Banggai, Kolonodale, Leok, Tolitoli, Donggala, Wani, Ogoamas, Parigi, Poso, Ampana; dan 12 (dua belas) pelabuhan pengumpan (regional), yakni Sabang, Ogotua, Kumaligon, Paleleh, Wakai, Salakan, Menui, Sambalagi, Malala, Bungku, Dolong/Popolii, Moutong; serta 14 (empat belas) pelabuhan terminal khusus (tarsus).

**Tabel 2.77**  
**Sarana Pelabuhan Laut Utama/Nasional di Sulawesi Tengah**

No.	Nama Pelabuhan	Nama Kabupaten/ Kota	Kapasitas Dermaga	Luas Dermaga
1.	<b>Pelabuhan Utama (international)</b> Pantoloan	Palu	4.000 DWT	250 m x 13 m
1	<b>Pelabuhan Pengumpul (nasional)</b>	Banggai	1.000 DWT	
2	Luwuk	Banggai	1.000 DWT	150mx12m
3	Pagimana	Banggai	1.000 DWT	70 mx8 m
4	Bunta	Banggai	1.000 DWT	70 m x8 m
5	Tangkiah	Banggai Kepulauan	10.000 DWT	88mx12m
6	Banggai	Morowali		150mx8m
7	Kolonodale	Buol	1.000 DWT	
8	Leok	Tolitoli	1.000 DWT	50mx8m
9	Tolitoli	Donggala	1.000 DWT	81 mx8 m
10	Donggala	Donggala	500 DWT	70 mx8 m
11	Wani	Donggala	1.000 DWT	46mx8m
12	Ogoamas	Parigi Moutong	400 DWT	70mx8m
13	Parigi	Poso	1.000 DWT	35 m x 8 m
14	Poso	Tojo Una-Una	1.000 DWT	100mx 9m
	Ampana			70mx 8m

Sumber: Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulteng dan RTRWP Sulteng Tahun 2013-2033

**a. Perkembangan Perhubungan Udara**

Bandar Udara Mutiara Sis Aljufri Palu dengan status Bandar Udara pengumpul sekunder sebagaipintu gerbang utama melalui udara semakin dituntut dalam peningkatan aktifitas pelayanan penerbangan guna mengantisipasi kesiapan daerah dalam menghadapi perdagangan bebas dan era globalisasi.

Pemerintah daerah saat ini telah menyiapkan pengembangan Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu agar dapat didarati pesawat yang berbadan besar, tidak terbatas hanya mampu melayani pesawat jenis Boeing 737-900 ER dan Boeing 737-800 NG. Selain itu, di beberapa kabupaten terdapat pula Bandar Udarapengumpul tersieryakni Bandar Udara Bubung Syukuran Aminudin Amir di Kabupaten Banggai yang dapat melayani jenis pesawat Boeing 737/200, Cassa 212, ATR 500/600, Dornier 32, Bandar Udara Lalos Sultan Bantilan di Kabupaten Tolitoli. Untuk melayani penerbangan pengumpan Bandar Udara Pogogul di Kabupaten Buol yang baru mampu didarati jenis pesawat Cassa 212 dan Dornier 32 serta Bandar Udara Kasiguncu di Kabupaten Poso yang sudah mampu didarati oleh jenis pesawat N 219 dan ATR 500/600. Selain itu di Sulawesi Tengah sedang dilakukan pembangunan 2 (dua) Bandar Udara yaitu Bandar Udara Ampana di Kabupaten Tojo Una-Una , Sedangkan Bandar Udara Bungku di Kabupaten Morowali saat ini terkendala dengan penyelesaian lahan untuk pembangunannya. Sehingga fasilitas transportasi udara yang ada di Sulawesi Tengah hingga Tahun 2013 berjumlah 7 (tujuh) bandar udara, selain itu juga diupayakan studi kelayakan untuk perencanaan pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Banggai Laut.

**Tabel 2.78**  
**Sarana Bandar Udara Menurut Jenisnya Di Sulawesi Tengah**

No.	Nama Bandara	Nama Kabupaten / Kota	Dimensi Landasan Pacu	Maksimal Pesawat
1.	<u><b>Pengumpul Sekunder</b></u> Mutiara Sis Aljufri	Palu	2.250 m x 45 m	B – 737
1. 2.	<u><b>Pengumpul Tersier</b></u> Bubung Syukuran Aminuddin Amir Lalos Sultan Bantilan	Banggai Tolitoli	1.850 m x 30 m 1.400 m x 30 m	B – 737.200 C - 212

No.	Nama Bandara	Nama Kabupaten / Kota	Dimensi Landasan Pacu	Maksimal Pesawat
1.	<b><u>Pengumpan</u></b>	Buol	1.373 m x 30	C – 212
2.	Kasiguncu	Poso	m	D - 900
			1.620 m x 30	
1.	<b><u>Sedang dibangun</u></b>	Tojo	m	
2.	Ampana	Unauna		
	Umbele	Morowali		
1.	<b><u>Missioner</u></b>			Cesna
2.	Gintu (operasional)	Poso		Cesna
	Tentena (operasional)	Poso		
1.	<b><u>Bandara yang direncanakan</u></b>	Banggai		
	Banggai	Laut		

Sumber: Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulteng dan RTRWP Sulteng Tahun 2013-2033.

**2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi**

**2.1.4.3.1. Angka Kriminalitas Yang Tertangani**

Percepatan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah ke depan memerlukan dukungan investasi khususnya dari kalangan sektor swasta dengan mengisyaratkan stabilitas politik, keamanan dan iklim investasi yang kondusif dan menjanjikan.

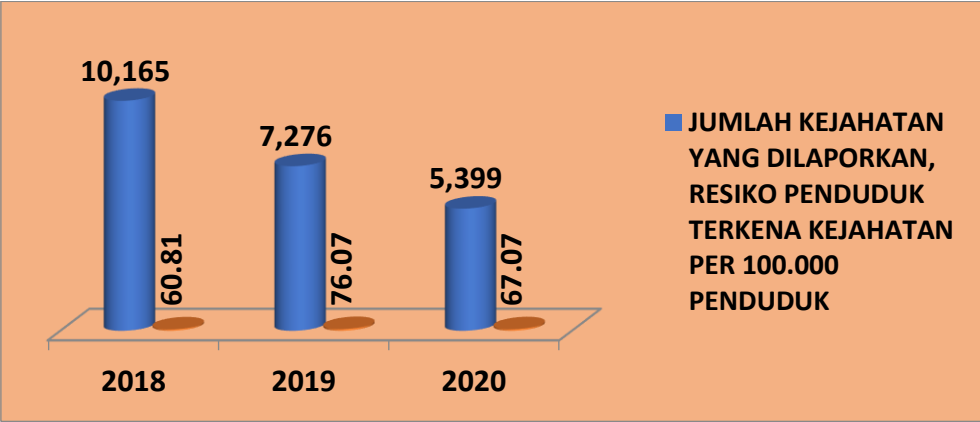
Oleh karena itu pemerintah daerah terus berupaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, serta memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan iklim yang kondusif dalam rangka meningkatkan minat investor untuk menanamkan investasinya di Sulawesi Tengah. Oleh karenanya pemerintah memfokuskan perhatian pada penanganan keamanan dan ketertiban terutama masalah yang semakin marak terjadi dikalangan masyarakat yakni tawuran antar kampung.

Jumlah kejahatan yang dilaporkan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan dengan jumlah 10.165 kasus pada tahun 2018 menjadi 5.399 kasus pada tahun 2020, sementara persentase penyelesaiannya dari tahun 2018 sebesar 60,81 persen meningkat menjadi 76,07 persen pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 kembali menurun menjadi 67,07 persen, dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.47

Perkembangan Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk dan Persentase Penyelesaian Kejahatan, Tahun 2018-2020



Sumber: BPS, 2021.

Sementara jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan di Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan Tahun 2020 sebanyak 1.768 kasus yang masih tersisa sejumlah 322 kasus dari jumlah kasus yang masuk di Kejaksaan Sulawesi Tengah sejumlah 2.090 kasus, ditunjukkan pada gambar berikut :

Tabel 2.79

Perkembangan Jumlah Perkara Tindak Pidana Umum yang Masuk dan diselesaikan pada Kejaksaan Sulawesi Tengah, Tahun 2020

URAIAN	TAHUN 2020			
	SISA LAPORAN TAHUN LALU	MASUK TAHUN LAPORAN	DISELESAIKAN	SISA AKHIR TAHUN
KEJAKSAAN TINGGI	16	183	197	2
KEJAKSAAN NEGERI 9 KABUPATEN DAN 1 KOTA	293	1.598	1.571	320
JUMLAH	309	1781	1768	322

Sumber: BPS, 2021.

Sedangkan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan Tahun 2020 sebanyak 36 kasus yang masih tersisa sejumlah 45 kasus dari jumlah kasus yang masuk di Kejaksaan Sulawesi Tengah sejumlah 81 kasus, ditunjukkan pada gambar berikut :

**Tabel 2.80**  
**Perkembangan Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Masuk dan diselesaikan pada Kejaksaan Sulawesi Tengah, Tahun 2020**

URAIAN	TAHUN 2020				
	SISA LAPORAN TAHUN LALU	MASUK TAHUN LAPORAN	JUMLAH	DISELESAIKAN	SISA AKHIR TAHUN
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH	12	5	17	5	12
KEJAKSAAN NEGERI 9 KABUPATEN DAN 1 KOTA	31	33	64	31	33
JUMLAH	43	38	81	36	45

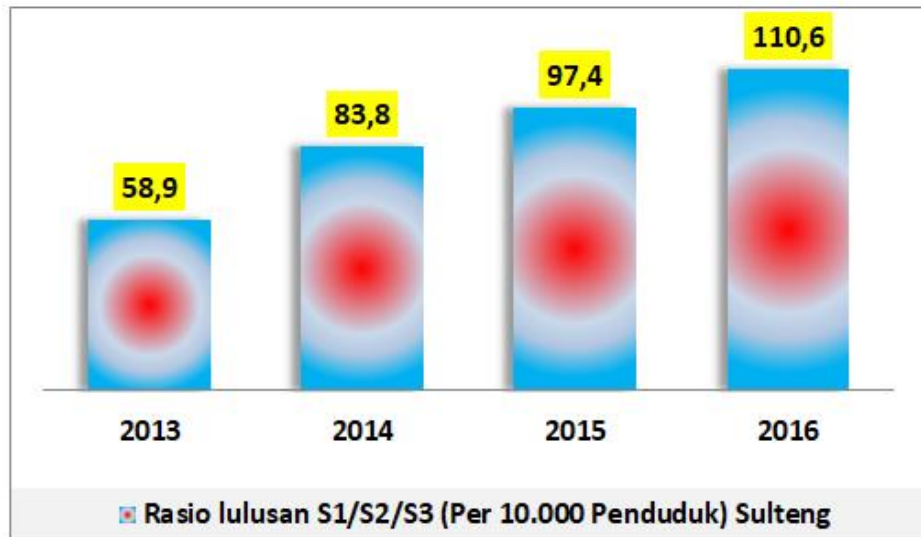
Sumber: BPS, 2021.

**2.1.4.4. Fokus Sumberdaya Manusia**

**2.1.4.4.1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)**

Perkembangan rasio kelulusan untuk pendidikan (S1/S2/S3) per jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 cenderung meningkat, dimana pada Tahun 2013 rasionya sebesar 59,9 per 10.000 penduduk meningkat menjadi 83,8 per 10.000 penduduk pada Tahun 2014, selanjutnya setiap tahun rasionya mengalami peningkatan hingga mencapai 110,6 per 10.000 penduduk.

**Gambar 2.48**  
**Perkembangan Rasio Lulusan S1/S2/S3 Per 10.000 Penduduk di**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 – 2016**



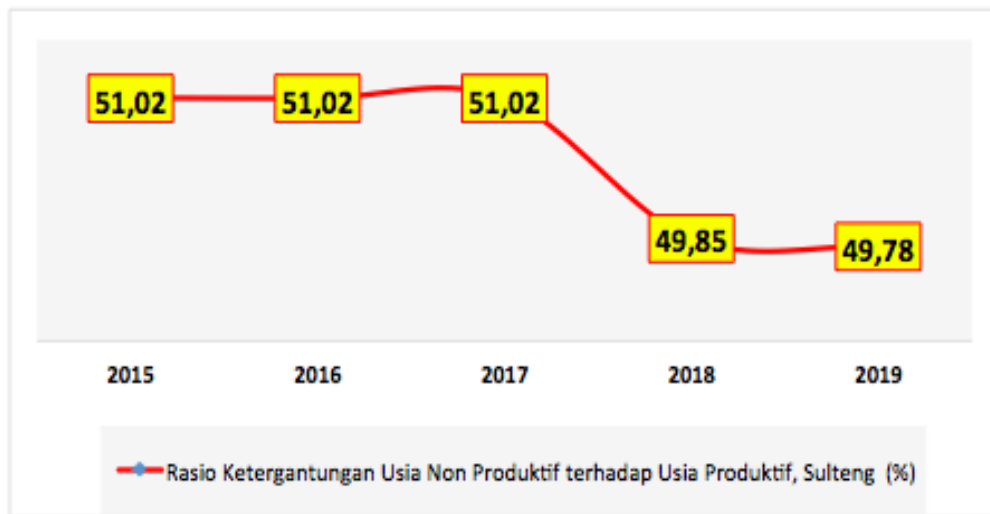
Sumber: BPS, Tahun 2017 (Data Diolah Kembali)

#### **2.1.4.4.2. Rasio Ketergantungan**

Untuk melihat seberapa besar ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap usia produktif salah satunya dapat dilihat dari indikator *dependency ratio* atau rasio ketergantungan. Persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Perkembangan rasio ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk usia produktif di Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 cenderung mengalami penurunan (semakin rendah) yakni dari 51,02 persen pada Tahun 2015 menjadi 49,78 persen pada Tahun 2019.

**Gambar 2.49**  
**Trend Rasio Ketergantungan Penduduk Usia non produktif**  
**Terhadap Usia Produktif di Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2015 – 2019**



Sumber: BPS, 2020 (Data Diolah Kembali)

#### 2.1.4.4.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan mutu modal manusia. Paradigma Pembangunan Mutu Modal Manusia, dianggap sebagai suatu konsep yang lebih komprehensif karena memperhitungkan keberhasilan pembangunan manusia dari aspek ekonomi, aspek pendidikan dan aspek kesehatan. Berdasarkan metode baru perhitungan IPM, aspek ekonomi meliputi pengeluaran riil perkapita; aspek pendidikan meliputi angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah, sedangkan aspek kesehatan meliputi angka harapan hidup.

Pembangunan manusia di Sulawesi Tengah terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2022, IPM Sulawesi Tengah mencapai 70,28. Angka ini meningkat sebesar 0,49 poin dari tahun 2021 yang sebesar 69,79 atau tumbuh sebesar 0,70 persen, dan selama 2012–2022, IPM Sulawesi Tengah rata-rata meningkat sebesar 0,78 persen, dan kalau dilihat pada target RPJMD tahun 2021 telah *melebihi sebesar 68,50-68,76 poin dan target RKPD Perubahan Tahun 2021 sebesar 69,70 poin. (belum ada target RPJMD dan RKPD Tahun 2022)*

Nilai IPM yang menyentuh angka 70 menunjukkan bahwa adanya peningkatan status pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu berstatus “tinggi”.

Bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga usia 68,93 tahun, meningkat 0,1 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,32 tahun, meningkat 0,09 tahun dibandingkan pada tahun 2021.

Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,89 tahun. Di sisi lain, rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan pada tahun 2022 sebanyak Rp9.7 juta, naik sebesar 3,39 persen dibandingkan tahun 2021.

#### 1. Perkembangan IPM Sulawesi Tengah Tahun 2012-2022

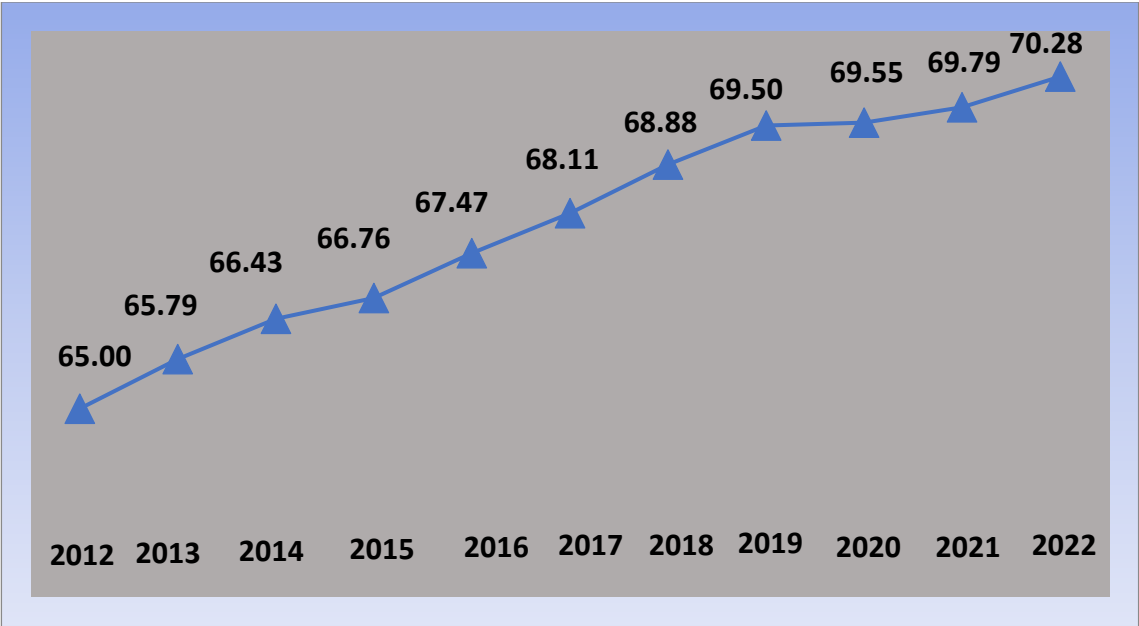
IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah formal (tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity).

Secara umum, pembangunan manusia Sulawesi Tengah terus mengalami kemajuan selama periode 2012 hingga 2022. IPM Sulawesi Tengah meningkat dari 65,00 pada tahun 2012 menjadi 70,28 pada tahun 2022 atau rata-rata tumbuh sebesar 0,78 persen per tahun. Pada 2021-2022, IPM Sulawesi Tengah tumbuh 0,7 persen, angka pertumbuhan ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kenaikan pada 2020-2021, yang hanya tumbuh sebesar 0,35 persen.

Pada tahun 2022 IPM Sulawesi Tengah menunjukkan kemajuan yang besar. Pembangunan manusia Sulawesi Tengah meningkat yang sebelumnya berstatus “sedang” menjadi “tinggi”. Apabila dibandingkan dengan 34 provinsi di Indonesia, IPM Sulawesi Tengah menempati posisi 25. Hal ini menunjukkan posisi peringkat Sulawesi Tengah masih sama dibandingkan tahun sebelumnya.

#### **Gambar 2.50**

#### **Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tengah, 2012 - 2022**



Sumber BRS Tahun 2022 (diolah)

**Tabel 2.81**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tengah Menurut**  
**Komponen 2012 – 2022**

Komponen	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	66,7	67,02	67,18	67,26	67,31	67,32	67,78	68,23	68,69	68,83	68,93
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,09	12,36	12,71	12,72	12,92	13,04	13,13	13,14	13,17	13,23	13,32
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,73	7,82	7,89	7,97	8,12	8,29	8,52	8,75	8,83	8,89	8,89
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP)	Juta Rupiah	8,29	8,5	8,6	8,77	9,03	9,31	9,49	9,6	9,34	9,38	9,7
IPM		65,00	65,79	66,43	66,76	67,47	68,11	68,88	69,5	69,55	69,79	70,28
Pertumbuhan IPM		1,14	1,22	0,97	0,5	1,06	0,95	1,13	0,9	0,07	0,35	0,7

Sumber BRS Tahun 2022 (diolah)

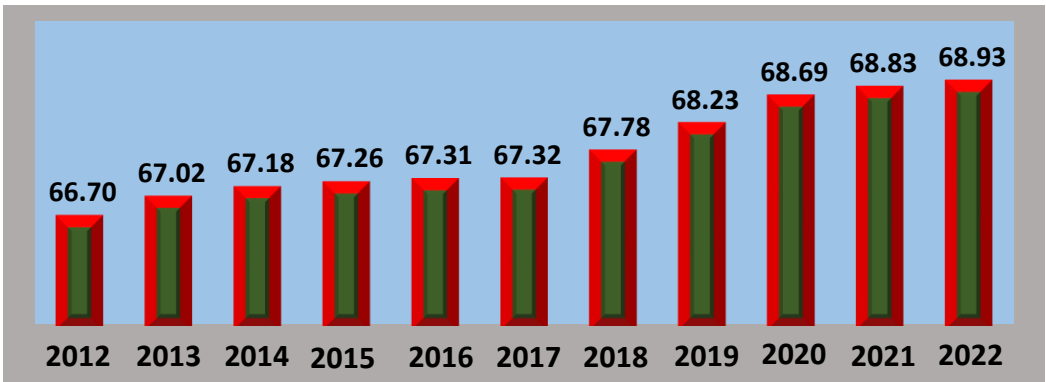
2. Perkembangan Dimensi Pembentuk IPM Sulawesi Tengah Tahun 2012– 2022

Peningkatan IPM tahun 2022 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama pada dimensi standar hidup layak yaitu pengeluaran per kapita (yang disesuaikan) yang meningkat sebesar 3,39 persen.

- Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2012 hingga 2022, Sulawesi Tengah telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir sebesar 2,23 tahun atau rata- rata tumbuh sebesar 0,33 persen per tahun. Pada tahun 2022 UHH Sulawesi Tengah sebesar 68,93 tahun meningkat sebesar 0,1 tahun atau tumbuh sebesar 0,15 persen.

**Gambar 2.51**  
**Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Sulawesi Tengah,**  
**2012 – 2022 (tahun)**

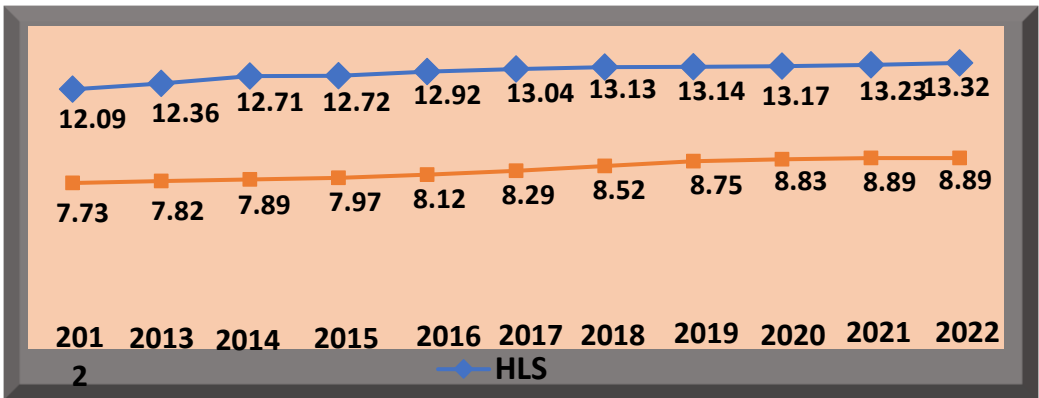


Sumber BRS Tahun 2022 (diolah)

- Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2012 hingga 2022, HLS di Sulawesi Tengah meningkat dari 12,09 tahun menjadi 13,32 tahun, sedangkan RLS meningkat dari 7,73 tahun menjadi 8,89 tahun

**Gambar**  
**Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**  
**Sulawesi Tengah, 2012 – 2022 (tahun)**



Sumber BRS Tahun 2022 (diolah)

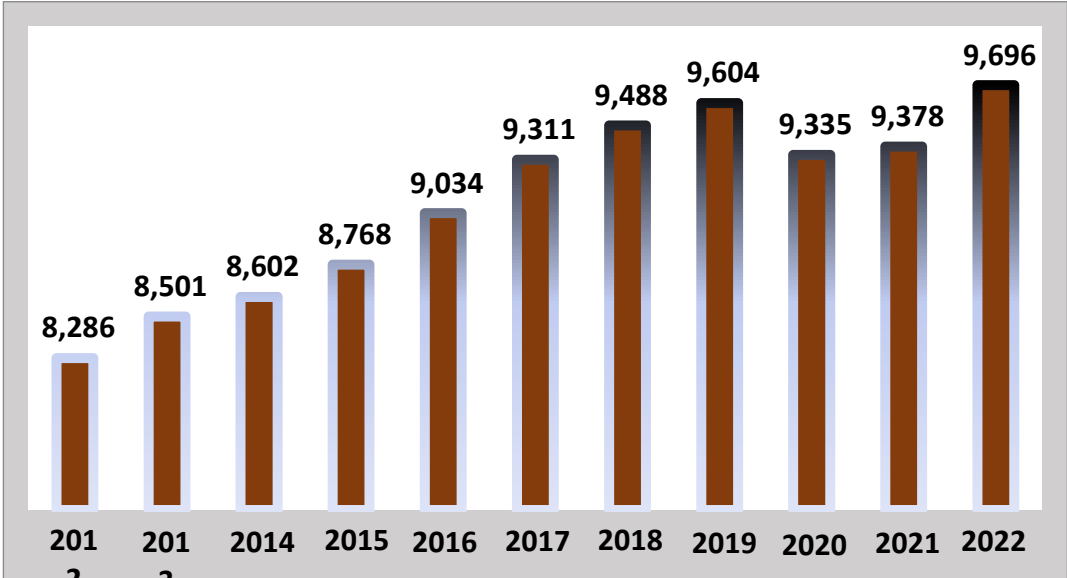
- Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi terakhir yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita (yang disesuaikan) masyarakat Sulawesi Tengah mencapai Rp9,7 juta per tahun. Angka ini meningkat 3,39 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah kurang lebih 2 tahun pandemi COVID-19 berlalu, pengeluaran riil per kapita mulai meningkat kembali setelah pada tahun 2020 mengalami penurunan.

**Gambar 2.53**



**Pengeluaran Per Kapita (yang disesuaikan) Sulawesi Tengah,  
2012 – 2022 (Rp000)**



Sumber BRS Tahun 2022 (diolah)

3. Pencapaian Pembangunan Manusia di Tingkat Kabupaten/Kota

Peningkatan IPM tahun 2022 terjadi di seluruh Kabupaten/Kota. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Kabupaten Tojo Una-Una (65,54), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Palu (82,02). Satu-satunya Kabupaten/Kota dengan status capaian pembangunan manusia “sangat tinggi” ( $IPM \geq 80$ ) yaitu Kota Palu. Jumlah Kabupaten/Kota dengan status capaian “tinggi” ( $70 \leq IPM < 80$ ) sebanyak 3 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Morowali, Poso, dan Banggai. Sementara itu, 9 Kabupaten/Kota lainnya masih berstatus “sedang” (capaian  $60 \leq IPM < 70$ ).

**Tabel**

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tengah Menurut  
Kabupaten/Kota, 2012 – 2022**

Kabupaten/Kota	UHH		HLS		RLS		Pengeluaran per kapita Disesuaikan (Rp000)		IPM		
	(Tahun)		(Tahun)		(Tahun)				Capaian		Pertumbuhan
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021-2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Banggai Kepulauan	66,59	66,73	13,07	13,08	8,44	8,46	7.453	7.712	65,61	66,08	0,72
Banggai	70,88	70,88	13,25	13,34	8,53	8,54	9.603	9.963	70,6	71,08	0,68
Morowali	69,23	69,23	13,35	13,36	9,34	9,35	11.028	11.291	72,29	72,55	0,36
Poso	71,19	71,19	13,71	13,72	9,5	9,52	8.850	9.218	71,45	71,93	0,67
Donggala	67,5	67,61	12,51	12,6	7,98	7,98	8.002	8.303	65,72	66,25	0,81
Toli-Toli	66,18	66,41	12,89	12,92	8,76	8,76	7.947	8.191	66,3	66,76	0,69
Buol	69,05	69,32	13,1	13,17	9,08	9,08	7.974	8.176	68,25	68,72	0,69
Parigi Moutong	64,35	64,35	12,48	12,5	7,74	7,77	9.675	10.063	65,82	66,26	0,67
Tojo Una-Una	65,9	66,08	12,29	12,36	8,4	8,41	7.621	8.096	64,74	65,54	1,24
Sigi	70,09	70,15	12,88	12,97	8,82	8,84	8.171	8.498	68,49	69,05	0,82
Banggai Laut	65,67	65,81	12,96	13,02	8,63	8,63	7.707	8.037	65,65	66,22	0,87
Morowali Utara	69,71	69,77	12,25	12,28	8,72	8,75	8.890	9.242	68,48	68,97	0,72
Kota Palu	71,09	71,2	16,28	16,36	11,72	11,73	14.894	15.162	81,7	82,02	0,39
Sulawesi Tengah	68,83	68,93	13,23	13,32	8,89	8,89	9.378	9.696	69,79	70,28	0,7

Sumber BRS Tahun 2022 (diolah)

Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dicapai Indonesia sebesar 72,91 poin, sedangkan Sulawesi Tengah mencapai 70,28 poin, dengan demikian masih berada dibawah nasional sebesar 2,63 poin, dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

**Gambar**  
**Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**  
**Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2017 – 2022**



Sumber: BRS, Prov. Sulteng Tahun 2022.

### Metodologi

Dokumen Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023-2026 menggunakan metode kualitatif.

### Sasaran Pengguna

1. Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Instansi Vertikal, Organisasi Pemuda, dan BUMN seperti :
  - a. Dinas Pendidikan
  - b. Dinas Pemuda dan Olahraga
  - c. Dinas Pariwisata
  - d. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
  - e. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - f. Dinas Sosial
  - g. BAPPEDA
  - h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  - i. Universitas Tadulako
  - j. Bank Indonesia
  - k. BPOM
  - l. Badan Narkotika Nasional
  - m. Alfamidy
  - n. BPD Sulteng
  - o. KONI
  - p. KNPI
  - q. PMI

## BAB II

### LANDASAN HUKUM BIDANG PELAYANAN KEPEMUDAAN

#### 1. LANDASAN HUKUM

- 1) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5067);

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pemuda mempunyai peran penting sebagai salah satu penentu dan subjek bagi tercapainya tujuan nasional.

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah mencatat peran penting pemuda yang dimulai dari pergerakan Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, pergerakan pemuda, pelajar, dan mahasiswa tahun 1966, sampai dengan pergerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang telah membawa bangsa Indonesia memasuki masa reformasi. Hal ini membuktikan bahwa pemuda mampu berperan aktif sebagai garda terdepan dalam proses perjuangan, pembaruan, dan pembangunan bangsa.

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian.

Berdasarkan amanat dari peraturan bahwa Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

2. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.

UU 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah pengakuan sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah mencatat peran penting pemuda yang dimulai dari pergerakan Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, pergerakan pemuda, pelajar, dan mahasiswa tahun 1966, sampai dengan pergerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang telah membawa bangsa Indonesia memasuki masa reformasi.

Hal ini membuktikan bahwa pemuda mampu berperan aktif sebagai garda terdepan dalam proses perjuangan, pembaruan, dan pembangunan bangsa. Undang-Undang Kepemudaan adalah bentuk upaya dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional.

Tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan dimaksudkan untuk memperkuat posisi dan kesempatan kepada setiap warga negara yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya. Di samping itu, Undang-Undang ini memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi serta aktivitas kepemudaan. Undang-Undang ini juga memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan program pelayanan kepemudaan.

UU Kepemudaan memuat pengaturan mengenai segala aspek pelayanan kepemudaan yang berkaitan dengan koordinasi dan kemitraan, prasarana dan sarana, dan organisasi kepemudaan. Selain itu, juga memuat pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam pelayanan kepemudaan, pemberian penghargaan, pendanaan, serta akses permodalan bagi kegiatan kewirausahaan pemuda secara terencana, terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 14 Oktober 2009 di Jakarta. UU 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan mulai berlaku sejak diundangkan oleh Menkumham Andi Mattalatta pada tanggal 14 Oktober 2009 di Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148. Penjelasan Atas UU 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan diundangkan dan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067. Agar setiap orang mengetahuinya.

Guna memenuhi harapan tersebut, diperlukan pengaturan dan penataan pembangunan nasional kepemudaan yang berorientasi pada pelayanan kepemudaan untuk mewujudkan pemuda Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, dan berdaya saing. Dalam pelaksanaannya, pelayanan kepemudaan berfungsi menyadarkan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi pemuda dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Pelayanan kepemudaan dikembangkan sesuai dengan karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhinekatunggalikaan. Oleh karena itu, proses pelayanan kepemudaan harus dipersiapkan secara komprehensif integral dengan terlebih dahulu menyusun dan menetapkan (i) strategi pelayanan kepemudaan; (ii) tugas, fungsi, wewenang, serta tanggungjawab Pemerintah dan pemerintah daerah; dan (iii) peran, tanggung jawab, dan hak pemuda.

Kebijakan pelayanan kepemudaan mempunyai arah untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, kebijakan pelayanan kepemudaan juga diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas dalam rangka mencapai pemuda yang maju, yaitu pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing. Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi dan kesempatan kepada setiap warga negara yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya. Di samping itu, Undang-Undang ini memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi serta aktivitas kepemudaan. Undang-Undang ini juga memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan program pelayanan kepemudaan.

Undang-Undang ini memuat pengaturan mengenai segala aspek pelayanan kepemudaan yang berkaitan dengan koordinasi dan kemitraan, prasarana dan sarana, dan organisasi kepemudaan. Selain itu, juga memuat pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam pelayanan kepemudaan, pemberian penghargaan, pendanaan, serta akses permodalan bagi kegiatan kewirausahaan pemuda secara terencana, terpadu, terarah, dan berkelanjutan.





2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang baru yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Salah satu perubahan krusial dari Undang-Undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dari sisi hukum, perubahan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua aspek yakni perubahan formal dan perubahan materiil.



**PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLARAGA**

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Kepemudaan	a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor nasional, wirausaha muda berprestasi, dan pemuda kader nasional. b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat nasional. c. Kerja sama kepemudaan internasional.	a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda, dan pemuda kader provinsi. b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah provinsi.	a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota. b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah kabupaten/kota.

- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2022 Nomor 75);
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 140, Nomor registrasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 13-237/2021);
- 5) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 860);
- 6) Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 400.5/236/DIS.PORA-G.ST/2023 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023 – 2026.

BAB III  
ISU STRATEGIS KEPEMUDAAN

1. Domain Pendidikan

Pembangunan di sektor pendidikan, diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan dengan memanfaatkan secara optimal fasilitas pendidikan yang ada. Keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain yaitu: Angka Melek Huruf (AMH), Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Beberapa indikator urusan pendidikan tersebut mencakup capaian kinerja pada seluruh level pendidikan (SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK) di Sulawesi Tengah. Hal ini diperlukan agar perencanaan pendidikan oleh perangkat daerah terkait dapat terkoordinasi dan tersinkronisasi seluruh level pemerintahan daerah dan sebagai salah sistem pendidikan formal yang saling terkait. Keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan kinerja pendidikan (tingkat provinsi ditentukan oleh baik tidaknya kinerja pada level pendidikan di tingkat kabupaten/kota.

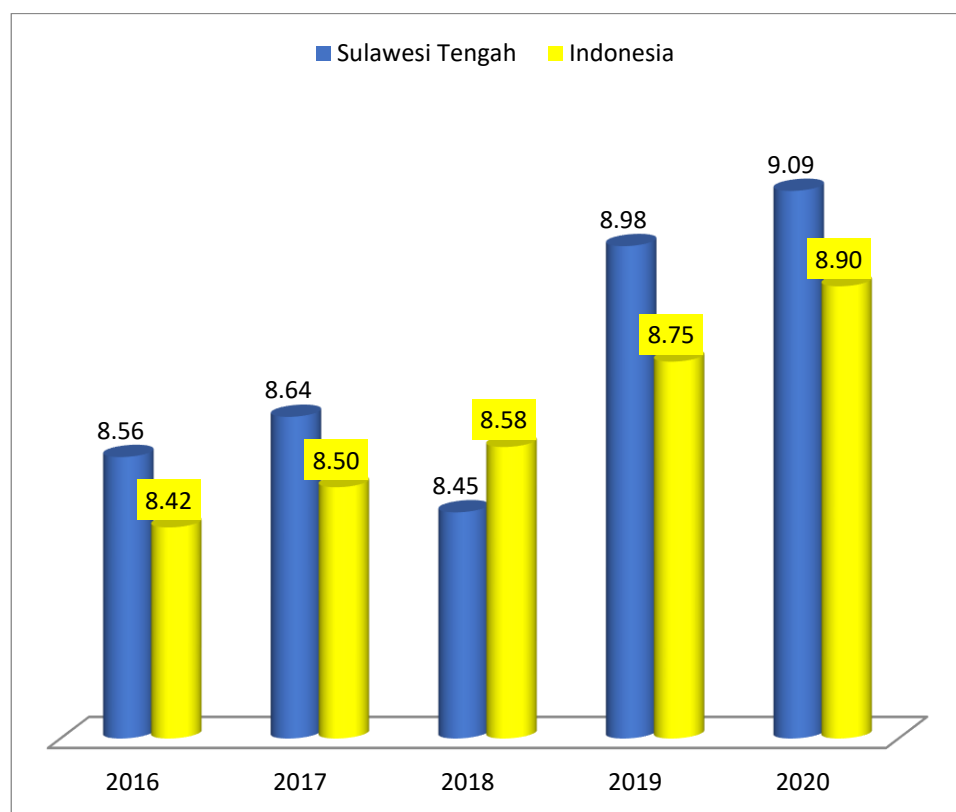
Jumlah Fasilitas Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022

KABUPATEN/KOTA	SD		SMP		SMA/SMK		PERGURUAN TINGGI	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Banggai Kepulauan	137	136	65	64	38	39	1	2
Banggai	297	296	131	126	77	77	2	3
Morowali	127	124	48	45	27	23	2	2
Poso	168	167	78	80	34	34	5	6
Donggala	167	164	108	103	48	45	–	–
Tolitoli	110	110	72	72	38	38	5	5
Buol	113	108	67	65	24	23	2	2
Parigi Moutong	268	268	127	127	70	71	3	3
Tojo Una-Una	141	140	59	61	28	29	–	1
Sigi	174	172	83	82	42	38	4	4
Banggai Laut	65	65	39	39	21	20	–	–
Morowali Utara	121	121	49	47	19	20	–	–
Palu	46	46	35	34	38	37	13	13
SULTENG	1.934	1.917	961	945	504	494	37	41

Sumber: BPS, Tahun 2022

Sampai dengan Tahun 2021 fasilitas pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi sudah hampir merata disemua Kabupaten/Kota, walaupun masih terdapat beberapa Kabupaten yang belum memiliki Perguruan Tinggi yaitu Kabupaten Donggala, Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara, dan Perguruan Tinggi yang terbanyak selain Kota Palu yang memang merupakan Ibu Kota Provinsi yaitu Kabupaten Poso dan Kabupaten Tolitoli masing – masing memiliki 5 Perguruan Tinggi.

Angka Rata-rata lama Sekolah adalah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Pengetahuan diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.



Di sisi Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), sepanjang Tahun 2016-2020 RLS di Provinsi Sulawesi Tengah juga mengalami peningkatan, yakni dari 8,56 tahun pada Tahun 2016 menjadi 9,09 tahun pada Tahun 2020 kecuali Tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk Sulawesi Tengah usia 15 tahun ke atas bersekolah selama 9,09 tahun atau 9 tahun atau secara rata-rata baru menamatkan pada tingkatan Sekolah Dasar, dan sampai kelas 3 (dua) jenjang Pendidikan Tingkat Pertama (SLTP) pada Tahun 2020. Dengan demikian, program wajib belajar sembilan tahun perlu untuk ditingkatkan.

Capaian rata-rata lama sekolah Tahun 2016-2020 di Provinsi Sulawesi Tengah cenderung meningkat, Pada Tahun 2016 selama 8,12 tahun naik pada Tahun 2018 menjadi 8,52 tahun, kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 8,83 tahun. Capaian rata-rata lama sekolah bagi penduduk usia sekolah telah mencapai kelas 2 (dua) pada jenjang pendidikan SMP.

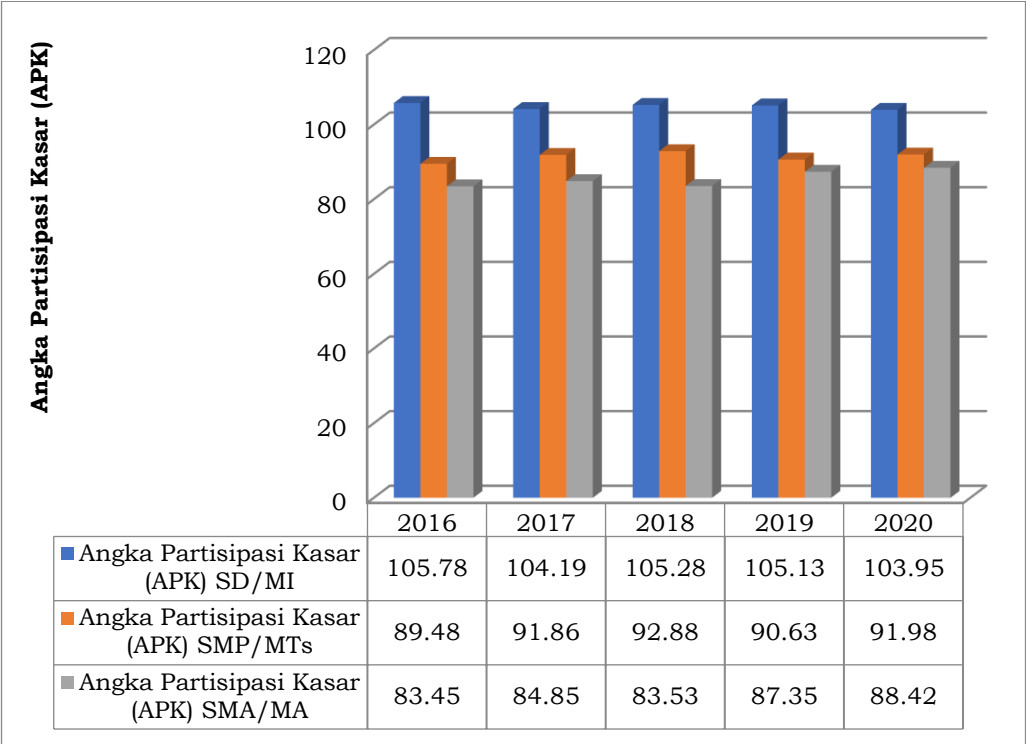
Kabupaten/Kota	Rata-rata lama sekolah Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Sulawesi Tengah	8,12	8,29	8,52	8,75	8,83
Banggai Kepulauan	7,94	7,99	8,14	8,19	8,43
Banggai	7,73	7,92	8,06	8,24	8,49
Morowali	8,49	8,73	8,98	9,11	9,46
Poso	8,67	8,81	9,04	9,36	9,46
Donggala	7,82	7,84	7,85	7,86	8,06
Tolitoli	7,73	7,85	7,96	8,26	8,44
Buol	8,62	8,63	8,74	8,75	8,89
Parigi Moutong	6,87	6,98	7,18	7,47	7,57
Tojo Una-una	7,87	7,90	8,16	8,38	8,39
Sigi	8,21	8,22	8,43	8,53	8,56
Banggai Laut	7,94	8,21	8,44	8,51	8,64
Morowali Utara	8,16	8,39	8,58	8,70	8,72
Kota Palu	11,25	11,26	11,33	11,60	11,59

Merujuk pada Tabel 2.30, angka RLS Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 8,83 tahun pada Tahun 2020. Kabupaten yang memiliki RLS berada di atas kondisi Provinsi Sulawesi Tengah yakni Kota Palu, Kabupaten Poso, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Morowali.

Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

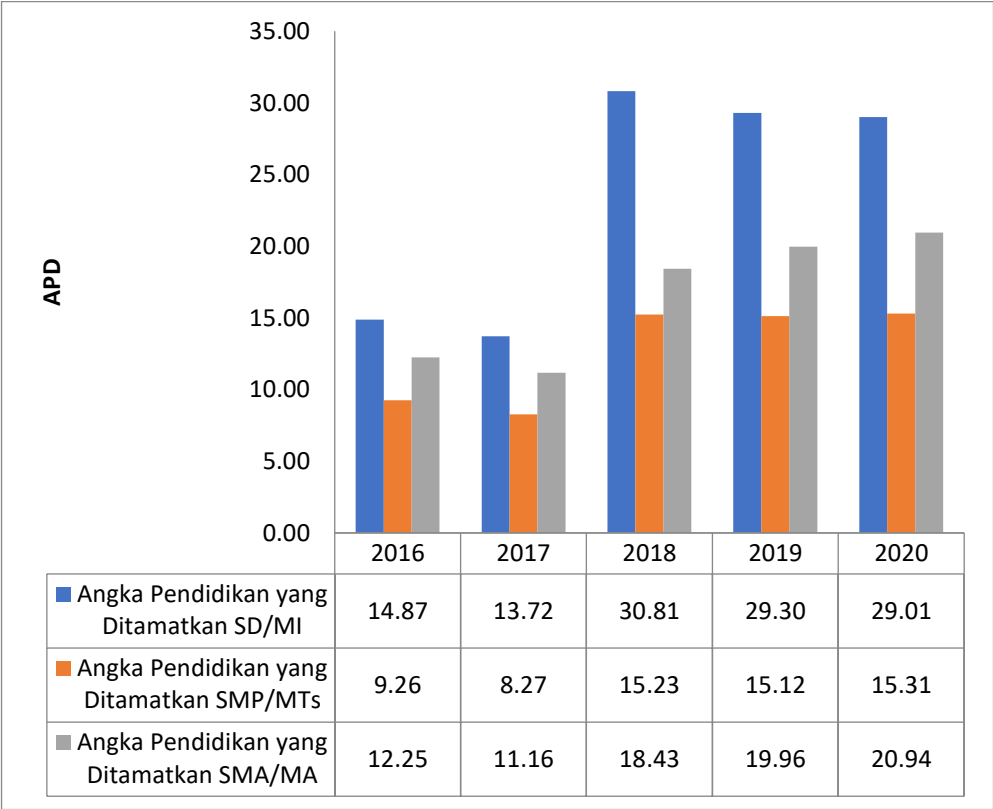
Capaian APK di Sulawesi Tengah disajikan pada Gambar 2.22.



Gambar 2.22 menunjukkan bahwa APK di Provinsi Sulawesi Tengah untuk seluruh tingkatan pendidikan dasar dan menengah cenderung mengalami peningkatan. Capaian APK SD/MI melebihi target yang ditetapkan dalam P-RPJMD 2016-2021.

Selanjutnya untuk APK tingkat SMP, cenderung mengalami fluktuasi dengan capaian terendah Tahun 2016 dengan 89,48 poin dan yang tertinggi Tahun 2018 dengan 92,88 poin.

Pada tingkatan SMA dan sederajat, pada tahun 2016 APK SMA di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 83,45 poin dan cenderung meningkat dengan capaian tertinggi tahun 2020 dengan 87,36 poin.



Gambar 2.23 menunjukkan bahwa angka pendidikan yang ditamatkan pada seluruh jenjang pendidikan cenderung meningkat terutama jenjang pendidikan menengah atas.

Salah satu indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan, yakni melalui Angka Partisipasi Kasar (APK).

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkatpendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitandengan jenjang pendidikan tertentu. APK ini menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan.

Capaian APK SD di Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 sebesar 103,55 persen, sementara capaian APK SMP sebesar 92,86 persen dan capaian APK SMA sebesar 87,99 persen, dapat ditunjukkan pada gambar berikut : Sumber: BPS-RI

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2022

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5
SD/MI/Sederajat	93.33	93.25	103.68	103.55
SMP/MTs/ Sederajat	74.99	75.63	93.17	92.86
SMA/SMK/MA/Sederajat	65.44	65.72	88.06	87.99

Perspektif kabupaten/kota, pada Tahun 2021 capaian APK SD tertinggi terdapat di Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 106,89 persen dan terendah terdapat di Kabupaten Tolitoli sebesar 95,54 persen, namun terdapat 2 (dua) Kabupaten yang datanya tidak terupdate yaitu Kabupaten Banggai dan Kota Palu, dapat dilihat pada tabel berikut:

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan  
serta Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

NO.	KABUPATEN/KOTA	Angka Partisipasi Kasar (APK)		
		SD/MI/Se derajat	SMP/MTs/ Sederajat	SMA/SMK/MA/ Sederajat
1	2	6	7	8
1.	PALU	-	-	-
2.	SIGI	103,37	92,39	82,92
3.	DONGGALA	107,78	92,46	76,89
4.	PARIGI MOUTONG	100,56	89,94	87,43
5.	POSO	103,58	97,58	91,87
6.	TOJO UNA-UNA	106,89	79,26	87,93
7.	BANGGAI	-	-	-
8.	BANGGAI KEPULAUAN	110,21	79,77	78,56
9.	BANGGAI LAUT	97,97	107,64	80,97
10.	MOROWALI	109,42	102,31	83,39
11.	MOROWALI UTARA	98,3	101,7	87,43
12.	BUOL	110,00	89,08	78,79
13.	TOLITOLI	95.54	91.91	83.67

Sumber: BPS dan Dikjar Provinsi Sulteng 2021

Capaian APK SMP pada Tahun 2021 tertinggi terdapat di Kabupaten Banggai Laut sebesar 107,64 persen dan terendah di Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 79,26 persen, namun terdapat 2 (dua) Kabupaten yang datanya tidak terupdate yaitu Kabupaten Banggai dan Kota Palu.

Pada jenjang SMA Tahun 2021, capaian APK tertinggi terdapat di Kabupaten Poso sebesar 91,87 persen dan terendah di Kabupaten Donggala sebesar 76,89 persen, namun terdapat 2 (dua) Kabupaten yang datanya tidak terupdate yaitu Kabupaten Kabupaten Banggai dan Kota Palu.

Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APK, APM merupakan juga indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Semakin tinggi APM, semakin tinggi akses penduduk suatu daerah terhadap pendidikan, dan semakin tinggi tingkat kemampuan daerah tersebut dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

Angka Partisipasi Murni jenjang pendidikan SD/MI/Paket A di Provinsi Sulawesi Tengah cenderung fluktuatif, pada periode Tahun 2016-2020. Pencapaian APM SD/MI/Paket A terbaik terjadi pada Tahun 2017 dan 2020 yaitu sebesar 92,75 dan capainya lebih tinggi dari capaian APM jenjang SD/MI/Paket A untuk Indonesia.

Angka Partisipasi Murni jenjang pendidikan SMP/Mts/Paket B di Provinsi Sulawesi Tengah cenderung fluktuatif, pada periode Tahun 2016-2020. Pencapaian SMP/Mts/Paket B. Tahun 2016-2020 yaitu sebesar 72,25 kecuali Tahun 2018 yang merupakan capaian terendah yaitu 71,10. Capaian APM pada tingkat SMP/Mts/Paket B Sulawesi Tengah kurun waktu tersebut lebih rendah dari capaian APM jenjang SMP/Mts/Paket B untuk Indonesia.

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI/Paket A Sulawesi Tengah	92,48	92,75	92,35	92,48	92,75
SD/MI/Paket A Nasional	96,82	97,19	97,58	97,64	97,69
SMP/Mts/Paket B Sulawesi Tengah	71,25	72,25	71,10	71,25	72,25
SMP/Mts/Paket B INDONESIA	77,95	78,40	78,84	79,40	80,12
SMA/SMK/MA/Paket C SULAWESI TENGAH	63,61	63,32	63,32	63,61	63,8
SMA/SMK/MA/Paket C INDONESIA	59,95	60,37	60,67	60,84	61,25

Secara spesifik Angka Partisipasi Murni pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C di Provinsi Sulawesi Tengah cenderung meningkat pada periode Tahun 2016-2020. Pencapaian SMA/SMK/MA/Paket C tertinggi yakni 65,02 tahun 2020 namun belum memenuhi target P-RPJMD Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021. Capaian APM pada tingkat SMA/SMK/MA/Paket C Sulawesi Tengah sepanjang kurun waktu tersebut lebih tinggi dari capaian APM jenjang SMA/SMK/MA/Paket C untuk Indonesia. Capaian kinerja terkait Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan Menengah Atas di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah terlihat pada Tabel 2.32.

No	Kabupaten/Kota	APM per jenjang sekolah tahun 2020		
		SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MA
1	Banggai Kepulauan	91,04	80,53	60,87
2	Donggala	85,66	74,57	60,45
3	Poso	92,56	87,42	68,16
4	Banggai	94,17	87,19	63,94
5	Buol	91,42	82,56	62,14
6	Tolitoli	91,02	80,56	56,76
7	Morowali	76,84	77,36	67,54



No	Kabupaten/Kota	APM per jenjang sekolah tahun 2020		
		SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MA
8	Parigi Moutong	92,48	79,46	66,32
9	Tojo Unauna	91,15	73,32	63,33
10	Sigi	90,62	79,41	61,59
11	Banggai Laut	87,85	82,75	60,55
12	Morowali Utara	89,07	78,98	70,29
13	Kota Palu	95,03	83,87	74,94

Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah, untuk pendidikan jenjang SD/MI menunjukkan daerah dengan APM tertinggi adalah Kota Palu, kemudian Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Poso. Sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Morowali dan Kabupaten Donggala. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs, APM tertinggi adalah Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai dan Kota Palu. Sebaliknya yang terendah adalah Kabupaten Tojo Una-una dan Kabupaten Donggala.

Capaian indikator kinerja bidang pendidikan terkait angka partisipasi sekolah, kelulusan dan melanjutkan sekolah di Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2016-2020, terlihat pada Tabel 2.47.

Capaian Indikator Kinerja Angka Partisipasi Sekolah, Kelulusan dan  
Melanjutkan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020

No.	INDIKATOR KINERJA PENDIDIKAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (%) :					
	- APS SD/MI	98,00	98,14	98,13	98,32	98,27
	-APS SMP/MTs	92,08	92,49	92,71	93,01	92,74
	- APS SMA/MA/SMK	73,96	74,82	75,05	75,02	74,96
2.	Angka Putus Sekolah (%)					
	- APUS SD/MI	0,06	0,17	0,26	0,10	0,005
	-APUS SMP/MTs	0,11	0,39	0,80	0,14	0,03
	- APUS SMA/MA/SMK	0,16	0,71	1,22	0,28	0,04
3.	Angka Kelulusan (%)					

No.	INDIKATOR KINERJA PENDIDIKAN	2016	2017	2018	2019	2020
	- AL SD/MI	91,29	98,89	97,37	99,93	98,73
	-AL SMP/MTs	99,9	99,6	97,64	96,91	98,05
	- AL SMA/MA/SMK	99,81	99,02	98,66	99,01	98,90
4.	Angka Melanjutkan (%)					
	- AM SD/MI	100	100	100	100	100
	-AM SMP/MTs	100	100	100	100	100
	- AM SMA/MA/SMK	83,17	83,98	84,79	85,60	86,41

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Sulawesi Tengah selama periode 2016-2020 sebagai berikut:

- Pada Tingkat Sekolah Dasar (SD/MI), APS cenderung meningkat, yakni dari 98,00 persen pada Tahun 2016 menjadi 98,27 persen pada Tahun 2020, atau meningkat sebesar 0,27 persen selama periode 2016-2020.
- Pada jenjang SMP/MTs, APS cenderung meningkat, yakni dari 92,08 persen pada Tahun 2016 menjadi 92,74 persen pada Tahun 2020, atau meningkat sebesar 0,66 persen selama periode 2016-2020.
- Pada tingkat SMA/MA/SMK, APS cenderung meningkat, dari 73,96 persen pada Tahun 2016 menjadi 74,96 persen pada Tahun 2020, atau meningkat sebesar 1,00 persen selama periode 2016-2020.

Angka Putus Sekolah (APUS)

Perkembangan Angka Putus Sekolah di Sulawesi Tengah selama periode 2016-2020 sebagai berikut:

- Pada jenjang SD/MI, Angka Putus Sekolah cenderung menurun tajam, yakni dari 0,06 persen pada Tahun 2016 menjadi 0,005 persen pada Tahun 2020. Pada periode 2016-2020, APUS meningkat pada Tahun 2018 sebesar 0,26 persen sebagai konsekuensi dari Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi pada 28 September 2018;
- Pada tingkat SMP/MTs, Angka Putus Sekolah cenderung menurun, yakni dari 0,11 persen pada Tahun 2016 menjadi 0,03 persen pada Tahun 2020. Namun, pada 2018 APUS SMP/MTs mencapai 0,8 persen sebagai konsekuensi dari Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi pada 28 September 2018;
- Pada tingkat SMA/SMK/MA, Angka Putus Sekolah cenderung menurun, yakni dari 0,16 persen pada Tahun 2016 menjadi 0,04 persen pada Tahun 2020, namun pada 2018, APUS ini mencapai 1,22 persen lebih tinggi dibanding angka putus sekolah Tahun 2016-2017 dan 2019-2020.

- Angka Kelulusan (AKUL)

Perkembangan Angka Kelulusan di Sulawesi Tengah selama periode 2016-2020 sebagai berikut:

- Pada jenjang SD/MI, selama lima tahun terakhir angka kelulusan mencapai hampir 100 persen, yakni pada Tahun 2020 mencapai 98,73 persen siswa SD/MI yang lulus.
- Sebaliknya pada jenjang SMP/MTs, angka kelulusan cenderung menurun, dari 99,9 persen pada Tahun 2016 menjadi 98,05 persen pada Tahun 2020.
- Demikian pula pada jenjang SMA/SMK, Angka Kelulusan cenderung menurun, yakni dari 99,81 persen pada Tahun 2016 menjadi 98,90 persen pada Tahun 2020.

Capaian indikator kinerja bidang pendidikan terkait ketersediaan prasarana pendidikan dan sumberdaya manusia di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2016-2020, terlihat pada Tabel 2.8.

No.	Indikator Kinerja Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah (per 1000 penduduk)					
	- SD/MI	5,56	5,23	5,58	5,54	5,45
	- SMP/MTs	4,01	4,83	4,22	4,26	4,44
	- SMA/MA/SMK	1,91	2,09	2,14	2,22	2,15
2.	Target P-RPJMD 2016-2020 (%)	1,86	1,92	1,97	2,02	2,08

Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2020 (Data diolah kembali).

Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah.

Data menunjukkan bahwa pada jenjang SD/MI, rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah SD/MI cenderung berfluktuasi, yakni dari 5,56 per 1000 penduduk usia sekolah pada Tahun 2016 meningkat menjadi 5,58 per 1000 penduduk usia sekolah pada Tahun 2018, lalu menurun kembali menjadi 5,45 di Tahun 2020.

Pada jenjang SMP/MTs, rasionya juga cenderung fluktuatif, yakni dari 4,01 per 1000 penduduk usia sekolah pada Tahun 2016 meningkat menjadi 4,83 per 1000 penduduk usia sekolah pada Tahun 2017, dan menurun kembali di Tahun 2018, selanjutnya meningkat sampai 4,44 di akhir periode Tahun 2016-2020.

Pada jenjang SMA/MA/SMK, rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK cenderung meningkat, yakni dari 1,91 per 1000 penduduk usia sekolah pada Tahun 2016, meningkat menjadi 2,15 per 1000 penduduk usia sekolah pada Tahun 2020, atau rasionya meningkat sebesar 0,24 poin selama periode Tahun 2016-2020.

Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15-24 Tahun

Terkait pencapaian kinerja indikator Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan dan Laki-Laki di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020 tertera pada Tabel 2.50.

**Tabel 2.1**

Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2020

Tahun	AMH (%) Jenis kelamin		Jumlah (Lk+Pr)
	laki laki	perempuan	
2016	99,68	99,65	99,67
2017	99,67	99,65	99,66
2018	99,72	99,70	99,71
2019	99,78	99,75	99,76
2020	99,78	99,78	99,78

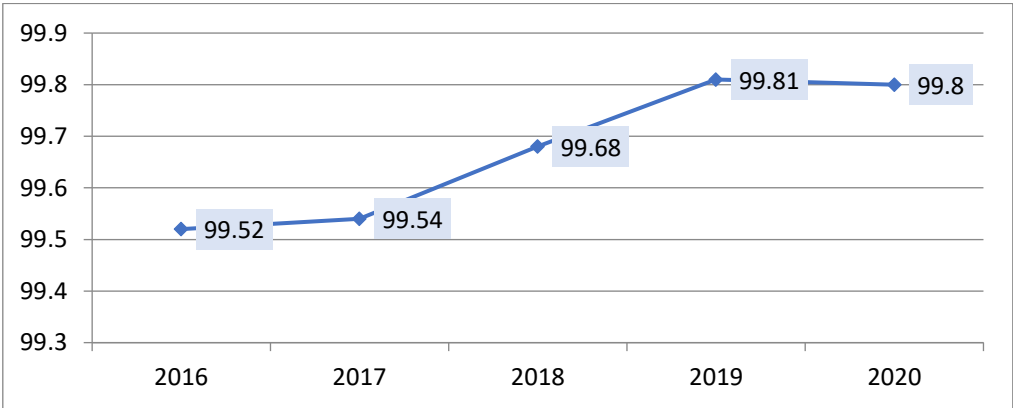
Sumber. BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2021 (diolah kembali).

Tabel 2.50 menunjukkan bahwa angka melek huruf penduduk umur 15-24 tahun cenderung mengalami peningkatan setiap tahun baik jenis kelamin perempuan maupun laki-laki.

Capaian kinerja penduduk yang berusia di atas 15 Tahun Melek Huruf (tidak buta aksara) di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020 tertera pada Gambar 2.25.

Penduduk yang berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)

Jumlah penduduk berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) di Provinsi Sulawesi Tengah disajikan pada Gambar 2.25.



a. Jumlah Penduduk Disabilitas Usia 4 s.d 18 Tahun

Adapun data penduduk disabilitas usia 4 s.d. 18 tahun yang perlu mendapatkan pendidikan khusus per kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 disajikan pada Tabel berikut.

No	Kabupaten / Kota	Penyandang Disabilitas	
		Panti	Bukan Panti
1	Banggai Kepulauan		571
2	Banggai		2214
3	Morowali	150	533
4	Poso		1781
5	Donggala		1692
6	Toli-Toli		1135
7	Buol		1217
8	ParigiMoutong		2324
9	Tojo Una-Una		879
10	Sigi		1475
11	BanggaiLaut		315
12	Morowali Utara		734
13	Palu	97	773
JUMLAH DISABILITAS		247	15.643

Jumlah Penduduk Disabilitas Usia 4 s.d. 18 tahun yang perlu Mendapatkan Pendidikan Khusus di Provinsi Sulawesi Tengah

Gambaran Pendidikan Khusus dan Pendidikan Inklusi di Sulawesi Tengah

Pendidikan untuk penyandang disabilitas dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusi dan pendidikan khusus. Pendidikan inklusi sendiri adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Kewajiban pemerintah terhadap peserta didik penyandang disabilitas berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2016 adalah memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya, mengikutsertakan anak.

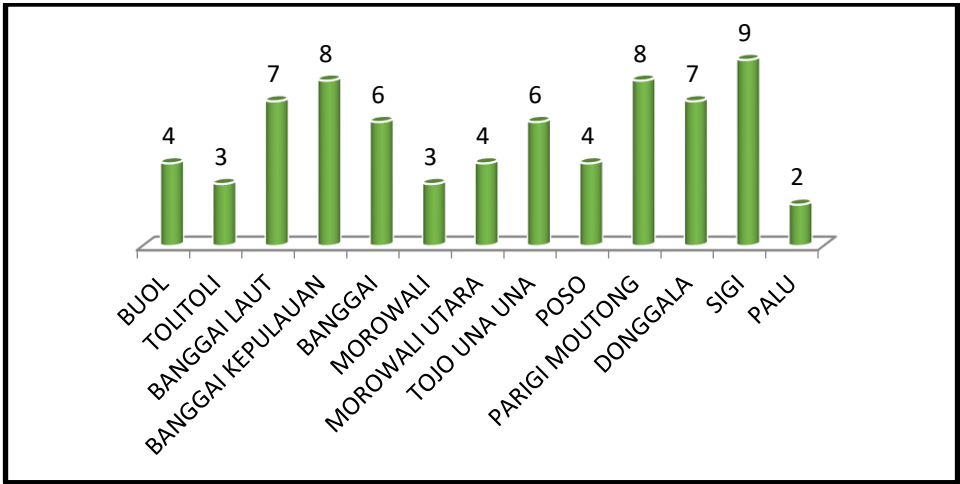
penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya, memfasilitasi penyandang disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan, menyediakan beasiswa untuk peserta didik penyandang disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, serta menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari penyandang disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga wajib memfasilitasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak.

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1	Palu	11	473	79
2	Sigi	2	153	32
3	Donggala	1	45	9
4	Parigi Moutong	1	83	10
5	Poso	3	129	28
6	Tojo Una Una	1	58	8
7	Morowali Utara	1	36	7
8	Morowali	1	100	10
9	Banggai	4	169	32
10	Banggai kepulauan	1	54	8
11	Banggai laut	1	38	6
12	Tolitoli	1	79	10
13	Buol	2	71	12
	Total	30	1.488	251

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bidang PKLK 2021, diolah

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, tercatat sebanyak 1.488 siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) pada tahun 2021 yang tersebar di 30 SLB yang ada di Sulawesi Tengah dengan jumlah tenaga pendidik sebanyak 251 orang. Sementara jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang putus sekolah sebanyak 71 orang.

Gambar 2.34  
Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang Putus Sekolah  
Tahun 2021

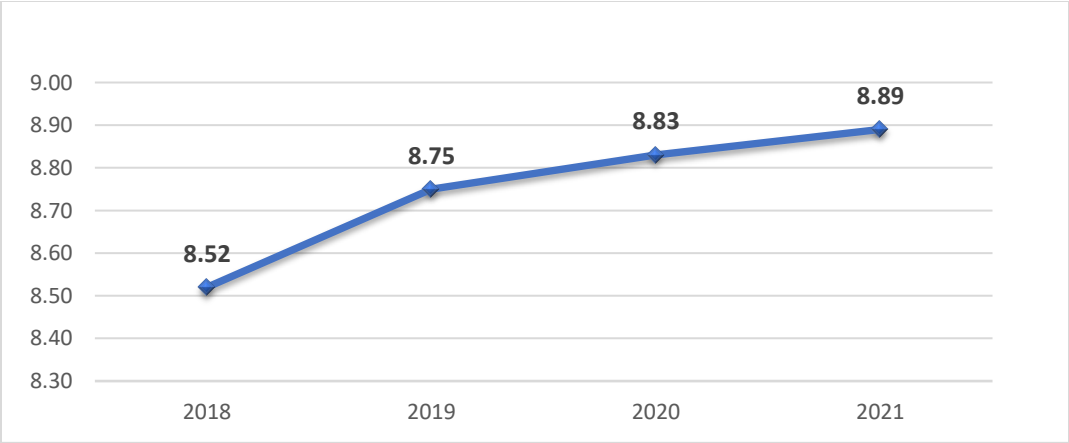


Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bidang PKLK 2021, diolah

Penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan inklusi di Sulawesi Tengah masih menghadapi berbagai kendala seperti aksesibilitas, jumlah guru khusus yang menangani anak penyandang disabilitas masih belum memadai, sarana prasarana yang kurang mendukung, serta kerentanan mendapatkan perundungan maupun stigma karena kondisi kedisabilitasnya.

Pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan pada Tahun 2021 dilaksanakan melalui 6 (enam) program dan 15 (lima belas) kegiatan, untuk mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah “Optimalisasi Pengelolaan Pendidikan Menengah dan Khusus sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).”

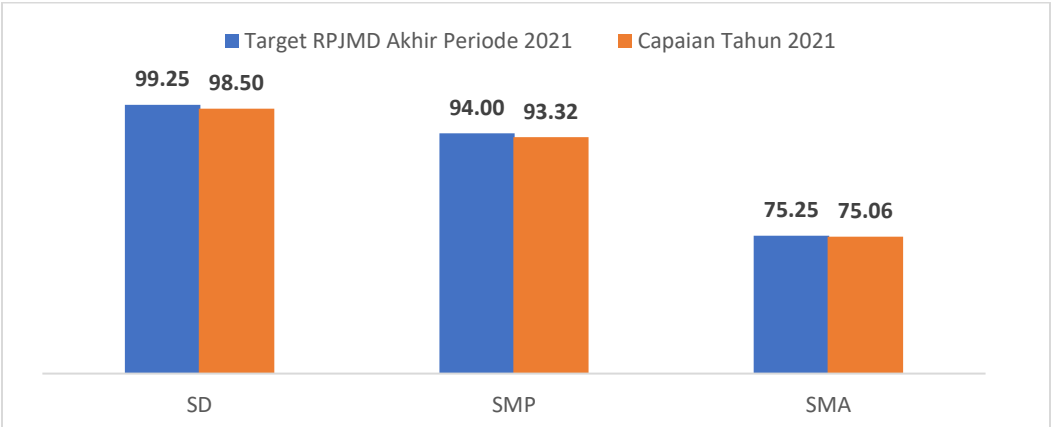
Kinerja pembangunan dalam Bidang Pendidikan secara kontinyu mengalami perbaikan yang cukup nyata, hal ini terlihat dari capaian indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan manusia, pada Tahun 2020 Angka Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 8,83 Tahun naik menjadi sebesar 8,89 Tahun pada Tahun 2021 atau meningkat sebesar mencapai 0,06 Point sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini:



Indikator selanjutnya yaitu Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15 Tahun keatas, hingga akhir Tahun 2021 telah mencapai 98,11 persen atau melampaui target RPJMD pada akhir periode Tahun 2021 yaitu sebesar 96,50 persen, hal ini menggambarkan bahwa semakin tingginya minat dan perhatian masyarakat dalam pendidikan formal maupun informal.

Indikator penting lainnya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang menunjukkan pencapaian masih di bawah target RPJMD Akhir RPJMD Tahun 2021, dimana untuk target Angka Partisipasi Sekolah SD/MI Tahun 2021 yaitu sebesar 99,25 persen dengan capaian sebesar 98,50 persen, APS SMP/MTs dari target 94,00 persen realisasi mencapai 93,32 persen dan untuk APS SMA/MA/SMK capaian sebesar 75,06 persen dari target RPJMD sebesar 75,25 persen seperti terlihat pada gambar berikut:

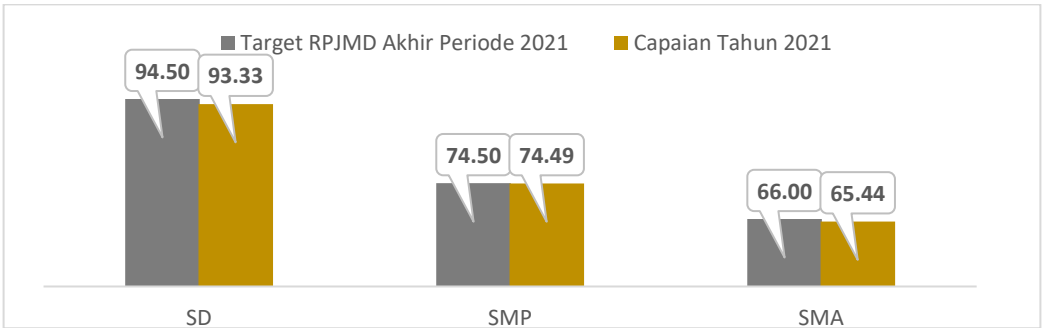
Gambar 2.37  
Capaian Indikator Angka Partisipasi Sekolah  
(APS) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021



Indikator lainnya yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) yang menunjukkan pencapaian cukup menggembirakan walaupun masih di bawah target RPJMD Akhir RPJMD Periode Tahun 2021, dimana untuk target APM SD/MI Tahun 2021 yaitu sebesar 94,50 persen dengan capaian sebesar 93,33 persen, APM SMP/MTs dari target 74,50 persen realisasi mencapai sebesar 74,49 persen dan untuk APM SMA/MA/SMK dari target RPJMD sebesar 66,00 persen realisasi capaian sebesar 65,44 persen seperti terlihat pada gambar berikut:



Gambar 2.38  
Capaian Indikator Angka Partisipasi Murni  
(APM) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021



Berdasarkan hasil evaluasi untuk Capaian Indikator Kinerja Program (Outcomes) Bidang Pendidikan antara lain dapat dilihat pada 6 (enam) capaian indikator, dimana capaian indikator terendah ada pada Indikator Meningkatnya Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP pada Jenjang Pendidikan Menengah (SMA, SMK) dan Jenjang Pendidikan Khusus dengan realisasi Tahun 2021 sebesar 75,00 persen, sedangkan capaian tertinggi pada 3 indikator sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Program	Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Target RKPD 2021	Capaian 2021	Tingkat Capaian (%)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada DISDIKBUD	100	100	100
2. Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah (SMA, SMK) dan Jenjang Pendidikan Khusus	100	75	75

Program	Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Target RKPD 2021	Capaian 2021	Tingkat Capaian (%)
3. Program Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya Persentase Terlaksananya Pemenuhan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pada Jenjang Pendidikan Menengah (SMA, SMK) dan Jenjang Pendidikan Khusus	100	95	95
4. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Persentase Pemerataan dan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	100	95	95
5. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Meningkatnya Persentase Terlaksananya Pengendalian Perizinan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Yang Dilaksanakan Oleh Masyarakat	100	100	100

Program	Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Target RKPD 2021	Capaian 2021	Tingkat Capaian (%)
6. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Meningkatnya Persentase Terlaksananya Pengembangan Bahasa Dan Sastra Daerah	100	100	100

## BAB IV

### STRATEGI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

#### 1. Strategi Kebijakan

Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan untuk mencapai sasaran. Sedangkan, kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu. Program prioritas dalam hal peningkatan pelayanan kepemudaan sebagai berikut:

##### 1.1 Penyadaran Pemuda

Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perkembangan dan perubahan lingkungan seperti pendidikan agama dan akhlak mulia, pendidikan wawasan kebangsaan, serta penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kegiatan penyadaran pemuda bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pemuda dari berbagai hal yang bersifat destruktif atau merusak di era global. Diantaranya adalah penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya, penyimpangan perilaku sex bebas, penularan penyakit HIV/AIDS, semakin maraknya tindak kekerasan diantara pemuda serta penyebaran radikalisme dan terorisme. Secara umum berbagai upaya telah dilakukan oleh seluruh stakeholder terkait untuk melaksanakan kegiatan penyadaran pemuda. Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai instansi pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab utama dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kepemudaan telah berupaya melaksanakan kegiatan sendiri atau berkoordinasi dengan lembaga lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.

##### 1.2 Pemberdayaan Pemuda

Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda. Di mana pemuda itu memiliki beragam potensi yang dimiliki oleh individu pemuda itu sendiri.

Sedangkan proses pemberdayaan dalam konteks aktualisasi diri berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan individu dengan menggali segala potensi yang dimiliki oleh

individu tersebut baik menurut kemampuan keahlian (skill) ataupun pengetahuan (knowledge) Adapun Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri.

proses belajar dalam rangka pemberdayaan akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

- 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- 3) Tahap peningkatan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mehantarkan pada kemandirian.

### 1.3 Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda. Pemerintah kemudian membuat aturan yang lebih fokus membahas mengenai pengembangan kepemudaan terutama untuk membangun jiwa kepemimpinan pemuda yaitu Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga No. 0059 tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Tujuan dari pengembangan kepemimpinan pemuda dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan pemuda yang berwawasan kebangsaan guna berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional di segala bidang. Pengembangan kepemimpinan pemuda bertujuan untuk meningkatkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan yang berwawasan kebangsaan.

### 1.4 Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

sikap mental dan jiwa yang selalu aktif dan kreatif untuk meningkatkan keterampilan pemuda agar menjadi pemuda yang mandiri dengan memberikan pelatihan, pembinaan serta pendampingan.

Derasnya arus globalisasi di satu sisi merupakan manfaat yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh generasi muda untuk menempa diri sehingga memiliki pengetahuan dan kemampuan yang lebih baik. Terbukanya arus informasi dewasa ini menjadi kekuatan yang dapat dimanfaatkan oleh generasi muda untuk memotivasi dan menginspirasi diri untuk melakukan berbagai kegiatan dan aktivitas yang bermanfaat, salah satunya adalah mengembangkan motivasi kewirausahaan.

Fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda meliputi tiga pilar program, yaitu penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan. Ketiga pilar program tersebut merupakan program yang saling terkait dan tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.

- 1) Program penyadaran dimaksudkan untuk memberikan dorongan dan pemicu untuk tumbuh dan berkembangnya sikap mental, cara pandang (*mindset*) serta motivasi untuk berwirausaha. Program penyadaran ini ditujukan untuk menumbuhkan beberapa sikap mental yang dibutuhkan untuk menjadi seorang wirausahawan. Hal ini sangat penting dilaksanakan mengingat motivasi sebagian besar pemuda Indonesia untuk berwirausaha masih cukup rendah.
- 2) Program pemberdayaan pemuda dilaksanakan untuk memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan kepada pemuda dalam mengembangkan wirausaha. Pengetahuan dan ketrampilan yang diberikan setelah pemuda tersebut sadar akan pentingnya berwirausaha, sehingga mereka memiliki motivasi dan sikap mental untuk berwirausaha dengan mengembangkan ide-ide usaha yang ada. Pemberdayaan ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan tentang kewirausahaan. Pelatihan, pendidikan dan penyuluhan yang diberikan harus melalui tahap analisis kebutuhan sehingga pelatihan dan pendidikan yang diberikan tepat sasaran
- 3) Program pengembangan kewirausahaan dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi berwirausaha dan meningkatkan keterampilan dalam berwirausaha sehingga usaha yang digeluti dapat berkembang dan memberi manfaat kepada individu maupun orang lain.

#### 1.5 Pengembangan Kepeloporan Pemuda

kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.

Kepeloporan Pemuda adalah akumulasi dari semangat pemuda dalam mengembangkan potensi diri, guna merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah yang dilandasi sikap dan jiwa kesukarelawanan, tanggung jawab dan kepedulian untuk menciptakan sesuatu dan/atau mengubah gagasan pemikiran, tindakan dan perilaku menjadi suatu karya nyata yang berkualitas dan dilaksanakan secara konsisten dan gigih yang dirasakan manfaatnya bagi masyarakat serta diakui oleh pelbagai pihak dan pemerintah.

#### 1.6 Penelitian dan Kajian Kepemudaan

Generasi muda merupakan generasi penerus atau tunas harapan yang memiliki peran sangat penting bagi bangsa dan Negara. Majunya sebuah bangsa dan Negara sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku mereka. Tentunya generasi muda yang bersikap dan berperilaku baik yang dapat memajukan bangsa dan Negara.

Pemuda merupakan generasi yang sangat berpengaruh untuk proses pembangunan bangsa Indonesia. Pemuda selalu menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa yang dapat merubah pandangan orang dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan ide – ide ataupun gagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepada nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Untuk pembangunan kepemudaan pertama yang harus dilakukan adalah secara sistematis, komprehensif, akseleratif, sinergis, dan integratif, yang kedua meliputi ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, yang ketiga melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dan yang terakhir menyediakan wahana aktualisasi diri yang positif dan konstruktif.

#### 1.7 Penanggulangan Perilaku Negatif Pemuda

Penyebab perilaku menyimpang pada remaja dapat dipicu oleh dua faktor utama, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal perilaku menyimpang, seperti tingkat kecerdasan, usia, jenis kelamin, dan kedudukan anak dalam keluarga. Sedangkan faktor eksternal, termasuk kehidupan keluarga, lingkungan, pendidikan di sekolah, pergaulan, dan media massa.

Berdasarkan teori konflik, penyebab perilaku menyimpang berasal dari ketidaksetaraan sosial, politik, atau materi dalam suatu kelompok sosial. Seseorang akan menjadi menyimpang sebagai akibat dari pemaksaan identitas. Perilaku menyimpang dipahami sebagai perilaku berulang yang melanggar norma sosial, tidak sejalan dengan nilai dan aturan konvensional, dinilai negatif oleh orang lain, mengarah pada maladaptasi individu. Bahkan merugikan dirinya sendiri maupun masyarakat. Penyebab perilaku menyimpang pada remaja, sejatinya dapat dicegah dan diatasi. Terutama dari kesadaran orangtua sendiri, sebagai teladan di rumah.

## 2. Program Prioritas

Program prioritas adalah program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan pelayanan kepemudaan setiap OPD mempunyai program yang berbeda beda dalam hal pelayanan kepemudaan antara lain :

### 4.2.1 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah

Dinas Pemuda dan olah raga Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai kegiatan – kegiatan prioritas dal hal pelayanan kepemudaan antara lain :

- 1) Penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pemuda.

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal penyadaran pemuda yaitu penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pemuda. Kegiatan ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2019 – 2021 dengan jumlah peserta sebanyak 80 orang Dengan slogan Sulteng Bersinar (sulawasi tengah bersih narkoba)

Table I  
Data Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba  
Bagi Pemuda

NO	TAHUN	JUMLAH PESERTA	TEMPAT PELAKSANAAN
1	2019	35 Orang	Kota Palu
2	2020	25 Orang	Kota Palu
3	2021	20 Orang	Kota Palu



Gambar I  
Dokumentasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan  
Narkoba Bagi Pemuda tahun 2020



Gambar II  
Dokumentasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan  
Narkoba Bagi Pemuda tahun 2021



- 2) Melaksanakan kegiatan Kader Inti Pemuda Anti Narkoba  
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan secara Online.

Table II  
Data Kader Inti Pemuda Anti Narkoba

NO	TAHUN	JUMLAH PESERTA	TEMPAT PELAKSANAAN
1	2020	100 Orang	Online
2	2021	100 Orang	Online

3) Pelatihan Wirausaha Muda

Bentuk kegiatan dalam hal pemberdayaan pemuda yaitu dengan melaksanakan pelatihan wirausaha muda. Kegiatan ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2021 – 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 85 orang.

Table III  
Data Kegiatan Pelatihan Wirausaha Muda

NO	TAHUN	JUMLAH PESERTA	TEMPAT PELAKSANAAN
1	2021	20 Orang	Kab. Banggai
2	2022	25 Orang	Kab. Morowali
3	2023	40 Orang	Kota Palu

Gambar III  
Dokumentasi Pelatihan Wirausaha Muda Tahun 2021







Gambar IV

Dokumentasi Pelatihan Wirausaha Muda Tahun 2022





- 4) Seleksi Wirausaha Muda Berprestasi
- Bentuk kegiatan dalam hal pemberdayaan pemuda yaitu dengan melaksanakan seleksi wirausaha muda berprestasi. Kegiatan ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2021 – 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 29 orang.

Table IV  
Data Seleksi Wirausaha Muda Berprestasi

NO	TAHUN	JUMLAH PESERTA	TEMPAT PELAKSANAAN
1	2021	24 Orang	Kota Palu
2	2022	5 Orang	Kota Palu

Gambar V  
Dokumentasi Seleksi Wirausaha Muda Berprestasi Tahun 2021







Gambar VI

Dokumentasi Seleksi Wirausaha Muda Berprestasi Tahun  
2022





5) Seleksi Pemuda Pelopor

Bentuk kegiatan dalam hal pengembangan kepemimpinan pemuda yaitu dengan melaksanakan kegiatan seleksi pemuda pelopor Kegiatan ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2019 – 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 8 orang.

Table V  
Data Kegiatan Pemuda Pelopor

NO	TAHUN	JUMLAH PESERTA	TEMPAT PELAKSANAAN
1	2019	2 Orang	Kota Palu
2	2020	2 Orang	Kota Palu
3	2021	2 Orang	Kota Palu
4	2022	2 Orang	Kota Palu



Gambar VI

Dokumentasi Seleksi Pemuda Pelopor Tahun 2020





Gambar VII

Dokumentasi Seleksi Pemuda Pelopor Tahun 2021



Gambar VIII  
Dokumentasi Seleksi Pemuda Pelopor Tahun 2022



6) Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara

Bentuk kegiatan dalam hal pengembangan kepemimpinan pemuda yaitu dengan melaksanakan kegiatan seleksi Pertukaran Pemuda antar negara. Kegiatan ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2019 – 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 12 orang.

Table VI  
Data Kegiatan Pertukaran Pemuda antar Negara (PPAN)

NO	TAHUN	JUMLAH PESERTA	TEMPAT PELAKSANAAN
1	2019	2 Orang	Kota Palu
2	2020	2 Orang	Kota Palu
3	2021	3 Orang	Kota Palu
4	2022	3 Orang	Kota Palu
5	2023	2 Orang	Kota Palu

Gambar IX  
Dokumentasi Seleksi Pertukaran Pemuda antar Negara  
(PPAN) Tahun 2019







Gambar X

Dokumentasi Seleksi Pertukaran Pemuda antar Negara  
(PPAN) Tahun 2020



Gambar XI  
Dokumentasi Seleksi Pertukaran Pemuda antar Negara  
(PPAN) Tahun 2021



Gambar XII  
Dokumentasi Seleksi Pertukaran Pemuda antar Negara  
(PPAN) Tahun 2022





Gambar XIII  
Dokumentasi Seleksi Pertukaran Pemuda antar Negara  
(PPAN) Tahun 2023



7) Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Provinsi

Bentuk kegiatan dalam hal pengembangan kepemimpinan pemuda yaitu dengan melaksanakan kegiatan seleksi Pertukaran Pemuda antar provinsi. Kegiatan ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2022 – 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 4 orang.

Table VII  
Data Kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP)

NO	TAHUN	JUMLAH PESERTA	TEMPAT PELAKSANAAN
1	2022	3 Orang	Kota Palu
2	2023	2 Orang	Kota Palu

Gambar XIV  
Dokumentasi Seleksi Pertukaran Pemuda antar Provinsi (PPAN) Tahun 2023





## BAB V

### PENGORGANISASIAN RENCANA AKSI

#### 1. Struktur Pelaksanaan

Struktur pelaksanaan kegiatan koordinasi lintas sektor penyelenggaraan rencana aksi daerah (RAD) pelayanan kepemudaan terdiri dari tiga surat keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah

##### 1.1 Tim Koordinasi

Susunan tim koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan provinsi sulawesi tengah sesuai dengan keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 400.5/236/DIS.PORA-G.ST/2023 Tanggal 10 April 2023 tentang Tim Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023 – 2026 sebagai berikut :

##### 1) Tim Pengarah

Ketua : Wakil Gubernur Sulawesi Tengah

Sekretaris : Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Anggota : 1. Rektor Universitas Tadulako;

2. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah;

3. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah;

Tim pengarah memberikan arahan, saran dan pertimbangan kepada Tim Pelaksana dalam rangka penyusunan RAD, termasuk memfasilitasi koordinasi antar Perangkat Daerah/Instansi Vertikal/Organisasi Kepemudaan terkait.

##### 2) Tim Pelaksana

Ketua : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sulteng

Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sulteng

Anggota :

##### ▪ Bidang Pendidikan

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sulteng

2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Prov. Sulteng

3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulteng

4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Sulteng

- Bidang Partisipasi dan Kepemimpinan
  1. Kepala Bidang Olahraga Dispora Prov. Sulteng
  2. Ketua KONI Prov. Sulteng
  3. Ketua KNPI Prov. Sulteng
- Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan
  1. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sulteng
  2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulteng
  3. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sulteng
- Bidang Lapangan dan Kesempatan Kerja
  1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulteng
  2. Kepala Dinas Sosial Prov. Sulteng
  3. Kepala Dinas Pariwisata Prov. Sulteng
  4. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Sulteng
  5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sulteng
- Bidang Gender dan Diskriminasi
  1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Prov. Sulteng
  2. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sulteng
  3. Ketua Komnas Perlindungan Anak Prov. Sulteng

Tim pelaksana membuat dan melaksanakan langkah-langkah teknis penyusunan RAD sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang telah ditentukan

## 1.2 Tim Pembahas

Susunan tim pembahas rencana aksi daerah provinsi sulawesi tengah sesuai dengan keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 400.5/235/DIS.PORA-G.ST/2023 Tanggal 10 April 2023 Tentang Pembentukan Tim Pembahas Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2022 – 2026 sebagai berikut :

Susunan Keanggotaan Tim

Ketua : Drs. Irvan Ariyanto. M.Si

Sekretaris : Dr. Irwan, S.Pd., M.Si

Anggota : 1. Mohamad Sirhan, SE., MM

2. Ir. Sutrisno. S. Abusungut M.Si
3. Masnawati Rahman, SE., MM
4. Adhitya Almaida Tandayu, SH
5. Mohammad Safri, S.STP, M.M
6. Ahmad Kemal, S.Sos
7. Polin, S.Sos
8. Jatimi, S.Pd
9. Erdickar Wardani, S.Sos., M.Si
10. Muhammad Isnaeni, SIP., M.Si
11. Ridwan, SE
12. Dedy Wahyudi, SH., M.H
13. Meiske

Tim Pembahas mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memberikan arahan dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman Renaksi Pelayanan Kepemudaan;
2. Menghimpun arahan dan masukan mengenai substansi penyusunan Renaksi Pelayanan Kepemudaan;
3. Memberikan arahan mengenai kebijakan yang diharapkan dalam penyusunan Renaksi Pelayanan Kepemudaan;
4. Melakukan analisa situasi perkembangan pencapaian Pelayanan Kepemudaan di tingkat provinsi dan upaya-upaya yang telah dilakukan;
5. Menyusun Renaksi Pelayanan Kepemudaan sesuai dengan sistematika dan dikonsolidasikan dengan hasil Kelompok Kerja lainnya;
6. Melakukan sosialisasi Renaksi Pelayanan Kepemudaan kepada seluruh pemangku kepentingan. Dan
7. Menyampaikan laporan penyusunan Renaksi Pelayanan Kepemudaan kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

### 1.3 Tim Sekretariat

Susunan tim sekretariat rencana aksi daerah provinsi sulawesi tengah sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 903/150/BID. KEPEMUDAAN Tanggal 17 Maret 2023 Tentang Pembentukan Tim Sekretariat Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 – 2026 sebagai berikut :

Susunan Keanggotaan Tim

Ketua : Mohammad Iksan T. S.Sos

Sekretaris : Ulfah. S.Ag

Anggota : 1. Suriyani. S.Sos

2. Jemmy
3. Sri Nur Afni. S.Sos
4. Yongki J. Tumanduk. S.Hut
5. Nurfikri, SE
6. Talib. S.Sos., M.Si
7. Nely. S.Pd
8. Jatimi, S.Pd
9. Rini Handayani. S.Ak

Tim Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan Renaksi Pelayanan Kepemudaan sesuai dengan bidang tugasnya;
2. Melakukan pencarian, pengumpulan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara kepada pihak terkait dalam rangka penyusunan Renaksi Pelayanan Kepemudaan;
3. Melakukan identifikasi faktor-faktor penentu pencapaian Renaksi Pelayanan Kepemudaan sesuai dengan bidang tugasnya;
4. Menyampaikan laporan penyusunan Renaksi Pelayanan Kepemudaan kepada Kepala Dinas.

2. Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan koordinasi lintas sektor rencana aksi daerah (RAD) pelayanan kepemudaan adalah sebagai berikut :

1. Persiapan pelaksanaan RAD
2. Konsultasi dengan Bapeda tentang persiapan pelaksanaan RAD
3. Rapat pelaksanaan RAD
4. Penyusunan matriks RAD
5. Penyusunan Pergub RAD
6. Penyusunan SK tim koordinasi/pokja RAD
7. Penyusunan Tim pembahasa dokumen RAD
8. Penyusunan SK tim sekretariat pelaksanaan RAD
9. Rapat koordinasi dengan OPD terkait
10. Konsultasi pelaksanaan kegiatan RAD ke Kemenpora
11. Pelaksanaan kegiatan RAD
12. Uji kelayakan publik RAD
13. Sosialisasi kegiatan RAD di Kabupaten/Kota
14. Sosialisasi pergub RAD di Kabupaten/Kota

3. Rapat Koordinasi

Rapat koordinasi tentang rencana aksi daerah (RAD) pelayanan kepemudaan dilakukan beberapa kali dengan agenda sebagai berikut :

1. Rapat pada tanggal 22 Februari 2023 dengan agenda persiapan pelaksanaan RAD dan tahapan tahapan dalam pelaksanaan RAD.
2. Rapat pada tanggal 8 Mei 2023 dengan agenda pembagian penyusunan dokumen RAD.
3. Rapat pada tanggal 15 Mei 2023 dengan agenda penyampaian ke pada OPD dalam rangka permintaan data ke OPD yang berkaitan dengan kegiatan kepemudaan untuk penyusunan dokumen RAD.
4. Rapat pada tanggal 17 Mei 2023 dengan agenda rapat desk dengan OPD terkait dalam rangka untuk penyusunan dokumen RAD.
5. Rapat pada tanggal 23 Mei 2023 dengan agenda rapat fainal chek terkait dalam rangka untuk penyusunan dokumen RAD sebagai lampiran Pergub pelayanan kepemudaan.

BAB VI

MATRIKS RENCANA KOORDINASI KEGIATAN LINTAS ORGANISASI

PERANGKAT DAERAH UNTUK PELAYANAN KEPEMUDAAN

A. Matriks Rencana Aksi Daerah (Rad) Pelayanan Pemudah Prov. Sulteng

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PELAYANAN PEMUDA PROV.

SULTENG

Koordinasi Strategis Lintas sektor (sesuai Pasal 3)	Domain IPP Bentuk Koordinasi Program /Kegiatan Rincian Output (RO)	Indikator IPP/ Indikator RO	Baseline (2020 )						OPD Koordinator Pelaksana
				2022	2023	2024	2025	2026	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									
Kegiatan						Dinas Pendidikan			
Sub Kegiatan									
	Presentasi pemenuhan SPM dan SNP satuan Pendidikan SMA, SMK dan pendidikan Khusus	Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		10.35	8.89				
		Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)		14.08	13.32				
		APK SMA		86.00	80.96				
		APM SMA		67.00	38.57				
		Angka Kelulusan (AL) SMA		98.00	95.41				
		APK SMK		86.00	47.34				
		APM SMK		67.00	22.81				
		Angka Kelulusan (AL) SMK		98.00	97.33				
		APK SLB/Paket C		74.50	1.92				
		APM SLB/Paket C		66.50	38.75				
		Persentase SMA		40.00	52.27				

		berakredita si minimal B							
		Persentase guru di SMA bersetifika si		48.0 0	64. 87				
		Persentase guru di SMA bersetifika si S1		48.0 0	80. 46				
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									Dinas Kesehat an
Kegiatan									
Sub Kegiatan									
PROGR AM PEMEN UHAN UPAYA KESEH ATAN PEROR ANGAN DAN UPAYA KESEH ATAN MASYA RAKAT		Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran		7,39	5,8 7				
		Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup		5,8	7,6 8				
		Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran Hidup		134, 17	122				
		Cakupan pertolonga n persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetens i kebidanan		83	76, 4				
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani		76	97				

		Cakupan Desa/Kelu rahan Universal Child Immunizati on (UCI)		100	71, 5			
		Persentase anak usia 1 tahun yang Diimunisas i Campak		90,3	87, 4			
		Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk		0,01	3,9 9			
		Cakupan Penemuan dan Penangana n Penderita Penyakit TBC BTA		92	47			
		Tingkat kematian karena TB		2,35	6,7			
		Proporsi kasus Tuberkulos is yang diobati dan sembuh dalam program DOTS		82	87			
		Cakupan penemuan dan Penangana n Penderita Penyakit DBD		100	99, 26			
		Penderita Diare Yang Ditangani		68	32, 15			
		Cakupan kunjungan bayi		84	110			
		Cakupan Puskesmas		126, 25	124 ,57			
		Cakupan Pustu		39,0 9	35, 25			
		Cakupan kunjungan Ibu hamil K4		82,9 7	84, 66			
		Cakupan pelayanan		81,5	91, 24			



		nifas							
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani		42,61	65,31				
		Cakupan Pelayanan Anak Balita		69,15	91,67				
		Cakupan penjarangan Kesehatan Siswa SD dan setingkat		92,55	120				
		Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)		100	100				
		Pelayanan Gawat Darurat Level I		100	100				
		Cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam		100	100				
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									Dinas Kesehatan
kegiatan									
Sunb Kegiatan									
PROGR AM PENING KATAN KAPASI TAS SUMBE R DAYA MANUS IA KESEH ATAN		Rasio Posyandu Per Satuan Balita		10,97	10,97				

		Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk		0,07	0,07				
		Rasio Posyandu Per Satuan Penduduk		1,29	1,29				
		Rasio Pustu/pos kesdes Per Satuan Penduduk		0,23	0,23				
		Rasio Rumah sakit Per Satuan Penduduk		0,02	0,02				
		Rasio Dokter Per Satuan Penduduk		0,25	0,25				
		Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk		2,45	2,45				
		Persentase Capaian Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		100	100				
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									Dinas Kesehatan
kegiatan									
Sub Kegiatan									
		Persentase Kabupaten /Kota dengan minimal 80% Posyandu Aktif		100	30,8				
		Neth Death Rate (NDR)		30%	45%				UNDAT A
		Bed Occupancy Rate (BOR)		70%	41%				
		Cost Recovery Ratio		100%	110,22				
		Neth Death Rate (NDR)		64%	20%				MADANI
		Bed Occupancy		25%	65%				

		Rate (BOR)							
		Cost Recovery Ratio		70%	40 %				
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN									DINAS KOPERASI DAN UMKM
Kegiatan									
Sub Kegiatan									
		Persentase Jumlah Pengurus/ Anggota Koperasi yang mengikuti Pelatihan		0,67	0,38				
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI									
Kegiatan									
Sub Kegiatan									
		Persentase Koperasi Modern		2,3	1,67				
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)									
Kegiatan									
Sub Kegiatan									
		Persentase Pertumbuhan Wirausaha baru		0,18	0,12				
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM									
Kegiatan									
Sub Kegiatan									
		Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha		5,77	6,24				
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN									Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kegiatan									
Sub Kegiatan									
Pemud ah yang terfasili tasi sebagai kader wira uasaha muda		Persentase Wirausaha Muda		5,35	0,2				

		Pertumbuh an organisasi pemuda yang aktif		2.00	0.3 3				
		Cakupan Pelatih Yang bersertifika t		0,47	7,4 6				
		Rasio Jumlah Gedung Olahraga per 10.000 Penduduk		0,14 8	0,0 56				
PROGRAM PENANGANAN BENCANA									Dinas Sosial
Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi									
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Permakanan, 2. Pelayanan Dukungan Psikososial									
Pemud a yang menda patkan bantu an sosial kebutu han dasar	Persenta se korban bencana skala provinsi yang menda ptkan bantu an sosial kebutuh an dasar	Jumlah Korban Bencana Alam yang menerima bantuan logistik makanan		285 7	285 7	950	100 0	11 00	
Pemud a yang menda patkan layana n dukung an psikoso sial	Persenta se korban bencana skala provinsi yang ditangan i dan menda ptkan layanan psikosos ial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatk an Layanan Dukungan Psikososial Kewenanga n Provinsi		200	200	65	70	80	
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA									Dinas Tenaga Kerja dan Transm igrasi
Kegiatan									
Sub Kegiatan									
		Tingkat Penganggu ran		3,07	3				

		Terbuka							
		Angka partisipasi angkatan kerja		69,36	69,99				
		Tingkat partisipasi angkatan kerja		72,28	69,99				
		Rasio Penduduk yang Bekerja		96,93	96,99				
		Laju pertumbuhan PDB per Tenaga kerja (PDB/jumlah Tenaga kerja, ADHB) (Rupiah/T K)		10055,3	5212,26				
		Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (persen)		68,69	66,38				
		Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja (persen)		29,46	42,65				
		Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (kasus)		156	179				
		Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama		62	63,13				

		(PB)							
		Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan		10,74	23,98				
		Keselamatan dan perlindungan		79	79,16				
		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek		85.000	93.864				
		Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah tertangani (kasus)		81	100				
		Besaran Pemeriksaan Perusahaan (Persen)		2100	1080				
		Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan (persen)		81	5,52				
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (orang)		246	366				
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat		53	148				

		t (orang)							
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (orang)		84	1315				
		Rasio lulusan S1/S2/S3 (angka)		89,75	90,1				
		Persentase jumlah perusahaan yang mengikuti jamsostek/ BPJS TK (persen)		73	82,43				
		Persentase peningkatan kesejahteraan/upah kerja (persen)		91	8,73				
		Indeks pengembangan kawasan transmigrasi (angka)		53	51,42				
		Persentase transmigran dalam binaan yang berhasil (persen)		25,89	30,61				
		Jumlah KK transmigran yang di bina (RT)		1738	588				
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT									Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi
Kegiatan									
Sub Kegiatan									

									si Tengah
		Persentase Desa Mandiri		1,57	2,28				
		Persentase Desa Maju		22,58	28,34				
		Persentase Desa Berkemba ng		58,42	54,02				
		Persentase Desa Tertinggal		16,29	14,44				
		Persentase Desa Sangat Tertinggal		1,14	0,92				
PROGRAM PENATAAN DESA									Dinas Kelauta n dan Perikan an Provinsi Sulawe si Tengah
Kegiatan									
Sub Kegiatan									
		Persentase Capaian Pengelolaa n Kelautan, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (%)		100.00	97.3				
		Produksi Perikanan Tangkap		252.189.372,00	205.198.207,00				
		Produksi Perikanan Budidaya		1.238.813,65	700.825,35				
		Jumlah Penyelesai an Kasus Tindak Pidana KP yang dapat dipertangg ungjawabk an sesuai peraturan perundang -undangan melalui penerapan		30	30				



		sanksi administra si & Sangsi Pidana								
		Produksi Perikanan Olahan		13.0 00.0 00,0 0-	13. 079 .32 1,5 0					
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA										Dinas Pariwis ata Provinsi Sulawe si Tengah
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI										
PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN										
INTELEKTUAL										
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI										Dinas Pariwis ata Provinsi Sulawe si Tengah
PARIWISATA										
Kegiatan										Dinas Pariwis ata Provinsi Sulawe si Tengah
Sub Kegiatan										
		Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp, Miliar)		50 (Mili ar)	-					
		Capaian kunjungan wisata (Persen)		80,8	92. 57					
		Rata-rata lama kunjungan wisata (Hari)		3,5	4-5 hari					
		Rata-rata lama kunjungan wisata (Wisman) (Hari)		1	4-5 hari					
		Rata-rata lama kunjungan wisata (Wisnus) (Hari)		6	4-5 hari					
		Jumlah teknologi informasi pemasaran pariwisata		3	1					

		Jumlah kegiatan promosi pariwisata (kegiatan)		4	7				
		Jumlah ekonomi kreatif yang dikembangkan (unit)		9	16				
		Jumlah promosi dan pemasaran ekonomi kreatif pariwisata (kali)		4	5				
		Jumlah hasil ekonomi kreatif yang dipromosikan (kali)		9	8				
		Jumlah potensi baru pariwisata (objek)		2	30				
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN									Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA									
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)									
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN									
Kegiatan									
Sub Kegiatan									
		Luas Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara		250 Ha	1183 Ha				
		Persentase Kerusakan Kawasan Hutan		0,01 %	0,01 %				

		Persentase Data dan Informasi Sumber Daya Hutan		100 %	100 %				
		Indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap		71%	70 %				
		Luas Fasilitasi Pengusulan akses legal kepada Masyarakat		1300 Ha	4709 Ha				
		Persentase data dan informasi pengelolaan DAS lintas daerah Kab/Kota dalam Prov. Sulteng		100 %	100 %				
		Pemulihan Ekosistem pada Kawasan TAHURA Provinsi Sulawesi Tengah		8 Ha	2 Ha				
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)		85.27	82.48				
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN  PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN									Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah
Kegiatan									
Sub Kegiatan									

		Persentase Produksi Tanaman TPH		100	76, 47				
		Persentase Capaian Penyediaan Dan Pengemba ngan Prasarana Pertanian		100	100				
		Persentase Capaian Pengendali an dan Penanggul angan Bencana Pertanian		100	100				
		Persentase Capaian Perizinan Usaha Pertanian		100	100				
		Persentase Capaian Pelaksanaa n Penyuluha n Pertanian		100	100				
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH									Badan Perenca naan Pemban gunan Daerah Provinsi Sulawe si Tengah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah									
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia									
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)									
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah									
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian									
Hasil evaluas i Capaia n Sasara n Perang kat Daerah	Jumlah Capaian Sasaran Perangk at Daerah	Persentase Capaian Sasaran Perangkat Daerah		75%	75, 21 %	30 %	30 %	30 %	
Capain progra m	Jumlah capain Program	Persentase Capaian Program		75%	75, 22 %	30 %	30 %	30 %	

[illegible]

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)									Dinas Pengu- dalian Pendud- uk dan Keluarg a Berenc ana Provinsi Sulawe si Tengah
Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal									
Sub Kegiatan Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi									
Pusat Inform- asi Konseli- ng Remaja yang Menda- pat Fasilita- si dan Pembin- aan Edukas- i Kespro Bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	Jumlah Pusat Informas- i Konselin- g Remaja yang Mendap- at Fasilita- si Pembina- an Edukasi Kespro Bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu (Kelomp- ok Masyara- kat)	Menurun- ya Angka Kelahiran Remaja		50/ 100 0	36/ 100 0	34/ 100 0	32/ 100 0	30/ 100 0	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)									Dinas Pengu- dalian Pendud- uk dan Keluarg a Berenc ana Provinsi Sulawe si Tengah
Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga									
Sub Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana									

Remaja yang menda patkan Sosialis asi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah Remaja yang Mendap atkan Sosialis asi dan Pembinaan Remaja Tentang Generasi Berencana	Menurunya Angka Kelahiran Remaja		50/1000	36/1000	34/1000	32/1000	30/1000	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)									Dinas Penger dalian Pendud uk dan Keluarg a Berencana Provinsi Sulawesi Tengah
Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB									
Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB									
Perana n Kader dalam Progra m KB dan Keseha tan Reprod uksi	Terlaksa nanya Peran Kader dalam Program KB dan Kesehat an Reprodu ksi	Menurunya Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi		14	13,99	13,98	13,97	13,95	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)									Dinas Penger dalian Pendud uk dan Keluarg a Berencana Provinsi Sulawesi Tengah
Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga									
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)									
Pening katan Kapasit as Pengelo la dan Pelaksa na Pusat Inform	Jumlah Remaja yang Mendap atkan Informas i Konselin g tentang	Menurunya Angka Kelahiran Remaja		50/1000	36/1000	34/1000	32/1000	30/1000	

asi Konseli ng Remaja (PIK-R)	Generasi Berenc na dan Kesehat an Reprodu ksi Remaja								
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK									Dinas Pengen dalian Pendud uk dan Keluarg a Berenc ana Provinsi Sulawe si Tengah
Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk									
Sub Kegiatan Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal									
Progra m Kepend uduka n, KB dan Pemba ngunan Keluarg a dalam Menur unkan Angka Kelahir an Total (TFR)	Terlaksa nanya Program Kependu dukan, KB dan Pemban ngunan Keluarga dalam Menuru nkan Angka Kelahira n Total (TFR)	Menurun y a Angka Kelahiran Total		2,61	2,5 5	2,5	2,4	2.3 0	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK									Dinas Pengen dalian Pendud uk dan Keluarg a Berenc ana Provinsi Sulawe si Tengah
Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk									
Sub Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat									
Satuan Pendidi kan (SLTA/ MA) yang melaks anakan Pendidi	Terlaksa nanya Pemaha man tentang Pendidik an Kependu dukan			2,61	2,5 5	2,5	2,4	2,3	



kan Kepend uduka n guna Menur unkan Angka Kelahir an Total (TFR)	bagi Remaja dalam meneka n Angka Kelahira n Total (TFR)								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## BAB VII PENUTUP

### 1. KESIMPULAN

Pemerintah provinsi Sulawesi Tengah dalam menyingkapi permasalahan pelayanan kepemudaan Menyusun rencana aksi daerah (RAD) pelayanan kepemudaan sebagai dokumen pelaksanaan koordinasi lintas sectoral untuk mewujudkan komitmen bersama semua stakeholders ditingkat daerah dalam upaya pembangunan kepemudaan. Dalam hal ini Dinas pemuda dan Keolahragaan yang menaungi urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga yang pada hakikatnya untuk mewujudkan pemuda yang Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak Mulia, Sehat, Serta Memiliki Jiwa Kepemimpinan, Kewirausahaan, kepoloporan, dan Kebangsaan Berdsarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

Secara umum, RAD Pelayanan Kepemudaan tahun 2023-2026 Provinsi Sulawesi Tengah ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman teknis bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan pelaksanaan koordinasi dan komitmen bersama lintas pemangku kepentingan dalam bidang pembangunan kepemudaan;
2. Sebagai referensi dalam penyusunan rencana aksi tahunan, harmonisasi antara kebijakan nasional dan daerah dalam pelayanan kepemudaan.
3. Meningkatkan pemahaman terhadap kondisi masalah dan potensi kepemudaan yang berguna untuk mendukung pembangunan daerah;
4. Meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah dan lintas sector agar dapat bersinergi dalam mewujudkan pemuda yang Tangguh dan berdaya saing;
5. Menyediakan perangkat pemantauan dan penilaian untuk berbagai kegiatan kepemudaan didaerah.

Untuk mencapai tujuan diatas maka pemerintah provinsi Sulawesi Tengah mengambil langkah-langkah dan kebijakan strategis guna mencapai tujuan tersebut melalui program prioritas dalam hal peningkatan pelayanan kepemudaan sebagai berikut :

#### 1. Penyadaran Pemuda

Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perkembangan dan perubahan lingkungan seperti pendidikan agama dan akhlak mulia, pendidikan wawasan kebangsaan, serta penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## 2. Pemberdayaan Pemuda

Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda. Di mana pemuda itu memiliki beragam potensi yang dimiliki oleh individu pemuda itu sendiri.

Sedangkan proses pemberdayaan dalam konteks aktualisasi diri berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan individu dengan menggali segala potensi yang dimiliki oleh individu tersebut baik menurut kemampuan keahlian (skill) ataupun pengetahuan (knowledge) Adapun Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri.

## 3. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda. Pemerintah kemudian membuat aturan yang lebih fokus membahas mengenai pengembangan kepemudaan terutama untuk membangun jiwa kepemimpinan pemuda yaitu Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga No. 0059 tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Tujuan dari pengembangan kepemimpinan pemuda dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan pemuda yang berwawasan kebangsaan guna berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional di segala bidang. Pengembangan kepemimpinan pemuda bertujuan untuk meningkatkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan yang berwawasan kebangsaan.

## 4. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

sikap mental dan jiwa yang selalu aktif dan kreatif untuk meningkatkan keterampilan pemuda agar menjadi pemuda yang mandiri dengan memberikan pelatihan, pembinaan serta pendampingan.

Fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda meliputi tiga pilar program, yaitu penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan. Ketiga pilar program tersebut merupakan program yang saling terkait dan tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.

- a. Program penyadaran dimaksudkan untuk memberikan dorongan dan pemacu untuk tumbuh dan berkembangnya sikap mental, cara pandang (*mindset*) serta motivasi untuk berwirausaha. Program penyadaran ini ditujukan untuk menumbuhkan beberapa sikap mental yang dibutuhkan untuk menjadi seorang wirausahawan.

- b. Program pemberdayaan pemuda dilaksanakan untuk memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan kepada pemuda dalam mengembangkan wirausaha. Pengetahuan dan ketrampilan yang diberikan setelah pemuda tersebut sadar akan pentingnya berwirausaha, sehingga mereka memiliki motivasi dan sikap mental untuk berwirausaha dengan mengembangkan ide-ide usaha yang ada.
- c. Program pengembangan kewirausahaan dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi berwirausaha dan meningkatkan keterampilan dalam berwirausaha sehingga usaha yang digeluti dapat berkembang dan memberi manfaat kepada individu maupun orang lain.

5. Pengembangan Kepeloporan Pemuda

kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.

6. Penelitian dan Kajian Kepemudaan

Generasi muda merupakan generasi penerus atau tunas harapan yang memiliki peran sangat penting bagi bangsa dan Negara. Majunya sebuah bangsa dan Negara sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku mereka. Tentunya generasi muda yang bersikap dan berperilaku baik yang dapat memajukan bangsa dan Negara.

7. Penanggulangan Perilaku Negatif Pemuda

Penyebab perilaku menyimpang pada remaja dapat dipicu oleh dua faktor utama, yakni faktor internal dan faktor eksternal.

Program prioritas adalah program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan pelayanan kepemudaan setiap OPD mempunyai program yang berbeda beda dalam hal pelayanan kepemudaan Dinas Pemuda dan olah raga Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai kegiatan – kegiatan prioritas dal hal pelayanan kepemudaan antara lain :

- a. Penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pemuda.
- b. Kegiatan kader inti pemuda anti narkoba
- c. Pelatihan Wirausaha Muda
- d. Seleksi Wirausaha Muda Berprestasi
- e. Seleksi Pemuda Pelopor
- f. Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara
- g. Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Provinsi

#### A. SARAN

Pelayanan Kepemudaan di Provinsi Sulawesi Tengah harus mendapatkan banyak dukungan dari berbagai Steck Holder agar pelayanan Kepemudaan tidak berjalan statis. Untuk itu sangat diharapkan seluruh instansi terkait agar bersama-sama mendorong pembangunan dan pelayanan kepemudaan yang berkelanjutan.

Melalui dokumen RAD ini, diharapkan mampu menjadi sumbangsi pemikiran baik secara praktis maupun secara ilmiah Olehnya itu, diharapkan masukan dari seluruh pihak berupa saran dan kritik dalam perbaikan demi kesempurnaan dokumen RAD pelayanan kepemudaan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ADIMAN, SH., M.SI  
Pembina Tingkat I, IV/b  
Nip. 19740610 200003 1 007